



**D I T**  
**S M K**

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



# Desain Pendidikan Layanan Khusus Pada Sekolah Menengah Kejuruan

---

**2020**



***DESAIN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PADA SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN***

---

**Penerbit**

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# DESAIN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

## Penasehat

Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D  
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

## Pengarah

Dr. Ir. M. Bakrun, M.M  
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan

## Penanggung Jawab

Arfah Laidiah Razik, S.H, MA – Kasubag Tata Usaha Dit. SMK  
Chrismi Widjajanti, S.E., M.BA – Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Dit. SMK  
Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak – Koordinator Bidang Sarana Prasarana Dit. SMK  
Mochamad Widiyanto, S.Pd – Koordinator Bidang Penilaian Dit. SMK  
Drs. Haryono, M.M – Koordinator Bidang Peserta Didik Dit. SMK  
Dr. Abdul Haris – Koordinator Bidang Tata Kelola Dit. SMK

## Tim Penyusun

Dr. Hermanto, M.Pd.  
Ibnu Siswanto, Ph.D.  
Dr. Sujarwo, M.Pd.  
Dr. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.  
Ir. Moh. Khairudin, MT., Ph.D.  
Dr. K. Ima Ismara, M.Pd., M.Kes

## Editor

Muhammad Abdul Majid

## Penerbit

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan  
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
Gedung E, Lantai 12 - 13  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

## DESAIN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

ISBN:

ISBN 978-602-5517-85-3 (PDF)



## KATA PENGANTAR

Laporan kajian ini disusun dalam rangka mendukung kebijakan pendidikan menengah kejuruan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang akan melaksanakan kajian akademis berupa naskah kebijakan tentang Desain Pendidikan Layanan Khusus pada Sekolah Menengah Kejuruan. Kajian ini di susun sebagai bentuk sumbangsih dalam mendukung perkembangan pendidikan menengah kejuruan saat ini.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Pembinaan SMK atas kesempatan dan mandat yang diberikan kepada kami untuk menyusun naskah kebijakan di sekolah menengah kejuruan. Selain itu, penyusunan laporan kajian ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. M. Bakrun, M.M. selaku Direktur Direktorat Pembinaan SMK beserta jajarannya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Margana, M.Hum, selaku Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Sujarwo, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Rekan-rekan kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Rekan-rekan tim penyusun laporan kajian NSPK Tahun 2020;
6. Bapak Ibu narasumber focus group discussion Pendidikan Layanan Khusus pada SMK;
7. SMK yang menjadi tempat pelaksanaan kajian; dan
8. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan kajian ini.

Laporan kajian yang disusun ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu tim penyusun terbuka dalam menerima kritik, saran, dan masukan dari semua pihak yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan selanjutnya. Semoga laporan kajian tentang Pendidikan Layanan Khusus ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Tim penyusun



## RINGKASAN

### **Desain Pendidikan Layanan Khusus Pada Sekolah Menengah Kejuruan**

**Oleh**

**Hermanto, Ibnu Siswanto, Sujarwo, Nurtanio Agus Purwanto,  
Moh. Khairudin, K Ima ismara**

Pendidikan layanan khusus adalah fasilitasi pelayanan akses Pendidikan bagi semua sebagaimana amanat dan tujuan kemerdekaan. Oleh karena itu, Pendidikan layanan khusus harus disiapkan dan didesain sesuai dengan kondisi dan karakter kebutuhan calon peserta didik, analisis dukungan yang tersedia. Pendidikan layanan khusus (selanjutnya disebut dengan PLK) harus dapat mengakomodasi kekhasan potensi berdasarkan geografis, social budaya, dan ekonomi. Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan Norma, Standar, Prosedur, serta Kriteria PLK pada SMK dengan melakukan identifikasi potensi daerah sasaran pengembangan program layanan PLK pada SMK, identifikasi potensi layanan sumber belajar digital sebagai bagian dari Layanan PLK pada SMK, mengembangkan konsep akademik desain layanan PLK pada SMK, mengembangkan model-model pelaksanaan layanan PLK pada SMK, menjelaskan sistem pengelolaan layanan PLK pada SMK, dan menjelaskan prosedur penyelenggaraan layanan PLK pada SMK

Kajian kebijakan ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan dan analisis data. Data pendahuluan didapatkan menggunakan kajian literatur, sedangkan data-data kuantitatif didapatkan dengan mengambil data-data sekunder dari sumber data pokok SMK, Badan Pusat Statistik, dan sumber relevan lainnya. Data sekunder selanjutnya divalidasi dengan melakukan kunjungan observasi dan wawancara secara langsung ke sasaran program Layanan PLK pada SMK.

Hasil kajian Pendidikan Layanan Khusus pada SMK difokuskan pada pengembangan PLK di 62 daerah tertinggal. Hasil kajian menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di daerah tertinggal rendah karena faktor akses dan ekonomi. SMK memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan APM dan APK di daerah tertinggal karena 1) minat masuk SMK yang tinggi; 2) rasio jumlah guru dan siswa yang baik; dan 3) meningkatnya kesadaran untuk melanjutkan pendidikan menengah. Daerah sasaran program PLK pada SMK secara umum memiliki potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Terdapat beberapa daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga dapat menjadi indikasi kebutuhan ruang kelas atau SMK baru. Sumber-sumber bahan ajar digital sudah tersedia dengan jumlah yang cukup banyak. Akan tetapi perlu ditingkatkan, khususnya untuk sumber bahan ajar mata pelajaran produktif. Pelaksanaan PLK pada SMK perlu memperhatikan berbagai kondisi



peserta didik, jarak geografis, kondisi sosial-ekonomi, dan keterbatasan jumlah pendidik. Oleh karena itu diperlukan Modifikasi (M), Afirmasi (A), Proyeksi (P), dan Strategi (S) untuk menyesuaikan Standar Nasional Pendidikan supaya dapat mengakomodasi masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan formal Menengah Kejuruan sebelumnya. Model pelaksanaan PLK pada SMK dapat berupa model PLK SMK Kecil, PLK SMK Terbuka, PLK SMK Darurat, dan PLK SMK Terintegrasi. Sistem pengelolaan program PLK pada SMK melibatkan berbagai pihak mulai dari Direktorat SMK, Dinas Pendidikan Provinsi, SMK penyelenggara, Mitra program PLK, dan pemerintah daerah. Setiap pihak memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing supaya program PLK dapat berjalan dengan efektif. Supaya dapat diimplementasikan dengan baik, penyelenggara PLK pada SMK sebaiknya adalah SMK yang memiliki kualitas yang baik dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat akreditasi dan pernah menerima dana revitalisasi.

Kata Kunci: Pendidikan Layanan Khusus, Sekolah Menengah Kejuruan, Potensi Daerah

**Judul Kajian** : Desain Pendidikan Layanan Khusus Pada Sekolah Menengah Kejuruan

**Ketua Tim Kajian:**

- a. Nama Lengkap : Dr. Hermanto, M.Pd.
- b. NIP : 197011152002121008
- c. Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNY
- d. Nomor HP : 08121575726
- e. Alamat Rumah : Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
- f. Alamat Surel (e-mail) : hermansp@uny.ac.id

**Anggota Tim Kajian:**

- a. Nama Lengkap (1) : Ibnu Siswanto, Ph.D.
- b. Nama Lengkap (2) : Dr. Sujarwo, M.Pd.
- c. Nama Lengkap (3) :
- d. Nama Lengkap (4) : Dr. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.
- e. Nama Lengkap (5) : Ir. Moh. Khairudin, MT., Ph.D.  
Prof (Asse) Dr. K. Ima Ismara, M.Pd., M.Kes.

**Lama Kajian:** : 120 hari

**Biaya yang digunakan** : Rp 200.000.000,00 (Dir. PSMK tahun Anggaran 2020)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY

Yogyakarta, 1 November 2020  
Ketua Tim Kajian

(Dr. Sujarwo, M.Pd.)  
NIP. 19691030 200312 1 001

(Dr. Hermanto, M.Pd.)  
NIP. 197011152002121008



## DAFTAR ISI

COVER .....	I
KATA PENGANTAR .....	III
RINGKASAN.....	V
HALAMAN PENGESAHAN .....	VII
DAFTAR ISI .....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR TABEL.....	XIV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    DASAR HUKUM.....	2
C.    TUJUAN KAJIAN .....	3
D.    HASIL YANG DIHARAPKAN .....	3
E.    OUTPUT KAJIAN .....	3
F.    OUTCOME KAJIAN .....	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI.....	5
A.    PENGERTIAN PLK.....	5
B.    PENYELENGGARAAN .....	7
C.    SASARAN PLK .....	8
D.    STANDAR PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS .....	12
E.    TATA CARA PENDIRIAN DAN PENUTUPAN .....	14
F.    DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PLK... 14	
G.    PEMBINAAN DAN EVALUASI PLK.....	15
H.    PELAPORAN DAN PENJAMINAN MUTU PLK .....	15
I.    PERAN SERTA MASYARAKAT .....	15
J.    DASAR HUKUM PLK.....	16
BAB III.....	19

METODE KAJIAN .....	19
A.    JENIS KAJIAN .....	19
B.    LOKASI PELAKSANAAN KAJIAN.....	20
C.    METODE PENGUMPULAN DATA .....	21
D.    METODE ANALISIS.....	22
BAB IV .....	23
HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN .....	23
A.    GAMBARAN UMUM DAERAH TERTINGGAL .....	23
B.    POTENSI LAYANAN SUMBER BELAJAR DIGITAL SEBAGAI BAGIAN DARI LAYANAN PLK PADA SMK.....	66
C.    MODIFIKASI, AFIRMASI, PROYEKSI, DAN STRATEGI (MAPS) PLK PADA SMK...	73
D.    MODIFIKASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN UNTUK PLK PADA SMK.....	74
E.    AFIRMASI PENGEMBANGAN PLK PADA SMK.....	95
F.    PROYEKSI PENGEMBANGAN PLK PADA SMK DI DAERAH TERTINGGAL.....	99
G.    STRATEGI OPTIMALISASI PLK PADA SMK .....	192
H.    PRAKTIK BAIK PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PADA SMK .....	193
I.    MODEL PELAKSANAAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PLK) PADA SMK 196	
J.    PROSEDUR PENYELENGGARAAN PLK PADA SMK.....	219
BAB V.....	222
SIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	222
A.    SIMPULAN .....	222
B.    REKOMENDASI .....	223
DAFTAR PUSTAKA .....	226
LAMPIRAN .....	228

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Desain kajian Pendidikan Layanan Khusus pada SMK.....	19
Gambar 3. 2 Langkah-langkah operasional dalam analisis data .....	22
Gambar 4. 1 APK dan APM Daerah tertinggal di Indonesia bagian barat .....	24
Gambar 4. 2 APK dan APM Daerah tertinggal di Indonesia bagian tengah.....	25
Gambar 4. 3 APK dan APM Daerah tertinggal di provinsi Maluku dan Maluku Utara.	26
Gambar 4. 4 APK dan APM Daerah tertinggal di provinsi Papua Barat.....	27
Gambar 4. 5 APK dan APM Daerah tertinggal di provinsi Papua.....	28
Gambar 4. 6 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Sumatera Utara .....	29
Gambar 4. 7 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Kepulauan Mentawai .....	30
Gambar 4. 8 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Musi Rawas Utara.....	31
Gambar 4. 9 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Pesisir Barat.....	32
Gambar 4. 10 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Lombok Utara.....	33
Gambar 4. 11 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Nusa Tenggara Timur .....	33
Gambar 4. 12 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Nusa Tenggara Timur .....	34
Gambar 4. 13 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Sulawesi Tengah .....	35
Gambar 4. 14 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Maluku .....	36
Gambar 4. 15 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Maluku Utara .....	37
Gambar 4. 16 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua Barat.....	38
Gambar 4. 17 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua Barat.....	39
Gambar 4. 18 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua .....	40
Gambar 4. 19 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua .....	41
Gambar 4. 20 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua .....	42
Gambar 4. 21 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua .....	43
Gambar 4. 22 Rasio Jumlah Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Tertinggal di Indonesia bagian barat .....	44
Gambar 4. 23 Rasio Jumlah Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Tertinggal di Indonesia bagian tengah.....	44
Gambar 4. 24 Rasio Jumlah Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Tertinggal di Indonesia bagian timur (Maluku dan Maluku Utara) .....	45
Gambar 4. 25 Rasio Jumlah Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Tertinggal di Indonesia bagian timur (Papua Barat).....	45
Gambar 4. 26 Rasio Jumlah Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Tertinggal di Indonesia bagian timur (Papua).....	46
Gambar 4. 27 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Barat.....	61
Gambar 4. 28 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tengah .....	62
Gambar 4. 29 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tengah .....	62
Gambar 4. 30 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur .....	63

Gambar 4. 31 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur .....	63
Gambar 4. 32 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur .....	64
Gambar 4. 33 . Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur .....	64
Gambar 4. 34 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur .....	65
Gambar 4. 35 . Skema pembelajaran Digital Online dan Offline .....	66
Gambar 4. 36 Server Lokal .....	67
Gambar 4. 37. Bagan MAPS .....	74
Gambar 4. 38. Modifikasi dan afirmasi standar kompetensi lulusan PLK pada SMK... 77	77
Gambar 4. 39 Penjabaran Antara Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi .....	79
Gambar 4. 40. Modifikasi dan afirmasi standar standar isi PLK pada SMK.....	80
Gambar 4. 41. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Nias.....	100
Gambar 4. 42. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Nias Selatan.....	102
Gambar 4. 43. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Nias Utara .....	104
Gambar 4. 44. Peta sebaran SMK di Kabupaten Nias Barat.....	105
Gambar 4. 45. Peta sebaran SMK di Kepulauan Mentawai.....	107
Gambar 4. 46. Sebaran lokasi SMK di Musi Rawas Utara.....	109
Gambar 4. 47. Peta sebaran SMK di Kabupaten Pesisir barat .....	111
Gambar 4. 48. Peta sebaran SMK di Lombok Utara .....	113
Gambar 4. 49. Sebaran lokasi SMK di Sumba Barat.....	115
Gambar 4. 50. Sebaran lokasi SMK di Sumba Timur .....	117
Gambar 4. 51. Sebaran lokasi SMK di Kupang .....	118
Gambar 4. 52. Sebaran lokasi SMK di Timor Tengah Selatan .....	120
Gambar 4. 53. Sebaran lokasi SMK di Belu .....	122
Gambar 4. 54. Sebaran lokasi SMK di Alor .....	123
Gambar 4. 55. Sebaran lokasi SMK di Lembata .....	124
Gambar 4. 56. Sebaran lokasi SMK di Rote Ndao.....	126
Gambar 4. 57. Sebaran lokasi SMK di Sumba Tengah .....	127
Gambar 4. 58. Sebaran lokasi SMK di Sumba Barat Daya .....	129
Gambar 4. 59. Sebaran lokasi SMK di Manggarai Timur .....	131
Gambar 4. 60. Sebaran lokasi SMK di Sabu Raijua.....	133
Gambar 4. 61. Sebaran lokasi SMK di Malaka .....	134
Gambar 4. 62. Sebaran lokasi SMK di Donggala.....	136
Gambar 4. 63. Sebaran lokasi SMK di Tojo Una-una .....	137
Gambar 4. 64. Sebaran lokasi SMK di Sigi .....	139
Gambar 4. 65. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Maluku Tenggara .....	140
Gambar 4. 66. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Kepulauan Aru .....	142
Gambar 4. 67. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	144
Gambar 4. 68. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Seram Bagian Timur.....	145
Gambar 4. 69. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Maluku Barat Daya.....	146
Gambar 4. 70. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Buru Selatan .....	148

Gambar 4. 71. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Kepulauan Sula .....	150
Gambar 4. 72. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Pulau Taliabu .....	151
Gambar 4. 73. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Teluk Wondama .....	153
Gambar 4. 74. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Teluk Bintuni .....	155
Gambar 4. 75. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Sorong Selatan.....	156
Gambar 4. 76. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Sorong.....	158
Gambar 4. 77. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Manokwari Selatan.....	162
Gambar 4. 78. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Pegunungan Arfak.....	163
Gambar 4. 79. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Jayawijaya.....	165
Gambar 4. 80. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Nabire .....	167
Gambar 4. 81. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Paniai .....	168
Gambar 4. 82. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Puncak Jaya.....	170
Gambar 4. 83. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Boven Digul .....	171
Gambar 4. 84. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Mappi.....	173
Gambar 4. 85. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Asmat.....	174
Gambar 4. 86. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Yakuimo.....	176
Gambar 4. 87. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Keerom.....	180
Gambar 4. 88. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Waropen.....	181
Gambar 4. 89. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Dogiyai.....	189
Gambar 4. 90. SMKN 1 Gangga, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat .....	193
Gambar 4. 91. SMK DKV Yanuraf Khidirraja, Raja Ampat, Papua Barat .....	196
Gambar 4. 92 Struktur Organisasi Model PLK pada SMK .....	197
Gambar 4. 93 Model Layanan PLK SMK Kecil .....	199
Gambar 4. 94 Model Layanan PLK SMK Terbuka.....	200
Gambar 4. 95 Model layanan PLK-SMK Darurat.....	202
Gambar 4. 96 Model layanan PLK-SMK Terintegrasi.....	203
Gambar 4. 97. Struktur Satuan Pendidikan PLK SMK .....	204
Gambar 4. 98. Proses Penerimaan Siswa Baru Layanan PLK SMK.....	205
Gambar 4. 99. Model Pembelajaran Layanan PLK Pada SMK .....	206
Gambar 4. 100 Variasi Pembelajaran Model Blok.....	207
Gambar 4. 101 Sarana pembelajaran online untuk layanan PLK pada SMK .....	208
Gambar 4. 102 Mobil layanan praktik PLK pada SMK .....	209
Gambar 4. 103 Sarana dan prasarana pembelajaran Layanan PLK pada SMK.....	211
Gambar 4. 104 Kendaraan layanan praktik PLK pada SMK .....	213
Gambar 4. 105 Pendidik program layanan PLK pada SMK.....	215
Gambar 4. 106 Ragam Uji Kompetensi program layanan PLK pada SMK .....	216
Gambar 4. 107 Identifikasi kebutuhan pembiayaan layanan PLK pada SMK.....	217
Gambar 4. 108 Prosedur penyelenggaraan PLK berdasarkan Permendikbud No. 72 Tahun 2013.....	220
Gambar 4. 109. Prosedur penyelenggaraan PLK pada SMK yang direkomendasikan	221

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sampel daerah untuk pengambilan data primer .....	20
Tabel 3. 2 Daftar Narasumber Kajian Desain PLK pada SMK.....	21
Tabel 4. 1 Potensi SDA Wilayah Barat.....	49
Tabel 4. 2 Potensi SDA Wilayah Barat.....	49
Tabel 4. 3 Potensi SDA Wilayah Barat.....	50
Tabel 4. 4 Potensi SDA Wilayah Tengah .....	51
Tabel 4. 5 Potensi SDA Wilayah Tengah .....	51
Tabel 4. 6 Potensi SDA Wilayah Tengah Provinsi Sulawesi Tengah .....	54
Tabel 4. 7 Potensi SDA Wilayah Timur Provinsi Maluku.....	55
Tabel 4. 8 Potensi SDA Wilayah Timur Provinsi Maluku Utara .....	55
Tabel 4. 9 Potensi SDA Wilayah Timur Provinsi Papua Barat.....	56
Tabel 4. 10 Potensi SDA Wilayah Timur Provinsi Papua .....	57
Tabel 4. 11. Potensi sumber bahan ajar digital yang dapat diakses oleh Guru dan Siswa SMK.....	69
Tabel 4. 12 LMS tidak berbayar yang dapat diakses oleh Guru dan Siswa SMK .....	71
Tabel 4. 13. Aplikasi <i>open source</i> yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan LMS .....	72
Tabel 4. 14. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Nias .....	99
Tabel 4. 15 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nias.....	99
Tabel 4. 16 Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Nias Selatan.....	101
Tabel 4. 17 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nias Selatan .....	101
Tabel 4. 18. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Nias Utara .....	103
Tabel 4. 19 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nias Utara .....	103
Tabel 4. 20. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Nias Barat.....	104
Tabel 4. 21. Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nias Barat .....	105
Tabel 4. 22. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Mentawai.....	106
Tabel 4. 23. Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Mentawai .....	106
Tabel 4. 24. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara	108
Tabel 4. 25. Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Musi Rawas Utata.....	108
Tabel 4. 26. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat .....	110
Tabel 4. 27 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Pesisir Barat .....	110

Tabel 4. 28. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara .....	112
Tabel 4. 29. Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Lombok Utara .....	113
Tabel 4. 30 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sumba Barat.....	114
Tabel 4. 31 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sumba Barat .....	115
Tabel 4. 32 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sumba Timur .....	116
Tabel 4. 33 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sumba Timur .....	116
Tabel 4. 34 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Kupang .....	118
Tabel 4. 35 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Kupang..	118
Tabel 4. 36. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Timor Tengah Selatan .....	119
Tabel 4. 37 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Timor Tengah Selatan.....	119
Tabel 4. 38 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Belu .....	121
Tabel 4. 39 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Belu.....	121
Tabel 4. 40 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Alor.....	122
Tabel 4. 41 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Alor.....	122
Tabel 4. 42 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Lembata .....	123
Tabel 4. 43 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Lembata.	124
Tabel 4. 44 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Rote Ndao .....	125
Tabel 4. 45 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Rote Ndao .....	125
Tabel 4. 46 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sumba Tengah .....	127
Tabel 4. 47 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sumba Tengah .....	127
Tabel 4. 48 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sumba Barat Daya... 128	128
Tabel 4. 49 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sumba Barat Daya .....	128
Tabel 4. 50 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Manggarai Timur ....	130
Tabel 4. 51 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Manggarai Timur.....	130
Tabel 4. 52 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sabu Raijua .....	132
Tabel 4. 53 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sabu Raijua .....	132
Tabel 4. 54 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Malaka .....	133
Tabel 4. 55 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Malaka ..	134
Tabel 4. 56 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Donggala.....	135
Tabel 4. 57 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Donggala	135

Tabel 4. 58 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Tojo Una-una .....	137
Tabel 4. 59 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Tojo Una-una .....	137
Tabel 4. 60 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sigi .....	138
Tabel 4. 61 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sigi.....	138
Tabel 4. 62 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Maluku Tenggara ..	140
Tabel 4. 63 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Maluku Tenggara.....	140
Tabel 4. 64 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Kepulauan Aru .....	141
Tabel 4. 65 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Kepulauan Aru .....	142
Tabel 4. 66 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Seram Bagian Barat.	143
Tabel 4. 67 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Seram Bagian Barat.....	143
Tabel 4. 68 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Seram Bagian Timur	144
Tabel 4. 69 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Seram Bagian Timur.....	145
Tabel 4. 70 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Maluku Barat Daya .	146
Tabel 4. 71 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Maluku Barat Daya .....	147
Tabel 4. 72 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Buru Selatan.....	148
Tabel 4. 73 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Buru Selatan .....	148
Tabel 4. 74 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Kepulauan Sula .....	149
Tabel 4. 75 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Kepulauan Sula .....	149
Tabel 4. 76 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Pulau Taliabu .....	151
Tabel 4. 77 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Pulau Taliabu .....	151
Tabel 4. 78 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Teluk Wondama.....	152
Tabel 4. 79 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Teluk Wondana.....	152
Tabel 4. 80 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Teluk Bintuni .....	154
Tabel 4. 81 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Teluk Bintuni .....	154
Tabel 4. 82 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sorong Selatan .....	156
Tabel 4. 83 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sorong Selatan .....	156
Tabel 4. 84 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sorong .....	157
Tabel 4. 85 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sorong...	157

Tabel 4. 86 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Tambrauw .....	159
Tabel 4. 87 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Tambrauw .....	159
Tabel 4. 88 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Maybrat.....	160
Tabel 4. 89 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Maybrat .	160
Tabel 4. 90 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Monokwari Selatan .	161
Tabel 4. 91 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Monokwari Selatan.....	161
Tabel 4. 92 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Pegunungan Arfak...	163
Tabel 4. 93 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Pegunungan Arfak .....	163
Tabel 4. 94 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Jayawihaya.....	164
Tabel 4. 95 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Jayawijaya .....	164
Tabel 4. 96 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Nabire .....	166
Tabel 4. 97 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nabire....	166
Tabel 4. 98 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Painai .....	167
Tabel 4. 99 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Painai ....	168
Tabel 4. 100 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Puncak Jaya.....	169
Tabel 4. 101 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Puncak Jaya .....	169
Tabel 4. 102 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Boven Digul.....	171
Tabel 4. 103 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Boven Digul .....	171
Tabel 4. 104 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Mappi.....	172
Tabel 4. 105 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Mappi..	172
Tabel 4. 106 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Asmat.....	173
Tabel 4. 107 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Asmat..	174
Tabel 4. 108 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Yakuhimo .....	175
Tabel 4. 109 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupatenYukuhimo .....	175
Tabel 4. 110 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Pegunungan Bintang .....	176
Tabel 4. 111 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Pegunungan Bintang.....	177
Tabel 4. 112 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Tolikara.....	178
Tabel 4. 113 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Tolikara	178
Tabel 4. 114 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Keerom .....	179
Tabel 4. 115 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Keerom	179
Tabel 4. 116 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Waropen.....	180

Tabel 4. 117 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Waropen .....	181
Tabel 4. 118 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Supiori .....	182
Tabel 4. 119 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Supiori.	182
Tabel 4. 120 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Mamberamo Raya .	183
Tabel 4. 121 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Mamberamo Raya .....	183
Tabel 4. 122 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Nduga .....	184
Tabel 4. 123 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nduga..	184
Tabel 4. 124 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Lanny Jaya.....	185
Tabel 4. 125 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Lanny Jaya .....	185
Tabel 4. 126 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Mamberamo Tengah .....	186
Tabel 4. 127 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Mamberamo Tengah.....	186
Tabel 4. 128 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Yalimo .....	187
Tabel 4. 129 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Yalimo.	187
Tabel 4. 130 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Puncak Jaya.....	188
Tabel 4. 131 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Puncak Jaya .....	188
Tabel 4. 132 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Dogiyai .....	189
Tabel 4. 133 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Dogiyai	189
Tabel 4. 134 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Intan Jaya .....	190
Tabel 4. 135 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Intan Jaya .....	190
Tabel 4. 136 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Deiyai .....	191
Tabel 4. 137 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Deiyai..	191
Tabel 4. 138 Daftar mitra SMKN 1 Gangga, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat .	194

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pendidikan Layanan Khusus atau sering disingkat PLK merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Keberadaan PLK sejalan dengan salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat, berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, PLK juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 5 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu. Selanjutnya; (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. dan (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat. Pasal 32, (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PLK setelah diundangkan dalam Sisdiknas, selanjutnya secara rinci, peraturan yang menaungi PLK dimulai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2013, dan selanjutnya dilakukan perubahan atas peraturan tersebut menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Penyelenggaraan PLK bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar memperoleh hak pendidikan terpenuhi. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan PLK meliputi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang pendidikan. Namun dalam Permendikbud Nomor 67 Tahun 2016 pada Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Penyelenggaraan PLK dalam bentuk satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), antara lain dalam bentuk: a) sekolah kecil; b) sekolah terbuka; c) sekolah darurat; d) sekolah terintegrasi; atau e) sekolah

dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keterlibatan satuan pendidikan formal nampaknya menjadi sangat penting dan ditekankan.

Ada dua hal penting dalam PLK, yaitu sasaran dan penyelenggaraan. Untuk sasaran PLK sudah jelas yaitu pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Selanjutnya, bagaimana dengan penyelenggaraan khususnya dalam bentuk satuan pendidikan formal. Untuk selanjutnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan bagaimana dapat ikut berkontribusi dalam mensukseskan implementasi PLK dalam bentuk: a) sekolah kecil; b) sekolah terbuka; c) sekolah darurat; d) sekolah terintegrasi; atau e) sekolah dalam bentuk lain, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam. Penyelenggaraan PLK pada SMK sudah semestinya berbekal dengan big data dan diiringi dengan otomasi system sehingga akan memudahkan dalam pencapaian sasaran serta monitoring dan evaluasinya.

Implementasi PLK pada Sekolah Menengah Kejuruan, menarik untuk dikaji dan disiapkan dalam naskah akademik. Hal ini, selain tetap memperhatikan isu utama pembangunan kemandirian SMK dengan peningkatan daya saing, keberagaman program kejuruan yang ada, tentunya juga harus tetap mempertimbangkan berbagai tuntutan dan kebijakan nasional. Untuk itu, pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan seiring dengan tuntutan revolusi industri 4.0, dan kebijakan merdeka belajar perlu dikaji guna menghasilkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sesuai antara kebutuhan sasaran calon siswa atau peserta didik dengan regulasi, konten dan konstruksi penyelenggaraan, serta rancangan daya dukung seperti bentuk-bentuk kemitraan yang diperlukan dengan tujuan menghasilkan proses yang bermutu dan hasil yang sesuai sesuai harapan. Kemitraan yang perlu dijalin dalam penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada SMK diantaranya dengan dunia usaha dan dunia industri lokal, komunitas kolej, balai latihan kerja. Mekanisme otomasi system dengan berbekal big data menjadi syarat mutlak dalam implementasi PLK pada SMK mengingat beragam dan besarnya area geografis, social budaya serta ekonomi di seluruh kawasan nusantara.

## **B. DASAR HUKUM**

---

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### C. TUJUAN KAJIAN

---

Tujuan kajian desain Pendidikan Layanan Khusus pada Sekolah Menengah Kejuruan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi daerah sasaran pengembangan program layanan PLK pada SMK
2. Mengembangkan konsep akademik desain layanan PLK pada SMK
3. Mengidentifikasi potensi layanan sumber belajar digital sebagai bagian dari Layanan PLK pada SMK
4. Mengembangkan model-model pelaksanaan layanan PLK pada SMK
5. Menjelaskan sistem pengelolaan layanan PLK pada SMK
6. Menjelaskan prosedur penyelenggaraan layanan PLK pada SMK

### D. HASIL YANG DIHARAPKAN

---

Adapun hasil yang diharapkan dari kajian Desain Pendidikan Layanan Khusus pada SMK ini adalah:

1. Tersusunnya desain model penyelenggaraan PLK pada SMK untuk berbagai jenis kondisi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
2. Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur, serta Kriteria PLK pada SMK untuk berbagai jenis kondisi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.

### E. OUTPUT KAJIAN

---

*Output* kajian PLK pada SMK tahun 2020 dengan tema “Desain Pendidikan Layanan Khusus Pada Sekolah Menengah Kejuruan” adalah:

- 
1. Laporan kajian desain PLK pada SMK
  2. Buku panduan Tata Kelola PLK pada SMK

## **F. OUTCOME KAJIAN**

---

*Outcome* dari program penyusunan naskah kebijakan PLK pada SMK adalah:

1. Peningkatan pengelolaan PLK pada SMK
2. Peningkatan angka partisipasi sekolah di daerah tertinggal

## BAB II LANDASAN TEORI

Salah satu amanat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan Pendidikan dari pemerintah, tidak terkecuali untuk masyarakat dari daerah tertinggal, terpencil, dan/atau yang sedang mengalami bencana alam/sosial. Masyarakat yang berasal dari daerah terpencil, tertinggal, dan/atau sedang mengalami bencana alam/sosial berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan berupa Pendidikan Layanan Khusus (PLK) dalam bentuk: a) sekolah kecil; b) sekolah terbuka; c) sekolah darurat; d) sekolah terintegrasi; atau e) sekolah dalam bentuk lainnya sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2016.

Program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mendikbud Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019 membuka peluang lebih luas untuk mengimplementasikan PLK khususnya pada SMK. Empat pokok program pendidikan Merdeka Belajar yaitu tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (GTK Kemendikbud, 2020). Pemerintah Daerah, Sekolah, atau pihak lain yang memberikan layanan PLK jenjang SMK dapat lebih fleksibel untuk menawarkan berbagai spektrum program keahlian (146 Kompetensi Keahlian) di bidang teknologi dan rekayasa, energi dan pertambangan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan pekerjaan sosial, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, bisnis dan manajemen, pariwisata, serta seni dan industri kreatif sesuai dengan karakteristik dan potensi baik ekonomi maupun sosial budaya dari masyarakat dari daerah tertinggal.

### A. PENGERTIAN PLK

Pendidikan layanan khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 Ayat (2) disebutkan bahwa: "Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi." Pendidikan Layanan Khusus (PLK) merupakan pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik yang tinggal di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, sosial, dan bagi mereka yang terkendala secara ekonomi. (PERMEN No. 72 tahun 2013). Penyelenggaraan PLK bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar

haknya memperoleh pendidikan terpenuhi. Dan ruang lingkup penyelenggaraan PLK meliputi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang pendidikan.

Jika dirinci garapan pendidikan layanan khusus tersebut di atas seperti anak-anak yang memerlukan pendidikan yang aksesnya tidak terjangkau seperti anak-anak di daerah terbelakang/terpencil/pedalaman/perbatasan/pesisir/ pulau-pulau, anak suku minoritas terpencil, pekerja anak, lapas anak, anak jalanan, anak pemulung, anak pengungsi (gempa konflik) atau bekas bencana alam (tsunami, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, kekeringan, gempa), anak dari keluarga tidak mampu (miskin), anak dari daerah yang sedang dilanda bencana sosial atau daerah konflik misalnya konflik antar suku, dan sebagainya (Kustawan & Meimulyani, 2013).

Secara umum terdapat setidaknya dua jenis anak berkebutuhan khusus. Pertama adalah anak berkebutuhan khusus permanen dan temporer. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak yang akibat dari perkembangan yang secara memerlukan perhatian dan pelayanan khusus, seperti anak yang mengalami hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan kecerdasan atau mental, hambatan fisik, emosional, sosial dan atau dikarenakan kecelakaan sejak di dalam kandungan maupun setelah lahir sehingga mengalami kecacatan. Oleh karena itu layanan Pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak selalu harus di satuan pendidikan khusus atau sekolah khusus/Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi bisa dilayani di sekolah umum dan kejuruan secara inklusif di sekolah terdekat dimana anak itu berada. Cara berpikir seperti ini dilandasi oleh konsep special needs education, yang antara lain melatarbelakangi munculnya gagasan pendidikan inklusif (UNESCO, 1994).

Pada kajian ini, difokuskan pada definisi anak berkebutuhan khusus berjenis temporer. Konsep anak berkebutuhan khusus jenis temporer adalah anak yang mengalami hambatan sementara seperti trauma akibat bencana alam atau kerusakan, anak yang mengalami kesulitan konsentrasi, anak mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, yaitu anak yang mengalami trauma akibat bencana, anak korban kerusakan, anak yang memiliki kesulitan konsentrasi karena sering diperlakukan dengan kasar, anak yang tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar. Pada anak-anak ini mereka memiliki hambatan dalam belajarnya sehingga membutuhkan pelayanan khusus. Anak berkebutuhan temporer dapat dikategorikan pada wilayah-wilayah atau daerah-daerah seperti daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan mengalami bencana alam serta bencana sosial (Kustawan & Meimulyani, 2013).

Berkenaan dengan anak berkebutuhan khusus temporer ini atau anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendidikan layanan khusus lebih luas akan diuraikan mengenai anak di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, anak dari daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi pada sub bab di bawah.

## B. PENYELENGGARAAN

---

Penyelenggaraan PLK diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus. Apabila dilihat secara keseluruhan maka PLK dapat diselenggarakan layaknya satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Penyelenggaraan PLK dapat dilakukan melalui PJJ (Pendidikan Jarak Jauh). Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik, pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

Penyelenggaraan PLK dimungkinkan berbentuk sekolah kecil, terbuka, darurat ataupun sekolah terintegrasi. Sekolah kecil adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan yang berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang. Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraannya menggunakan metode belajar mandiri. Sekolah darurat adalah bentuk satuan pendidikan formal yang didirikan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial yang bersifat sementara. Sekolah terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen.

Berbagai bentuk PLK di atas, dalam penyelenggaraannya dipayungi oleh salah satu sekolah yang disebut sekolah induk. Sekolah induk adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi pembina dari satu atau lebih bentuk layanan PLK. Berbagai jenis dan bentuk PLK tersebut berada di bawah koordinasi kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan tersebut dipimpin oleh seorang menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. PLK pada jalur pendidikan formal atau nonformal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik. Satuan pendidikan yang sudah ada dapat mengusulkan untuk menyelenggarakan program layanan pembelajaran PLK kepada dinas pendidikan.

### C. SASARAN PLK

---

Sasaran penyelenggaraan PLK adalah memberikan layanan bagi peserta didik yang termasuk dalam kategori:

1. Tinggal di daerah terpencil atau terbelakang;

Daerah terpencil atau terbelakang yang dimaksud merupakan daerah yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar;
- b. tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
- c. tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Daerah terpencil merupakan daerah yang sulit dijangkau. Yaitu wilayah yang tidak terhubung dengan prasarana transportasi (darat, laut maupun udara) dan komunikasi dengan pusat-pusat pertumbuhan terkecil sekalipun (yaitu pusat desa atau kecamatan). Wilayah terpencil berada di pulau-pulau kecil maupun di pedalaman. Di beberapa wilayah pedesaan terpencil ini bermukim masyarakat adat dan masyarakat umum. Mereka adalah masyarakat yang masih sangat terbelakang, belum mampu mengembangkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan sangat sedikit menerima sentuhan pembangunan.

Dengan kondisi daerah seperti itu, sangat berpengaruh pada anak-anak usia sekolah yang pada umumnya berada di pulau-pulau kecil maupun di pedalaman yang masih sangat terbelakang, anak-anak usia sekolah di daerah terpencil belum mampu mengembangkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan sangat sedikit menerima sentuhan pembangunan.

Hambatan geografis menjadi persoalan dalam penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di seluruh Indonesia. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian Raharjo yang membuktikan bahwa faktor jarak dan kondisi geografis memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerataan kualitas Pendidikan, khususnya di Indonesia (Raharjo, 2013). Secara geografis, wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan terdiri lebih dari 17,000 pulau memiliki kemajemukan adat istiadat, budaya dan serta memiliki potensi alam dan manusia yang besar. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi upaya pemerataan pendidikan. Di samping keterpencilan, di Indonesia juga masih terdapat kelompok masyarakat etnis minoritas, yang menganut adat istiadat tertentu, dan sudah berlangsung turun temurun, yang mempunyai sikap belum dapat

menerima pengaruh budaya dari masyarakat luar. Contohnya masyarakat Badui Dalam di Kabupaten Lebak, Banten, Suku Anak Dalam/Kubu di Jambi, Suku Kaili di Sulawesi, suku suku di pedalaman Papua yang jumlahnya ratusan, serta suku di pedalaman Kalimantan. Kawasan yang rentan terhadap bencana alam juga turut berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia.

## 2. Masyarakat adat yang terpencil;

Daerah masyarakat adat yang terpencil merupakan masyarakat dengan kriteria adanya resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat. Stigma tentang masyarakat adat sebagai “masyarakat primitive”, “masyarakat terasing”, “masyarakat perambah” dan lainnya adalah bentuk diskriminasi yang dialami oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Menurut Keppres No. 111/1999 dan Kepmensos No. 06/PEGHUK/2002, komunitas adat terpencil adalah kelompok sosial (budaya) yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Kedua, adanya pengakuan dari pemerintah berupa pengakuan akan eksistensi komunitas adat terpencil, pengakuan terhadap hak sosial dan ekonomi komunitas adat terpencil, pengakuan terhadap perlindungan tradisi dan adat-istiadat komunitas adat terpencil dan pengakuan terhadap program pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Dengan kata lain masyarakat yang telah memiliki predikat terpencil sebenarnya akan merasa terasingkan karena dari sisi defenisi tentu saja ini menyudutkan mereka. Masyarakat Adat Terpencil merupakan komunitas kecil, tertutup dan homogen serta hubungan kekeluargaan di antara mereka sangat kuat. Sehingga berdampak keengganan mereka untuk meninggalkan daerahnya dan membaur dengan masyarakat lainnya.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional di pasal 5 ayat 3 menyebutkan dengan tegas bahwa “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”. Berdasarkan hal tersebut maka Anak berkebutuhan khusus dari masyarakat adat dan tertinggal mempunyai hak untuk mendapat Pendidikan supaya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan social mereka, sehingga harkat dan martabat mereka dapat setaraf dengan bangsa Indonesia pada umumnya dan mendapat pengakuan terhadap martabat dan harga diri individu.

## 3. Peserta didik yang mengalami bencana alam;

Peserta didik yang mengalami korban bencana alam atau bencana sosial merupakan daerah terkena musibah bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan: a) minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik; b) hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau c) ditetapkan

sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

Indonesia terletak pada pertemuan lempeng tektonik aktif, jalur pegunungan aktif, dan kawasan beriklim tropik, sehingga menjadikan sebagian wilayahnya rawan terhadap bencana alam (Mahdia & Noviyanto, 2013). Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami. Contohnya adalah kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam.

Bencana alam membuat anak berpotensi mengalami problema dalam belajar. Masa anak merupakan masa kritis dimana pengalaman-pengalaman dasar yang terbentuk pada masa itu akan sulit untuk diubah dan terbawa sampai dewasa. Karena itu pengalaman negatif anak dalam berinteraksi dengan lingkungan yang terjadi pada masa awal kehidupannya akan dapat merugikan perkembangan sosial anak selanjutnya. Untuk itu perlu adanya pendidikan layanan khusus agar anak dapat belajar dan dapat berkembang di lingkungannya, sehingga mampu mengeliminir dampak sosial sebagai akibat dari kondisinya (Kustawan & Meimulyani, 2013).

#### 4. Peserta didik yang mengalami bencana sosial;

Bencana tidak hanya sebatas bencana alam, namun juga terdapat bencana yang disebabkan oleh manusia. Salah satu bencana yang disebabkan oleh manusia adalah bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang melibatkan manusia seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror (Prabawa et al., 2019).

Pemerintah telah berupaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri konflik sering terjadi di antara masyarakat. Perebutan lahan, pertikaian atau perang antar suku dan bentuk konflik lainnya dapat mengganggu ketentraman kehidupan. Anak-anak yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan jadi terabaikan, anak yang seharusnya sekolah menjadi tidak sekolah. Rasa takut dan ancaman akan keselamatan menyebabkan mereka tidak bersekolah. Kadang mereka mengungsi atau bersembunyi di tempat-tempat yang dianggap aman. Di samping harus memulihkan stabilitas keamanan nasional, anak-anak tetap harus memperoleh akses pendidikan. Anak-anak di daerah seperti ini memerlukan pendidikan layanan khusus.

#### 5. Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi merupakan peserta didik di lingkungan masyarakat yang antara lain: a) jumlah pendapatannya tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidup minimal; b) mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi; c) secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi korban tindak kejahatan sosial, dan/atau d) keadaan tertentu lainnya yang menyebabkan kekurangan ekonomi.

Semua warga berharap memperoleh keadilan, ingin hidup layak dan taraf ekonominya cukup. Namun apalah daya, pada sebagian masyarakat banyak yang tidak beruntung. Mereka berupaya dengan sekuat tenaga namun jalan belum ditemui, kemiskinan begitu melilit kehidupan mereka. Mereka mungkin hanya punya angan-angan untuk menyekolahkan anaknya mulai dari jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Angan-angan itu menjadi tertekan dan kandas dengan pentingnya kebutuhan yang sangat krusial yaitu perlunya makan dan minum untuk hari ini, entah untuk besok atau lusa. Begitu sulit rasanya mencari sesuap nasi, susah sekali caranya mencari uang. Untuk memenuhi kebutuhan ini dikerahkan seluruh keluarganya mulai dari istri dan anak-anaknya untuk mencari uang, bekerja dan terus bekerja walau penghasilan atau upahnya tidak seberapa. Indonesia sendiri termasuk negara berkembang yang isu kemiskinan mempengaruhi hampir seluruh sektor, termasuk sektor pendidikan (Ishatono & Raharjo, 2016).

Itulah kenyataan yang terjadi, tak sempat terpikirkan bagaimana caranya agar anaknya yang seharusnya bersekolah dapat masuk sekolah. Atau mungkin anak yang sedang sekolah akhirnya keluar sekolah atau putus sekolah (drop out). Dengan kondisi seperti ini anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dari segi ekonomi tidak akan mampu mengembangkan diri secara optimal. Keterbatasan kemampuan orang tuanya akan mempengaruhi kesempatannya untuk bersekolah. Faktor ekonomi yang menekan dan menghimpit orang tua membuat orang tua tidak perhatian akan pendidikan anaknya, bahkan karakternya menjadi pemaarah dan keras. Kekerasan tersebut tidak hanya berupa kekerasan dalam berucap atau bentakan, tetapi juga sering diikuti kekerasan fisik yang berupa siksaan terhadap anaknya, seperti menjewer telinga, menjitak, mencubit dan memukul. Erat kaitannya antara karakter anak dengan lingkungan disekitarnya, termasuk lingkungan keluarga (Ramdhani, 2017).

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi banyak yang bekerja untuk membantu orang tuanya. Keluarga seperti ini bukan hanya berada di desa tetapi juga banyak di perkotaan. Di pedesaan pekerjaan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu membantu orang tuanya bekerja di kebun/sawah/ladang, mencari kayu bakar dan mencari keperluan dari sungai atau hutan. Di perkotaan

pekerjaannya berbeda dengan anak-anak miskin di pedesaan. Ada anak-anak yang menjadi pengemis, pengamen, tukang semir, pembersih kaca mobil di perempatan jalan, tukang koran, pengangkut barang, dan sebagainya.

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan bahwa semua warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Anak-anak seperti ini membutuhkan Pendidikan layanan khusus untuk memberikan akses pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

#### D. STANDAR PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

---

##### 1. Kurikulum

Kurikulum PLK mengacu pada standar nasional pendidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, salah satu komponen penting di dalamnya adalah kurikulum (Huda, 2017). Kurikulum PLK dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap kebutuhan satuan pendidikan dan program layanan pendidikan. Kurikulum tingkat PLK disusun mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau mengikuti kurikulum sekolah induk. Materi pembelajaran PLK disajikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka dan/atau pemberian buku, modul dan/atau bahan ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

##### 2. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran PLK dilaksanakan dengan memperhatikan a) tempat pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan; b) waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, pendidik dan peserta didik; c) sistem pembelajaran dilakukan dalam bentuk klasikal, tutorial, tatap muka, jarak jauh, dan/atau mandiri; dan d) jumlah jam mengajar pendidik kunjung disesuaikan dengan kondisi PLK tanpa mengurangii capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Pembelajaran praktik dapat dilakukan pada satuan pendidikan terdekat atau lembaga lain yang memiliki fasilitas yang memadai. Proses pembelajaran di SMK mengharuskan tersedianya sarana dan prasarana yang digunakan untuk praktik sehingga peserta didik dapat melaksanakan hands on training. Oleh karena itu, penyelenggara PLK pada SMK perlu memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada, serta harus pandai dalam mencari mitra yang dapat membantu terselenggaranya proses pembelajaran dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran PLK pada SMK dapat menggunakan media berbasis teknologi dalam bentuk digitalisasi materi pembelajaran, bahan ajar, dan media pembelajaran. Teknologi yang ada saat ini memungkinkan penyelenggara PLK untuk menyediakan berbagai perangkat pembelajaran digital yang dapat diakses secara online maupun offline.

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah (Darmawan, 2014). Sarana dan prasarana yang digunakan pada PLK menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi dan lokasi setempat. Sarana dan prasarana PLK akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.

### 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan pada PLK disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pendidik dan tenaga kependidikan PLK harus memenuhi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lokasinya. Dan pendidik dan tenaga kependidikan PLK mendapatkan tunjangan dan penghargaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5. Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada PLK dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana pada sekolah formal lainnya. Sedangkan untuk menentukan hasil akhir capaian pembelajaran, peserta didik pada PLK juga harus mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional.

Standar Kompetensi Lulusan PLK disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan oleh Menteri. Peserta didik PLK dinyatakan lulus apabila telah lulus ujian sekolah/ujian satuan pendidikan dan memenuhi nilai minimal ujian nasional. Peserta ujian yang lulus berhak mendapatkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi. Ijazah dan/atau sertifikat diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.

### 6. Sumber Dana

Pada kasus penyelenggaraan desentralisasi pendidikan yang paling utama adalah ketersediaan pendanaan (Kuswandi, 2011). Pendanaan PLK bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan PLK. Biaya PLK diatur dengan Standar Biaya Khusus (SBK) yang ditetapkan oleh Menteri

### 7. Peserta Didik PLK

Peserta didik PLK pada SMK merupakan segmen masyarakat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendapatkan akses pendidikan. Peserta didik harus diatur dengan baik dan benar agar dapat diukur keberhasilannya prestasi peserta didik pada lembaga pendidikan (Jahari et al., 2019). Jumlah peserta didik PLK per rombongan

belajar/kelompok belajar disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan layanan pendidikan. Penyelenggara PLK pada SMK dapat mengakomodasi masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah pertama atau paket B akan tetapi belum menempuh/menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Peserta didik yang sudah terdaftar pada PLK akan mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Kementerian sebagaimana peserta didik di sekolah pada umumnya.

## E. TATA CARA PENDIRIAN DAN PENUTUPAN

---

Pendirian PLK dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Persyaratan yang diperlukan untuk pendirian PLK meliputi:

1. studi kelayakan;
2. rencana induk pengembangan PLK;
3. sumber peserta didik;
4. pendidik dan tenaga kependidikan;
5. kurikulum;
6. sumber pembiayaan;
7. sarana dan prasarana; dan
8. penyelenggara PLK.

Tata cara pendirian PLK meliputi 1) usul rencana pendirian PLK oleh pemrakarsa dan 2) pemberian pertimbangan oleh kepala dinas pendidikan. Pemberian persetujuan pendirian PLK yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Izin penyelenggaraan PLK yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam keadaan darurat, masyarakat dapat menyelenggarakan PLK terlebih dahulu kemudian mengurus perizinan. Keadaan darurat ditetapkan oleh bupati/walikota.

## F. DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PLK

---

Dokumen yang diperlukan untuk persyaratan perizinan penyelenggaraan PLK terdiri dari:

1. uraian jenis satuan pendidikan dan/atau program PLK yang akan dilaksanakan;
2. akte Pendirian dan AD/ART satuan pendidikan atau program layanan pendidikan, sedangkan PLK yang melayani anak usia dini yang diselenggarakan oleh perorangan dapat menggunakan KTP;
3. surat keterangan domisili;
4. struktur organisasi penyelenggara;

5. daftar pendidik dan tenaga kependidikan;
6. daftar peserta didik atau calon peserta didik; dan
7. daftar inventaris sarana-prasarana.

Dokumen disampaikan sebagai lampiran surat permohonan izin pendirian. Izin pendirian PLK berlaku selama masih memenuhi persyaratan. Pemerintah/pemerintah daerah dapat mencabut izin pendirian PLK yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. PLK pada satuan pendidikan yang sudah memiliki izin memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional dari Kementerian.

## G. PEMBINAAN DAN EVALUASI PLK

---

Pembinaan PLK menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran, dan kelembagaan. Pembinaan PLK secara nasional menjadi tanggung jawab Kementerian.

Evaluasi atas penyelenggaraan PLK dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Peran serta masyarakat tentu sangat berpengaruh terhadap pembinaan lembaga disekitarnya guna meningkatkan potensi SDM pada daerahnya masing-masing (Semaun, 2019)

## H. PELAPORAN DAN PENJAMINAN MUTU PLK

---

PLK harus membuat laporan penyelenggaraan minimal satu kali dalam satu tahun kepada dinas pendidikan dengan tembusan kepada Kementerian. Pelaporan terdiri atas pelaporan satuan pendidikan dan/atau program layanan pendidikan. Pelaporan mencakup data pokok pendidikan dan evaluasi diri PLK.

Penjaminan mutu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi peningkatan kualitas, khususnya sumber daya manusia di bidang pendidikan (Sudarsana, 2016). Penjaminan mutu untuk PLK ini dilakukan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya PLK sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan sumber daya PLK yang diperlukan untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan.

## I. PERAN SERTA MASYARAKAT

---

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perluasan akses dan peningkatan mutu. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan, sosialisasi, advokasi, dan kegiatan lainnya yang mendukung perluasan akses dan peningkatan mutu. Partisipasi masyarakat sangat dominan untuk mengembangkan potensi wilayahnya masing-masing (Suroso et al., 2014)

## J. DASAR HUKUM PLK

---

Dasar hukum Pendidikan Layanan Khusus (PLK), di antaranya (Tim Sub Direktorat Pendidikan, 2016: 4).

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 2.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 dan 54.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 dan 84.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan.
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

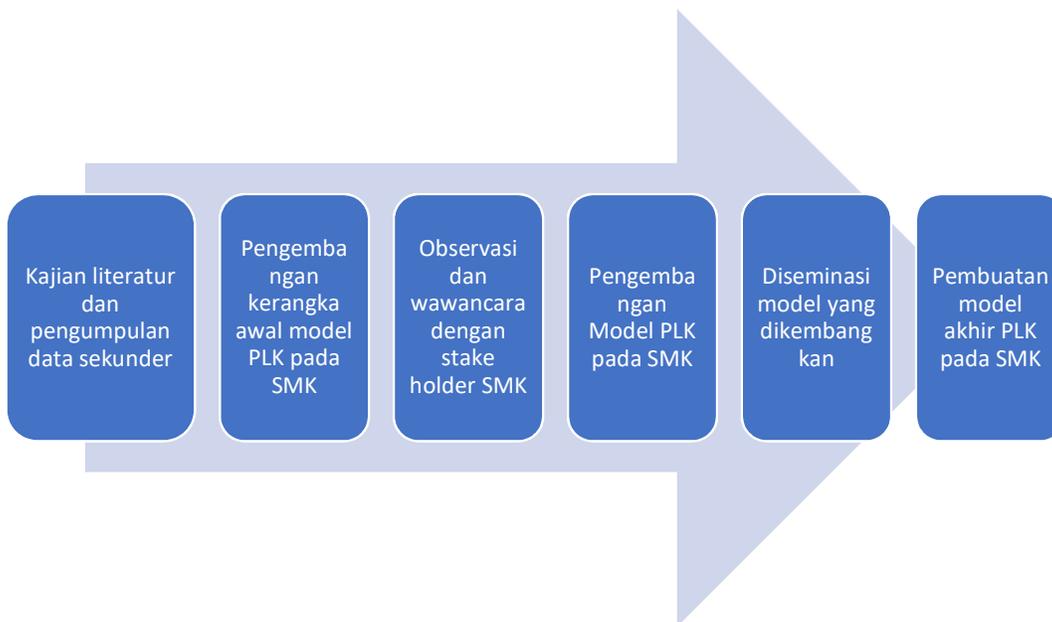
- 
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.
  16. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1670/D/LK/2014 tentang Pelaksanaan pada Jenjang Pendidikan Menengah



### BAB III METODE KAJIAN

#### A. JENIS KAJIAN

Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan kajian literatur dan fakta di lapangan sehingga dapat mempertajam luaran berupa Norma, Standar, Prosedur, serta Kriteria untuk desain Pendidikan Layanan Khusus (PLK) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kajian literatur dilakukan melalui buku, jurnal kajian, modul, peraturan-peraturan pemerintah, data pokok SMK, data Badan Pusat Statistik, maupun sumber informasi lainnya yang dapat memberikan gambaran makro terhadap aspek yang sedang dikaji. Sedangkan data yang didapatkan dari lapangan melalui observasi dan wawancara berguna untuk mendukung supaya luaran kajian yang dicapai betul-betul akurat sesuai dengan kebutuhan di tiap daerah yang sangat bervariasi dan beragam. Kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam kajian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih baik serta komprehensif mengenai permasalahan yang terjadi serta solusi-solusi berupa model Pendidikan Layanan Khusus pada SMK.



Gambar 3. 1. Desain kajian Pendidikan Layanan Khusus pada SMK

## B. LOKASI PELAKSANAAN KAJIAN

Kajian ini dilaksanakan di beberapa wilayah yang dianggap dapat mewakili sasaran dari implementasi Pendidikan Layanan Khusus yaitu daerah terpencil/terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau masyarakat yang mengalami bencana alam/sosial. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, terdapat 62 daerah tertinggal yang berlokasi di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Daerah yang dijadikan sampel untuk pengambilan data primer pada kajian ini meliputi 5 kabupaten/kota yang berada di Papua Barat (Indonesia Wilayah Timur), Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (Indonesia Wilayah Tengah), dan Lampung (Indonesia Wilayah Barat).

Tabel 3. 1 Sampel daerah untuk pengambilan data primer

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	SMK
1	Papua Barat	Kota Sorong	SMK Modelink SMKN 2 Sorong SMKN 3 Sorong
2	Papua Barat	Raja Ampat	SMK DKV Yanuraf Khidirraja
3	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	BLK Don Bosco-Indonesia SMKN 1 Wewengka SMK Pancasila Sumba Hospitality School
4	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	SMKN 1 Tanjung SMKN 1 Gangga
5	Lampung	Pesisir Barat	SMKN 1 Pesisir Barat MKKS SMK Pesisir Barat

Pengumpulan data primer melibatkan beberapa stakeholder untuk memberikan masukan tentang potensi daerah serta model layanan PLK pada SMK. Narasumber untuk kajian desain pendidikan layanan khusus pada SMK ini terdiri dari Direktur DSMK, Kepala Sekolah, Guru, dan stakeholder lainnya. Narasumber berasal dari SMK-SMK yang berlokasi di daerah tertinggal. Kegiatan wawancara dilakukan oleh tim kajian dengan mendatangi secara langsung lokasi kajian, melakukan komunikasi melalui tatap muka daring, maupun dengan mengundang narasumber ke Yogyakarta. Wawancara difokuskan untuk melakukan verifikasi data-data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya serta meminta masukan untuk model PLK pada SMK yang dikembangkan.

Tabel 3. 2 Daftar Narasumber Kajian Desain PLK pada SMK

No	Narasumber	Keterangan
1	Dr. Ir. M. Bakrun, MM.	Direktur direktorat SMK
2	Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak.	Stake holder
3	Dr. Arbangi, M.Si.	Kepala Sekolah SMK Modelink Sorong
4	Drs. Haryanto.	Kepala Sekolah SMKN 2 Sorong
5	Umar Singgih, S.Pd.	Kepala Sekolah SMKN 3 Sorong
6	Jajang Kusnara, S.Pd.	Kepala Sekolah SMK DKV Yanuraf Khidirraja
7	Muhammad Insan Ansori, ST.	Guru SMKN 1 Tanjung, Lombok Utara
8	Andi Munif, S.Pd.	Kepala Sekolah SMKN 1 Gangga, Lombok Utara
9	Ephrem M.R. Santos	Kepala BLK Don Bosco-Indonesia, Sumba Barat Daya
10	Hi. Rajalulhaq, S.Pd.,MM.	Kepala MKKS SMK Pesisir Barat, Lampung
11	Andrianto, ST.	Guru SMKN 1 Pesisir Barat, Lampung

### C. METODE PENGUMPULAN DATA

Data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun desain implementasi Pendidikan Layanan Khusus (PLK) pada SMK ini berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder difokuskan untuk mendapatkan data yang bersifat makro mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi PLK. Sedangkan data primer akan membantu dalam mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam penyelenggaraan PLK pada SMK dengan masyarakat sasaran yang spesifik. Baik data primer maupun sekunder sangat diperlukan dalam rangka penyusunan desain Pendidikan Layanan Khusus pada SMK.

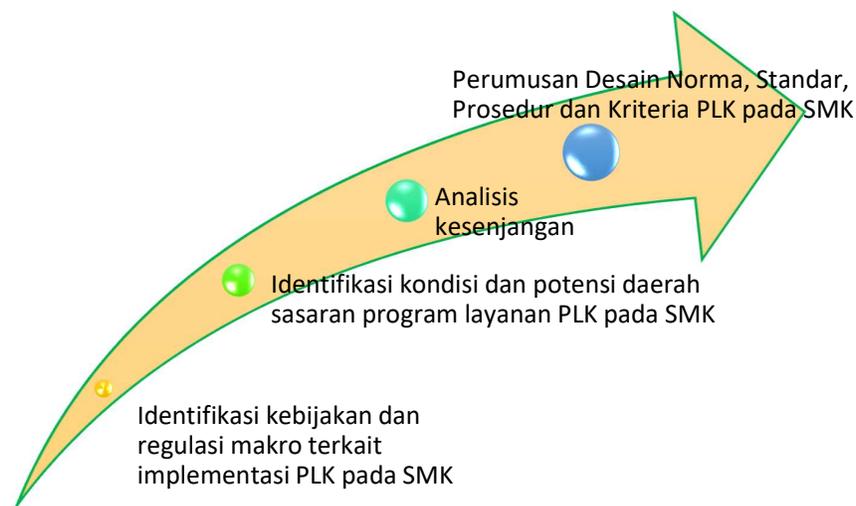
Pengumpulan data primer dan sekunder pada kajian ini dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain:

- a. **Studi dokumen** dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang diperkirakan dapat dijadikan sumber data, referensi, serta bukti empiris dari BPS, Balitbang Kemdikbud, Direktorat Pembinaan SMK dan sumber lainnya sesuai dengan tuntutan yang terdapat pada desain kajian.
- b. **Observasi** dilakukan untuk mengumpulkan fakta, data, dan suasana baik di SMK, Pemerintah Daerah, DUDI, Direktorat Pembinaan SMK, serta instansi terkait lainnya sepanjang sesuai dengan tuntutan yang terdapat pada desain kajian/kebijakan;

- c. **Wawancara** dilakukan untuk mengumpulkan fakta, data, pendapat dan wacana baik di SMK, Pemerintah Daerah, DUDI, Direktorat Pembinaan SMK, LSM, serta instansi terkait lainnya sepanjang sesuai dengan tuntutan yang terdapat pada desain kajian ;
- d. **Focus Group Discussion** untuk mengumpulkan data dan masukan baik di SMK, Pemerintah Daerah, DUDI, Direktorat Pembinaan SMK, serta instansi terkait lainnya sepanjang sesuai dengan tuntutan yang terdapat pada desain kajian.

#### D. METODE ANALISIS

Data dan informasi pada kajian ini dianalisis dan disajikan secara tertulis dan komprehensif menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisisnya akan dilaksanakan dalam 4 tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi pengkajian data mengenai kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan Pendidikan Layanan Khusus pada SMK yang eksisting dilapangan baik dari kemendikbud maupun kementerian lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran makro mengenai pelaksanaan PLK pada SMK serta mengupayakan adanya integrasi dalam implementasi program. Tahap kedua yaitu menganalisis kondisi dan potensi daerah sasaran pelaksanaan program layanan PLK pada SMK. Tahap ketiga melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi ideal atau seharusnya pada aspek-aspek implementasi PLK pada SMK. Selanjutnya pada tahap keempat dilakukan perumusan desain Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PLK pada SMK.



Gambar 3. 2 Langkah-langkah operasional dalam analisis data

## BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

### A. GAMBARAN UMUM DAERAH TERTINGGAL

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, terdapat 62 daerah tertinggal yang berlokasi di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

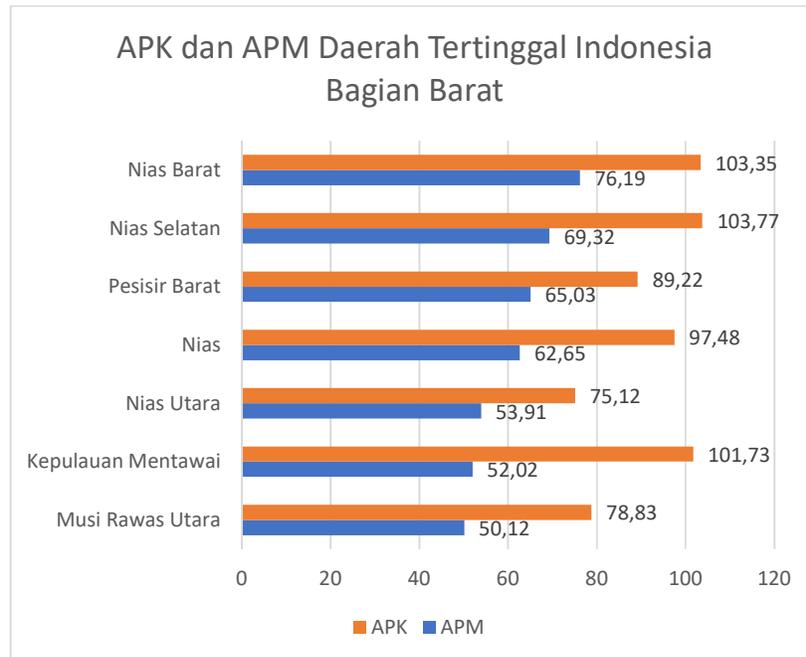
#### 1. Angka Partisipasi Kasar dan Murni

Data APK (Angka Partisipasi Kasar) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sedangkan APM (Angka Partisipasi Murni) merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM yang ideal adalah 100% yang berarti semua penduduk pada usia tertentu mengenyam jenjang pendidikan sesuai dengan usianya. Data APK dan APM menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan PLK karena tujuan utamanya untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat.

Guna kemudahan dalam hal pembahasan maka penjabaran data dikelompokkan berdasarkan wilayahnya. Wilayah barat meliputi provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Wilayah Tengah meliputi NTB, NTT, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan wilayah timur meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

##### a) Wilayah Barat

Daerah yang masuk kategori tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024 di Wilayah Indonesia bagian Barat berada di provinsi Sumatera Utara (4 kabupaten), Sumatera Barat (1 kabupaten), Sumatera Selatan (1 kabupaten), dan Lampung (1 kabupaten).

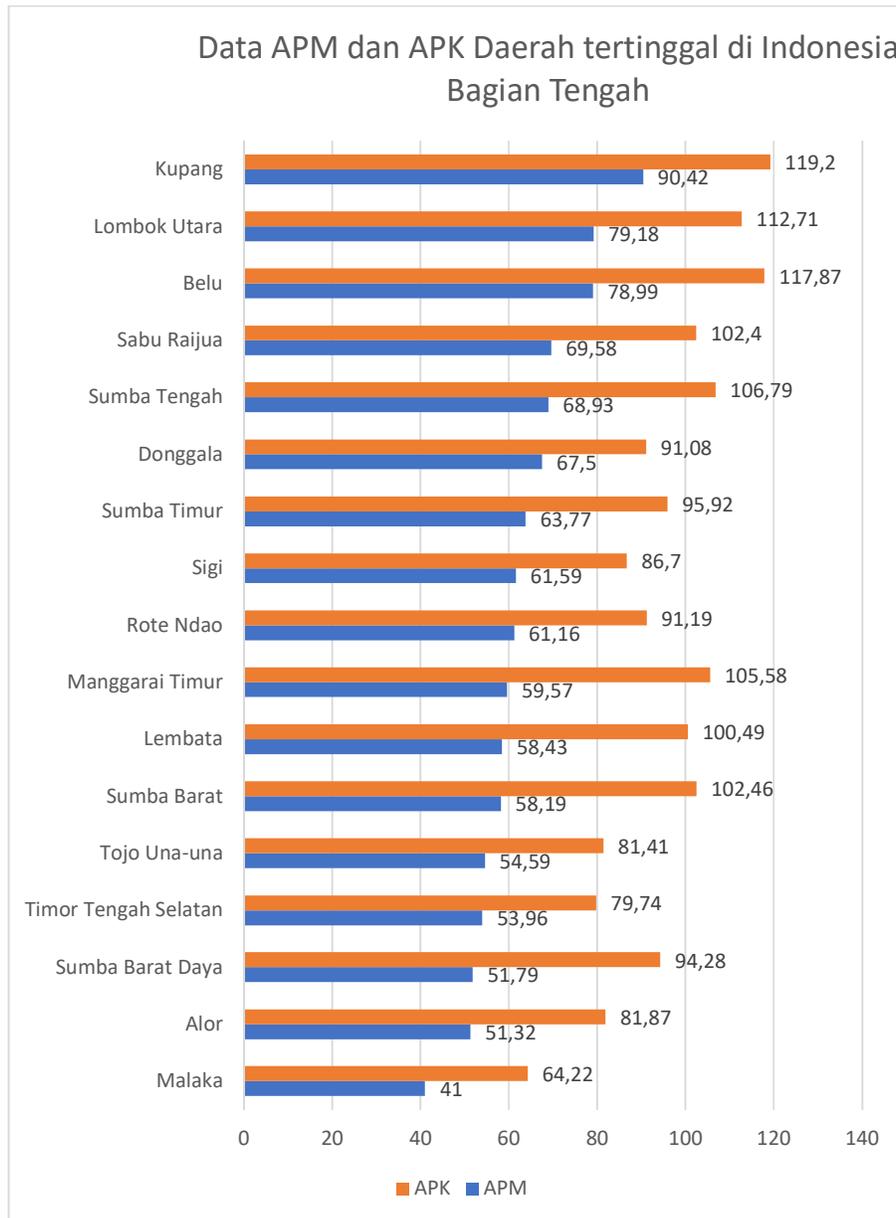


Gambar 4. 1 APK dan APM Daerah tertinggal di Indonesia bagian barat

Diagram yang menunjukkan capaian APM dan APK di daerah yang berada di Wilayah Indonesia bagian barat disusun berurutan berdasarkan capaian APM. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 6 kabupaten yang capaian APM nya 50-75% (Musi Rawas Utara, Kepulauan Mentawai, Nias Utara, Nias, Pesisir Barat, dan Nias Selatan), serta 1 Kabupaten yang capain APMnya diatas 75% (Nias Barat).

#### b) Wilayah Tengah

Kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal di Wilayah Indonesia bagian tengah terdiri dari 17 kabupaten yang tersebar di provinsi Nusa Tenggara Barat (1 Kabupaten), Nusa Tenggara Timur (13 Kabupaten), dan Sulawesi Tengah (3 Kabupaten).

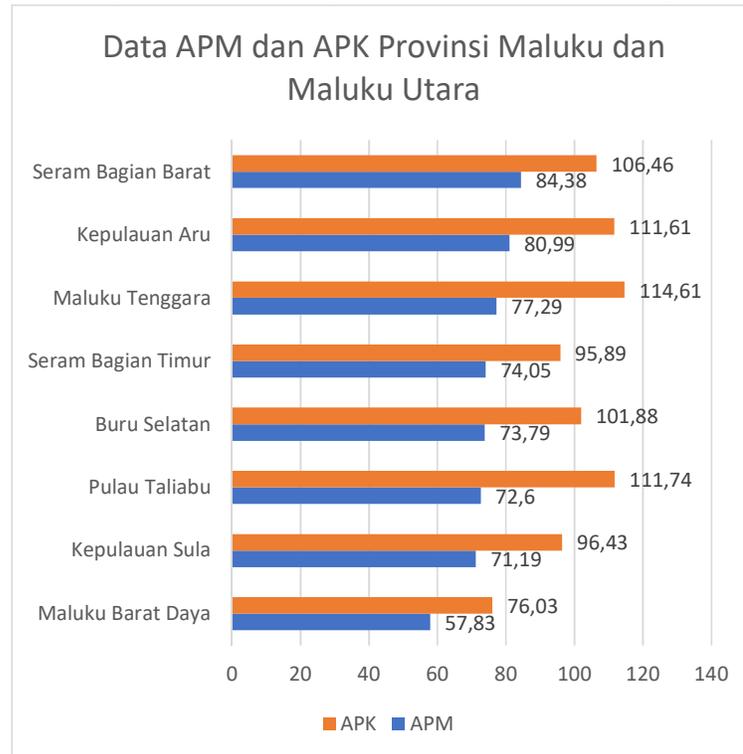


Gambar 4. 2 APK dan APM Daerah tertinggal di Indonesia bagian tengah

Berdasarkan data (Gambar 4.2), terlihat bahwa terdapat 1 Kabupaten yang memiliki capaian APM dibawah 50% (Malaka), 13 kabupaten yang memiliki capaian APM 50-75% (Alor, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Tojo Una-una, Sumba Barat, Lembata, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sigi, Sumba Timur, Donggala, Sumba Tengah, dan Sabu Raijua). Sedangkan daerah yang memiliki capaian APM diatas 75% adalah Belu, Lombok Utara, dan Kupang.

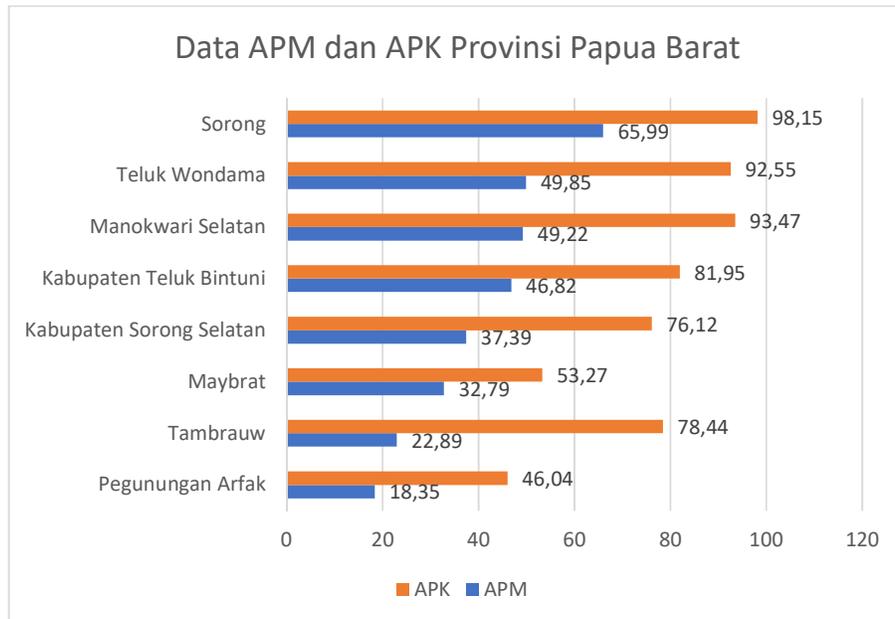
### c) Wilayah Timur

Daerah yang masuk kategori tertinggal di Indonesia bagian timur berjumlah 38 Kabupaten. Daerah-daerah tersebut tersebar di provinsi Maluku (6 Kabupaten), Maluku Utara (2 Kabupaten), Papua Barat (8 Kabupaten), dan Papua (22 Kabupaten).



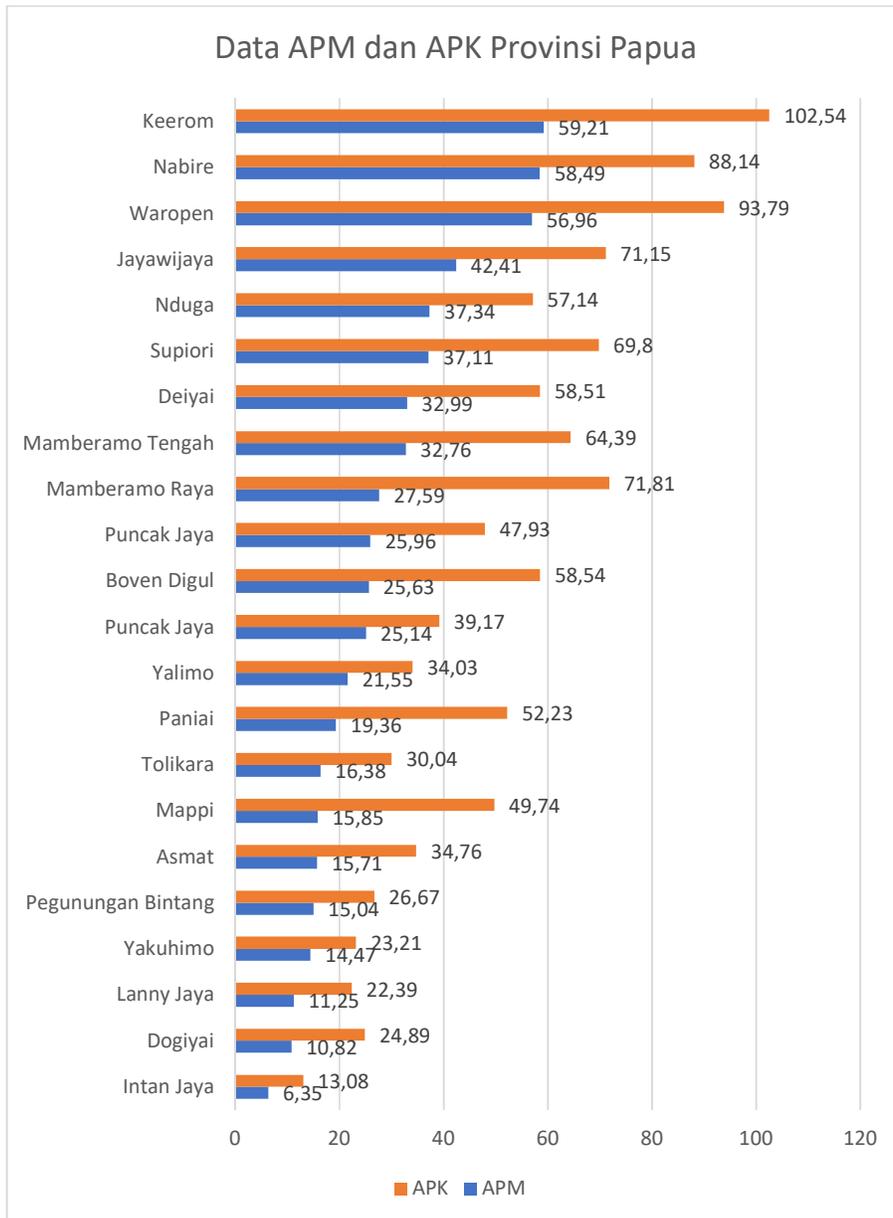
Gambar 4. 3 APK dan APM Daerah tertinggal di provinsi Maluku dan Maluku Utara

Berdasarkan data (Gambar 4.3), 5 kabupaten yang memiliki capaian APM 50-75% adalah Maluku Barat Daya, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Buru Selatan, dan Seram Bagian Timur. Sedangkan daerah yang memiliki capaian APM diatas 75% adalah Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Seram Bagian Barat.



Gambar 4. 4 APK dan APM Daerah tertinggal di provinsi Papua Barat

Berdasarkan data (Gambar 4.4), 7 kabupaten yang memiliki capaian APM kurang dari 50% (Pegunungan Arfak, Tambrau, Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama). Sedangkan ada 1 Kabupaten yang memiliki capaian APM antara 50-75% yaitu Sorong.

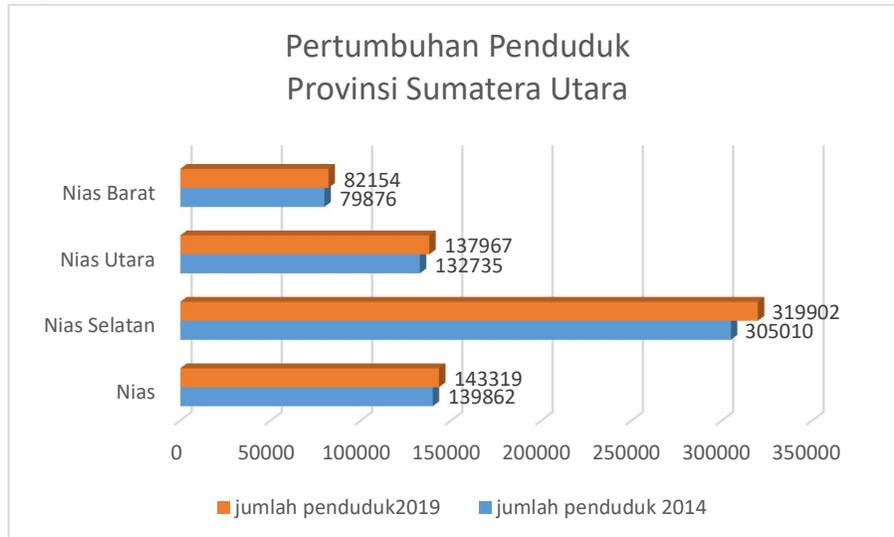


Gambar 4. 5 APK dan APM Daerah tertinggal di provinsi Papua

Berdasarkan data (Gambar 4.5), terdapat 19 kabupaten yang memiliki capaian APM kurang dari 50% dan hanya ada 3 kabupaten yang memiliki capaian APM 50-75% (Waropen, Nabire, dan Keerom).

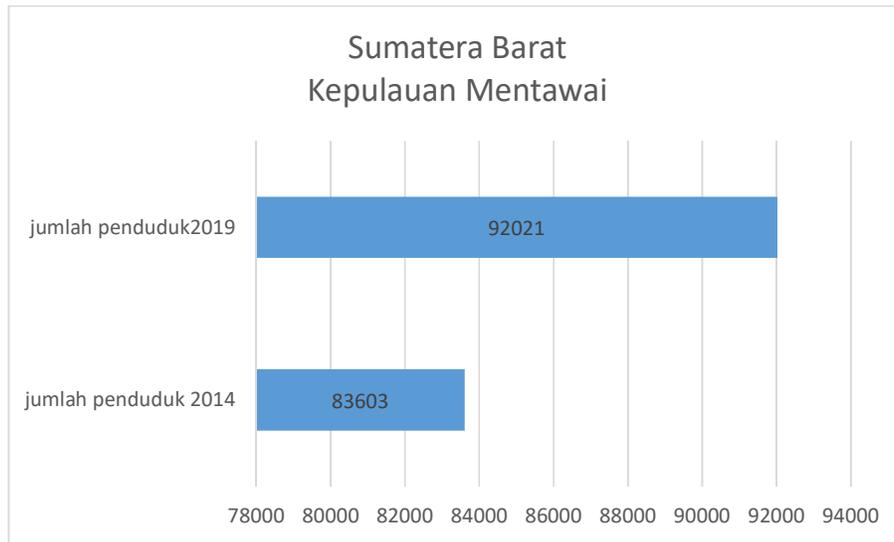
## 2. Pertumbuhan Penduduk

### a. Wilayah Barat



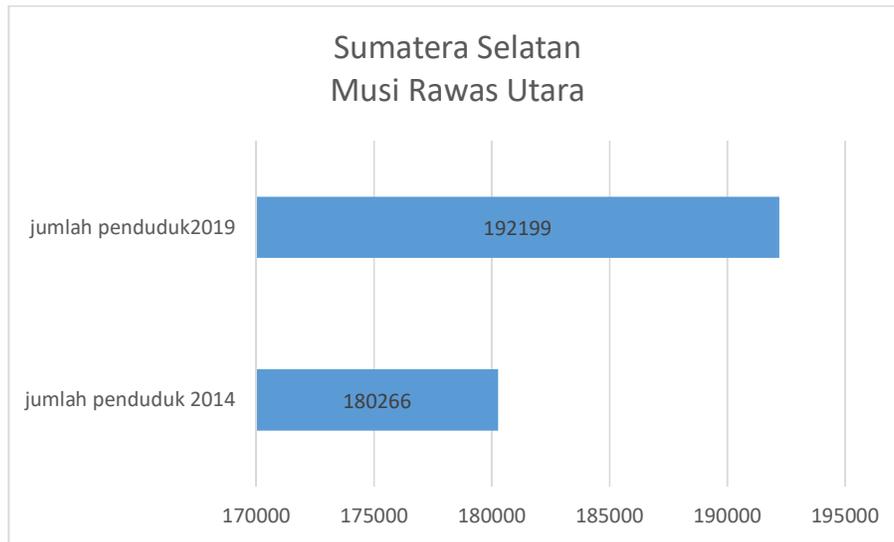
Gambar 4. 6 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Sumatera Utara

Berdasarkan data (Gambar 4.6), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di setiap kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Nias Barat laju pertumbuhan penduduknya sedikit karena hanya bertambah 2278 jiwa, Kabupaten Nias (3457 jiwa) yang laju pertumbuhan penduduknya hanya sedikit. Sedangkan daerah yang memiliki capaian pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah Kabupaten Nias Utara (5232 jiwa), Kabupaten Nias Selatan (14892 jiwa). Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Selatan membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.



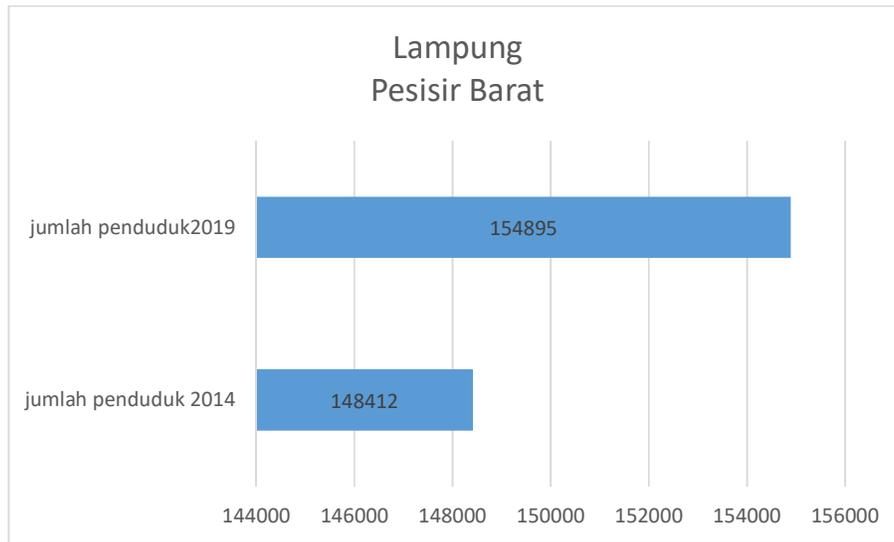
Gambar 4. 7 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Kepulauan Mentawai

Berdasarkan data (Gambar 4.7), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di kabupaten pada Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk yang banyak diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi karena bertambah 8418 jiwa. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki capaian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.



Gambar 4. 8 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Musi Rawas Utara

Berdasarkan data (Gambar 4.8), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk yang banyak diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi karena bertambah 11933 jiwa. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki capaian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Musi Rawas Utara membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.

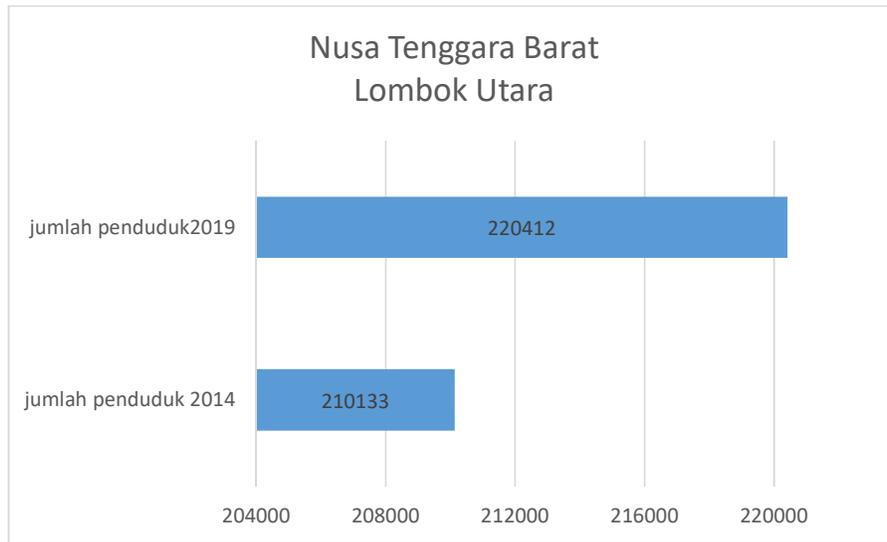


Gambar 4. 9 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Pesisir Barat

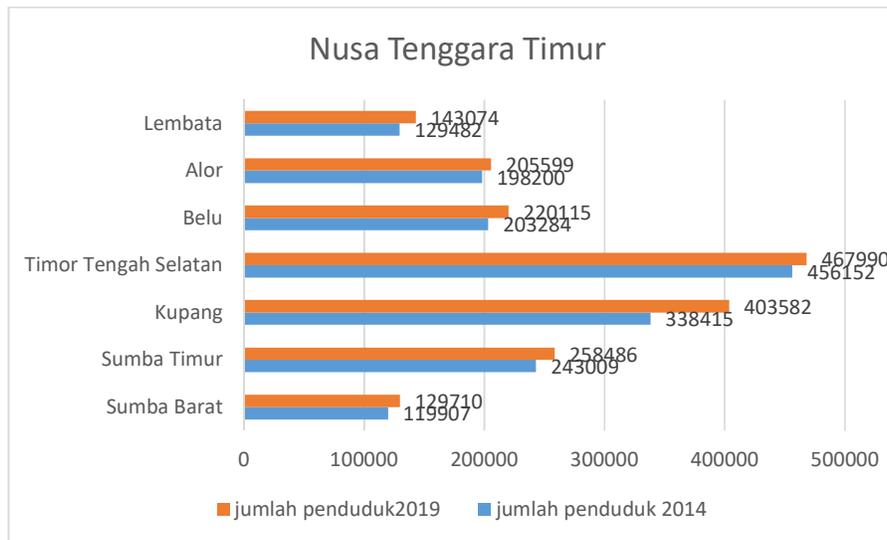
Berdasarkan data (Gambar 4.9), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di kabupaten pada Provinsi Lampung. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk yang banyak diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi karena bertambah 6483 jiwa. Kabupaten Pesisir Barat memiliki capaian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Pesisir Barat membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.

#### **b. Wilayah Tengah**

Berdasarkan data (Gambar 4.10), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk yang banyak diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi karena bertambah 10279 jiwa. Kabupaten Lombok Utara memiliki capaian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Lombok Utara membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.



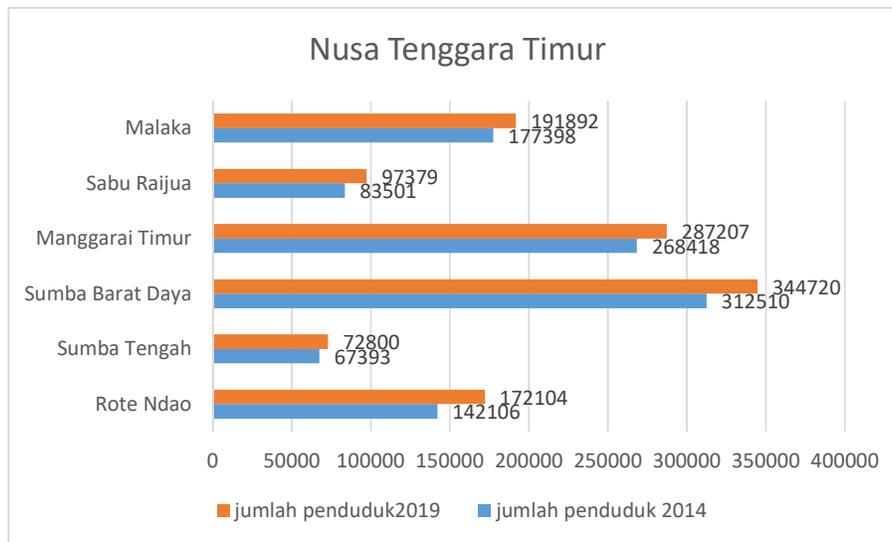
Gambar 4. 10 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Lombok Utara



Gambar 4. 11 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Nusa Tenggara Timur

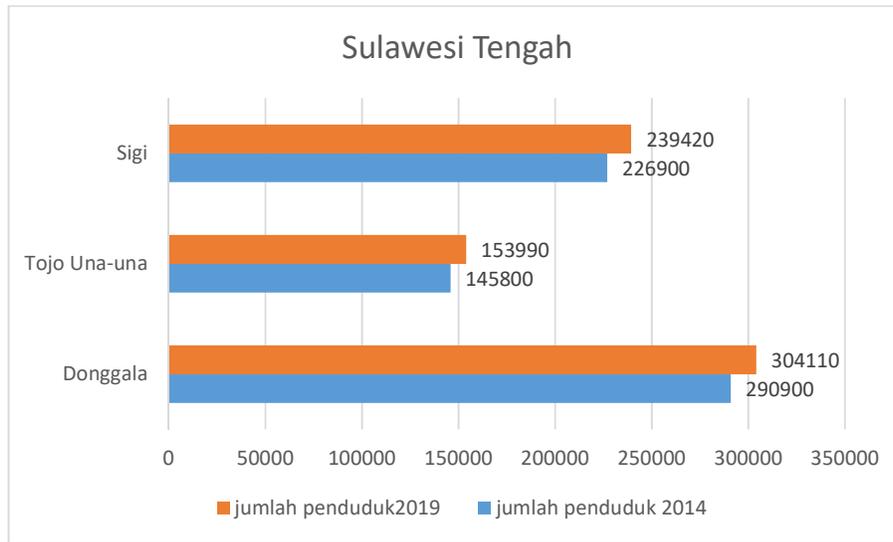
Berdasarkan data (Gambar 4.11), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di setiap kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Sumba Barat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi karena bertambah 9803 jiwa, begitu juga dengan Kabupaten Alor (7399 jiwa), Kabupaten Timor Tengah Selatan (11838 jiwa), Kabupaten Lembata (13592 jiwa), Kabupaten Sumba Timur (15477 jiwa), Kabupaten Belu (16831 jiwa), Kabupaten Kupang (65167

jiwa). Semua daerah tersebut memiliki capaian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Lembata membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.



Gambar 4. 12 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Nusa Tenggara Timur

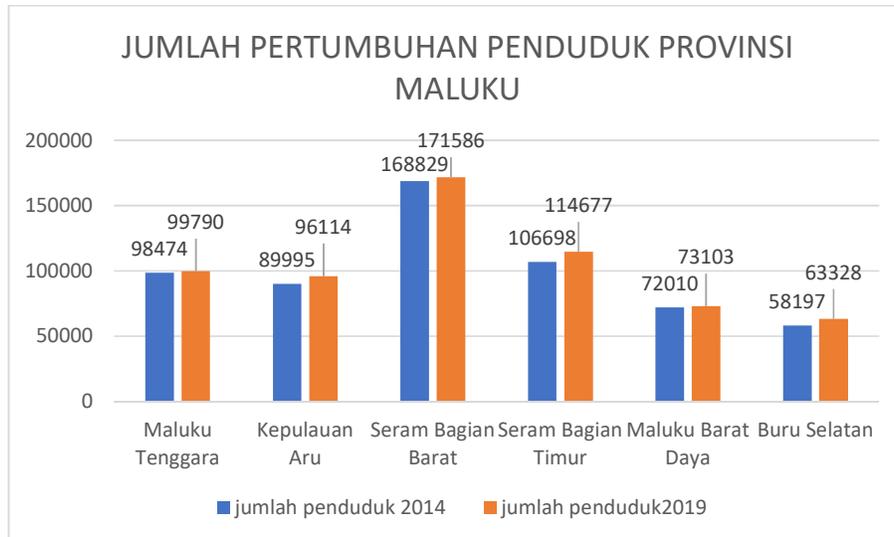
Berdasarkan data (Gambar 4.12), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di setiap kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Rote Ndao merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk yang banyak diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi karena bertambah 29998 jiwa, begitu juga dengan Kabupaten Sumba Tengah (5407 jiwa), Kabupaten Sumba Barat Daya (32210 jiwa), Kabupaten Manggarai Timur (18789 jiwa), Kabupaten Sabu Raijua (13878 jiwa), Kabupaten Malaka (14494 jiwa). Semua daerah tersebut memiliki capaian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.



Gambar 4. 13 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Sulawesi Tengah

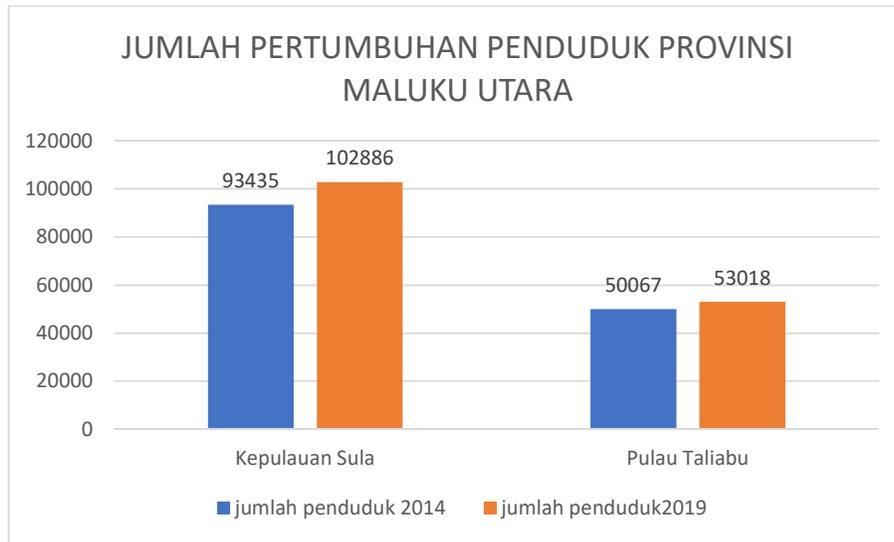
Berdasarkan data (Gambar 4.13), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di setiap kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Donggala merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi karena bertambah 13210 jiwa, begitu juga dengan Kabupaten Tojo Una-una (8190 jiwa), Kabupaten Sigi (12520 jiwa). Semua daerah tersebut memiliki capaian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Donggala, Tojo Una-una, Sigi membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.

### c. Wilayah Timur



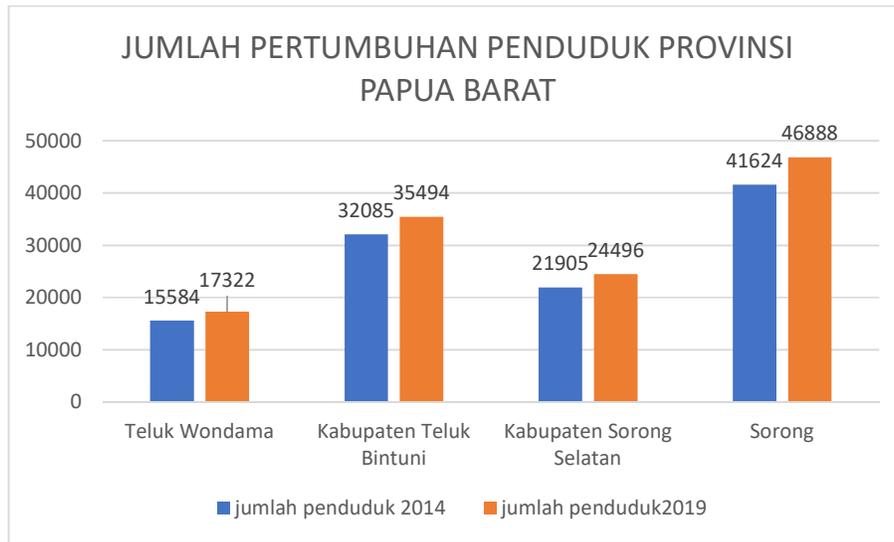
Gambar 4. 14 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Maluku

Berdasarkan data (Gambar 4.14), terdapat 6 kabupaten di Provinsi Maluku dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang terdapat perbedaan cukup signifikan di setiap kabupatennya. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak namun laju pertumbuhan penduduknya sedikit karena hanya bertambah 2757 jiwa, begitu juga dengan kabupaten Maluku Tenggara (1316 jiwa) , Maluku Barat Daya (1093 jiwa) yang laju pertumbuhan penduduknya hanya sedikit. Sedangkan daerah yang memiliki capaian pertumbuhan penduduk terbanyak adalah Kabupaten Seram Bagian Timur (7979 jiwa), Kepulauan Aru (6119 jiwa), dan Buru Selatan (5131 jiwa), dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Buru Selatan membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.



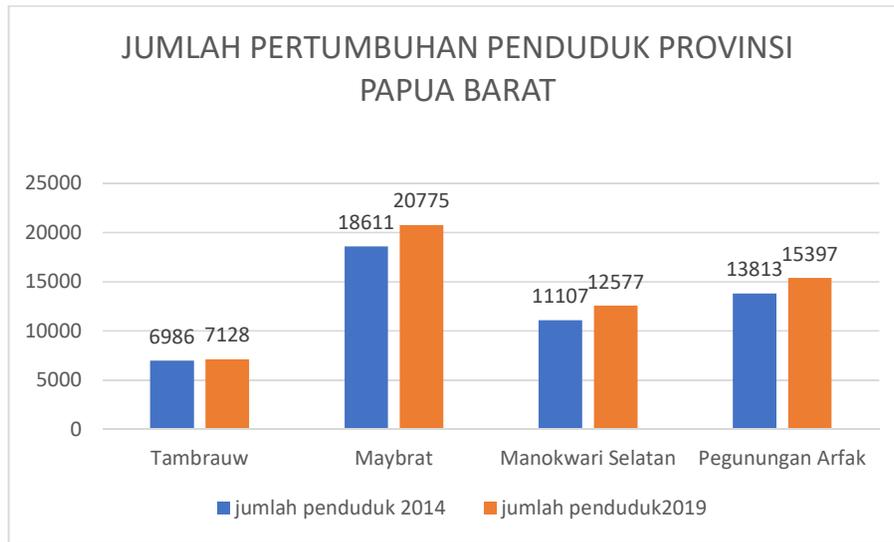
Gambar 4. 15 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Maluku Utara

Berdasarkan data (Gambar 4.15 ), terdapat 2 kabupaten di Provinsi Maluku Utara dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang terdapat perbedaan cukup signifikan di setiap kabupatennya. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Pulau Taliabu merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk sedikit karena hanya bertambah 2951 jiwa. Sedangkan daerah yang memiliki capaian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 9451 jiwa, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Sula membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.



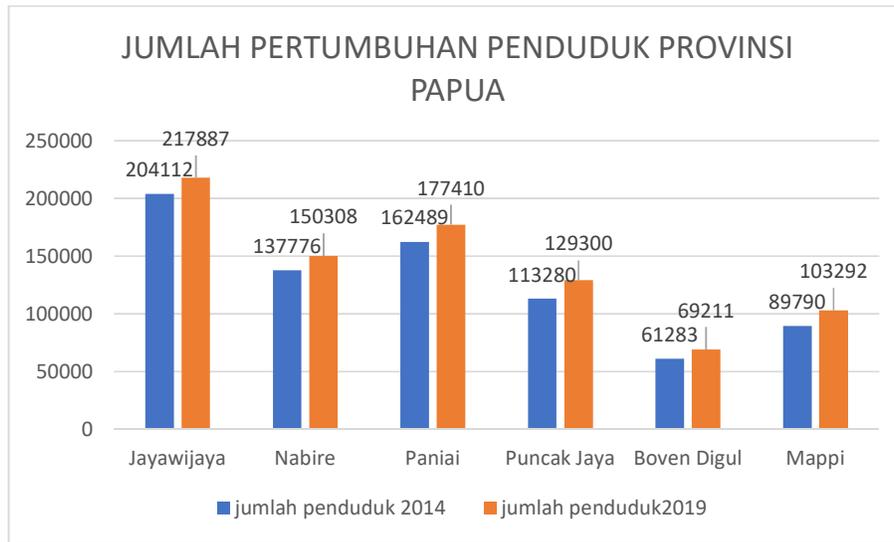
Gambar 4. 16 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua Barat

Berdasarkan data (Gambar 4.16), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di setiap kabupaten pada Provinsi Papua Barat. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Teluk Wondama laju pertumbuhan penduduknya sedikit karena hanya bertambah 1738 jiwa, begitu juga dengan kabupaten Sorong Selatan (2591 jiwa), Kabupaten Teluk Bintuni (3409 jiwa) yang laju pertumbuhan penduduknya hanya sedikit. Sedangkan daerah yang memiliki capaian pertumbuhan penduduk terbanyak adalah Kabupaten Sorong (5264 jiwa), dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Sorong membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.



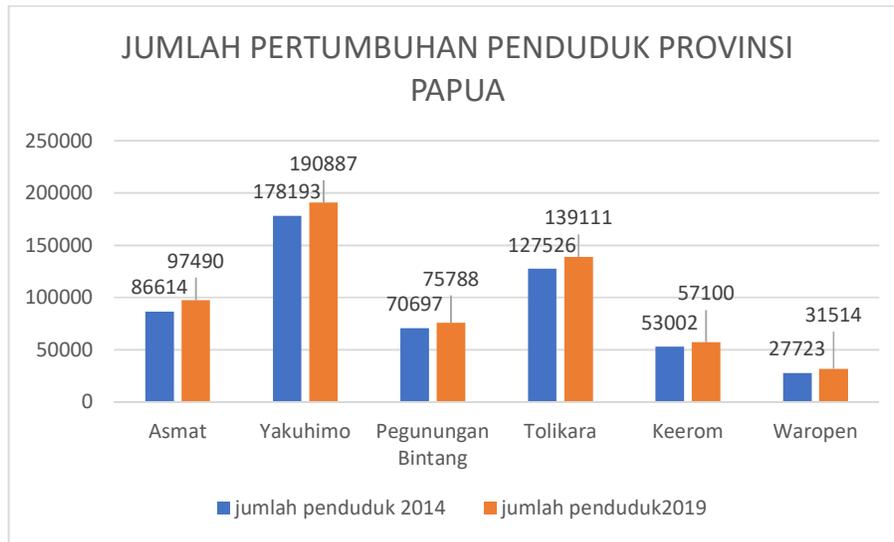
Gambar 4. 17 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua Barat

Berdasarkan data (Gambar 4.17), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di setiap kabupaten pada Provinsi Papua Barat. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Tambrauw laju pertumbuhan penduduknya sedikit karena hanya bertambah 142 jiwa, begitu juga dengan kabupaten Manokwari Selatan (1470 jiwa), Kabupaten Pegunungan Arfak (1584 jiwa), dan Kabupaten Maybrat (2164 jiwa) yang laju pertumbuhan penduduknya hanya sedikit. Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang sedikit maka perlu untuk mengoptimalkan sekolah yang sudah ada untuk meningkatkan angka patisipasi sekolah.



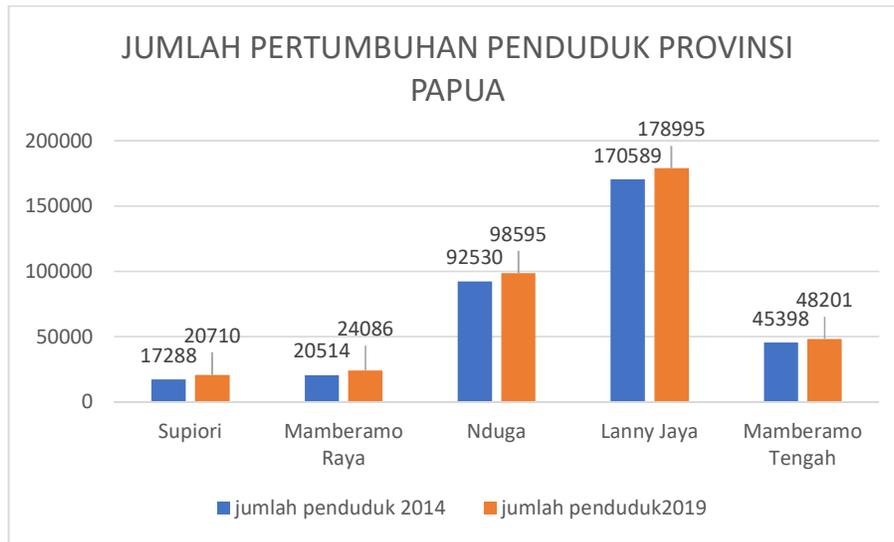
Gambar 4. 18 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua

Berdasarkan data (Gambar 4.18), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di setiap kabupaten pada Provinsi Papua. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi karena bertambah 13775 jiwa, begitu juga dengan Kabupaten Boven Digul (7928 jiwa), Kabupaten Nabire (12532 jiwa), Kabupaten Mappi (13502 jiwa), Kabupaten Paniai (14921 jiwa), Kabupaten Puncak Jaya (16020 jiwa). Semua daerah tersebut memiliki capaian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Kabupaten Jayawijaya, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Boven Digul, Mappi membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.



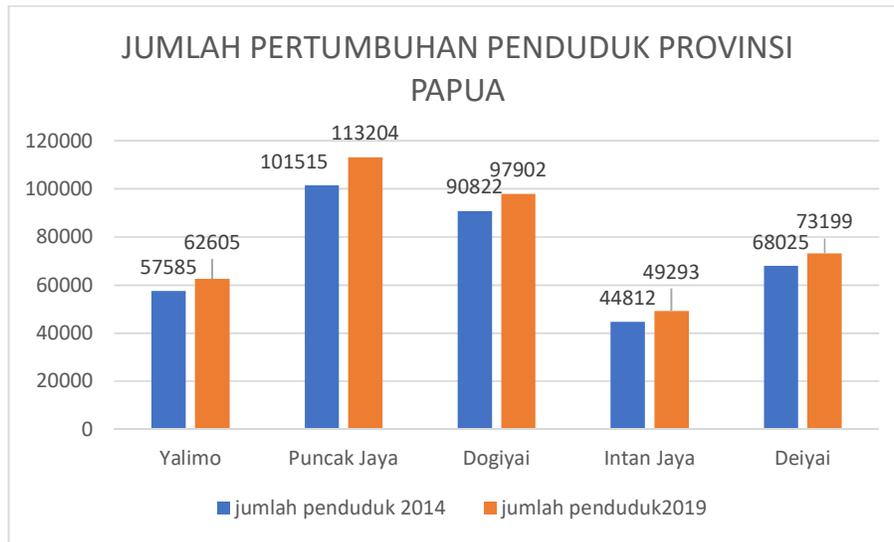
Gambar 4. 19 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua

Berdasarkan data (Gambar 4.19), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di setiap kabupaten pada Provinsi Papua. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Waropen laju pertumbuhannya sedikit karena hanya bertambah 3791 jiwa, begitu juga dengan Kabupaten Keerom (4098 jiwa) yang laju pertumbuhannya hanya sedikit. Sedangkan daerah yang memiliki capaian pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah Kabupaten Pegunungan Bintang (5091 jiwa), Kabupaten Asmat (10876 jiwa), Kabupaten Tolikara (11585 jiwa), Kabupaten Yakuhimo (12694 jiwa). Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yakuhimo membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.



Gambar 4. 20 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua

Berdasarkan data (Gambar 4.20), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di setiap kabupaten pada Provinsi Papua. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Mamberamo Tengah laju pertumbuhan penduduknya sedikit karena hanya bertambah 2803 jiwa, begitu juga dengan Kabupaten Supiori (3422 jiwa), dan Kabupaten Mamberamo Raya (3572 jiwa) yang laju pertumbuhan penduduknya hanya sedikit. Sedangkan daerah yang memiliki capaian pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah Kabupaten Nduga (6065 jiwa), dan Kabupaten Lanny Jaya (8406 jiwa). Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Lanny Jaya membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.

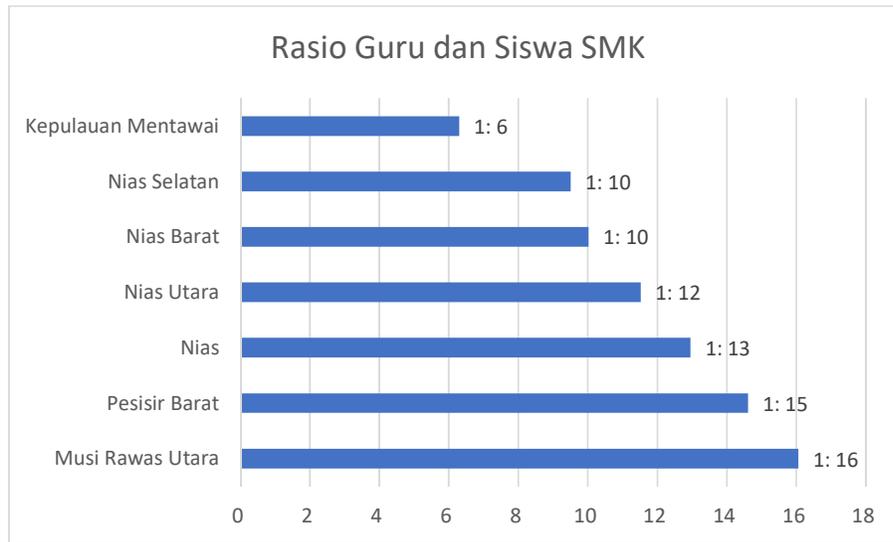


Gambar 4. 21 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Papua

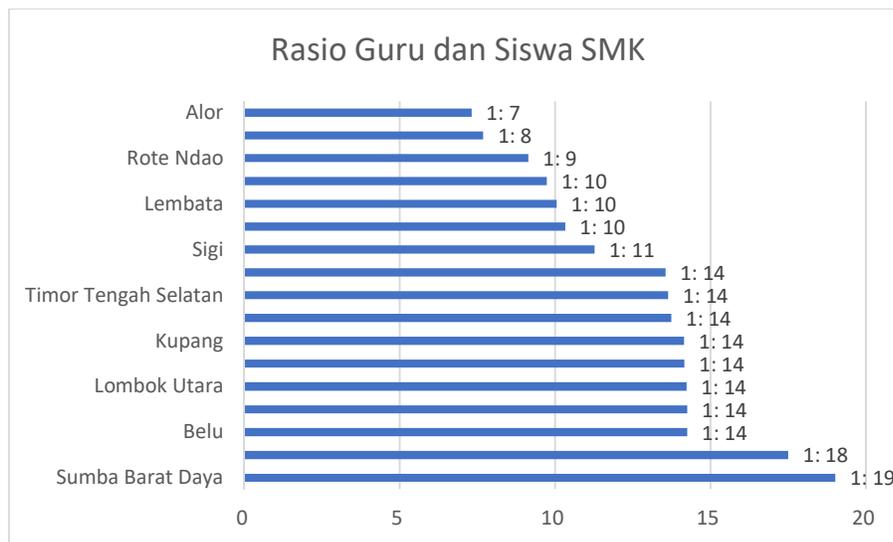
Berdasarkan data (Gambar 4.21), terdapat jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan di setiap kabupaten pada Provinsi Papua. Berdasarkan selisih jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 dengan tahun 2014 didapatkan data bahwa Kabupaten Intan Jaya laju pertumbuhan penduduknya sedikit karena hanya bertambah 4481 jiwa. Sedangkan daerah yang memiliki capaian pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah Kabupaten Yalimo (5020 jiwa), Kabupaten Deiyai (5174 jiwa), Kabupaten Dogiyai (7080 jiwa), Kabupaten Puncak Jaya (11689 jiwa). Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak maka mengindikasikan bahwa daerah Kabupaten Yalimo, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Puncak Jaya membutuhkan penambahan ruang kelas baru atau SMK baru untuk menyediakan akses pendidikan menengah kepada masyarakat di daerah tersebut.

### 3. Rasio guru dan siswa smk

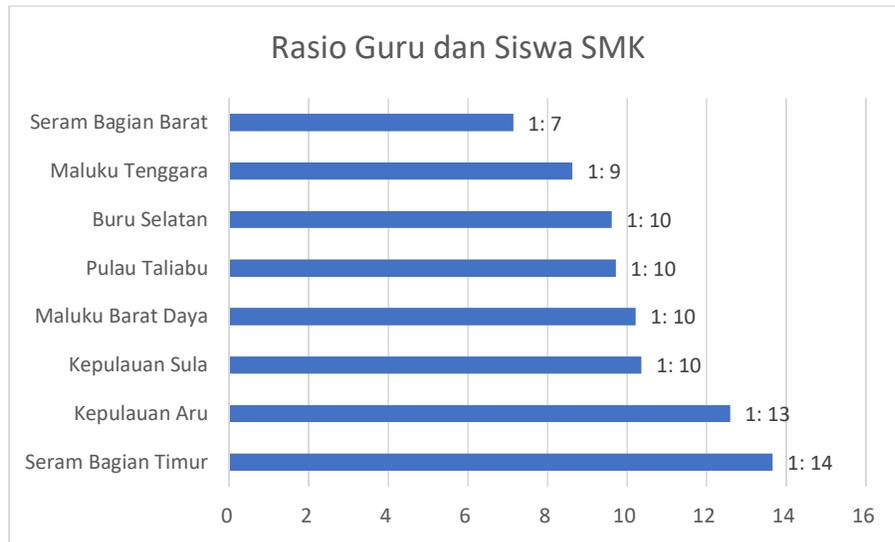
Rasional untuk program ini yaitu rasio guru dan siswa yang rata-rata masih sangat rendah untuk daerah-daerah tertinggal.



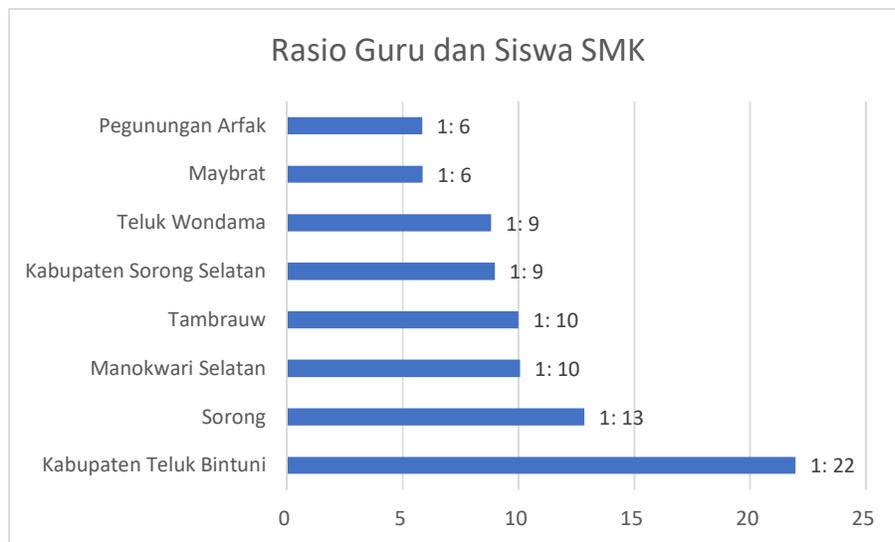
Gambar 4. 22 Rasio Jumlah Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Tertinggal di Indonesia bagian barat



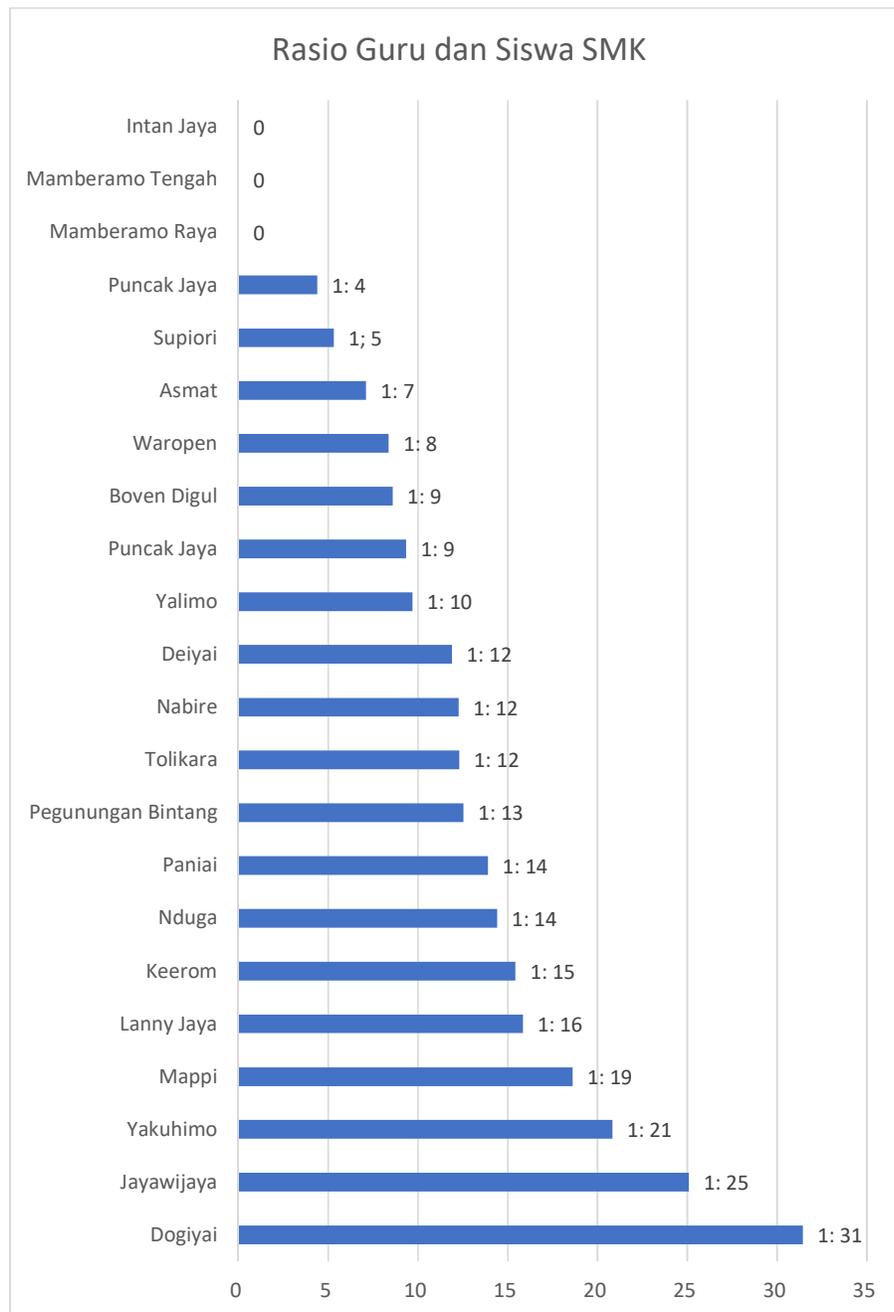
Gambar 4. 23 Rasio Jumlah Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Tertinggal di Indonesia bagian tengah



Gambar 4. 24 Rasio Jumlah Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Tertinggal di Indonesia bagian timur (Maluku dan Maluku Utara)



Gambar 4. 25 Rasio Jumlah Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Tertinggal di Indonesia bagian timur (Papua Barat)



Gambar 4. 26 Rasio Jumlah Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Tertinggal di Indonesia bagian timur (Papua)

Standar minimal perbandingan antara jumlah guru dengan siswa SMK adalah 1: 15 (PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru). Sedangkan jumlah siswa untuk setiap rombongan maksimal 32 (Permendikbud Nomor 34 tahun 2018). Data perbandingan jumlah guru dan siswa SMK di 62 Kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal menunjukkan bahwa rasio yang ada masih belum memenuhi standar minimal sesuai dengan ketentuan. Secara keseluruhan, rasio guru-siswa SMK di 62 Kabupaten yang termasuk daerah tertinggal adalah ... dengan rincian daerah di Indonesia bagian barat (1:12), Indonesia bagian tengah (1:13), daerah di Maluku dan Maluku Utara (1:10), daerah di Papua Barat (1:11), dan daerah di Papua (1:14).

Data-data tersebut selanjutnya di konfirmasi melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SMK di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan data-data tersebut, dapat diindikasikan bahwa jumlah SMK di daerah yang termasuk kategori tertinggal pada saat ini belum dapat memenuhi kuota jumlah siswa dengan optimal. Akan tetapi, rasio guru dan siswa SMK yang rendah tersebut tidak mencerminkan kondisi kebutuhan guru produktif atau kejuruan di daerah tertinggal. Masih terdapat banyak SMK yang kekurangan guru produktif dengan bidang keahlian yang linier dengan kompetensi keahlian yang diampunya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya kuota jumlah siswa adalah 1) ketika terdapat SMA yang lokasinya berdekatan, maka minat masyarakat untuk melanjutkan ke SMA lebih tinggi daripada ke SMK, 2) lokasi SMK yang saling berdekatan menyebabkan calon peserta didik akan memilih ke SMK yang lebih bagus, 3) minat dan motivasi masyarakat untuk mendorong anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah masih belum tinggi, 4) Kompetensi keahlian yang ditawarkan kurang menarik, 5) Kesalahan persepsi masyarakat tentang SMK, misalkan lulusan SMK sekedar menjadi tukang, 6) kondisi ekonomi masyarakat yang rendah membuat mereka langsung berusaha bekerja setelah lulus SMP, dan 7) lokasi sumber siswa yang jauh.

Oleh karena itu, kajian yang dilakukan mengenai Pendidikan Layanan Khusus (PLK) pada SMK di daerah kategori tertinggal merekomendasikan untuk mengoptimalkan SMK-SMK di daerah tertinggal untuk terus dikembangkan. Bentuk optimalisasi SMK-SMK di daerah tertinggal yaitu dengan 1) peningkatan kompetensi guru produktif di SMK daerah tertinggal, 2) peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran praktik di SMK daerah tertinggal, 3) pembukaan kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta mempertimbangkan faktor kejenuhan jumlah lulusan, 4) menjalin perjanjian kerjasama dengan SMP sebagai sumber siswa, dan 5) SMK di daerah tertinggal berusaha secara langsung berkontribusi dalam aktifitas yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

a. Peningkatan kompetensi guru produktif di SMK daerah tertinggal

Permasalahan yang dihadapi guru-guru produktif di SMK adalah linieritas dengan bidang keahlian dan kebutuhan untuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat.

- b. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran praktik di SMK daerah tertinggal
- c. Pembukaan kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta mempertimbangkan faktor kejenuhan jumlah lulusan.
- d. menjalin perjanjian kerjasama dengan SMP sebagai sumber siswa  
Kerjasama supaya lulusan SMP yang lokasinya berdekatan dengan SMK bisa melanjutkan pendidikan ke SMK.
- e. Kontribusi SMK terhadap aktifitas ekonomi  
Teaching factory (Industri mete dan VCO di SMKN 1 Gangga, Lombok Utara)

#### **4. Program kompetensi keahlian yang tersedia di daerah tertinggal**

Program-program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK yang ada di daerah tertinggal sangat bervariasi dan sudah cukup sesuai dengan potensi SDA yang ada namun pada beberapa daerah tertentu juga ada yang belum sesuai dengan potensi SDA yang ada di daerah tersebut. Contoh program keahlian yang tersedia di daerah tertinggal adalah sebagai berikut: Administrasi Perkantoran, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Akuntansi dan Keuangan, Manajemen Perkantoran, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Nautika Kapal Niaga, Pengolahan Hasil Perikanan, Kepariwisata, Perhotelan, Pertambangan, Teknik Otomotif, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Komputer dan Jaringan serta masih banyak lagi program keahlian yang ditawarkan di beberapa daerah tertinggal.

Dari program-program keahlian yang cukup bervariasi maka jika kita amati hanya terdapat beberapa program keahlian yang populer dan paling banyak diminati di daerah tertinggal sesuai dengan jumlah siswa adalah sebagai berikut Teknik Komputer dan Jaringan, Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Keperawatan, Kepariwisata dan Perhotelan.

#### **5. sumber daya alam**

Potensi SDA pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar secara umum didominasi oleh potensi disektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Secara rinci dapat dilihat pada tabel.

a) Wiayah Barat

Tabel 4. 1 Potensi SDA Wilayah Barat

Provinsi	Kabupaten	Potensi SDA
Sumatera Utara	Nias	- Perikanan, - Perkebunan - Pertanian
	Nias Selatan	- Pertanian - Perkebunan - Peternakan - Kelautan dan perikanan - Pariwisata
	Nias Utara	- Peetanian, - perkebunan, - peternakan, - perikanan
	Nias Barat	- pertanian, - kehutanan, - pariwisata, - kelautan dan perikanan, - pertambangan (Bahan Mineral Bukan Logam, dan Batuan)

Potensi SDA di Provinsi Sumatera Utara adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK yang ada di Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi dengan ini maka program keahlian yang ditawarkan SMK di Provinsi Sumatera Utara perlu lebih dioptimalkan atau menambah SMK dengan program keahlian yang relevan supaya lebih sesuai dengan potensi SDA yang ada.

Tabel 4. 2 Potensi SDA Wilayah Barat

Provinsi	Kabupaten	Potensi SDA
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	- Perikanan dan Kelautan, - Pertanian, - Pariwisata

Potensi SDA di Provinsi Sumatera Barat adalah perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata. Program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK yang ada di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi dan program keahlian yang ditawarkan SMK di Provinsi Sumatera Barat sudah cukup sesuai dengan potensi SDA yang ada.

Dengan jumlah SMK yang menyelenggarakan program keahlian sesuai dengan SDA yang ada maka mengindikasikan untuk mengoptimalkan sekolah yang sudah ada untuk menghasilkan tamatan SMK yang berkompeten dan menjadi tenaga kerja yang terampil.

Tabel 4. 3 Potensi SDA Wilayah Barat

Provinsi	Kabupaten	Potensi SDA
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pertanian tanaman pangan</li> <li>- perkebunan (karet dan sawit),</li> <li>- Pertambangan (minyak, gas, batubara, emas, perak, tembaga, besi, timah hitam dan seng),</li> <li>- peternakan (kambing, domba),</li> <li>- pariwisata</li> </ul>
Provinsi	Kabupaten	Potensi SDA
Lampung	Pesisir Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan (pasir, batu andesit, pasir besi)</li> <li>- Pertanian (tanaman pangan)</li> <li>- Kehutanan (pohon jati, sengon, dammar)</li> <li>- Kelautan dan perikanan</li> <li>- Peternakan (sapi, kerbau, kambing, domba)</li> <li>- Perkebunan (sawit, kelapa dalam, karet kopi, kakao, lada, cengkeh, gula aren, pinang)</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>

Potensi SDA di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung adalah pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung sangat bervariasi namun kurang sesuai dengan potensi SDA yang ada. Dengan ini maka program keahlian yang ditawarkan SMK di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung perlu lebih dioptimalkan atau menambah SMK dengan program keahlian yang relevan supaya lebih sesuai dengan potensi SDA yang ada.

## b) Wilayah Tengah

Tabel 4. 4 Potensi SDA Wilayah Tengah

Provinsi	Kabupaten	Potensi SDA
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kelautan dan perikanan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Perkebunan (jagung)</li></ul>

Potensi SDA di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kelautan dan perikanan, pariwisata, dan perkebunan. Program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat bervariasi namun kurang sesuai dengan potensi SDA yang ada. Dengan ini maka program keahlian yang ditawarkan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu lebih dioptimalkan atau menambah SMK dengan program keahlian yang relevan supaya lebih sesuai dengan potensi SDA yang ada.

Tabel 4. 5 Potensi SDA Wilayah Tengah

Provinsi	Kabupaten	Potensi SDA
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pertanian (Padi, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan)</li><li>- Pertambangan (minyak, gas, mineral)</li><li>- Perkebunan (</li><li>- Kelautan dan perikanan</li><li>- Peternakan (babi, kerbau, kuda, kambing, domba)</li><li>- Pariwisata</li></ul>
	Sumba Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pertanian (padi, jagung, kedelai, singkong dan hasil umbi-umbian)</li><li>- Perkebunan (kopi, kakao, tembakau, kelapa)</li><li>- Kehutanan</li><li>- Kelautan</li><li>- Peternakan (Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing Domba dan Babi)</li><li>- Pertambangan (batu karang, sirtu, pasir, batu pecah, batu gelondongan, batu kapur, batu warna, tanah urug, batu gamping, pasir kali, pasir laut, Andesit, Granit, batu setengah permata,</li></ul>

		Feldspar, Tembaga, Granodiorit, Timah Hitam, Emas)
	Kupang	- Pariwisata - Perkebunan - Pertanian
	Timor Tengah Selatan	- Pariwisata - Pertanian - Peternakan - Perikanan - Perkebunan - Kehutanan - pertambangan
	Belu	- Perikanan - Perkebunan - Pertambangan - Pertanian - Peternakan
	Alor	- Perkebunan (kelapa, kopi, cengkeh, dll) - Pariwisata - Perikanan dan kelautan - Kehutanan - Pertambangan - Pertanian
	Lembata	- Pertanian - Perkebunan - Peternakan - Perikanan - Pariwisata - Pertambangan (panas bumi, mineral logam, mineral non logam dan batuan)
	Rote Ndao	- Pariwisata - Kehutanan - Perikanan - Pertanian - Peternakan - Perkebunan
	Sumba Tengah	- Pertanian - Perkebunan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peternakan</li> <li>- Perikanan</li> </ul>
	Sumba Barat Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian</li> </ul>
	Manggarai Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Perikanan dan kelautan</li> <li>- Pertambangan</li> <li>- Perindustrian/perdagangan</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>
	Sabu Raijua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Pertambangan dan energy</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>
	Malaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Pertambangan dan energy</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>

Potensi SDA di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pertanian, perkebunan, pariwisata. Program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat bervariasi dan program keahlian yang ditawarkan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah cukup sesuai dengan potensi SDA yang ada. Dengan jumlah SMK yang menyelenggarakan program keahlian sesuai dengan SDA yang ada maka mengindikasikan untuk mengoptimalkan sekolah yang sudah ada untuk menghasilkan tamatan SMK yang berkompeten dan menjadi tenaga kerja yang terampil.

Tabel 4. 6 Potensi SDA Wilayah Tengah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi	Kabupaten	Potensi SDA
Sulawesi Tengah	Donggala	- Perkebunan (Sawit) - Peternakan - Pertambangan - Kelautan
	Tojo Una-una	- Pertanian - Perkebunan - Peternakan - Perikanan - Pariwisata
	Sigi	- Pertanian (Padi, jagung) - Perkebunan (kakao, kopi, dan kelapa) - Pariwisata (ekowisata. Paralayang)

Potensi SDA di Provinsi Sulawesi Tengah adalah pertanian, perkebunan, peternakan. Program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sangat bervariasi dan program keahlian yang ditawarkan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup sesuai dengan potensi SDA yang ada. Dengan jumlah SMK yang menyelenggarakan program keahlian sesuai dengan SDA yang ada maka mengindikasikan untuk mengoptimalkan sekolah yang sudah ada untuk menghasilkan tamatan SMK yang berkompeten dan menjadi tenaga kerja yang terampil

#### c) Wilayah Timur

Potensi SDA di Provinsi Maluku adalah perikanan dan kelautan, perkebunan, pertambangan. Program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK yang ada di Provinsi Maluku cukup bervariasi dan program keahlian yang ditawarkan SMK di Provinsi Maluku sudah sesuai dengan potensi SDA yang ada. Dengan jumlah SMK yang menyelenggarakan program keahlian sesuai dengan SDA yang ada maka mengindikasikan untuk mengoptimalkan sekolah yang sudah ada untuk menghasilkan tamatan SMK yang berkompeten dan menjadi tenaga kerja yang terampil.

Tabel 4. 7 Potensi SDA Wilayah Timur Provinsi Maluku

Provinsi	Kabupaten	Potensi SDA
Maluku	Maluku Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Perikanan dan Kelautan</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>
	Kepulauan Aru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan</li> <li>-</li> </ul>
	Seram Bagian Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Pertambangan dan energi</li> </ul>
	Seram Bagian Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan dan kelautan</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Pertambangan</li> </ul>
	Maluku Barat Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan dan kelautan</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>
	Buru Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan dan kelautan</li> <li>- Pertambangan (emas, bauksit, semen, marmer, pasir besi)</li> <li>- perkebunan (kelapa, cengkih, coklat, tebu, dan pala)</li> </ul>

Tabel 4. 8 Potensi SDA Wilayah Timur Provinsi Maluku Utara

Provinsi	Kabupaten	Potensi SDA
Maluku Utara	Kepulauan Sula	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perkebunan (kelapa, kakao, pala, cengkeh, jambu mete, dll)</li> <li>- pertambangan (emas, tembaga,</li> <li>- pariwisata</li> <li>- perikanan dan kelautan</li> </ul>

	Pulau Taliabu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perkebunan (cengkeh, kelapa, kakao, pala)</li> <li>- perikanan dan kealutan</li> <li>- pertambangan (biji besi, galena, panas bumi)</li> <li>- pariwisata</li> <li>- pertanian (sayuran)</li> </ul>
--	---------------	--

Potensi SDA di Provinsi Maluku Utara adalah perkebunan, perikanan dan kelautan ,pariwisata. Program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK yang ada di Provinsi Maluku Utara kurang bervariasi namun program keahlian yang ditawarkan SMK di Provinsi Maluku Utara sudah cukup sesuai dengan potensi SDA yang ada. Dengan jumlah SMK yang menyelenggarakan program keahlian sesuai dengan SDA yang ada maka mengindikasikan untuk lebih mengoptimalkan sekolah yang sudah ada untuk menghasilkan tamatan SMK yang berkompeten dan menjadi tenaga kerja yang terampil

Tabel 4. 9 Potensi SDA Wilayah Timur Provinsi Papua Barat

Provinsi	Kabupaten	Potensi SDA
Papua Barat	Teluk Wondama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan dan kelautan</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Pertambangan (batu gamping,</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>
	Teluk Bintuni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan dan kelautan (udang, kepiting, rumput laut, dll)</li> <li>- Pertambangan (minyak bumi, gas alam, batu bara)</li> <li>- Kehutanan (mangrove, dll)</li> </ul>
	Sorong Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan dan kelautan (ikan, udang, kepiting, dll)</li> <li>- Kehutanan (mangrove, dll)</li> <li>- Pariwisata</li> <li>- Pertambangan (bahan galian)</li> </ul>
	Sorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan (minyak bumi,gas,</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Kehutanan</li> </ul>

	Tambrau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Kelautan dan perikanan</li> </ul>
	Maybrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan (minyak, gas bumi, dll)</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perkebunan (kelapa, kakao)</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Perikanan (tawar)</li> </ul>
	Manokwari Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan (timah, batu gamping, granit, panas bumi, batu gunung api)</li> <li>- Pertanian (tanaman pangan)</li> <li>- Pariwisata (sejarah dan alam)</li> <li>-</li> </ul>
	Pegunungan Arfak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian (padi)</li> <li>- Pertambangan (timah, seng, tembaga, granit)</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>

Potensi SDA di Provinsi Papua Barat adalah Pertanian, pertambangan, dan pariwisata,. Program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK yang ada di Provinsi Papua Barat sangat Terbatas dan juga kurang sesuai dengan potensi SDA yang ada. Dengan ini maka program keahlian yang ditawarkan SMK di Provinsi Papua Barat perlu lebih dioptimalkan atau menambah SMK dengan program keahlian yang relevan supaya lebih sesuai dengan potensi SDA yang ada.

Tabel 4. 10 Potensi SDA Wilayah Timur Provinsi Papua

Provinsi	Kabupaten	Potensi SDA
Papua	Jayawijaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian (ubi, talas, jagung)</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Peternakan (babi, kambing, dll)</li> <li>- Perikanan (tawar)</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>
	Nabire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehutanan</li> <li>- Pertambangan</li> </ul>

	Paniai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan (emas, batubara, dll)</li> <li>- Pertanian (ubi jalar, jagung)</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Pariwisata</li> <li>- Peternakan (babi, kambing)</li> <li>- Perikanan (tawar)</li> </ul>
	Puncak Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehutanan</li> <li>- Pariwisata</li> <li>- Pertanian</li> </ul>
	Boven Digul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan</li> <li>- Pertanian (padi, jagung)</li> <li>- Perikanan (tawar)</li> <li>- Peternakan (babi, kambing, sapi)</li> <li>- Perkebunan (sawit, kopi, lada)</li> </ul>
	Mappi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan dan kelautan</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Kehutanan</li> </ul>
	Asmat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Perikanan</li> <li>- Pertambangan</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>
	Yakuhimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Perikanan</li> <li>- Pertambangan</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>
	Pegunungan Bintang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perikanan (tawar)</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>
	Tolikara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian (buah merah)</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Perkebunan</li> </ul>

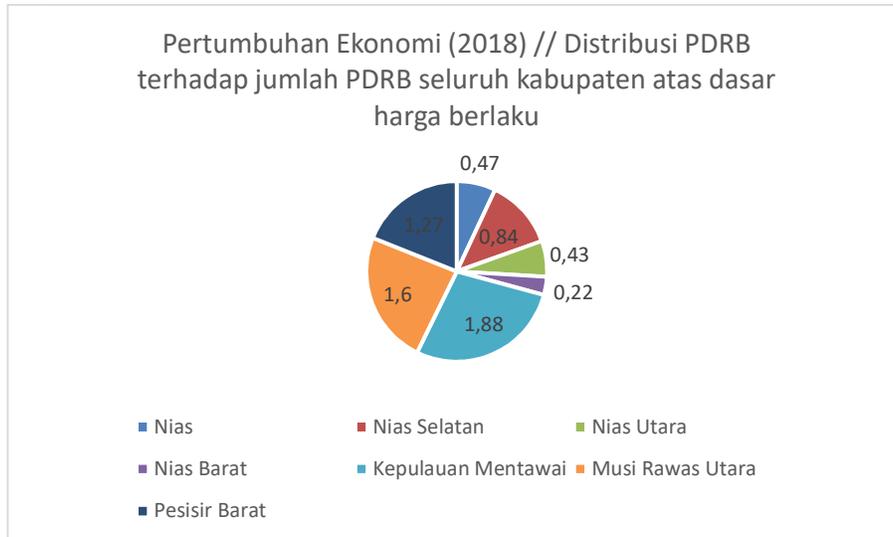
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pariwisata</li> <li>- Pertambangan</li> </ul>
	Keerom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian</li> <li>- Pertambangan</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Perikanan</li> <li>- Perkebunan</li> </ul>
	Waropen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian (padi, jagung, dll)</li> <li>- Perkebunan (kelapa, kakao, sawit, dll)</li> <li>- Kehutanan (kayu, mangrove)</li> <li>- Peternakan (sapi, kambing, ayam, dll)</li> <li>- Perikanan</li> <li>- Pariwisata (alam, bahari, religi, ekowisata)</li> <li>- Pertambangan (batubara</li> </ul>
	Supiori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan (sayur dan buah)</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Peternakan (babi, kambing, sapi, ayam kampung, dll)</li> <li>- Perikanan</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>
	Mamberamo Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan (batubara, minyak bumi)</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- PLTA</li> </ul>
	Nduga	-
	Lanny Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Peternakan</li> <li>-</li> </ul>
	Mamberamo Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian (padi, jagung, ubi kayu)</li> <li>- Peternakan (babi, kambing, sapi)</li> <li>- Kelautan dan perikanan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan (emas, tembaga, bauksit, nikel)</li> <li>- PLTA terbesar</li> </ul>
	Yalimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian (jagung, ubi kayu, dll)</li> <li>- Perkebunan (kelapa, kopi)</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Peternakan (babi, sapi, ayam buras, dll)</li> <li>- Perikanan air tawar</li> </ul>
	Puncak Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian</li> <li>- Kehutanan (kayu merbau, matoa, bakau, gaharu, dll)</li> <li>- Pariwisata (wisata gunung)</li> <li>-</li> </ul>
	Dogiyai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian (padi, palawija)</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Peternakan (babi, sapi, kambing)</li> </ul>
	Intan Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian (Sayuran organik, kopi arabika, sawit)</li> <li>- Peternakan (babi)</li> <li>- Perikanan air tawar</li> <li>- Pariwisata (puncak cartenz)</li> <li>- Pertambangan (Freeport)</li> </ul>
	Deiyai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehutanan</li> <li>- Pariwisata (danau Tigi)</li> <li>- Pertambangan</li> <li>- Perikanan air tawar</li> <li>- Pertanian (ubi jalar, kopi arabika)</li> </ul>

Potensi SDA di Provinsi Papua adalah Pertanian, pertambangan, dan pariwisata,. Program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK yang ada di Provinsi Papua sangat Terbatas dan juga kurang sesuai dengan potensi SDA yang ada. Dengan ini maka program keahlian yang ditawarkan SMK di Provinsi Papua perlu lebih dioptimalkan atau menambah SMK dengan program keahlian yang relevan supaya lebih sesuai dengan potensi SDA yang ada.

## 6. Pertumbuhan ekonomi

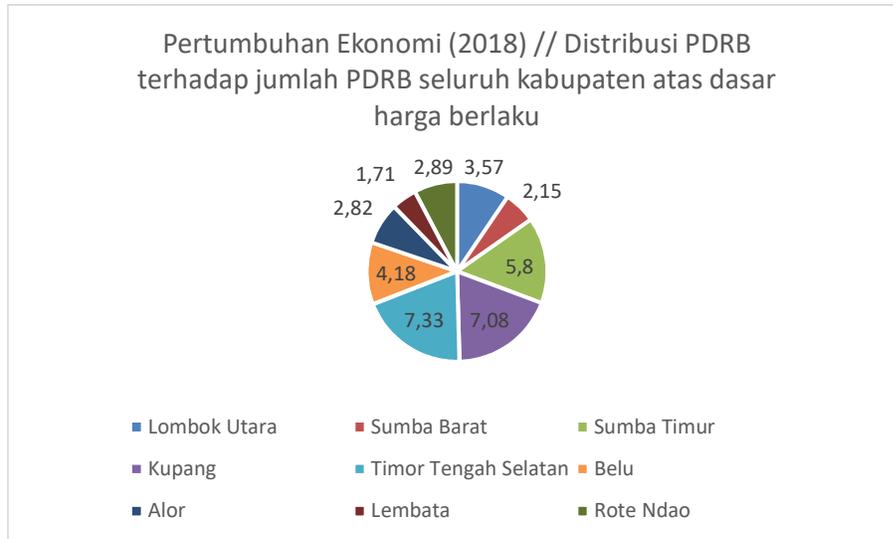
### a. Wilayah Barat



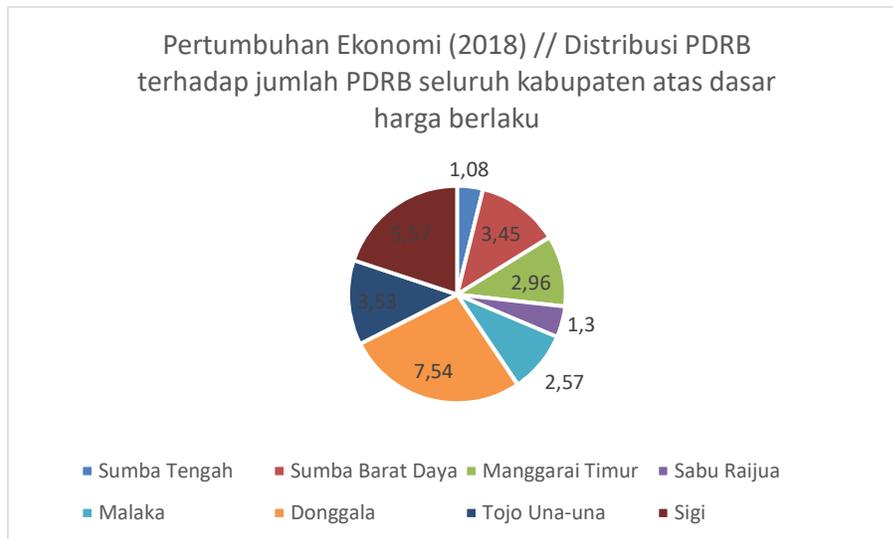
Gambar 4. 27 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Barat

Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Pada tahap tertentu, semakin naik tingkat ekonomi masyarakat, maka kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah juga akan semakin tinggi. Data pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal di Indonesia bagian barat menunjukkan pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi (0,22 – 1,88). Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan upaya kampanye ke masyarakat untuk menempuh pendidikan. Karena dalam hubungan antara ekonomi dengan tingkat pendidikan saling terkait. Pendidikan bisa menjadi instrument untuk menaikkan kelas sosial masyarakat dengan meningkatkan kegiatan perekonomian.

**b. Wilayah Tengah**



Gambar 4. 28 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tengah

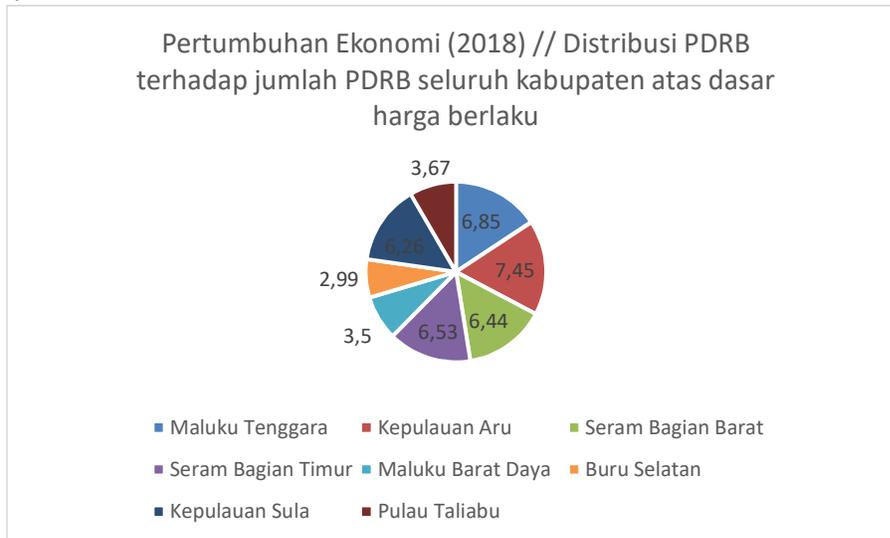


Gambar 4. 29 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tengah

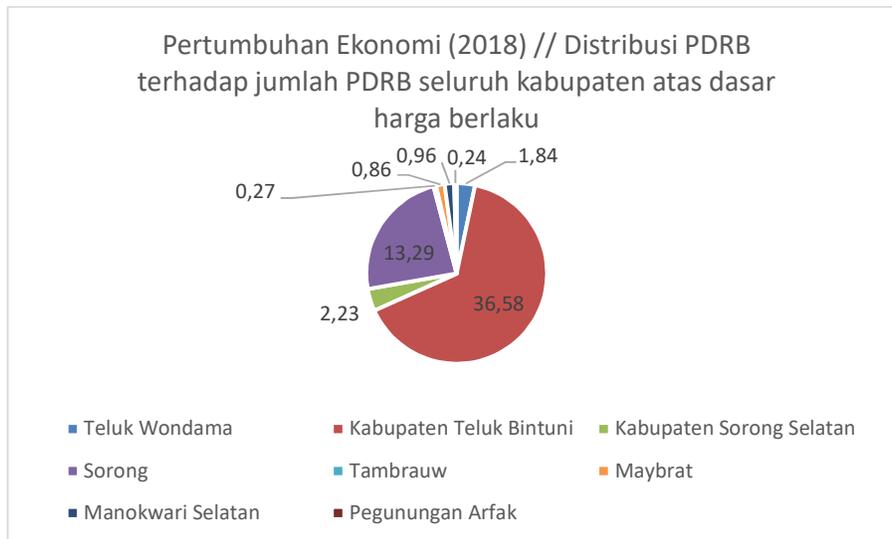
Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Pada tahap tertentu, semakin naik tingkat ekonomi masyarakat, maka kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah juga akan semakin tinggi. Data pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal di Indonesia bagian tengah menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi dari rendah (1,71) sampai tinggi (7,33). Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang

tinggi mengindikasikan perlunya kebutuhan akan pendidikan.

**c. Wilayah Timur**

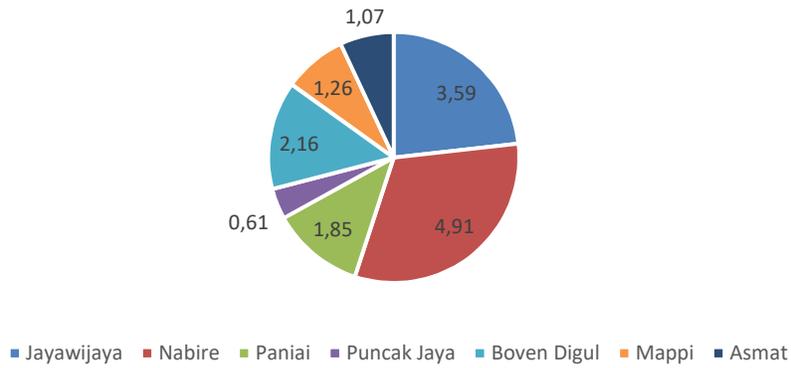


Gambar 4. 30 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur



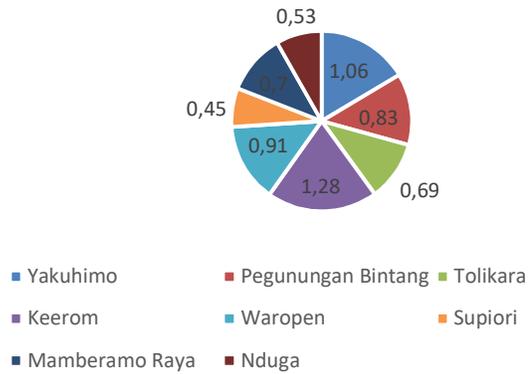
Gambar 4. 31 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur

Pertumbuhan Ekonomi (2018) // Distribusi PDRB terhadap jumlah PDRB seluruh kabupaten atas dasar harga berlaku

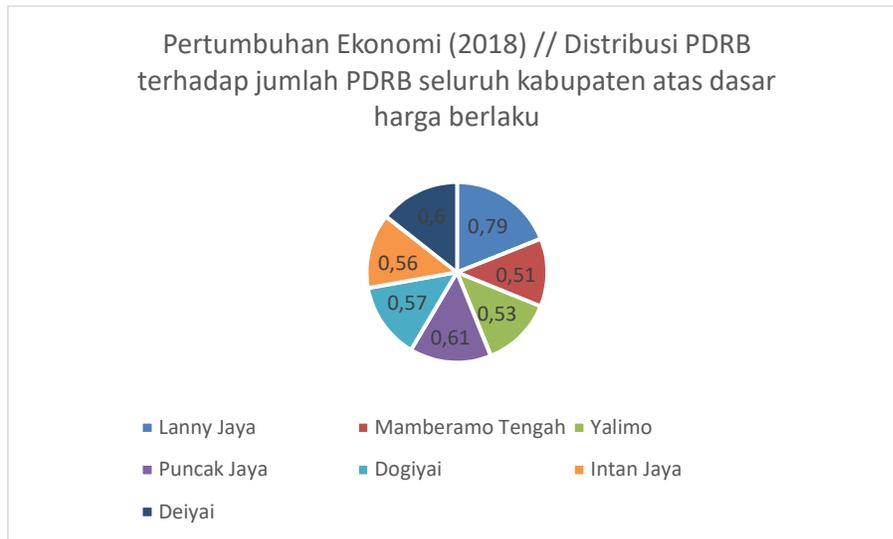


Gambar 4. 32 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur

Pertumbuhan Ekonomi (2018) // Distribusi PDRB terhadap jumlah PDRB seluruh kabupaten atas dasar harga berlaku



Gambar 4. 33 . Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur



Gambar 4. 34 Bagan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Timur

Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Pada tahap tertentu, semakin naik tingkat ekonomi masyarakat, maka kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah juga akan semakin tinggi. Data pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal di Indonesia bagian timur menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi dari rendah (0,24) sampai tinggi (7,45). Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengindikasikan perlunya kebutuhan akan pendidikan.

## B. POTENSI LAYANAN SUMBER BELAJAR DIGITAL SEBAGAI BAGIAN DARI LAYANAN PLK PADA SMK

Pendidikan Layanan Khusus (PLK) memiliki sasaran utama masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal. Kondisi daerah tertinggal menyebabkan jaringan komunikasi belum sebaik dengan daerah perkotaan. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat di daerah tertinggal juga belum mendukung untuk pemenuhan sarana pembelajaran berbasis komputer yang mumpuni. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas PLK di daerah tertinggal dapat dilakukan dengan penyediaan perangkat pembelajaran digital yang dapat diakses secara offline ataupun menggunakan wifi lokal serta penyediaan sumber bahan ajar digital.

### 1. Model sistem penyediaan bahan ajar digital yang dapat diakses secara *online/offline*

Direktorat SMK sudah menginisiasi adanya program pengadaan sarana pembelajaran digital untuk mempermudah akses bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal (Apriliyadi, 2019). Kementerian yang lain juga ada yang memiliki program serupa, misalkan di kementerian pedesaan dan daerah tertinggal dengan program haloholanya.

Perangkat yang dibutuhkan guna mendukung inisiasi ini secara garis besar sebagai berikut:



Gambar 4. 35 . Skema pembelajaran Digital Online dan Offline

#### a. Server Pusat

Server Pusat merupakan lokasi pusat konten yang diadakan sebagai sarana pembelajaran digital. Server ini yang dikelola oleh Direktorat SMK. Server diadakan dengan menggunakan perangkat yang berkualitas. Perangkat server

dibangun berkualitas yang dimaksudkan adalah hardware perangkat dikondisikan handal agar mendukung akses konten secara online. Lokasi server ditempatkan di dekat dengan kantor pusat dengan dukungan tenaga kelistrikan yang dapat dijamin.

**b. Jaringan**

Saat server konten siap diakses, koneksi dengan bandwidth besar turut dibutuhkan untuk memfasilitasi pengguna yang mengakses server secara massal dalam waktu yang sama. Contoh keadaannya misal saat pembelajaran klasikal ataupun tes online yang dilakukan serentak.

**c. Server lokal (HDD lokal yang berisi konten)**

Server lokal merupakan lokasi cadangan konten yang diadakan sebagai sarana pembelajaran digital. Server lokal ini dibutuhkan untuk memfasilitasi ketidakstabilan koneksi kepada server Pustekkom. Server ini dikelola oleh sekolah/instansi daerah. Konten server ini dapat diselaraskan secara terjadwal sesuai kualitas jaringan yang ada, ataupun diselaraskan secara offline dengan distribusi fisik HDD. Perangkat server lokal dibangun sesuai dengan kebutuhan akses masing-masing daerah. Dukungan hardware perangkat dikondisikan agar mendukung akses konten dari pengguna. Server lokal perlu dipasang akses point agar server dapat diakses secara wireless ataupun langsung dikondisikan dalam jaringan lokal berupa *guided connection*. Lokasi server lokal diadakan di dekat dengan lokasi pengguna (siswa/guru/masyarakat umum). Hardware server dikondisikan dukungan tenaga kelistrikan yang dapat dijamin sesuai dengan jadwal penggunaan di tiap-tiap lokal daerah.

Berikut salah satu rekomendasi untuk server lokal dengan anggaran 15an Juta Rupiah:



Gambar 4. 36 Server Lokal

#### **d. Router (Koneksi Jaringan)**

Perangkat router digambarkan secara tersendiri merujuk pada urgensi manajemen koneksi pada penggunaan jaringan yang saat ini ada. Mikrotik difungsikan untuk keperluan administrasi jaringan komputer, Sarana pembelajaran digital diharapkan dapat diaplikasikan secara nasional tentunya diperlukan manajemen koneksi yang handal dan terstruktur. Wireless router lebih lanjut diadakan untuk memfasilitasi agar jaringan dapat diakses lewat jaringan wireless misal dari perangkat smartphone.

Penggunaan jaringan lokal dengan server lokal (poin 2) memiliki berbagai keunggulan untuk digunakan sebagai media pembelajaran digital. Kelebihan itu diantaranya:

- 1) Akses tidak memerlukan koneksi berbayar jika diakses dari jaringan yang disediakan (cakupan dapat diperluas dengan penambahan akses point wireless dan/atau jaringan kabel lokal).
- 2) Saat tersambung ke jaringan, koneksi terbatas pada konten di server lokal, sehingga fokus dan privasi data terjamin.
- 3) Manajemen Sumber Daya dapat dikelola secara mandiri oleh pengelola instansi. Akses penyesuaian konten ke server pusat dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan Sumber Daya yang ada.

#### **e. Device user**

##### **1) Siswa Terdaftar (Notebook/Smartphone)**

Perangkat dari siswa yang terdaftar dapat mengakses konten pembelajaran digital pada server lokal. Akses konten dengan wewenang siswa terdaftar harapannya struktur konten tetap terkendali sesuai struktur pembelajaran yang dikondisikan oleh pengelola server lokal. Perangkat siswa dapat diadakan secara mandiri ataupun difasilitasi oleh instansi dengan pola penggunaan sesuai keterdukungan Sumber Daya yang ada.

##### **2) Guru (Notebook/Smartphone)**

Perangkat dari sisi Guru dapat mengakses konten pembelajaran digital pada server lokal. Akses konten dengan level guru dikondisikan dengan wewenang tambahan terhadap akses fitur-fitur tambahan terhadap konten pembelajaran yang dikondisikan oleh pengelola server lokal. Perangkat guru ini sama dengan perangkat siswa yang dapat diadakan secara mandiri ataupun difasilitasi oleh instansi dengan pola penggunaan sesuai keterdukungan Sumber Daya yang ada.

### 3) Siswa tamu umum (Notebook/Smartphone)

Siswa tamu umum yang dimaksudkan adalah masyarakat umum. Merujuk pada kemajuan teknologi yang ada saat ini. Masyarakat diberikan akses pada beberapa konten pembelajaran digital yang dapat diakses pada server lokal. Akses konten dengan perizinan umum dikondisikan lebih lanjut oleh pengelola server lokal. Perangkat umum dapat diadakan secara mandiri ataupun difasilitasi oleh instansi daerah pada program-program pembelajaran digital masyarakat. Pola penggunaan perangkat ini ditindaklanjuti sesuai keterdukungan Sumber Daya yang ada.

### 4) LCD/Speaker

Perangkat LCD/Speaker merupakan contoh output dasar dari konten digital yang diadakan. LCD (*Liquid Crystal Display*) atau dapat pula digantikan proyektor difungsikan untuk menampilkan konten agar dapat diindra oleh mata. Speaker difungsikan untuk menampilkan konten agar dapat diindra oleh telinga. Untuk output dari konten digital lainnya semisal yang diindra oleh hidung, lidah ataupun kulit sampai di tahun 2020 ini masih sebatas prototipe yang belum harus diaplikasikan di daerah.

Program yang sudah dirintis ini dapat dikoordinasikan dan dikolaborasikan sehingga dapat lebih optimal dari sisi jangkauan sekolah yang mendapatkan bantuan. Program ini juga perlu terus dilanjutkan sehingga sekolah yang dapat menikmati program ini jumlahnya semakin bertambah.

## 2. Potensi sumber bahan ajar digital

Program digitalisasi perangkat pembelajaran yang sudah dirintis, selain menghadapi kendala dari sisi kuantitas jumlah perangkat yang bisa disediakan juga memiliki kendala dalam hal konten yang bisa disajikan. Berikut ini merupakan potensi sumber bahan ajar digital yang sudah ada dan dapat diakses secara gratis oleh guru dan siswa SMK.

Tabel 4. 11. Potensi sumber bahan ajar digital yang dapat diakses oleh Guru dan Siswa SMK

No	Sumber	Jumlah Bahan Ajar	Keterangan
1	Sumber Belajar Kemdikbud ( <a href="https://belajar.kemdikbud.go.id">https://belajar.kemdikbud.go.id</a> )	● 71 Video ● 40 materi/ animasi	Materi MTK, fisika & Kimia
2	TV Edukasi kemdikbud	219 video	Mayoritas bidang pertanian (51), Matematika (27), Kewirausahaan

	<a href="http://tve.kemdikbud.go.id/live/">(http://tve.kemdikbud.go.id/live/)</a>		(27), Broadcasting (36), Bahasa Inggris (30), dan Bahasa Indonesia (15)
3	Kemdikbud (mobile edukasi) ( <a href="https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/">https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/</a> )	1496 modul/ buku	Mayoritas pengetahuan umum dan materi untuk siswa SD-SMP dan SMA
4	Sumber belajar seamolec ( <a href="https://sumberbelajar.seamolec.org/">https://sumberbelajar.seamolec.org/</a> )	3619 modul/buku	Sumber belajar SMK yang lengkap
5	Bahan ajar Dit PSMK ( <a href="http://bahanajar.ditpsmk.net/">http://bahanajar.ditpsmk.net/</a> )	27 modul/ buku	Fisika, Kimia, dan Biologi, yang topik kejuruan belum ada
6	Buku & Bahan Ajar SMK ( <a href="http://103.40.55.195/bahanajar/bkuteks">http://103.40.55.195/bahanajar/bkuteks</a> )	650 modul/ buku	Buku umum (52), BSE mayoritas bisnis dan manajemen (195), Bahan ajar SMK 2017-kimia, biologi, fisikan, IPA Terapan, Simulasi sains dan digital (34), Bahan ajar SMK 2018-mayoritas agro industri/pertanian (95), Bahan ajar SMK 2019-bervariasi, banyak di bidang perikanan/kelautan/pariwisata (260), Bahan ajar bahasa asing-Jepang (7), Modul SMK 2019 (7)
7	Myedisi ( <a href="https://www.myedisi.com/buku/smk/471">https://www.myedisi.com/buku/smk/471</a> )	245 buku	Kelas X (100), Kelas XI (100), Kelas XII (45)

Data potensi sumber bahan ajar digital tersebut didapatkan dari website yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta penyedia konten lainnya yang dapat diakses secara online. Data ketersediaan sumber bahan ajar digital berupa modul, buku, materi pembelajaran, dan video menunjukkan bahwa jumlah konten bahan ajar digital untuk mata pelajaran produktif di SMK masih minim. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan sumber bahan ajar digital khususnya untuk mendukung pencapaian kompetensi produktif untuk SMK.

Proses penyediaan bahan ajar digital dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak. Misalkan saja Direktorat SMK menggandeng LPTK yang mendidik calon-calon guru SMK untuk menjadikan pengembangan bahan ajar

digital sebagai salah satu tugas/proyek akhir skripsi mahasiswa. Direktorat SMK dapat memberikan rambu-rambu panduan untuk bahan ajar digital yang dikembangkan meliputi jumlah minimal halaman atau panjang video, target kompetensi, program kompetensi keahlian yang diprioritaskan, dll. Selain itu, Direktorat SMK dapat mengoptimalkan potensi platform *online* untuk saling berbagi antar stakeholder SMK untuk penyediaan sumber bahan ajar digital. Salah satu platform yang menyediakan wadah bagi guru-guru untuk berbagi RPP, artikel, dan video pembelajaran yang dimilikinya yaitu guru berbagi (<https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/>) yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui platform tersebut, guru-guru di seluruh Indonesia dapat mengupload materi-materi yang dimilikinya sehingga dapat diakses oleh khalayak umum.

### 3. Ketersediaan *Learning Management System* tidak berbayar yang dapat diakses oleh guru dan siswa SMK

Proses pembelajaran di SMK juga dapat memanfaatkan beberapa penyedia *Learning Management System* (LMS) yang mendedikasikan platformnya secara gratis dan dapat diakses oleh guru dan siswa SMK. Berikut ini merupakan penyedia LMS yang dapat dipergunakan oleh guru dan siswa SMK.

Tabel 4. 12 LMS tidak berbayar yang dapat diakses oleh Guru dan Siswa SMK

No	Sumber	Keterangan
1	Tatap muka daring pusdatin ( <a href="https://pusdatin.webex.com/webappng/sites/pusdatin/dashboard?siteurl=pusdatin">https://pusdatin.webex.com/webappng/sites/pusdatin/dashboard?siteurl=pusdatin</a> )	Merupakan salah satu platform yang memungkinkan guru melakukan kegiatan tatap muka secara daring dengan peserta didik.
2	LMS SIAJAR SEAMOLEC ( <a href="https://lms.seamolec.org/">https://lms.seamolec.org/</a> )	Merupakan salah satu platform LMS yang dapat dipergunakan guru dan siswa untuk melakukan proses pembelajaran, evaluasi, diskusi, dll secara online.
3	Google Classroom	Google classroom memungkinkan guru dan siswa saling berinteraksi, berdiskusi, dan bekerjasama dalam sistem daring.
4	Schoology	Merupakan salah satu platform LMS yang terhubung dengan jejaring sosial. Fitur yang terdapat dalam Schoology yaitu kelas mapel, sumber belajar, dan kelompok belajar.
5	Edmodo	Merupakan salah satu platform LMS yang memiliki keunggulan adanya fitur kolaborasi antar guru, memungkinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan singkat, penyimpanan

	yang teroganisir, dan mampu menciptakan kelompok siswa yang lebih kecil dalam kelas.
--	--

Selain platform LMS yang dapat dipergunakan secara langsung oleh guru dan siswa SMK untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring, terdapat pula beberapa aplikasi *open source* yang dapat dipergunakan oleh guru untuk mengembangkan LMS di sekolah masing-masing. Aplikasi ini dapat didownload secara gratis, akan tetapi perlu langkah lebih lanjut untuk mengimplementasikannya sehingga dapat dipergunakan oleh sekolah. Penggunaan aplikasi ini dapat dilakukan secara online ataupun menggunakan jaringan internet lokal (*local host*). Berikut ini merupakan beberapa aplikasi *open source* yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan LMS.

Tabel 4. 13. Aplikasi *open source* yang dapat dipergukan untuk mengembangkan LMS

No	Aplikasi	Keterangan
1	Moodle	Merupakan aplikasi yang paling sering digunakan. Kelebihan Moodle yaitu dapat digunakan secara gratis, dikustomisasi sesuai kebutuhan, dan dapat digunakan untuk skala besar secara online ataupun jaringan internet lokal. Moodle memungkinkan pemberian materi, diskusi, kuis, dan tes online sebagai bagian dari kegiatan proses pembelajaran.
2	Chamilo	Chamilo merupakan aplikasi open license yang sudah dipergunakan lebih dari 600 rb orang dari berbagai Negara. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat digital campus untuk kegiatan pembelajaran secara <i>full online</i> ataupun <i>hybrid</i> .
3	Atutor	Atutor dirancang untuk berbagi pembelajaran berbasis online. Pengguna dapat berbagi modul serta bersosialisasi dengan sesama pengguna dalam platform yang sama.
4	Forma LMS	Forma LMS memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi, mengelola webinar, dan mengelola sertifikat. Selain itu, aplikasi ini memiliki sistem <i>e-commerce</i> dan <i>plugin</i> yang membuat peserta dapat melakukan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan.
5	Open EDX	Aplikasi <i>open source</i> ini menyediakan fitur untuk manajemen materi, evaluasi, dan kolaborasi antar pengguna. Selain itu, aplikasi ini menyediakan tim support dan komunitas untuk membantu menggunakan fitur-fitur yang ada di OPEN EDX.

6	OPENOLAT	OpenOlat menyediakan fitur untuk manajemen materi, manajemen siswa, tes evaluasi, kolaborasi antar pengguna, dan ruang kelas virtual. Salah satu kelebihan dari aplikasi ini yaitu adanya <i>podcast</i> dan <i>group project</i> .
---	----------	---

Berbagai aplikasi open source dan platform LMS tidak berbayar yang sudah tersedia tersebut tidak akan berarti kalau pengguna tidak memiliki kemampuan untuk mengoptimalkannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan guru dan siswa SMK di daerah tertinggal masih terbatas untuk menggunakan berbagai sarana berbasis computer dan internet tersebut.

Ketersediaan berbagai bahan pembelajaran digital akan lebih optimal jika didukung oleh SDM Guru yang mampu mengoperasikan dan mengoptimalkan penggunaannya. Oleh karena itu, guru-guru SMK di daerah tertinggal perlu mendapatkan pelatihan khusus terlebih dahulu untuk penggunaan bahan ajar digital tersebut. Materi training yang dilakukan misalkan saja: 1) prosedur pengoperasian perangkat bahan ajar digital, 2) prosedur pelaksanaan conference untuk kegiatan PJJ, 3) prosedur pencegahan virus pada perangkat digital, 4) dll. Kegiatan training dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan LPTK terdekat melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).

### C. MODIFIKASI, AFIRMASI, PROYEKSI, DAN STRATEGI (MAPS) PLK PADA SMK

Dalam konteks pendidikan layanan khusus sekolah menengah kejuruan, Standar Nasional Pendidikan (SNP) harus tetap menjadi dasar penyelenggaraan. SNP adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di Indonesia. SNP berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP sebagai acuan minimal yang harus menjadi pijakan, tidak saja digunakan sebagai indikator perencanaan, pelaksanaan tetapi juga sebagai indikator keberhasilan pendidikan, sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP yang kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 32 Tahun 2013. SNP mencakup delapan kriteria yang wajib mendasari dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas. Walaupun SNP menjadi dasar, tetapi perlu ada penyesuaian dalam keterlaksanaan implementasi PLK pada SMK.

Tim kajian menggunakan konsep Modifikasi, Afiriasi, Proyeksi, dan Strategi (MAPS) untuk mengembangkan desain pelaksanaan PLK pada SMK. Konsep ini dikembangkan untuk mengakomodasi situasi sasaran PLK pada SMK yang memiliki kekhususan sesuai dengan gambaran umum yang telah dideskripsikan di atas. Berdasarkan konsep MAPS tersebut, pembahasan pertama pada modifikasi dan afiriasi

standar pendidikan nasional yang diterapkan pada PLK pada SMK. Dengan konsep MAPS tersebut harapannya keterlaksanaan PLK pada SMK dapat terlaksana sebagai konsekuensi pemerataan akses pendidikan bagi semua warga negara. Adapun implementasi konsep MAPS pada PLK SMK tersebut dapat disajikan sebagai berikut.



Gambar 4. 37. Bagan MAPS

#### D. MODIFIKASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN UNTUK PLK PADA SMK

Modifikasi adalah pengubahan atau perubahan dari sesuatu yang sudah ada. Dengan demikian pengubahan menjadi salah satu inti pemikiran dan solusi untuk keterlaksanaan PLK pada SMK. Modifikasi dalam PLK SMK terutama berkaitan dengan delapan standar dari SNP, yang meliputi: modifikasi berkaitan dengan standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Selanjutnya bagaimana modifikasi dari delapan standar nasional pendidikan dalam perencanaan, dan implementasinya dalam PLK SMK, diuraikan sebagai berikut.

##### 1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL digunakan sebagai

acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. SKL SMK terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan.

**a. Profil umum lulusan SMK**

- 1) beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur;
- 2) memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan;
- 3) menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
- 4) memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja atau berwirausaha; dan
- 5) berkontribusi dalam pengembangan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global.

Penyusunan area kompetensi lulusan SMK/MAK didasarkan pada tujuan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan:

- 1) karakter dan budaya Indonesia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai Pancasila;
- 2) pembelajaran dan keterampilan abad 21 (dua puluh satu), seperti berfikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, kreatif, mampu bekerja sama, dan berkomunikasi;
- 3) peningkatan kompetensi lulusan melalui literasi bahasa, matematika, sains, teknologi, sosial, budaya, dan kemampuan dasar lainnya yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan masa depan;
- 4) penyiapan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai tenaga terampil tingkat menengah; dan,
- 5) ketentuan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan standar kerja yang berlaku baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 9 (sembilan) area kompetensi lulusan SMK/MAK yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) kebangsaan dan cinta tanah air;
- 3) karakter pribadi dan sosial;
- 4) literasi;
- 5) kesehatan jasmani dan rohani;
- 6) kreativitas;
- 7) estetika;

8) kemampuan teknis (3 atau 4 tahun);

- a) Kemampuan dasar
- b) Kemampuan spesifik
- c) Kemampuan khusus

9) kewirausahaan.

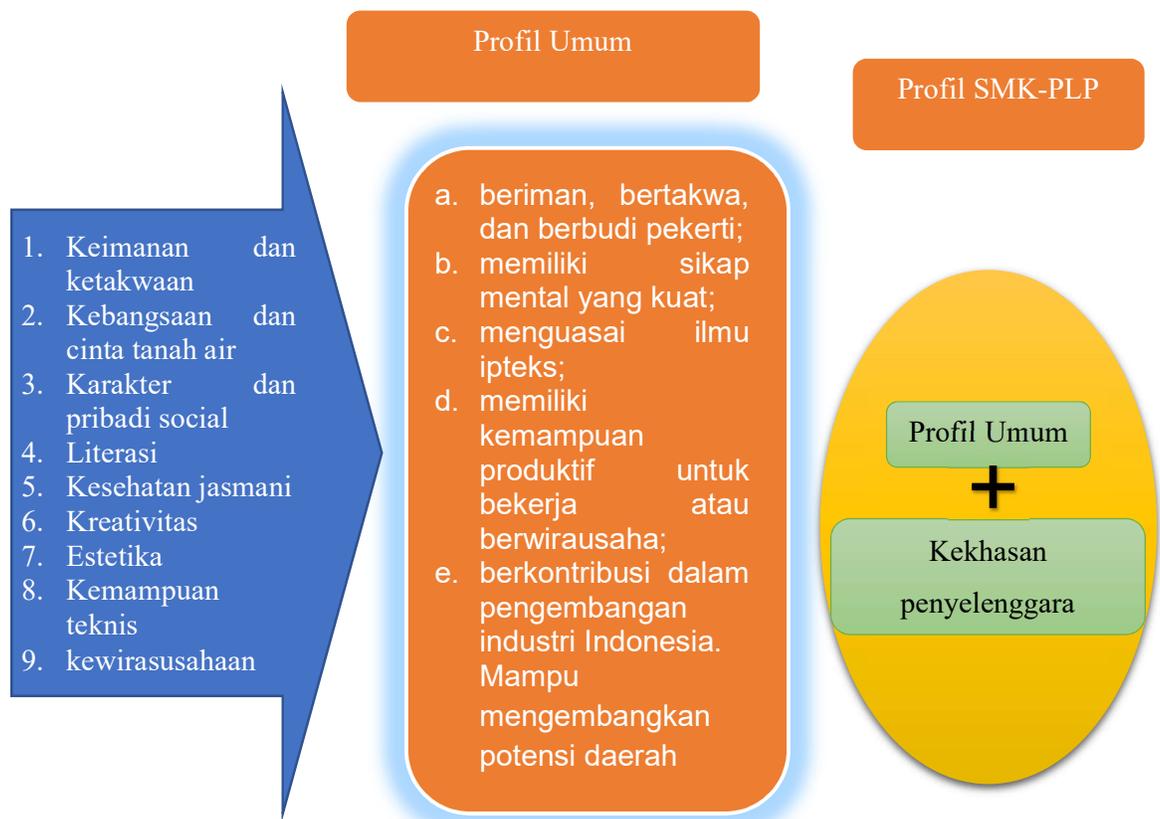
Khusus untuk dimensi sikap, internalisasi nilai-nilai sikap ke dalam diri setiap peserta didik dapat dilakukan melalui strategi: (1) pemberian keteladanan; (2) pemberian nasehat sesuai dengan konteks materi, waktu, dan tempat; (3) penguatan positif dan negatif; (4) pembiasaan; dan (5) pengkondisian.

Gradasi Kompetensi diharapkan dapat memberikan ruang dan kesempatan berkembangnya kompetensi lulusan secara optimal dengan mempertimbangkan lingkungan peserta didik, fungsi satuan pendidikan, kesinambungan, lingkup dan kedalaman materi, serta tahapan perkembangan psikologis peserta didik.

#### **b. Pengembangan Standar Kompetensi lulusan SMK-PLK**

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada jenjang sekolah menengah kejuruan regular sudah jelas standar yang harus dicapai. Oleh karena itu, pengembangan standar kompetensi lulusan PLK SMK tetap merujuk pada standar kompetensi lulusan seperti dalam standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan, akan tetapi harus memperhatikan kondisi dan karakteristik penyelenggaraan PLK SMK. Bagaimana seharusnya standar kompetensi lulusan PLK SMK, maka persentasi keterampilan harus menjadi indikator kompetensi utama. Dengan demikian SKL sebagai target, maka akan berkorelasi dengan muatan standar isi dan juga standar proses pembelajarannya yang lebih menekankan pencapaian keterampilan dibanding tingkat pencapaian kemampuan kognitifnya.

Tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan. Apapun bentuk PLK SMK yang dipilih di suatu daerah, maka Standar Kompetensi Lulusan harus menjadi pijakan dan acuan yang harus dipedomani oleh para pengelolanya. Standar kompetensi lulusan dapat dikelompokkan menjadi kompetensi umum dan kompetensi kejuruan. Dengan demikian SKL dimaksud selain diturunkan dari SKL regular, penyesuaian dengan visi misi dan tujuan dari berdirinya PLK SMK harus benar-benar menjadi perhatian. Dengan mencermati bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian yang dibuka dimana PLK SMK yang ada, maka penetapan kompetensi lulusan harus merujuk dan mempertimbangkan kompetensi lulusan yang berlaku.



Gambar 4. 38. Modifikasi dan afirmasi standar kompetensi lulusan PLK pada SMK

Pengembangan Standar kompetensi lulusan pada PLK SMK perlu menjadi pertimbangan tersendiri, apakah akan disesuaikan dengan sepenuhnya atau adakah yang perlu dikaji ulang. Pertanyaan ini menjadi penting dilakukan bagi penyelenggara PLK SMK. Hal ini dimaksudkan agar tujuan berdirinya PLK SMK dapat tercapai dan sesuai harapan. Dengan demikian walaupun bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian yang dimuka sama, antar PLK SMK namun SKL untuk masing-masing jenis PLK SMK bisa saja berbeda. Hal ini disesuaikan dengan adanya analisis potensi sumber daya, model PLK, daya dukung, dan proyeksi untuk calon alumninya.

## 2. Standar Isi

### a. Standar Nasional

Untuk mencapai kompetensi lulusan maka ditetapkan Standar Isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi

peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan Standar isi dikembangkan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencerminkan profil lulusan yang diharapkan dicapai melalui proses pembelajaran dan aktivitas pada satuan pendidikan. Standar Isi untuk Pendidikan Menengah kejuruan yang selanjutnya disebut Standar Isi terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan SMK. Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar Isi untuk muatan peminatan kejuruan pada SMK/MAK setiap program keahlian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. Pencapaian Kompetensi Inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Perumusan Kompetensi Dasar pada setiap Kompetensi Inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Standar kompetensi lulusan selanjutnya dijabarkan menjadi sub standar kompetensi lulusan agar lebih terukur, dan guna mendukung pencapaiannya dirumuskan ruang lingkup materi untuk masing-masing sub standar kompetensi lulusan tersebut sesuai bidang keahliannya. Sub standar kompetensi lulusan merupakan kemampuan yang harus dipenuhi oleh peserta didik, dan dikembangkan berdasarkan kriteria:

- 1) kemampuan yang diperlukan untuk menunjang sebuah pekerjaan;
- 2) deskripsi jenjang KKNI;
- 3) karakteristik bidang/program; dan
- 4) pengelompokan Kompetensi.

Ruang lingkup materi pada SMK/MAK terdiri atas kelompok muatan umum, kelompok muatan adaptif, dan kelompok muatan kejuruan. Muatan umum sama untuk seluruh bidang keahlian. Muatan adaptif sama untuk semua program keahlian di bidang yang sama. Adapun muatan kejuruan bersifat spesifik untuk masing-masing program keahlian. Khusus untuk kelompok muatan kejuruan dicapai melalui satuan kompetensi yang mengacu pada skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.

#### **b. Struktur Standar Isi Nasional SMK/MAK**

Struktur standar isi terdiri atas area kompetensi, standar kompetensi lulusan, sub standar kompetensi lulusan, dan ruang lingkup materi. Area kompetensi dan

butir standar kompetensi lulusan merupakan bagian dari standar kompetensi lulusan, sedang sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi merupakan bagian inti dari standar isi. Standar isi ini diorganisasikan berdasarkan bidang keahlian dan program keahlian. Secara umum Standar isi ini terdiri atas bagian umum dan bagian kejuruan. Muatan umum untuk suatu bidang keahlian tertentu adalah sama, sedangkan muatan kejuruan secara umum bersifat spesifik untuk masing-masing program keahlian pada bidang keahlian tertentu. Bidang keahlian dalam standar isi ini meliputi;

- 1) bidang teknologi dan rekayasa;
- 2) energi dan pertambangan;
- 3) teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) kesehatan dan pekerjaan sosial;
- 5) agribisnis dan agroteknologi;
- 6) kemaritiman;
- 7) bisnis dan manajemen;
- 8) pariwisata; dan
- 9) seni dan industri kreatif.

No.	Standar Kompetensi Lulusan		Standar Isi		
	Area Kompetensi	Standar Kompetensi Lulusan SMK 3 Tahun	Sub Standar Kompetensi Lulusan	Ruang Lingkup Materi	
9.	Kewirausahaan	9.1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha dengan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam keahlian tertentu.	9.1.1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi peluang usaha dalam bidang geomatika dan geospasial.	c. Prosedur penanganan dan pelaporan keadaan darurat. a. Identifikasi ide/jenis usaha. b. Identifikasi sumber daya. c. Identifikasi pasar dan peluang pemasaran.	
			9.1.2. Memiliki kemampuan memanfaatkan peluang dan sumber daya yang ada untuk bidang geomatika dan geospasial.	a. Pemanfaatan peluang usaha. b. Pemanfaatan peluang promosi usaha. c. Pemanfaatan sumber daya yang ada.	
			9.2. Memiliki kemampuan memperhitungkan dan mengambil resiko dalam mengembangkan dan mengelola usaha.	9.2.1. Memiliki kemampuan analisis pengembangan usaha sesuai bidang geomatika dan geospasial	a. Analisis jenis produk. b. Analisis biaya investasi. c. Analisis harga pulang pokok. d. Analisis sumber daya. e. Analisis pemasaran.
				9.2.2. Memiliki keberanian mengambil resiko usaha sesuai bidang geomatika dan geospasial.	a. Identifikasi resiko usaha. b. Penanganan resiko usaha.
			9.3. Memiliki keinginan kuat dan kemampuan mengelola usaha dengan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam keahlian tertentu.	9.3.1. Memiliki kemampuan mengelola usaha sesuai bidang geomatika dan geospasial.	a. Perijinan usaha. b. Pengelolaan sumber daya. c. Pengelolaan proses produksi. d. Pengelolaan promosi dan pemasaran produk. e. Pengelolaan keuangan.
					9.3.2. Memiliki kemampuan mengoptimalkan usaha dengan pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki

Gambar 4. 39 Penjabaran Antara Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi

Penjabaran sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi ke dalam muatan pembelajaran didistribusikan pada 1 (satu) atau lebih muatan

pembelajaran yang relevan. Namun semua muatan dan sejumlah kegiatan ekstra kurikuler seperti kepramukaan juga harus berkontribusi terhadap pencapaian aspek kejujuran ini.

Sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi setiap muatan pembelajaran untuk setiap kelas pada tingkat dan jenis kompetensi dirumuskan dalam kurikulum SMK/MAK. Selanjutnya sub standar kompetensi lulusan, ruang lingkup materi dan kurikulum tersebut dijabarkan ke dalam buku teks pelajaran.

### c. Pengembangan Standar Isi PLK Pada SMK



Gambar 4. 40. Modifikasi dan afirmasi standar standar isi PLK pada SMK

### 3. Modifikasi Standar Proses

Standar proses pembelajaran SMK/MAK adalah kriteria minimal mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk mencapai kompetensi lulusan. Proses pembelajaran adalah interaksi antara sesama peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan antara peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dalam standar proses, maka prinsip yang berkaitan dengan pembelajaran harus benar-benar memperhatikan perbedaan individual peserta didik antara lain

kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

#### **a. Prinsip Proses Pembelajaran**

Dalam melakukan proses pembelajaran di SMK/MAK, guru/instruktur harus memperhatikan dan menerapkan prinsip pembelajaran sebagai berikut:

##### 1). Prinsip Umum

Prinsip Umum dalam proses pembelajaran SMK/MAK sebagai berikut:

- a) menganut Pembelajaran sepanjang hayat;
- b) menerapkan pendekatan ilmiah;
- c) menerapkan nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarsa sung tuladha), membangun kemauan (ing madya mangun karsa), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);
- d) menerapkan pendekatan pembelajaran tuntas;
- e) memperhatikan keseimbangan antara keterampilan teknis dan nonteknis;
- f) menetapkan jumlah rombongan belajar paling sedikit 3 dan paling banyak 72 dengan jumlah maksimum 36 peserta didik per rombongan belajar.;
- g) menggunakan multisumber belajar;
- h) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- i) menerapkan metode pembelajaran yang mendorong peserta didik lebih aktif, inovatif, kreatif melalui suasana yang menyenangkan dan menantang dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik; dan
- j) menerapkan berbagai model pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dicapai.

##### 2). Prinsip khusus

Prinsip Khusus dalam proses pembelajaran SMK/MAK sebagai berikut:

- a) menekankan pada pengetahuan dan keterampilan aplikatif;
- b) mewujudkan iklim belajar sebagai simulasi dari lingkungan kerja di dunia usaha/industry;
- c) mendasarkan pada pekerjaan nyata, autentik, dan penanaman budaya kerja melalui pembelajaran industri (teaching factory) untuk mendapatkan pembiasaan berpikir dan bekerja dengan kualitas seperti di tempat kerja/usaha.
- d) memperhatikan permintaan pasar;
- e) berlangsung di rumah, di satuan pendidikan, dan di dunia usaha/industry;
- f) melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya untuk memperkuat pembelajaran dengan cara pembimbingan saat PKL dan PSG; dan
- g) menerapkan program Multi Entry Multi Exit dan rekognisi pembelajaran

lampau.

## **b. Proses Pembelajaran di Kelas**

### **1) Perencanaan pembelajaran**

Dalam melakukan perencanaan pembelajaran, Guru membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP dan/atau perangkat pembelajaran lain yang mengacu kepada silabus yang dikembangkan oleh SMK/MAK dan kurikulum. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang juga memuat kerangka konseptual program keahlian dan kompetensi keahlian. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP dikembangkan dari silabus dan bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi.

### **2) Pelaksanaan**

Pelaksanaan Guru/instruktur dalam melaksanakan pembelajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

#### **a) Pendahuluan**

Kegiatan pendahuluan Pada pelaksanaan kegiatan pendahuluan, guru/instruktur:

- 1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- 2) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik;
- 3) melakukan aktivitas yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- 4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai; dan
- 5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

#### **b) Kegiatan inti**

Pada kegiatan inti, Guru/instruktur menggunakan model pembelajaran sesuai karakteristik kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan bahan ajar yang tertuang dalam RPP. Guru/instruktur mendorong peserta didik belajar aktif dengan memberi kesempatan bertanya, menyampaikan ide/gagasan, pendapat, berdiskusi, atau bentuk lain yang memotivasi belajar.

#### **c) Kegiatan penutup**

Pada kegiatan penutup, guru/instruktur dan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok:

- 1) melakukan refleksi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran, hasil dan manfaat yang diperoleh;
- 2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- 3) merencanakan kegiatan tindak lanjut; dan
- 4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

### 3) Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian Proses Pembelajaran merupakan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk perbaikan. Hasil penilaian digunakan untuk merencanakan program perbaikan pembelajaran, pengayaan, dan layanan konseling untuk mengatasi kesulitan belajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a) penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran;
- b) fungsi penilaian sebagai diagnosis untuk perbaikan proses pembelajaran;
- c) tindak lanjut hasil penilaian berupa perbaikan dan pengayaan; dan
- d) berbagai teknik penilaian dapat digunakan seperti penilaian diri, penilaian antar teman, kuis, dan pengamatan.

## c. Pembelajaran Praktik

### 1) Perencanaan

Guru/instruktur menganalisis karakteristik keterampilan yang akan dicapai peserta didik.

### 2) Pelaksanaan

- a) Guru/instruktur memberi contoh dengan melakukan demonstrasi keterampilan kepada peserta didik.
- b) Guru/instruktur memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan keterampilan yang didemonstrasikan guru/instruktur dengan bimbingan.
- c) Peserta didik mengerjakan keterampilan secara mandiri.

## d. Pembelajaran Sistem Blok

### 1). Perencanaan

Dalam melakukan pembelajaran sistem blok guru/instruktur melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) menganalisis skema sertifikasi yang harus dicapai peserta didik;
- b) menguraikan hasil analisis dalam materi pembelajaran; dan
- c) menetapkan waktu, sumberdaya, peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran.

2). Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran sistem blok dapat dilakukan di SMK/MAK, industri, atau secara bergantian di industri dan SMK/MAK sesuai dengan waktu, sumber daya, peralatan, dan bahan yang telah ditetapkan.

3). Penilaian proses pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam subbab A angka 3 dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran.

**e. Pembelajaran pada Pendidikan Sistem Ganda**

1) Perencanaan

Guru/instruktur dari SMK/MAK dan pembimbing dunia kerja membuat perencanaan sistem ganda dengan tahapan sebagai berikut:

- a) melakukan sinkronisasi kompetensi yang akan dicapai berkerjasama dengan dunia kerja;
- b) menyusun modul dan jadwal pembelajaran; dan
- c) membuat rencana pengujian dan sertifikasi.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada PSG dilakukan sebagai berikut:

- a) pembimbing dunia kerja menyampaikan kompetensi yang akan dicapai peserta didik selama praktik kerja;
- b) pembimbing dunia kerja menjelaskan prinsip kerja dan keselamatan kerja;
- c) pembimbing dunia kerja memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melihat dan memperhatikan keterampilan kerja yang dilakukan oleh karyawan; d. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dengan mengikutsertakan pada kelompok kerja karyawan;
- d) peserta didik membantu dunia usaha/industri melakukan pekerjaan keterampilan tertentu; dan
- e) pembimbing dunia usaha/industri melakukan bimbingan kerja terhadap peserta didik untuk mencapai kompetensi kerja.

3) Penilaian

Pembimbing dunia usaha/industri melakukan penilaian yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan format yang disepakati oleh guru/instruktur.

#### f. Pengembangan Standar Proses PLK-SMK

Standar proses pada pendidikan layanan khusus pada PLK SMK sangat mungkin bervariasi. Selain berdasarkan model PLK yang dipilih, standar proses untuk SMK juga sangat berkaitan dengan ketersediaan pendidik, fasilitas, dan juga kemampuan dari peserta didik atau siswanya. Ketersediaan pendidik, tentu akan mempengaruhi keterlaksanaan proses pembelajaran. Begitu pula dengan ketersediaan sarana prasarana yang ada, akan sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Adapun untuk kemampuan peserta didik, maka dimungkinkan akan ada beberapa alternative layanan proses pembelajaran seperti pembelajaran yang berbeda (*differentiation instruction*) dan program pembelajaran individual. Proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran individual menjadi suatu penekanan dalam keterlaksanaan di PLK SMK.

Selama ini banyak sistem layanan pendidikan berkecenderungan menggunakan sistem yang sama. Semua siswa mendapat perlakuan yang sama sehingga pencapaian tujuan pembelajaran kurang maksimal karena kurang memperhatikan heterogenitas potensi anak didik. Anak-anak yang memiliki semangat dan punya tingkat kecerdasan diatas rata-rata tentu akan berbeda dengan anak yang kemampuannya dibawah rata-rata, begitu pula yang memiliki kelainan fisik kurang mendapat perhatian. Sistem dan proses dalam PLK SMK dalam sistem penyelenggaraannya perlu memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya. PLK SMK sebagai salah satu model layanan pendidikan bisa memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi.

Pembelajaran berdiferensiasi (*differentiation instruction*) adalah pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individual, seperti: tingkat kecerdasan, kondisi fisik, perkembangan psikologis, dan kemampuan lain. Pembelajaran berdiferensiasi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya. Walaupun model pembelajaran ini memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan-perbedaan individual anak, namun tidak berarti pembelajaran harus berdasarkan prinsip satu orang guru. Dalam mendiferensiasikan pembelajaran, guru bisa melakukan modifikasi terhadap lima unsur kegiatan belajar, yaitu materi pelajaran, proses, produk, lingkungan dan evaluasi.

Selain pembelajaran berdiferensiasi, standar proses yang mungkin dikembangkan untuk PLK SMK adalah dengan konsep pembelajaran individual, Manusia berbeda-beda bukan hanya dalam ukuran tubuh dan umurnya saja, tetapi juga dalam warna kulit, karakteristik, kesenangan, kebiasaan, kemampuan, minat, dan lain-lain. Bagi dunia pendidikan kenyataan ini mengharuskan perlunya

pendidik mempertimbangkan perbedaan-perbedaan peserta didik ketika merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses dan hasil pembelajaran. Perbedaan kemampuan ada pada sesama siswa, kemampuan yang sangat berbeda dan unik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Implikasi dari perbedaan yang bervariasi dan unik pada siswa termasuk yang berkebutuhan khusus, perlu ada program khusus. Agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal diperlukan bentuk layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan, perkembangan, motivasi, dan sebagainya yang diimplementasikan sesuai dengan model PLK SMK yang ditetapkan.

#### **4. Standar Penilaian**

Standar Penilaian Pendidikan SMK/MAK adalah kriteria minimal mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen Penilaian Hasil Belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Hasil Belajar peserta didik.

- a. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mendeskripsikan capaian belajar peserta didik.
- b. Penilaian Pembelajaran adalah Penilaian Hasil Belajar untuk perbaikan proses pembelajaran.
- c. Kriteria Pencapaian Kompetensi adalah penguasaan kompetensi minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kelulusan.
- d. Penilaian Mandiri adalah proses yang dilakukan oleh peserta didik untuk melihat sejauh mana pencapaian kompetensi diri dibandingkan dengan target kompetensi yang akan dicapai disertai bukti yang sah.
- e. Penugasan adalah proses integrasi antara pembelajaran dan penilaian yang dilakukan untuk mengukur dan mendorong penguasaan kompetensi peserta didik yang dikerjakan di dalam maupun luar kelas secara individu maupun berkelompok.
- f. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- g. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
- h. Ujian Nasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada mata pelajaran tertentu.
- i. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat

- menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- j. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - k. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan (okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.
  - l. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
  - m. Ujian Paket Kompetensi, yang selanjutnya disingkat UPK adalah penilaian terhadap pencapaian beberapa unit kompetensi yang dapat membentuk satu skema sertifikasi okupasi dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan terakreditasi dan/atau lembaga sertifikasi profesi.
  - n. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disingkat UKK adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri dengan memperhatikan paspor keterampilan dan/atau portofolio.
  - o. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Penilaian Hasil Belajar peserta didik dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Sahih, berarti interpretasi hasil penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan peserta didik dalam kaitannya dengan kompetensi yang dinilai sebagaimana diamanatkan oleh Standar Kompetensi Lulusan dan turunannya;
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dalam pemberian interpretasi, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai, dimulai dari pengembangan instrumen penilaiannya sampai dengan analisis hasil penilaian;
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;

- d. Terpadu, berarti penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi dan merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku sesuai tahapan pelaksanaan kurikulum;
- h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran Kriteria Pencapaian Kompetensi yang ditetapkan sesuai Standar Kompetensi Lulusan;
- i. Akuntabel, berarti hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya;
- j. Reliabel, berarti penilaian memberikan hasil yang dapat dipercaya, dan konsisten apabila proses penilaian dilakukan secara berulang dengan menggunakan instrumen setara yang terkalibrasi; dan
- k. Autentik, berarti penilaian didasarkan pada keahlian, materi, atau kompetensi yang dipelajari sesuai dengan norma dan konteks di tempat kerja

### **Pengembangan Standar Penilaian Standar Penilaian SMK-PLK**

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Mekanisme dalam penilaian hasil belajar tentu saja sesuai dengan mekanisme yang ada seperti: penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan; penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah; dan sebagainya.

Oleh karena itu dengan tetap memperhatikan ketercapaian dalam standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses, maka proses penilinan, akan lebih banyak menekankan penilaian yang menguji atas penguasaan keterampilan dibandingkan pada kemampuan kognitifnya. Disamping itu, standar penilaian juga lebih baik dilakukan dengan prinsip asesmen dinamis, dan penilaian portofolio. Dengan demikian penilaian dilakukan dalam proses dan juga hasil. Intinya

modifikasi penilaian dalam layanan PLK SMK, tidak hanya menekankan pada aspek yang mengukur kemampuan kognitif, seperti yang sekarang menjadi target tagihan penilaian tingkat tinggi (HOTs), tetapi kemampuan komprehensif yang lebih menekankan aspek keterampilan, yang mendukung kemampuan kognitif dan aspek spiritual lebih diutamakan.

Dengan kemampuan keterampilan yang dilakukan berkerjasama antara pihak sekolah, mungkin dengan unit produksi atau layanan terdekat, maka keterampilan yang dimiliki peserta didik akan lebih bermakna. Apalagi pilihan bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian yang dibuka dan diselenggarakan benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan dan adanya dukungan masyarakat sekitar. Sebagai konsekuensinya PLK SMK yang dibuka dimungkinkan akan mempunyai mekanisme duka tutup, artinya bila alumninya masih terserap didunia kerja atau mempunyai keterampilan kerja, maka program tersebut masih dinyatakan layak diselenggarakan. Sebaliknya bila program keahlian yang dibuka pada PLK SMK tersebut sudah dirasa jenuh, maka bisa dilakukan analisis untuk menutup dan membuka program keahlian yang lain.

## 5. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. Kompetensi pedagogik
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi profesional; dan
- d. Kompetensi sosial.

Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

### **Standar Kualifikasi Guru**

Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK melalui pendidikan formal Standar kualifikasi akademik guru SMK/MAK adalah jenjang pendidikan sedikitnya yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah sarjana (S1) atau sarjana terapan (D-IV) yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kualifikasi Kompetensi profesional guru kejuruan SMK/MAK mengacu pada kompetensi sebagai guru dan kompetensi kerja yang berlaku di dunia usaha dan industri. Kualifikasi kompetensi kerja guru kejuruan SMK/MAK yang dimaksud pada butir 2 memiliki jenjang 4 (empat) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

### **Standar Kualifikasi Instruktur Kejuruan**

Standar kualifikasi akademik instruktur kejuruan minimal memiliki ijazah SMK/MAK sesuai bidang kejuruan dan memiliki pengalaman kerja pada dunia usaha/industri yang relevan sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun. Kualifikasi instruktur kejuruan dapat juga diperoleh melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Jenjang IV Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian instruktur kejuruan berasal dari Lembaga Sertifikasi yang diakui secara nasional dan/atau internasional.

### **Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK-PLK**

Pengembangan standar pendidik untuk PLK SMK tentu disesuaikan dengan model PLK SMK yang dipilih. Selanjutnya pengembangan standar pendidik termasuk yang menjadi bahan kajian dalam afirmasi. Pengembangan standar pendidik tentu sangat berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya pendidik atau guru yang ada di lingkup dinas pendidikan provinsi atau kabupaten terdekat. Hal ini, juga perlu dipadukan dengan model PLK SMK yang ada dan pusat sumber yang ada atau sekolah mitra yang tersedia.

Dengan berbagai pertimbangan, maka untuk memenuhi kebutuhan atau ketercukupan tenaga pendidik PLK SMK, maka diperlukan adanya afirmasi tenaga pendidik. Afirmasi tenaga pendidik atau guru ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017, bahwa Pasal 10A (1) Setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik yang sudah atau belum memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-IV dan tidak memiliki Sertifikat Pendidik dapat diangkat menjadi Guru.

Sebagai konsekuensi dalam melakukan modifikasi berkaitan dengan tenaga pendidik, maka pihak penyelenggara PLK pada SMK bisa melakukan identifikasi kebutuhan guru yang sudah ada yang memungkinkan dapat mengisi kebutuhan atau formasi yang memang benar-benar memiliki latar belakang pendidik yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan program keahlian yang akan diselenggarakan. Kedua, melakukan analisis berbagai kemungkinan yang dapat diangkat dan berperan sebagai guru sesuai dengan PP 19 tahun 2017 pasal 10A. Sebagai guru dengan keahlian produktif, maka perlu dilakukan suatu perjanjian dan mekanisme pengangkatan, agar keberadaan guru tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, dan tidak menuntut menjadi ASN. Guru yang direkrut tersebut perlu diberikan pembekalan atau mungkin keahlian ganda.

## **6. Standar Sarana dan Prasarana**

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sarana adalah perlengkapan dan pendukung pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Prasarana adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Ruang adalah tempat yang difungsikan untuk pembelajaran teori dan/atau praktik, baik tempat terbuka maupun tempat tertutup.

Dalam rangka mewujudkan amanat tujuan pendidikan kejuruan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran bermutu. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi kriteria minimum yang meliputi:

- a. sarana terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lainnya, dan
- b. prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, serta instalasi daya dan jasa.

Dengan standar sarana dan prasarana ini, SMK/MAK diharapkan mampu mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai perkembangan dunia usaha/industri. Di samping itu, standar ini juga untuk mendukung proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Standar sarana dan prasarana SMK/MAK sekurang-kurangnya mencakup: 1. Standar Lahan; 2. Standar Bangunan; 3. Standar Ruang Pembelajaran Umum; 4. Standar Ruang Praktik/Laboratorium Umum; 5. Standar Ruang Praktik/Laboratorium Keahlian; 6. Standar Ruang Pimpinan dan Administrasi; serta 7. Standar Ruang Penunjang.

Lahan merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat prasarana SMK/MAK meliputi bangunan, lahan praktik, pertamanan, dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Sedangkan bangunan merupakan gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi pendidikan. Ruang pembelajaran umum diperlukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ruang praktik/laboratorium umum untuk meningkatkan kemampuan literasi ilmu-ilmu dasar dan ilmu pengetahuan alam terapan serta kemampuan dasar bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ruang praktik/laboratorium keahlian digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian spesifik yang relevan dengan dunia usaha/industri.

### **Pengembangan Standar Sarana Prasarana SMK-PLK**

Sarana prasarana atau kadang disebut juga fasilitas dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan kelancaran dalam proses dan pencapaian tujuan pendidikan atau pembelajaran. Dengan sarana prasarana yang mendukung maka tujuan penyelenggaraan PLK SMK akan terlaksana dengan baik. Bagaimana dengan pengembangan sarana prasarana untuk PLK SMK tersebut, tentu harus mempertimbangan banyak factor, pertama berkaitan dengan model PLK SMK yang di pilih. Kedua berdasar kepemilikan, ketiga berkaitan dengan perawatan atau pemeliharannya. Sarana pendidikan berdasar jenis barang seperti alat pelajaran, alat peraga, atau media berdasarkan sifat barang sebagai barang habis pakai atau barang bergerak dapat diusahakan oleh pihak penyelenggara.

Sarana pendidikan yang ada sangat mungkin dilakukan dengan melakukan modifikasi dari berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar penyelenggaraan PLK berlangsung. Adapun prasarana yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran hal ini sangat berkaitan dengan model layanan, kebutuhan dan kepemilikannya bisa bersifat pengadaan atau pinjam terlebih dulu. Adapun untuk prasarana yang keberadaannya tidak digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, mungkin dapat adakan secara terpadu seperti sekretariat bersama, bahkan bila mungkin ditempat tokoh masyarakat terdekat, atau belum menjadi prioritas pertama, hal ini dengan memperhatikan situasi dan kondisi lapangan PLK SMK berada dengan membuat beberapa alternative pilihan.

## **7. Standar Pengelolaan**

Pengelolaan SMK/MAK, dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip MBS/M sebagai berikut:

- a. Kemandirian. SMK/MAK berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dalam meningkatkan mutu belajar peserta didik.

- b. Keadilan. SMK/MAK melaksanakan pengelolaan berdasarkan skala prioritas sumber daya SMK/MAK untuk kepentingan peningkatan mutu SMK/MAK dan memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga SMK/MAK untuk ikut meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kapasitas masing-masing.
- c. Keterbukaan. Seluruh warga SMK/MAK dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumberdaya di SMK/MAK dan terjadi penyebarluasan informasi dan kepada masyarakat tentang pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh SMK/MAK.
- d. Kemitraan. SMK/MAK melakukan jalinan kerja sama antara sekolah/madrasah dengan masyarakat, baik individu, kelompok/organisasi maupun dunia usaha/industri, yang dalam hal ini SMK/MAK dan masyarakat dalam posisi sejajar untuk melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk didalamnya bekerjasama dengan komunitas orang tua peserta didik, lembaga pemerintahan, komunitas masyarakat sipil penggiat pendidikan, komunitas keagamaan.
- e. Partisipatif. Keikutsertaan semua pemangku kepentingan/Ekosistem Satuan Pendidikan dalam mengelola satuan pendidikan dan pembuatan keputusan, dapat dilakukan melalui prosedur formal atau insidental dapat berbentuk sumbangan tenaga, dana, dan sarana prasarana, serta bantuan teknis, dan membagikan pengalaman dan praktik baik kepada SMK/MAK berbagai proses atau strategi yang terkait dengan penanaman dan penumbuhan karakter sehingga orangtua juga dapat dijadikan teladan dalam penguatan pendidikan karakter di SMK/MAK.
- f. Efisiensi. SMK/MAK melaksanakan program atau kegiatan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan berdasarkan prioritas.
- g. Akuntabilitas. Pertanggungjawaban pencapaian tujuan SMK/MAK kepada warga SMK/MAK, masyarakat/komite sekolah/madrasah dan Dinas Pendidikan dilakukan secara tertulis

Standar Pengelolaan mencakup berbagai dimensi berikut ini: 1. Sumber daya manusia; 2. Sarana dan Prasarana; 3. Keuangan Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pembiayaan dan pengelolaan pendanaan. Modifikasi standar pengelolaan PLK SMK tentu saja memperhatikan model layanan yang dipilih apakah model SMK kecil, terbuka, terintegrasi atau darurat. Kembali pada pengertian sekolah kecil adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan suatu kelompok masyarakat, maka PLK SMK model ini konsep pengelolannya mirip dengan pengelolaan sekolah regular pada umumnya. PLK SMK dengan mengambil konsep seperti sekolah terbuka, bahwa bentuk satuan pendidikan formal ini berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. Dengan

demikian, konsep pengelolaannya akan mengikuti seperti yang selama ini berlangsung di sekolah terbuka atau bahkan mendekati seperti universitas terbuka. Selanjutnya PLK SMK dengan model terintegrasi yaitu sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen, maka model pengelolaannya mengadopsi pengelolaan sekolah satu atap. Adapun untuk PLK SMK model darurat maka pola pengelolaannya mengikuti sebagaimana situasi bencana alam dan/atau bencana sosial yang bersifat sementara.

Dengan didasarkan atas model-model layanan PLK SMK yang dipilih, maka modifikasi pengelolaannya pun juga akan sangat bervariasi. Modifikasi pengelolaan tersebut tentu akan sangat berbeda antara keempat model yang ada. Sebagai konsekuensi pengelolaan tersebut adalah mulai dari yang berkaitan dengan sumberdaya manusia, atapun sumberdaya pendukung seperti fasilitas, keuangan, pengelolaan peserta didik, sampai dengan pengelolaan hubungan social kemasyarakatannya. Bahkan bisa jadi pengelolaan yang melibatkan tenaga kependidikan dan tenaga pendidiknya. Dengan demikian akan sangat berpengaruh pada kepemimpinan PLK SMKnya dan bentuk supervisinya.

## **8. Standar Pembiayaan**

Biaya Operasi SMK/MAK, yang selanjutnya disebut Biaya Operasi adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi SMK/MAK agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Standar Biaya Operasi adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya Biaya Operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

### **a. Komponen biaya operasi**

- 1) Komponen Biaya Operasi Komponen Biaya Operasi meliputi Biaya Operasi personalia dan Biaya Operasi nonpersonalia.
- 2) Komponen Biaya Operasi Personalia Komponen Biaya Operasi personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

### **b. Komponen Biaya Operasi Nonpersonalia**

- 1) Komponen Biaya Operasi nonpersonalia meliputi biaya pengadaan alat tulis, bahan dan alat habis pakai kegiatan belajar mengajar teori dan praktikum, daya, air, jasa telekomunikasi, konsumsi, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana, biaya lembur, biaya transportasi, pajak, biaya asuransi, biaya kegiatan pembinaan peserta didik/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi/sertifikasi kompetensi, biaya praktik kerja/magang industri, biaya bengkel kerja berbasis industri, serta biaya perencanaan dan pelaporan.

- 2) Besaran Biaya Operasi nonpersonalia pada SMK/MAK dapat berbeda sesuai kebutuhan setiap kompetensi keahlian.

**c. Tanggung Jawab Pemenuhan Pembiayaan**

Standar Biaya Operasi digunakan sebagai acuan bagi satuan pendidikan kejuruan, penyelenggara pendidikan kejuruan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penganggaran dan pengendalian biaya investasi dan Biaya Operasi. Ketentuan pemenuhan pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Biaya investasi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan besarnya biaya investasi dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kementerian terkait.
- 2) Biaya Operasi personalia ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- 3) Biaya Operasi nonpersonalia ditetapkan dan dievaluasi secara periodik oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Pemenuhan Standar Biaya Operasi nonpersonalia menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Pengembangan Standar Biaya SMK-PLK**

Standar pembiayaan adalah dukungan penting untuk keberlangsungan PLK SMK agar dapat berdiri dan menjalankan programnya. Sebagaimana diketahui bahwa standar pembiayaan berkaitan dengan bagaimana mekanisme dan penataan sumber, penggunaan dan juga pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh, dan digunakan untuk penyelenggaraan PLK SMK sesuai dengan modelnya. Standar biaya ini dapat menggunakan asas plafond, dan berdasarkan mata anggaran yang ada dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan juga pengawasan penggunaannya. Berbagai macam biaya satuan pendidikan, satuan penyelenggaraan pendidikan bahkan juga biaya pribadi peserta didik, untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan model bantuan atau hibah. Dengan diikuti monitoring yang terprogram. Dengan adanya bantuan atau hibah dimaksudkan agar, PLK SMK yang dirintis dapat terealisasi dengan baik, atau seridaknya dilakukan melalui program percontohan atau piloting.

**E. AFIRMASI PENGEMBANGAN PLK PADA SMK**

Afirmasi dimaksudkan memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk terlibat langsung sebagai peserta didik. Dengan berbagai keterbatasan dan kondisi yang ada maka memberikan afirmasi pendidikan tentu merupakan satu terobosan yang harus dilakukan. Afirmasi peserta didik mungkin saja berdasarkan umur, lulusan, dan kemampuan prasyarat tidak menjadi pertimbangan yang ketat, hal ini untuk mengakomodasi yang berkebutuhan khusus. Dengan adanya afirmasi ini, perlu ada kelonggaran lulusan jenjang SMP yang bisa diterima, begitu pula dengan lulusan tahun berapa pun dapat diterima. Adapun untuk kemampuan intelektual termasuk calon peserta didik dengan kebutuhan khusus juga perlu diberikan peluang.

Seperti kebijakan yang telah ada, maka afirmasi perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan ini, Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam hal pemerataan kualitas pendidikan. Mereka disiapkan agar memiliki kemampuan belajar yang setara dengan sebagian besar anak-anak SMK pada umumnya. Afirmasi atau pengakuan ini dimaksudkan untuk pertama memberikan akses kepada calon peserta didik, dan yang kedua adalah untuk memberikan pengakuan kepada tenaga pendidik. Bagaimana afirmasi keduanya dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Afirmasi calon siswa**

SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setelah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat. Dengan demikian beberapa persyaratan umum dalam penerimaan sebagai peserta didik baru antara lain. (a) Calon peserta berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. (b) Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP/MTs sederajat. Seperti diketahui peruntukan PLK SMK adalah untuk mawadahi dan memberikan kesempatan kepada warga negara usia sekolah untuk memperoleh akses pendidikan. Untuk afirmasi calon siswa dapat dilakukan bberapa perubahan ata penyesuaian. Beberapa penyesuaian persyaratan calon siswa yang perlu ada pertimbangan seperti:

- a. Usia tidak harus di bawah 21 tahun pada tanggal 1 Juli berjalan;
- b. Tidak harus memiliki ijazah, tetapi bisa dengan surat tanda tamat belajar atau sejenisnya;
- c. Proses pendaftaran bisa dilakukan melalui berbagai tempat atau media.
- d. Khusus calon peserta didik penyandang disabilitas juga dikecualikan dari syarat usia serta ijazah atau dokumen lain.

Sebagai penjelasan untuk afirmasi calon peserta didik berkebutuhan khusus, maka dapat menggunakan beberapa istilah seperti yang digunakan dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 32 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ataupun dalam UU Disabilitas No 8 tahun 2016. Pasal 1 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

jangka waktu lama. Pasal 4 (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Selanjutnya afirmasi atau kesempatan pendidikan di PLK pada SMK untuk penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus antara lain: 1) anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh (total) atau sebagian (low vision). 2 .Anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian ataupun menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.3.Anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada dibawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa perkembangan. 4. Anak disabilitas fisika dalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak. 5.Anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang. 6.Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) atau *attention deficit and hyperactivity disorder* (ADHD) adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan, yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa ganggguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas, yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berfikir, dan mengendalikan emosi. 7. Anak dengan gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorders (ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam tiga area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial,serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotipi. 8. Anak lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik. 9. Anak dengan kesulitan belajar khusus atau *specific learning disabilities* adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja dan berhitung.10.Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis dan lingkungan, baik reseptif maupun ekspresif. 11. Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah anak yang memiliki skor inteligensi yang tinggi (gifted), atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus (talented) seperti musik, seni, olah raga, dan kepemimpinan, dan sebagainya.

Dari berbagai kondisi penyandang disabilitas, maka afirmasi yang diberikan dengan memperhatikan jenis keahlian yang ditawarkan pada PLK SMK setempat. Dengan demikian untuk tahap awal tidak berarti semua penyandang disabilitas harus langsung diterima, tetapi pelayanan dalam proses pendidikannya tidak terlayani. Sebagai missal, untuk anak dengan hambatan pendengaran atau penyandang tuna rungu dapat diterima di PLK SMK dengan

keahlian yang mengedepankan pada fungsi penglihatan, missal pertanian, perkebunan, perikanan atau sepeda motor.

## **2. Afirmasi tenaga pendidik**

Tenaga pendidik atau guru akan menjadi motor penggerak keterlaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Bila mengacu pada standar kualifikasi akademik guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, maka mereka harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Namun sesuai dengan kondisi geografis yang ada, untuk PLK SMK maka kemungkinan ketercukupan tenaga pendidikan yang benar-benar memenuhi persyaratan tersebut akan mengalami banyak kesulitan.

Dengan berbagai pertimbangan, maka untuk memenuhi kebutuhan atau ketercukupan tenaga pendidik PLK SMK, maka diperlukan adanya afirmasi tenaga pendidik. Afirmasi tenaga pendidik atau guru ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017, bahwa Pasal 10A (1) Setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik yang sudah atau belum memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-IV dan tidak memiliki Sertifikat Pendidik dapat diangkat menjadi Guru.

## F. PROYEKSI PENGEMBANGAN PLK PADA SMK DI DAERAH TERTINGGAL

Pembagian bisa dilakukan berdasarkan wilayah, ataupun berdasarkan faktor lain yang memiliki kesamaan.

### 1. Wilayah Barat

#### a. Kabupaten Nias

Kabupaten Nias terletak di Provinsi Sumatera Utara. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Nias sangat tinggi (62,65%). Jumlah SMK di Nias sebanyak 16 SMK yang terdiri dari 14 SMK Negeri dan 2 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Nias termasuk baik (1:13). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (141) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (40). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Nias.

Tabel 4. 14. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Nias

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	139862
2	Jumlah Penduduk 2019	143319
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	691
4	Pertumbuhan ekonomi	0,47

Tabel 4. 15 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nias

1	Jumlah SMK	16
2	Jumlah guru	282
3	Jumlah siswa	3653
4	Rasio guru dan siswa	1 : 13
5	Jumlah kelas baik	40
6	Jumlah kelas rusak	141
7	APM	62,65
8	APK	97,48

Sebaran lokasi SMK di kabupaten Nias sudah cukup tersebar dengan baik.



Gambar 4. 41. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Nias

Potensi SDA di Kabupaten Nias adalah perikanan, perkebunan, dan pertanian. Kabupaten Nias merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah dekat pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Nias sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 676 Siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 525 Siswa, Manajemen Perkantoran 496 Siswa. Program keahlian yang ditawarkan SMK di Kabupaten Nias perlu lebih dioptimalkan supaya lebih sesuai dengan potensi SDA yang ada.

Berdasarkan data-data tersebut, potensi SMK untuk memberikan Pendidikan Layanan Khusus dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan ruang kelas yang ada ataupun menambah jumlah SMK baru di daerah tersebut.

#### **b. Nias Selatan**

Kabupaten Nias Selatan terletak di Provinsi Sumatera Utara. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Nias Selatan sangat tinggi (62,32%). Jumlah SMK di Nias Selatan sebanyak 48 SMK yang terdiri dari 34 SMK Negeri dan 14 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Nias Selatan termasuk baik (1:10). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (358) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (36). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk

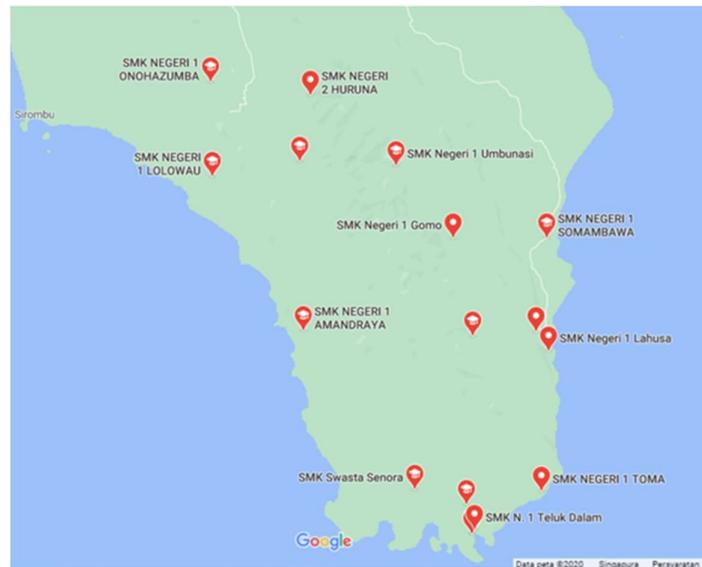
berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 4. 16 Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Nias Selatan

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	139862
2	Jumlah Penduduk 2019	143319
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	691
4	Pertumbuhan ekonomi	0,47

Tabel 4. 17 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nias Selatan

1	Jumlah SMK	48
2	Jumlah guru	765
3	Jumlah siswa	7272
4	Rasio guru dan siswa	10
5	Jumlah kelas baik	36
6	Jumlah kelas rusak	358
7	APM	69,32
8	APK	103,77



Gambar 4. 42. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Nias Selatan

Potensi SDA di Kabupaten Nias Selatan adalah peternakan, pariwisata, kelautan dan perikanan, perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah dekat pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Nias Selatan sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 1326 siswa, Administrasi Perkantoran 853 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hotel 814 siswa. Program keahlian yang ditawarkan SMK di Kabupaten Nias perlu lebih dioptimalkan supaya lebih sesuai dengan potensi SDA yang ada.

Berdasarkan data-data tersebut, potensi SMK untuk memberikan Pendidikan Layanan Khusus dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan ruang kelas yang ada ataupun menambah jumlah SMK baru di daerah tersebut.

### c. Nias Utara

Kabupaten Nias Utara terletak di Provinsi Sumatera Utara. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Nias Utara sangat tinggi (53,91%). Jumlah SMK di Nias Utara sebanyak 23 SMK yang terdiri dari 20 SMK Negeri dan 3 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Nias Utara termasuk baik (1:12). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (152) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (30). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten

Nias Utara. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Nias Utara juga sudah cukup tersebar dengan baik.

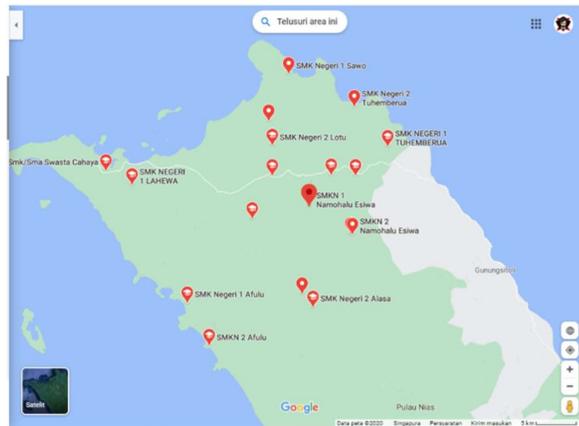
Tabel 4. 18. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Nias Utara

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	132735
2	Jumlah Penduduk 2019	137967
3	Rata-rata penambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1046
4	Pertumbuhan ekonomi	0,43

Tabel 4. 19 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nias Utara

1	Jumlah SMK	23
2	Jumlah guru	379
3	Jumlah siswa	4367
4	Rasio guru dan siswa	1 : 12
5	Jumlah kelas baik	30
6	Jumlah kelas rusak	152
7	APM	53,91
8	APK	75,12

Potensi SDA di Kabupaten Nias Utara adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sedangkan Kabupaten Nias Utara merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Nias Utara sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 757 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hotel 538 siswa, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 387 siswa. Program keahlian yang ditawarkan SMK di Kabupaten Nias Utara perlu lebih dioptimalkan supaya lebih sesuai dengan potensi SDA yang ada.



Gambar 4. 43. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Nias Utara

SMK di kabupaten Nias Utara dapat berkontribusi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan mengkampanyekan kesadaran pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Jumlah guru yang masih cukup banyak dibandingkan dengan jumlah siswa perlu difasilitasi dengan perbaikan ruang kelas sehingga dapat menampung peserta didik yang lebih banyak. Data penelitian menunjukkan bahwa penambahan ruang kelas yang layak dapat memberikan sumbangan peningkatan angka partisipasi sekolah sebesar 7%.

#### d. Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara

Kabupaten Nias Barat terletak di Provinsi Sumatera Utara. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Nias Barat sangat tinggi (76,19%). Jumlah SMK di Nias Barat sebanyak 13 SMK yang terdiri dari 12 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Nias Barat termasuk baik (1:10). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (110) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (24). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Nias. Barat

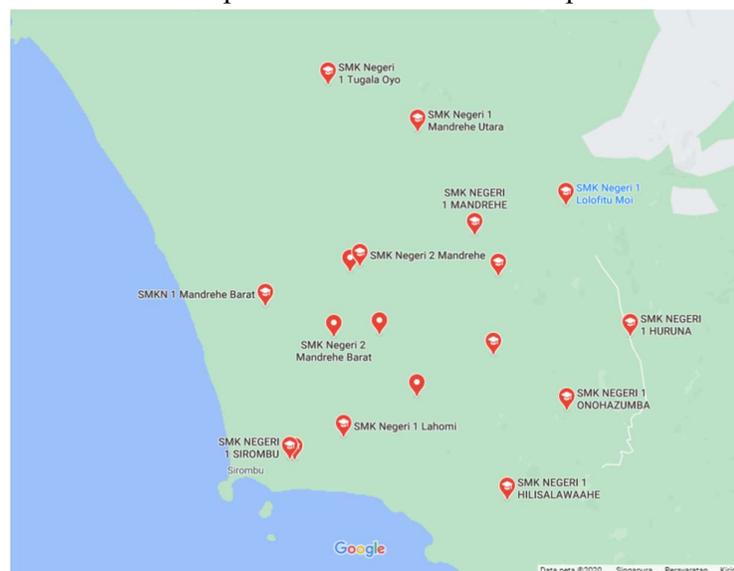
Tabel 4. 20. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Nias Barat

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	79876
2	Jumlah Penduduk 2019	82154
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	456
4	Pertumbuhan ekonomi	0,22

Tabel 4. 21. Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nias Barat

1	Jumlah SMK	13
2	Jumlah guru	215
3	Jumlah siswa	2154
4	Rasio guru dan siswa	1 : 10
5	Jumlah kelas baik	24
6	Jumlah kelas rusak	110
7	APM	76,19
8	APK	103,35

Sebaran lokasi SMK di kabupaten Nias Barat sudah cukup tersebar dengan baik.



Gambar 4. 44. Peta sebaran SMK di Kabupaten Nias Barat

Kabupaten Nias Barat merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Nias Barat sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 368 siswa, Teknik Komputer dan Informatika 270 siswa, Otomatisasi dan Tata kelola Perkantoran 256 siswa. Permasalahan yang menyebabkan angka partisipasi murni masyarakat menempuh jenjang pendidikan menengah atas adalah akses pendidikan yang cukup sulit karena kondisi geografis wilayah.

Berdasarkan data-data tersebut, potensi SMK untuk memberikan Pendidikan Layanan Khusus dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan ruang kelas yang ada ataupun menambah jumlah SMK baru di daerah tersebut.

#### e. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat

Daerah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat merupakan salah satu dari daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (52,02%). Jumlah SMK di Kepulauan Mentawai yaitu 3 SMK yang semuanya termasuk SMK Negeri.

Rasio Guru dan Siswa SMK di Kepulauan Mentawai termasuk baik (1:6). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (15) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (6). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

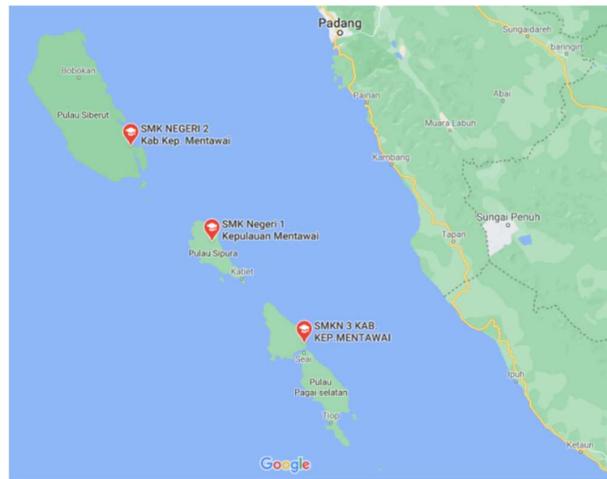
Tabel 4. 22. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Mentawai

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	83603
2	Jumlah Penduduk 2019	92021
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1684
4	Pertumbuhan ekonomi	1,88

Tabel 4. 23. Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Mentawai

1	Jumlah SMK	3
2	Jumlah guru	74
3	Jumlah siswa	466
4	Rasio guru dan siswa	1 : 6
5	Jumlah kelas baik	6
6	Jumlah kelas rusak	15
7	APM	52,02
8	APK	101,73

Sebaran lokasi SMK di Kepulauan Mentawai terdistribusi dengan baik, yaitu terdapat 1 SMK di tiap pulau. Akan tetapi jumlah SMK yang ada masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah Kepulauan Mentawai (6,011 KM<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk tahun 2019 (92,021 Jiwa).



Gambar 4. 45. Peta sebaran SMK di Kepulauan Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk kepulauan. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Kepulauan Mentawai sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut 69 siswa, Perhotelan 53 siswa, Perhotelan dan Jasa Parawisata 48 siswa. Program keahlian yang ditawarkan SMK di Kepulauan Mentawai sudah sesuai dengan potensi SDA yang ada.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kepulauan Mentawai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah 8,418 atau 2,08% per tahun. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, perlu diupayakan untuk menambah jumlah SMK yang ada di Kepulauan Mentawai serta melakukan perbaikan atau penambahan terhadap ruang kelas yang ada.

#### f. Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara terletak di Provinsi Sumatera Utara. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk rendah (50,12%). Jumlah SMK di Musi Rawas Utara sebanyak 2 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Musi Rawas Utara termasuk baik (1:16). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (5) dan ruang kelas yang kondisinya baik (21). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka

partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Musi Rawas Utara juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 24. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	180266
2	Jumlah Penduduk 2019	192199
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2387
4	Pertumbuhan ekonomi	1,6

Tabel 4. 25. Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Musi Rawas Utara

1	Jumlah SMK	2
2	Jumlah guru	50
3	Jumlah siswa	803
4	Rasio guru dan siswa	1 : 16
5	Jumlah kelas baik	21
6	Jumlah kelas rusak	5
7	APM	50,12
8	APK	78,83



Gambar 4. 46. Sebaran lokasi SMK di Musi Rawas Utara

Potensi SDA di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan (karet dan sawit), pertambangan (minyak, gas, batubara, emas, perak, tembaga, besi, timah hitam, dan seng), peternakan (kambing dan domba), dan pariwisata. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Informasi 253 siswa, Rekayasa Perangkat Lunak 169 siswa, Teknik Komputer dan Jaringan 133 siswa. Dengan ini maka program keahlian yang ditawarkan SMK di Kabupaten Musi Rawas Utara perlu lebih dioptimalkan atau menambah SMK dengan program keahlian yang relevan supaya lebih sesuai dengan potensi SDA yang ada.

#### **g. Kabupaten Pesisir Barat, Lampung**

Kabupaten pesisir barat, Lampung merupakan salah satu dari daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (65,03%).

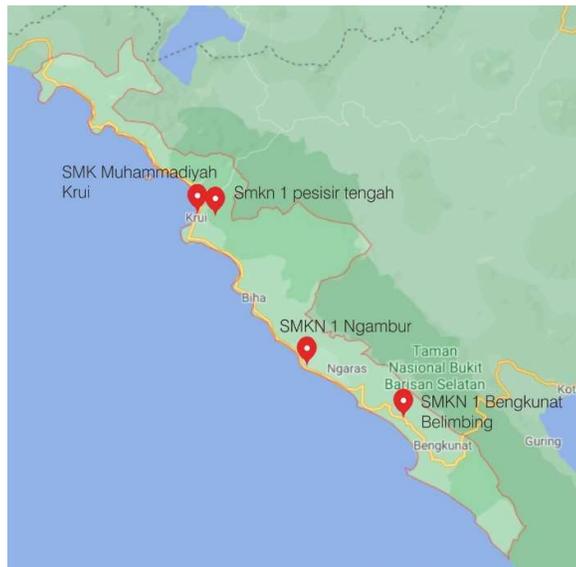
Tabel 4. 26. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	148412
2	Jumlah Penduduk 2019	154895
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1297
4	Pertumbuhan ekonomi	1,27

Tabel 4. 27 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Pesisir Barat

1	Jumlah SMK	4
2	Jumlah guru	137
3	Jumlah siswa	2002
4	Rasio guru dan siswa	1 : 15
5	Jumlah kelas baik	0
6	Jumlah kelas rusak	18
7	APM	65,03
8	APK	89,22

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Pesisir Barat adalah sulitnya akses untuk masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kabupaten. Sebaran lokasi SMK di kabupaten Pesisir Barat juga kurang bagus. Hal ini disebabkan 3 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta yang ada di kabupaten Pesisir Barat lokasinya mengumpul dan cenderung berdekatan di pusat Kabupaten (Kota Krui). Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Barat yang sempit dan memanjang di pinggir pantai, menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah jauh dari sekolah memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih bekerja di ladang atau perkebunan. Rasio jumlah guru dan siswa SMK di Kabupaten Pesisir Barat juga termasuk dalam kategori yang baik (1:15), hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan tenaga pendidik mencukupi, akan tetapi perlu diperhatikan tingkat ketersebarannya. Selain itu, jumlah ruang kelas yang rusak (15) lebih banyak dibandingkan dengan yang memiliki kondisi baik (0).



Gambar 4. 47. Peta sebaran SMK di Kabupaten Pesisir barat

Program Keahlian yang ditawarkan di SMK yang ada di Kabupaten Pesisir Barat adalah Administrasi Perkantoran, Akutansi dan Keuangan, Akutansi dan Keuangan Lembaga, Akomodasi Perhotelan, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Manajemen Perkantoran, Pelayaran Kapal Niaga, Nautika Kapal Niaga, Perhotelan dan Jasa Pariwisata, Perikanan, Agribisnis perikanan air tawar, Teknik dan bisnis sepeda motor, Teknik Kendaraan Ringan otomotif, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, dan Teknik kendaraan ringan. Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Kepulauan Mentawai sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 375 siswa, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 354 siswa, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 272 siswa

Berdasarkan informasi dari Guru SMK yang mengajar di SMKN 1 Pesisir Barat, peluang kerja bagi lulusan yang besar adalah di sektor Perkapalan. Potensi sumber daya alam (SDA) yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat terdapat pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Program keahlian yang ditawarkan di SMK-SMK di kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan potensi yang ada, akan tetapi, data jumlah siswa SMK tersebut menunjukkan banyak siswa SMP ataupun masyarakat yang cenderung memilih kompetensi keahlian di SMK berdasarkan tingkat popularitasnya dan belum memikirkan tingkat kebermanfaatan lulusannya.

Mempertimbangkan data-data yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, salah satu strategi yang perlu dilakukan oleh SMK untuk memberikan Pendidikan Layanan khusus dalam rangka meningkatkan akses pendidikan tingkat menengah atas yaitu dengan

mendirikan SMK di daerah kecamatan yang jumlah penduduknya besar, akan tetapi belum ada SMKnya. Alternatif lainnya yaitu dengan melakukan perubahan SMA menjadi SMK dengan mempertimbangkan faktor yang menunjukkan minat masyarakat untuk masuk ke SMK cukup tinggi. Selain itu, pihak SMK perlu lebih kuat dalam melakukan promosi program-program keahlian yang sesuai dengan potensi SDA di Kabupaten Pesisir Barat serta memiliki potensi keberkerjaan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan guru SMK yang bersedia ditempatkan di daerah tertinggal, disarankan untuk memberikan beasiswa bagi masyarakat setempat untuk di didik dengan perjanjian kembali mengabdikan di daerah asal.

## 2. Wilayah Tengah

### a. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

Daerah Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu dari daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk sangat tinggi (79,18%). Jumlah SMK di Kepulauan Mentawai yaitu 13 SMK terdiri dari 6 SMK Negeri dan 7 SMK swasta.

Rasio Guru dan Siswa SMK di kabupaten Lombok Utara termasuk baik (1:14). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (91) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (27). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Kabupaten Lombok Utara.

Tabel 4. 28. Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	210133
2	Jumlah Penduduk 2019	220412
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2056
4	Pertumbuhan ekonomi	3,57

Tabel 4. 29. Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Lombok Utara

1	Jumlah SMK	13
2	Jumlah guru	238
3	Jumlah siswa	3386
4	Rasio guru dan siswa	1 : 14
5	Jumlah kelas baik	27
6	Jumlah kelas rusak	91
7	APM	79,18
8	APK	112,71

Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Lombok Utara terdistribusi dengan baik.



Gambar 4. 48. Peta sebaran SMK di Lombok Utara

Potensi SDA di Kabupaten Lombok Utara adalah perikanan, kelautan, perkebunan, dan pariwisata. Sedangkan Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Lombok Utara sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 385 siswa, Tata Boga 375 siswa, Perhotelan 332 siswa. Dengan ini maka program keahlian yang ditawarkan SMK di Kabupaten Lombok Utara perlu lebih dioptimalkan atau menambah SMK dengan program keahlian yang relevan supaya lebih sesuai dengan potensi SDA yang ada.

Minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke SMK juga lebih dibandingkan dengan SMA. Salah satunya dibuktikan dengan perubahan SMA Negeri 2 Tanjung menjadi SMKN 2 Tanjung yang menyebabkan jumlah siswa meningkat. Pada saat masih SMA, jumlah input rata-rata siswa adalah 10 siswa per tahun, akan tetapi dengan perubahan yang ada sekarang membuat jumlah input meningkat menjadi 20 siswa per tahun.

Mempertimbangkan data-data yang ada di Kabupaten Lombok Utara, salah satu strategi yang perlu dilakukan oleh SMK untuk memberikan Pendidikan Layanan khusus dalam rangka meningkatkan akses pendidikan tingkat menengah atas yaitu dengan perubahan SMA menjadi SMK dengan mempertimbangkan faktor yang menunjukkan minat masyarakat untuk masuk ke SMK cukup tinggi.

#### **b. Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur**

Daerah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (58,19%). Jumlah SMK di Kabupaten Sumba Barat yaitu 7 SMK Negeri, tanpa adanya SMK swasta.

Rasio Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Sumba Barat termasuk baik (1:14). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang baik (65) dibandingkan dengan yang kondisinya rusak (48). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Sumba Barat.

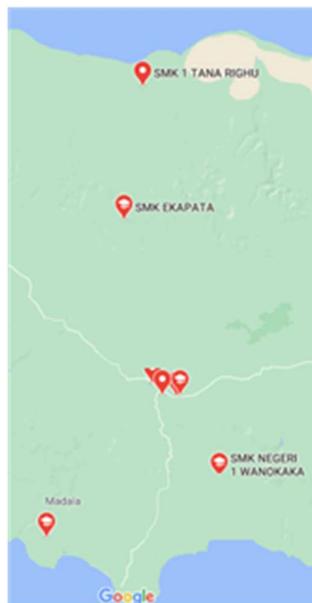
Tabel 4. 30 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sumba Barat

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	119907
2	Jumlah Penduduk 2019	129710
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1961
4	Pertumbuhan ekonomi	2,15

Tabel 4. 31 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sumba Barat

1	Jumlah SMK	7
2	Jumlah guru	202
3	Jumlah siswa	2861
4	Rasio guru dan siswa	1 : 14
5	Jumlah kelas baik	65
6	Jumlah kelas rusak	48
7	APM	58,19
8	APK	102,46

Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Sumba Barat terdistribusi dengan baik.



Gambar 4. 49. Sebaran lokasi SMK di Sumba Barat

Kabupaten Sumba Barat merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Sumba Barat sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Perhotelan dan Jasa Parawisata 342 siswa, Perhotelan 314 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 249 siswa

### c. Sumba Timur

Daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (63,77%). Jumlah SMK di Kabupaten Sumba Barat yaitu 8 SMK Negeri dan 1 SMK swasta.

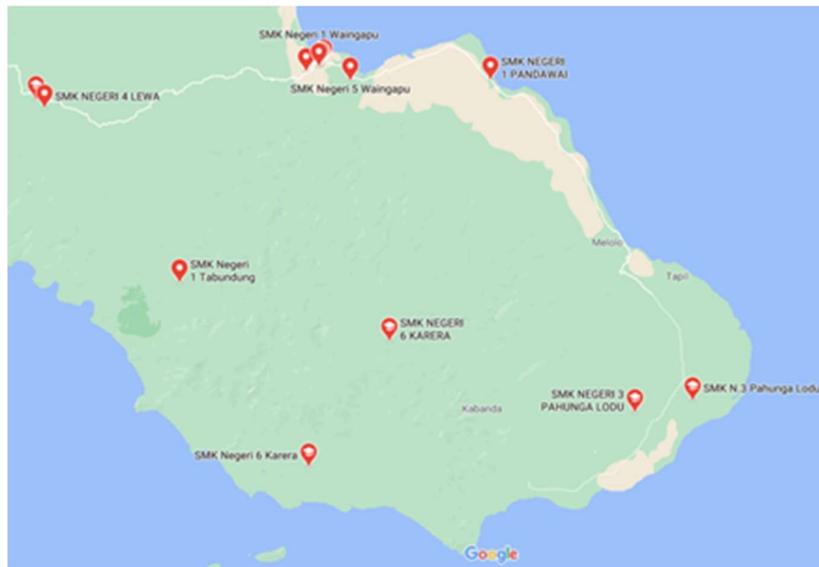
Rasio Guru dan Siswa SMK di Kabupaten Sumba Barat termasuk baik (1:14). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang baik (58) dibandingkan dengan yang kondisinya rusak (55). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Sumba Barat.

Tabel 4. 32 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sumba Timur

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	243009
2	Jumlah Penduduk 2019	258486
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	3095
4	Pertumbuhan ekonomi	5,8

Tabel 4. 33 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sumba Timur

1	Jumlah SMK	9
2	Jumlah guru	207
3	Jumlah siswa	2843
4	Rasio guru dan siswa	1 : 14
5	Jumlah kelas baik	58
6	Jumlah kelas rusak	55
7	APM	63,77
8	APK	95,92



Gambar 4. 50. Sebaran lokasi SMK di Sumba Timur

Kabupaten Sumba Timur merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Sumba Timur sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 199 siswa, Argribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 184 siswa, Teknik Otomotif 164 siswa

#### d. Kupang

Kabupaten Kupang terletak di Nusa Tenggara Timur. Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah sangat tinggi (90,42%). Jumlah SMK di Kabupaten Kupang yaitu 14 SMK Negeri dan 10 SMK swasta.

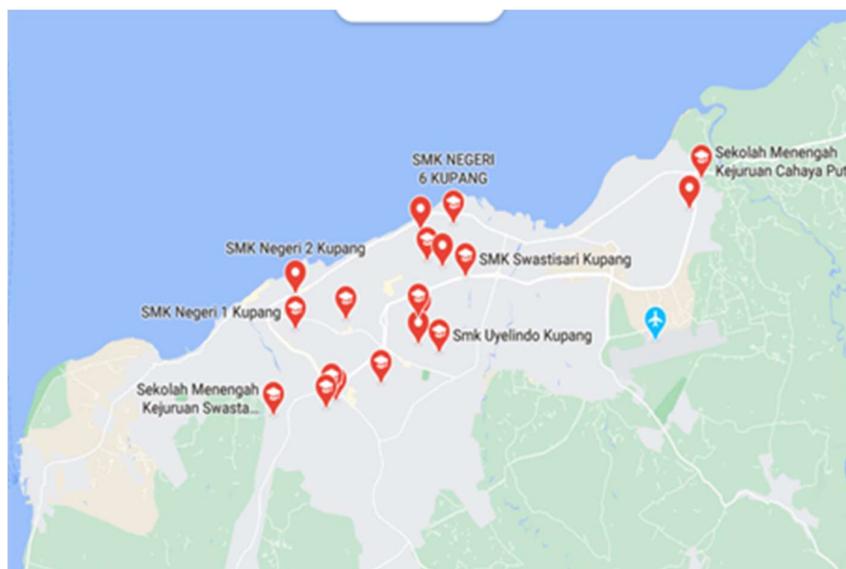
Rasio Guru dan Siswa SMK di kupang termasuk baik (1:14). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (96) dan ruang kelas yang kondisinya baik (198). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Kupang. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten kupang juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 34 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Kupang

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	338415
2	Jumlah Penduduk 2019	403582
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	13033
4	Pertumbuhan ekonomi	7,08

Tabel 4. 35 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Kupang

1	Jumlah SMK	24
2	Jumlah guru	732
3	Jumlah siswa	10360
4	Rasio guru dan siswa	1 : 14
5	Jumlah kelas baik	198
6	Jumlah kelas rusak	96
7	APM	90,42
8	APK	119,2



Gambar 4. 51. Sebaran lokasi SMK di Kupang

Kabupaten Kupang merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Kupang sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 870 siswa, Akuntansi dan Keuangan Lembaga 533 siswa, Multimedia 403 siswa

#### e. Timor Tengah Selatan

Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak di Nusa Tenggara Timur Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (53,96%). Jumlah SMK di Timor Tengah Selatan yaitu 11 SMK Negeri dan 14 SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Timor Tengah Selatan termasuk baik (1:14). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (178) dan ruang kelas yang kondisinya baik (44).

Tabel 4. 36. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	456152
2	Jumlah Penduduk 2019	467990
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2368
4	Pertumbuhan ekonomi	7,33

Tabel 4. 37 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Timor Tengah Selatan

1	Jumlah SMK	25
2	Jumlah guru	428
3	Jumlah siswa	5839
4	Rasio guru dan siswa	1 : 14
5	Jumlah kelas baik	44
6	Jumlah kelas rusak	178
7	APM	53,96
8	APK	79,74



Gambar 4. 52. Sebaran lokasi SMK di Timor Tengah Selatan

Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Timor Tengah Selatan juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Timor Tengah Selatan sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 387 siswa, Teknik Komputer dan Informatika 359 siswa, Teknik Komputer dan Jaringan 308 siswa

#### f. Belu

Kabupaten Belu terletak di Nusa Tenggara Timur Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk sangat tinggi (78,99%). Jumlah SMK di Kabupaten Belu yaitu 7 SMK Negeri dan 3 SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Belu termasuk baik (1:14). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (48) dan ruang kelas yang kondisinya baik (86). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Belu. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Belu juga sudah cukup tersebar dengan baik

Tabel 4. 38 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Belu

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	203284
2	Jumlah Penduduk 2019	220115
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	3366
4	Pertumbuhan ekonomi	4,18

Tabel 4. 39 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Belu

1	Jumlah SMK	10
2	Jumlah guru	268
3	Jumlah siswa	3819
4	Rasio guru dan siswa	1 : 14
5	Jumlah kelas baik	86
6	Jumlah kelas rusak	48
7	APM	78,99
8	APK	117,87



Gambar 4. 53. Sebaran lokasi SMK di Belu

Kabupaten Belu merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Belu sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Tata Busana 456 siswa, Teknik Komputer dan Informatika 293 siswa, Teknik Komputer dan Jaringan 272 siswa

**g. Alor**

Kabupaten Alor terletak di Nusa Tenggara Timur Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk rendah (51,32%). Jumlah SMK di Kabupaten Alor yaitu 13 SMK Negeri dan 1 SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Alor termasuk baik (1:7). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (106) dan ruang kelas yang kondisinya baik (27). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Alor. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Alor juga sudah cukup tersebar dengan baik

Tabel 4. 40 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Alor

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	198200
2	Jumlah Penduduk 2019	205599
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1480
4	Pertumbuhan ekonomi	2,82

Tabel 4. 41 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Alor

1	Jumlah SMK	14
2	Jumlah guru	327
3	Jumlah siswa	2391
4	Rasio guru dan siswa	1:7
5	Jumlah kelas baik	27
6	Jumlah kelas rusak	106
7	APM	51,32
8	APK	81,87



Gambar 4. 54. Sebaran lokasi SMK di Alor

Kabupaten Alor merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah kepulauan. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Alor sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 241 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 152 siswa, Teknik Komputer dan Informasi 164 siswa

#### **h. Lembata**

Kabupaten Lembata terletak di Nusa Tenggara Timur Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (58,43%). Jumlah SMK di Kabupaten Lembata yaitu 5 SMK Negeri dan 5 SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Lembata termasuk baik (1:10). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (64) dan ruang kelas yang kondisinya baik (32). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Lembata. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Lembata juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 42 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Lembata

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	129482
2	Jumlah Penduduk 2019	143074
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2718
4	Pertumbuhan ekonomi	1,71

Tabel 4. 43 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Lembata

1	Jumlah SMK	10
2	Jumlah guru	181
3	Jumlah siswa	1818
4	Rasio guru dan siswa	1:10
5	Jumlah kelas baik	32
6	Jumlah kelas rusak	64
7	APM	58,43
8	APK	100,49



Gambar 4. 55. Sebaran lokasi SMK di Lembata

Kabupaten Lembata merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Lembata sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Otomotif 128 siswa, Agribisnis Ternak Unggas 122 siswa, Teknik Kendaraan Ringan 116 siswa

### i. Rote Ndao

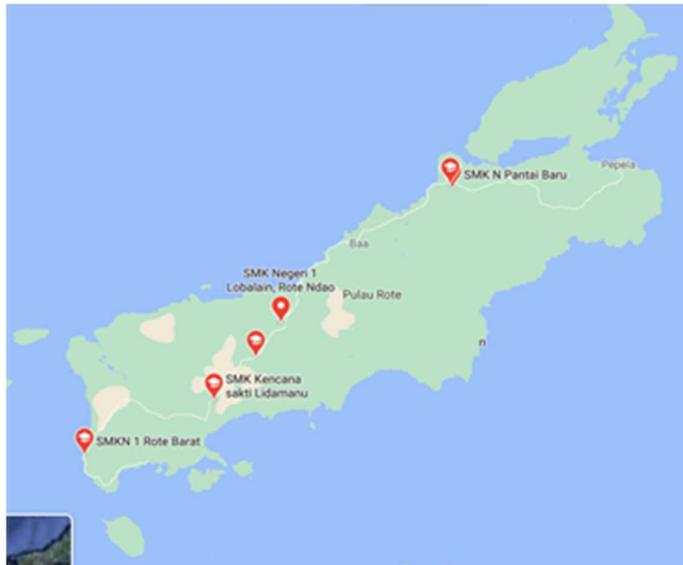
Kabupaten Rote Ndao terletak di Nusa Tenggara Timur Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (61,16%). Jumlah SMK di Kabupaten Rote Ndao yaitu 3 SMK Negeri dan 2 SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Rote Ndao termasuk baik (1:9). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (30) dan ruang kelas yang kondisinya baik (39). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Rote Ndao a. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Rote Ndao juga sudah cukup tersebar dengan baik

Tabel 4. 44 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Rote Ndao

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	142106
2	Jumlah Penduduk 2019	172104
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	6000
4	Pertumbuhan ekonomi	2,89

Tabel 4. 45 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Rote Ndao

1	Jumlah SMK	5
2	Jumlah guru	139
3	Jumlah siswa	1270
4	Rasio guru dan siswa	1:9
5	Jumlah kelas baik	39
6	Jumlah kelas rusak	30
7	APM	61,16
8	APK	91,19



Gambar 4. 56. Sebaran lokasi SMK di Rote Ndao

Kabupaten Rote Ndao merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Rote Ndao sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 225 siswa, Teknik Komputer dan Informatika 145 siswa, Nautika Kapal Penangkap Ikan 115 siswa

#### **j. Sumba Tengah**

Kabupaten Sumba Tengah terletak di Nusa Tenggara Timur Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (68,93%). Jumlah SMK di Kabupaten Sumba Tengah yaitu 3 SMK Negeri dan tidak ada SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Rote Ndao termasuk baik (1:10). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (16) dan ruang kelas yang kondisinya baik (39). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Sumba Tengah juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 46 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sumba Tengah

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	67393
2	Jumlah Penduduk 2019	72800
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1081
4	Pertumbuhan ekonomi	1,08

Tabel 4. 47 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sumba Tengah

1	Jumlah SMK	3
2	Jumlah guru	102
3	Jumlah siswa	1053
4	Rasio guru dan siswa	1:10
5	Jumlah kelas baik	39
6	Jumlah kelas rusak	16
7	APM	68,93
8	APK	106,79



Gambar 4. 57. Sebaran lokasi SMK di Sumba Tengah

Kabupaten Sumba Tengah merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Sumba Tengah sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Argibisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 147 siswa, Agribisnis Ternak Unggas 111 siswa, Argribisnis Ternak 96 siswa, Perikanan 96 siswa

#### k. Sumba Barat Daya

Kabupaten Sumba Barat Daya terletak di Nusa Tenggara Timur Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk rendah (51,79%). Jumlah SMK di Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu 10 SMK Negeri dan 25 SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Sumba Barat Daya termasuk baik (1:19). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (212) dan ruang kelas yang kondisinya baik (88).

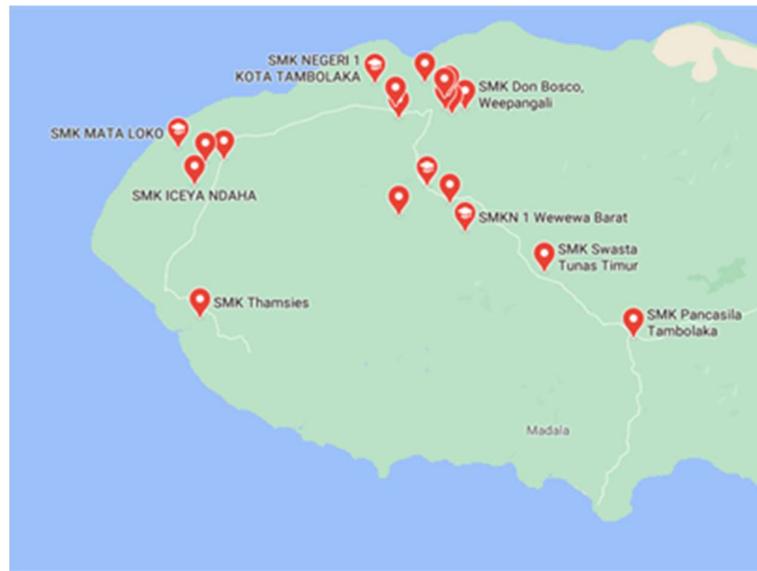
Tabel 4. 48 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sumba Barat Daya

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	312510
2	Jumlah Penduduk 2019	344720
3	Rata-rata penambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	6442
4	Pertumbuhan ekonomi	3,45

Tabel 4. 49 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sumba Barat Daya

1	Jumlah SMK	35
2	Jumlah guru	469
3	Jumlah siswa	8919
4	Rasio guru dan siswa	1:19
5	Jumlah kelas baik	88
6	Jumlah kelas rusak	212
7	APM	51,79
8	APK	94,28

Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Sumba Barat Daya juga sudah cukup tersebar dengan baik



Gambar 4. 58. Sebaran lokasi SMK di Sumba Barat Daya

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Sumba Barat Daya sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Keperawatan 1222 siswa, Teknik Komputer dan Jaringan 788 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 655 siswa

### **1. Manggarai Timur**

Kabupaten Manggarai Timur terletak di Nusa Tenggara Timur Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (59,57%). Jumlah SMK di Kabupaten Manggarai Timur yaitu 9 SMK Negeri dan 3 SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Manggarai Timur termasuk baik (1:18). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (88) dan ruang kelas yang kondisinya baik (38). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten

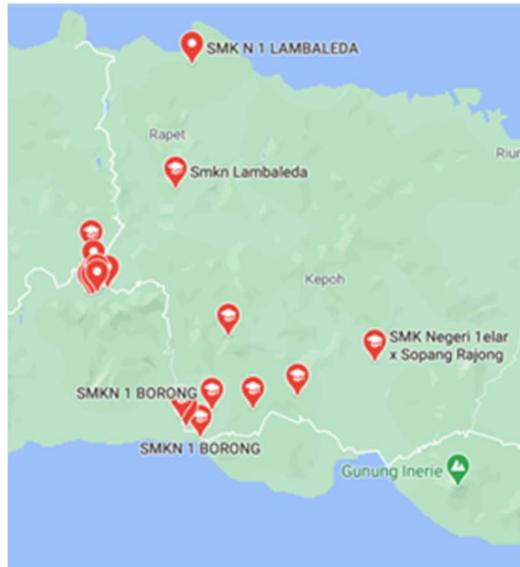
Manggarai Timur. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Manggarai Timur juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 50 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Manggarai Timur

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	268418
2	Jumlah Penduduk 2019	287207
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	3758
4	Pertumbuhan ekonomi	2,96

Tabel 4. 51 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Manggarai Timur

1	Jumlah SMK	12
2	Jumlah guru	228
3	Jumlah siswa	3991
4	Rasio guru dan siswa	1:18
5	Jumlah kelas baik	38
6	Jumlah kelas rusak	88
7	APM	59,57
8	APK	105,58



Gambar 4. 59. Sebaran lokasi SMK di Manggarai Timur

Kabupaten Manggarai Timur merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Manggarai Timur sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 565 siswa, Perhotelan dan Jasa Pariwisata 504 siswa, Teknik Komputer dan Informatika 487 siswa, Teknuk Komputer dan Jaringan 487 siswa

### **m. Sabu Raijua**

Kabupaten Sabu Raijua terletak di Nusa Tenggara Timur Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (69,58%). Jumlah SMK di Kabupaten Sabu Raijua yaitu 2 SMK Negeri dan tidak ada SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Sabu Raijua termasuk baik (1:18). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (20) dan ruang kelas yang kondisinya baik (39). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Sabu Raijua juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 52 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sabu Raijua

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	83501
2	Jumlah Penduduk 2019	97379
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2776
4	Pertumbuhan ekonomi	1,3

Tabel 4. 53 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sabu Raijua

1	Jumlah SMK	2
2	Jumlah guru	63
3	Jumlah siswa	484
4	Rasio guru dan siswa	1:8
5	Jumlah kelas baik	39
6	Jumlah kelas rusak	20
7	APM	69,58
8	APK	102,4

Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah Kepulauan. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Sabu Raijua sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 80 siswa, Teknik Komputer dan Informatika 55 siswa, Argribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 38 siswa, Teknik Audio Video 38 siswa



Gambar 4. 60. Sebaran lokasi SMK di Sabu Raijua

#### n. Malaka

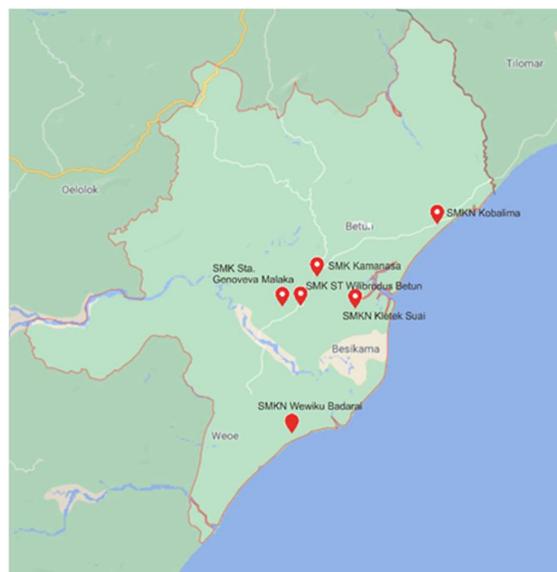
Kabupaten Malaka terletak di Nusa Tenggara Timur Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk rendah (41%). Jumlah SMK di Kabupaten Malaka yaitu 4 SMK Negeri dan 2 SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Malaka termasuk baik (1:10). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (33) dan ruang kelas yang kondisinya baik (39). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Malaka. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Malaka juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 54 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Malaka

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	177398
2	Jumlah Penduduk 2019	191892
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2899
4	Pertumbuhan ekonomi	2,57

Tabel 4. 55 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Malaka

1	Jumlah SMK	6
2	Jumlah guru	126
3	Jumlah siswa	1226
4	Rasio guru dan siswa	1:10
5	Jumlah kelas baik	39
6	Jumlah kelas rusak	33
7	APM	41
8	APK	64,22



Gambar 4. 61. Sebaran lokasi SMK di Malaka

Kabupaten Malaka merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Malaka sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Informatika 154 siswa, Teknik Komputer dan Jaringan 153 siswa, Agribisnis Ternak 102 siswa

#### o. Donggala

Kabupaten Donggala terletak di Sulawesi Tengah Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (67,5%). Jumlah SMK di Kabupaten Donggala yaitu 11 SMK Negeri dan 2 SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Donggala termasuk baik (1:14). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (90) dan ruang kelas yang kondisinya baik (60).

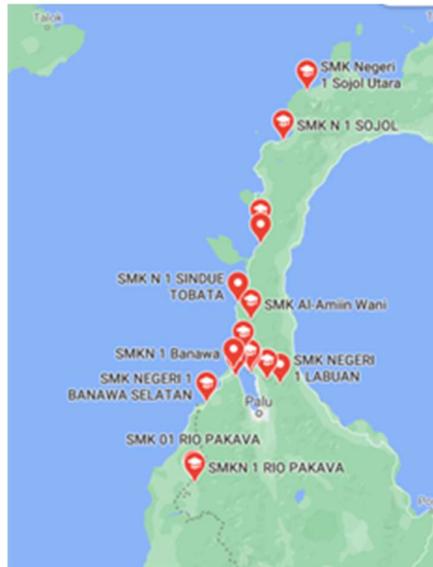
Tabel 4. 56 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Donggala

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	290900
2	Jumlah Penduduk 2019	304110
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2642
4	Pertumbuhan ekonomi	7,54

Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Donggala. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Donggala juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 57 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Donggala

1	Jumlah SMK	13
2	Jumlah guru	252
3	Jumlah siswa	3415
4	Rasio guru dan siswa	1:14
5	Jumlah kelas baik	60
6	Jumlah kelas rusak	90
7	APM	67,5
8	APK	91,08



Gambar 4. 62. Sebaran lokasi SMK di Donggala

Kabupaten Donggala merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Donggala sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 615 siswa, Teknik Komputer dan Informatika 366 siswa, Agribisnis Tanaman Perkebunan 236 siswa

**p. Tojo Una-una**

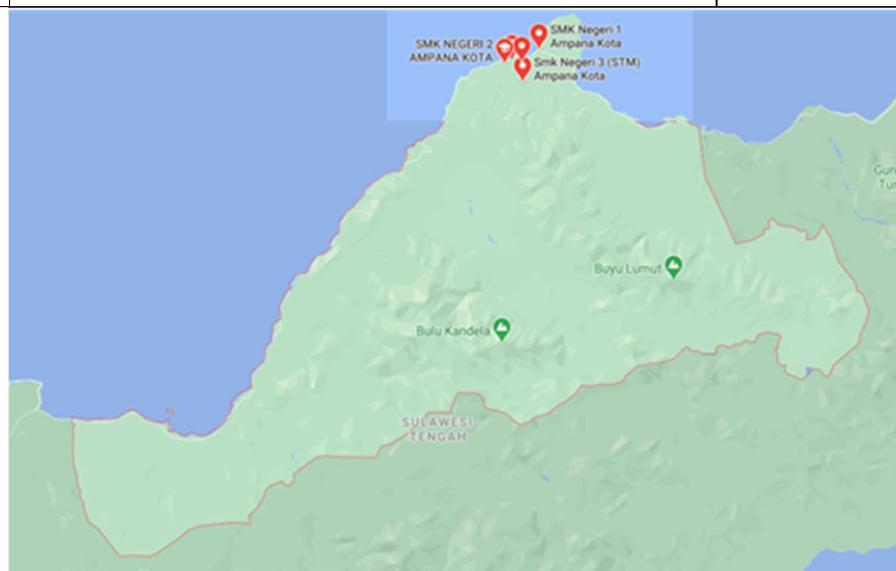
Kabupaten Tojo Una-una terletak di Sulawesi Tengah Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (54,59%). Jumlah SMK di Kabupaten Tojo Una-una yaitu 6 SMK Negeri dan 1 SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Tojo Una-una termasuk baik (1:14). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (53) dan ruang kelas yang kondisinya baik (47). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Tojo Una-una. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Tojo Una-una juga sudah cukup tersebar dengan baik

Tabel 4. 58 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Tojo Una-una

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	145800
2	Jumlah Penduduk 2019	153990
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1638
4	Pertumbuhan ekonomi	3,53

Tabel 4. 59 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Tojo Una-una

1	Jumlah SMK	7
2	Jumlah guru	174
3	Jumlah siswa	2479
4	Rasio guru dan siswa	1:14
5	Jumlah kelas baik	47
6	Jumlah kelas rusak	53
7	APM	54,59
8	APK	81,41



Gambar 4. 63. Sebaran lokasi SMK di Tojo Una-una

Kabupaten Tojo Una-una merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Tojo Una-una sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Informatika 394 siswa, Multimedia 272 siswa, Teknik Komputer dan Jaringan 240 siswa

#### q. Sigi

Kabupaten Sigi terletak di Sulawesi Tengah Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah atas termasuk tinggi (61,59%). Jumlah SMK di Kabupaten Sigi yaitu 5 SMK Negeri dan 6 SMK swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Sigi termasuk baik (1:11). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang rusak (40) dan ruang kelas yang kondisinya baik (38).

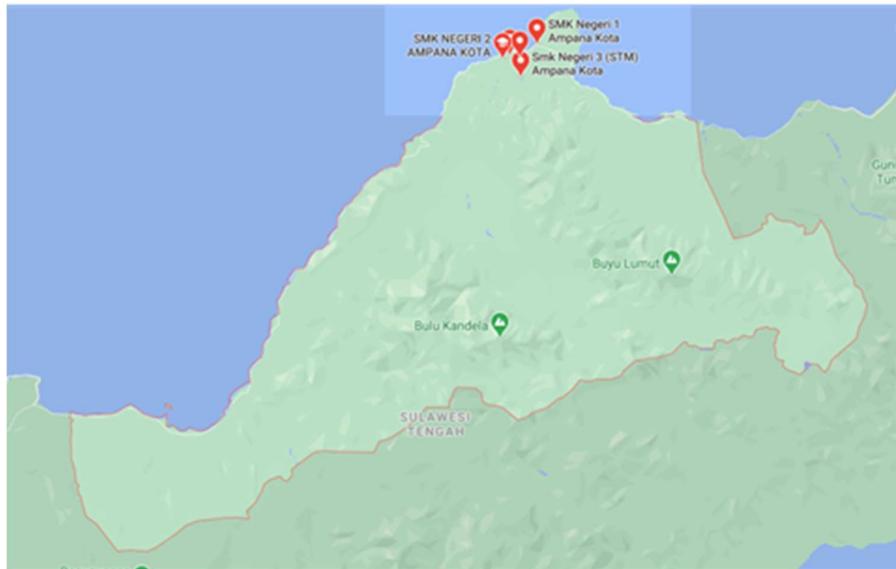
Tabel 4. 60 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sigi

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	226900
2	Jumlah Penduduk 2019	239420
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2504
4	Pertumbuhan ekonomi	5,57

Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Sigi. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Sigi juga sudah cukup tersebar dengan baik

Tabel 4. 61 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sigi

1	Jumlah SMK	11
2	Jumlah guru	171
3	Jumlah siswa	1927
4	Rasio guru dan siswa	1:11
5	Jumlah kelas baik	38
6	Jumlah kelas rusak	40
7	APM	61,59
8	APK	86,7



Gambar 4. 64. Sebaran lokasi SMK di Sigi

Kabupaten Sigi merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Sigi sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 323 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 196 siswa, Teknik Komputer dan Informatika 190 siswa

### **3. Wilayah Timur**

#### **a. Maluku Tenggara**

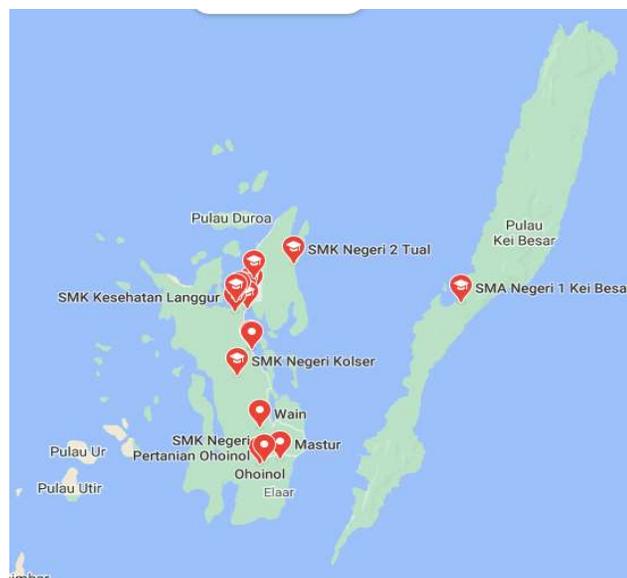
Kabupaten Maluku Tenggara terletak di Provinsi Maluku. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Maluku Tenggara sangat tinggi (77,29%). Jumlah SMK di Maluku Tenggara sebanyak 10 SMK yang terdiri dari 3 SMK Negeri dan 7 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Nias Utara termasuk baik (1:9). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (70) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (37). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Maluku Tenggara juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 62 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Maluku Tenggara

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	98474
2	Jumlah Penduduk 2019	99790
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	263
4	Pertumbuhan ekonomi	6,85

Tabel 4. 63 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Maluku Tenggara

1	Jumlah SMK	10
2	Jumlah guru	200
3	Jumlah siswa	1725
4	Rasio guru dan siswa	9
5	Jumlah kelas baik	37
6	Jumlah kelas rusak	70
7	APM	77,29
8	APK	114,61



Gambar 4. 65. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Maluku Tenggara

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan Kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk kepulauan. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Maluku Tenggara sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer Jaringan sebanyak 203 siswa, Keperawatan sebanyak 159 siswa, Teknik Komputer & Informatika sebanyak 88 siswa

#### **b. Kepulauan Aru**

Kabupaten Kepulauan Aru terletak di Provinsi Maluku. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Kepulauan Aru Tenggara sangat tinggi (80,99%). Jumlah SMK di Kepulauan Aru sebanyak 6 SMK yang terdiri dari 2 SMK Negeri dan 4 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Kepulauan Aru termasuk baik (1:13). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (20) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (38).

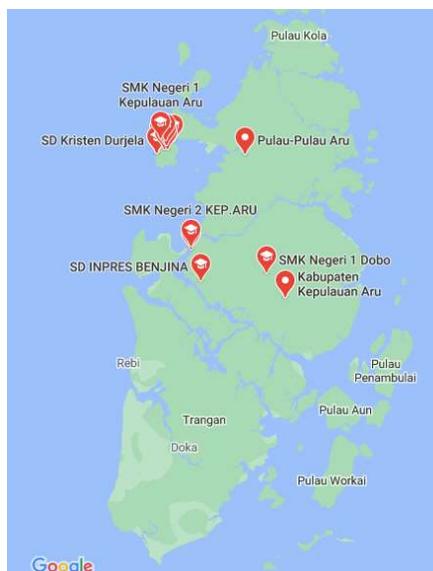
Tabel 4. 64 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Kepulauan Aru

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	89995
2	Jumlah Penduduk 2019	96114
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1224
4	Pertumbuhan ekonomi	7,45

Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Kepulauan Aru juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 65 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Kepulauan Aru

1	Jumlah SMK	6
2	Jumlah guru	120
3	Jumlah siswa	1511
4	Rasio guru dan siswa	13
5	Jumlah kelas baik	38
6	Jumlah kelas rusak	20
7	APM	80,99
8	APK	111,61



Gambar 4. 66. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Kepulauan Aru

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk kepulauan. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Kepulauan Aru sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Nautika Kapal Penangkap Ikan sebanyak 147 siswa, Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 159 siswa, Teknik Komputer & Informatika sebanyak 110 siswa.

### c. Seram Bagian Barat

Kabupaten Seram Bagian Barat terletak di Provinsi Maluku. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Seram Bagian Barat sangat tinggi (84,38%). Jumlah SMK di Seram Bagian Barat sebanyak 14 SMK yang terdiri dari 12 SMK Negeri dan 2 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Seram Bagian Barat termasuk baik (1:7). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (64) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (46). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Seram Bagian Barat juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 66 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Seram Bagian Barat

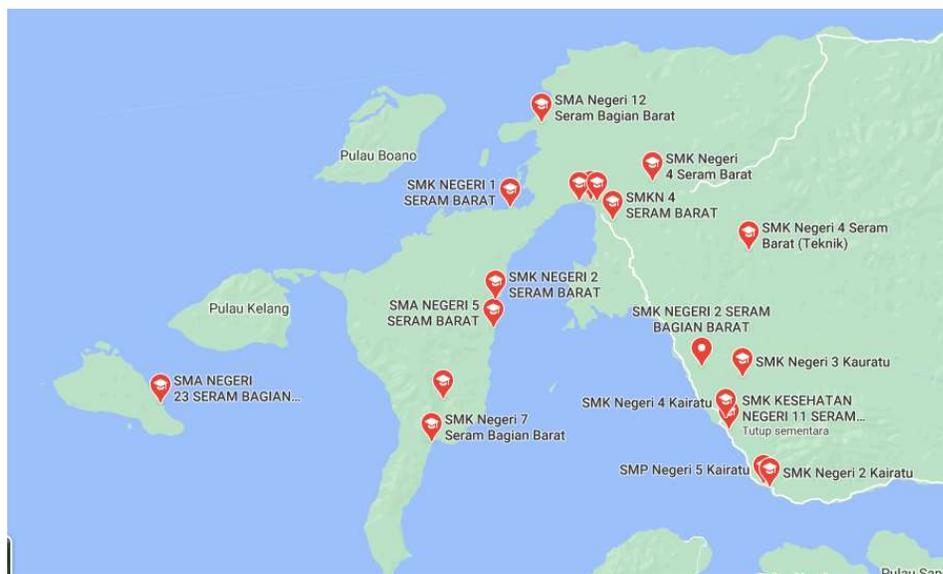
No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	168829
2	Jumlah Penduduk 2019	171586
3	Rata-rata penambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	551
4	Pertumbuhan ekonomi	6,44

Tabel 4. 67 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Seram Bagian Barat

1	Jumlah SMK	14
2	Jumlah guru	225
3	Jumlah siswa	1607
4	Rasio guru dan siswa	7
5	Jumlah kelas baik	46
6	Jumlah kelas rusak	64
7	APM	84,38
8	APK	106,46

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk kepulauan. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Seram Bagian Barat sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah

siswa paling banyak adalah Nautika Kapal Penangkap Ikan sebanyak 212 siswa, Asisten Keperawatan sebanyak 155 siswa, Teknik Komputer & Jaringan sebanyak 117 siswa.



Gambar 4. 67. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Seram Bagian Barat

#### d. Seram Bagian Timur

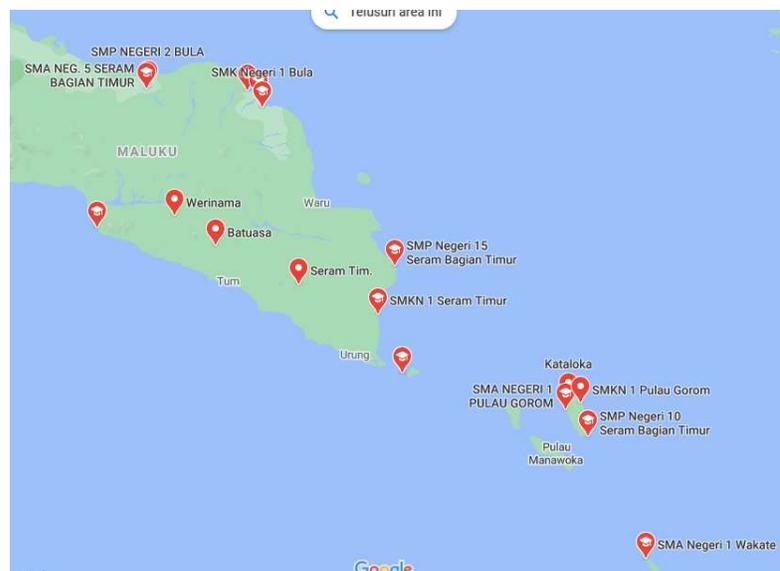
Kabupaten Seram Bagian Timur terletak di Provinsi Maluku. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Seram Bagian Timur sangat tinggi (74,05%). Jumlah SMK di Seram Bagian Timur sebanyak 8 SMK yang terdiri dari 7 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Seram Bagian Timur termasuk baik (1:14). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (26) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (28). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Seram Bagian Timur juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 68 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Seram Bagian Timur

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	106698
2	Jumlah Penduduk 2019	114677
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1596
4	Pertumbuhan ekonomi	6,53

Tabel 4. 69 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Seram Bagian Timur

1	Jumlah SMK	8
2	Jumlah guru	83
3	Jumlah siswa	1134
4	Rasio guru dan siswa	14
5	Jumlah kelas baik	28
6	Jumlah kelas rusak	26
7	APM	74,05
8	APK	95,89



Gambar 4. 68. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk daerah dekat pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Seram Bagian timur sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura sebanyak 315 siswa, Agribisnis Tanaman sebanyak 120 siswa, Manajemen perkantoran sebanyak 89 siswa

#### e. Maluku Barat Daya

Kabupaten Maluku Barat Daya terletak di Provinsi Maluku. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk tinggi (57,83%). Jumlah SMK di Maluku Barat Daya sebanyak 9 SMK yang terdiri dari 8 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Maluku Barat Daya termasuk baik (1:10). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (29) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (12). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Maluku Barat Daya juga sudah cukup tersebar dengan baik.



Gambar 4. 69. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Maluku Barat Daya

Tabel 4. 70 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Maluku Barat Daya

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	72010
2	Jumlah Penduduk 2019	73103
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	219
4	Pertumbuhan ekonomi	3,5

Tabel 4. 71 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Maluku Barat Daya

1	Jumlah SMK	9
2	Jumlah guru	84
3	Jumlah siswa	858
4	Rasio guru dan siswa	1:10
5	Jumlah kelas baik	12
6	Jumlah kelas rusak	29
7	APM	57,83
8	APK	76,03

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk kepulauan. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Maluku Barat Daya sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Nautika Kapal Penangkap Ikan sebanyak 133 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura sebanyak 125 siswa, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan sebanyak 68 siswa

#### f. Buru Selatan

Kabupaten Buru Selatan terletak di Provinsi Maluku. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Buru Selatan sangat tinggi (73,79%). Jumlah SMK di Buru Selatan sebanyak 10 SMK yang terdiri dari 10 SMK Negeri dan tidak ada SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Buru Selatan termasuk baik (1:10). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (31) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (31). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Buru Selatan. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Buru Selatan juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 72 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Buru Selatan

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	58197
2	Jumlah Penduduk 2019	63328
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1026
4	Pertumbuhan ekonomi	2,99

Tabel 4. 73 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Buru Selatan

1	Jumlah SMK	10
2	Jumlah guru	111
3	Jumlah siswa	1067
4	Rasio guru dan siswa	1:10
5	Jumlah kelas baik	31
6	Jumlah kelas rusak	41
7	APM	73,79
8	APK	101,88



Gambar 4. 70. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Buru Selatan

Kabupaten Buru Selatan merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk kepulauan. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Buru Selatan sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Perikanan sebanyak 119 siswa, Administrasi Perkantoran sebanyak 91 siswa, Multimedia sebanyak 117 siswa

### g. Kepulauan Sula

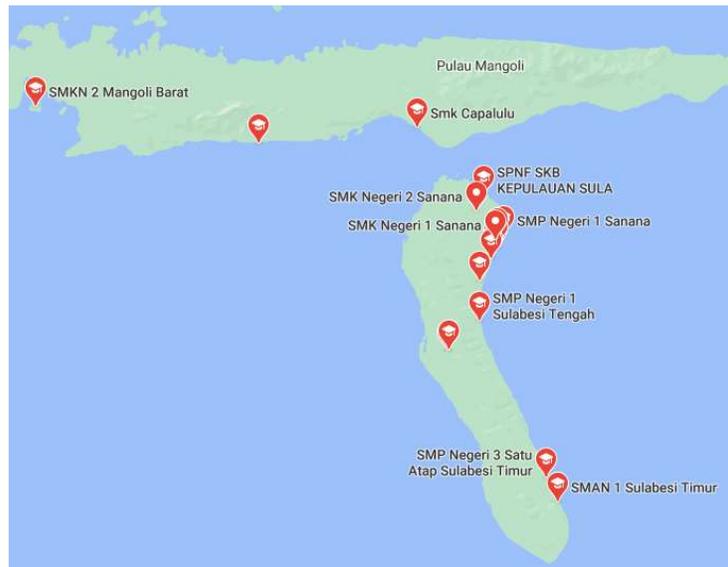
Kabupaten Kepulauan Sula terletak di Provinsi Maluku Utara. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Kepulauan Sula sangat tinggi (71,19%). Jumlah SMK di Kepulauan Sula sebanyak 16 SMK yang terdiri dari 14 SMK Negeri dan 2 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Kepulauan Sula termasuk baik (1:10). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (76) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (57). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Kepulauan Sula juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 74 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Kepulauan Sula

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	93435
2	Jumlah Penduduk 2019	102886
3	Rata-rata penambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1890
4	Pertumbuhan ekonomi	6,26

Tabel 4. 75 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Kepulauan Sula

1	Jumlah SMK	16
2	Jumlah guru	186
3	Jumlah siswa	1927
4	Rasio guru dan siswa	1:10
5	Jumlah kelas baik	57
6	Jumlah kelas rusak	76
7	APM	71,19
8	APK	96,43



Gambar 4. 71. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Kepulauan Sula

Kabupaten Kepulauan Sula merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk kepulauan. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 255 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura sebanyak 213 siswa, Keperawatan sebanyak 169 siswa

#### **h. Pulau Taliabu**

Kabupaten Pulau Taliabu terletak di Provinsi Maluku Utara. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pulau Taliabu sangat tinggi (72,6%). Jumlah SMK di Pulau Taliabu sebanyak 7 SMK yang terdiri dari 6 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Pulau Taliabu termasuk baik (1:100). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (41) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (1). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Pulau Taliabu juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 76 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Pulau Taliabu

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	50067
2	Jumlah Penduduk 2019	53018
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	590
4	Pertumbuhan ekonomi	3,67

Tabel 4. 77 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Pulau Taliabu

1	Jumlah SMK	7
2	Jumlah guru	85
3	Jumlah siswa	826
4	Rasio guru dan siswa	1:10
5	Jumlah kelas baik	1
6	Jumlah kelas rusak	41
7	APM	72,6
8	APK	111,74



Gambar 4. 72. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Pulau Taliabu

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk kepulauan. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura sebanyak 142 siswa, Agribisnis Perikanan Air Tawar sebanyak 90 siswa, Teknik Komputer dan Informatika sebanyak 86 siswa

#### **i. Teluk Wondama**

Kabupaten Teluk Wondama terletak di Provinsi Papua Barat. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Teluk Wondama termasuk rendah (49,85%). Jumlah SMK di Teluk Wondama sebanyak 2 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Teluk Wondama termasuk baik (1:9). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (6) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (tidak ada).

Tabel 4. 78 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Teluk Wondama

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	15584
2	Jumlah Penduduk 2019	17322
3	Rata-rata penambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	348
4	Pertumbuhan ekonomi	1,84

Tabel 4. 79 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Teluk Wondana

1	Jumlah SMK	2
2	Jumlah guru	32
3	Jumlah siswa	282
4	Rasio guru dan siswa	1:9
5	Jumlah kelas baik	0
6	Jumlah kelas rusak	6
7	APM	49,85
8	APK	92,55

Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Teluk Wondama juga sudah cukup tersebar dengan baik.



Gambar 4. 73. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Teluk Wondama

Kabupaten Teluk Wondama merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk daerah dekat pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Teluk Wondama sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran sebanyak 67 siswa, Manajemen Perkantoran sebanyak 48 siswa, Akuntansi dan Keuangan Lembaga sebanyak 46 siswa.

#### **j. Kabupaten Teluk Bintuni**

Kabupaten Teluk Bintuni terletak di Provinsi Papua Barat. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Teluk Bintuni termasuk rendah (46,82%). Jumlah SMK di Teluk Bintuni sebanyak 1 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan tidak ada SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Teluk Bintuni termasuk baik (1:22). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (15) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (1). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten

Teluk Bintuni. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Teluk Bintuni juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 80 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Teluk Bintuni

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	32085
2	Jumlah Penduduk 2019	35494
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	682
4	Pertumbuhan ekonomi	36,58

Tabel 4. 81 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Teluk Bintuni

1	Jumlah SMK	1
2	Jumlah guru	23
3	Jumlah siswa	505
4	Rasio guru dan siswa	1:22
5	Jumlah kelas baik	1
6	Jumlah kelas rusak	15
7	APM	46,82
8	APK	81,95



Gambar 4. 74. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Teluk Bintuni

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk daerah dekat pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Akuntansi dan Keuangan Lembaga sebanyak 133 siswa, Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 101 siswa, Teknik Komputer dan Informatika sebanyak 75 siswa

#### **k. Kabupaten Sorong Selatan**

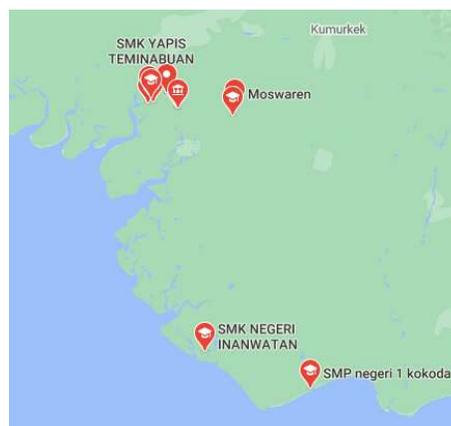
Kabupaten Sorong Selatan terletak di Provinsi Papua Barat. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Sorong Selatan sangat rendah (37,39%). Jumlah SMK di Sorong Selatan sebanyak 8 SMK yang terdiri dari 2 SMK Negeri dan 6 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Sorong Selatan termasuk baik (1:9). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (23) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (9). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Sorong Selatan juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 82 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sorong Selatan

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	21905
2	Jumlah Penduduk 2019	24496
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	518
4	Pertumbuhan ekonomi	2,23

Tabel 4. 83 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sorong Selatan

1	Jumlah SMK	4
2	Jumlah guru	83
3	Jumlah siswa	745
4	Rasio guru dan siswa	1:9
5	Jumlah kelas baik	9
6	Jumlah kelas rusak	23
7	APM	37,39
8	APK	76,12



Gambar 4. 75. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Sorong Selatan

Kabupaten Sorong Selatan merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk daerah dekat pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Sorong Selatan sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 193 siswa, Teknik Komputer dan Informatika sebanyak 101 siswa, Akuntansi dan Keuangan Lembaga sebanyak 79 siswa

### 1. Sorong

Kabupaten Sorong terletak di Provinsi Papua Barat. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Sorong termasuk tinggi (65,99%). Jumlah SMK di Sorong sebanyak 8 SMK yang terdiri dari 2 SMK Negeri dan 6 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Sorong termasuk baik (1:13). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (65) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (15).

Tabel 4. 84 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Sorong

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	41624
2	Jumlah Penduduk 2019	46888
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1053
4	Pertumbuhan ekonomi	13,29

Tabel 4. 85 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Sorong

1	Jumlah SMK	8
2	Jumlah guru	137
3	Jumlah siswa	1759
4	Rasio guru dan siswa	1:13
5	Jumlah kelas baik	15
6	Jumlah kelas rusak	65
7	APM	65,99
8	APK	98,15

Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam

meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Sorong. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Sorong juga sudah cukup tersebar dengan baik.



Gambar 4. 76. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk kepulauan. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Sorong sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 300 siswa, Akuntansi dan Keuangan Lembaga sebanyak 228 siswa, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif sebanyak 175 siswa

#### **m. Tambrauw**

Kabupaten Tambrauw terletak di Provinsi Papua Barat. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Tambrauw sangat rendah (22,89%). Jumlah SMK di Tambrauw sebanyak 4 SMK yang terdiri dari 3 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Tambrauw termasuk baik (tidak ada). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (5) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (0). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Tambrauw. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Tambrauw juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 86 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Tambrauw

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	6986
2	Jumlah Penduduk 2019	7128
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	28
4	Pertumbuhan ekonomi	0,27

Tabel 4. 87 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Tambrauw

1	Jumlah SMK	4
2	Jumlah guru	360
3	Jumlah siswa	116
4	Rasio guru dan siswa	0
5	Jumlah kelas baik	0
6	Jumlah kelas rusak	5
7	APM	22,89
8	APK	78,44

Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk daerah pedalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Tambrauw sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Perikanan Air Tawar sebanyak 36 siswa, Administrasi Perkantoran sebanyak 25 siswa, Perikanan sebanyak 14 siswa.

#### n. Maybrat

Kabupaten Maybrat terletak di Provinsi Papua Barat. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Maybrat sangat rendah (32,79%). Jumlah SMK di Maybrat sebanyak 1 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan tidak ada SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Maybrat termasuk baik (1:6). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (0) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (13). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam

meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Maybrat. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Maybrat juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 88 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Maybrat

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	18611
2	Jumlah Penduduk 2019	20775
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	433
4	Pertumbuhan ekonomi	0,86

Tabel 4. 89 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Maybrat

1	Jumlah SMK	1
2	Jumlah guru	15
3	Jumlah siswa	88
4	Rasio guru dan siswa	1:6
5	Jumlah kelas baik	13
6	Jumlah kelas rusak	0
7	APM	32,79
8	APK	53,27

Tidak ada di map

Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Maybrat

Kabupaten Maybrat merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk daerah pedalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Maybrat sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Informatika sebanyak 34 siswa, Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 31 siswa, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif sebanyak 9 siswa.

#### **o. Manokwari Selatan**

Kabupaten Manokwari Selatan terletak di Provinsi Papua Barat. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Manokwari Selatan termasuk rendah (49,22%). Jumlah SMK di Manokwari Selatan sebanyak 1 SMK yang terdiri dari tidak ada SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Manokwari Selatan termasuk baik (1:10). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang

rusak (6) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (0). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Manokwari Selatan juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 90 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Monokwari Selatan

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	11107
2	Jumlah Penduduk 2019	12577
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	294
4	Pertumbuhan ekonomi	0,96

Tabel 4. 91 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Monokwari Selatan

1	Jumlah SMK	1
2	Jumlah guru	16
3	Jumlah siswa	161
4	Rasio guru dan siswa	1:10
5	Jumlah kelas baik	0
6	Jumlah kelas rusak	6
7	APM	49,22
8	APK	93,47



Gambar 4. 77. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Manokwari Selatan

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk daerah dekat pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran sebanyak 56 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura sebanyak 50 siswa, Manajemen Perkantoran sebanyak 20 siswa.

#### **p. Pegunungan Arfak**

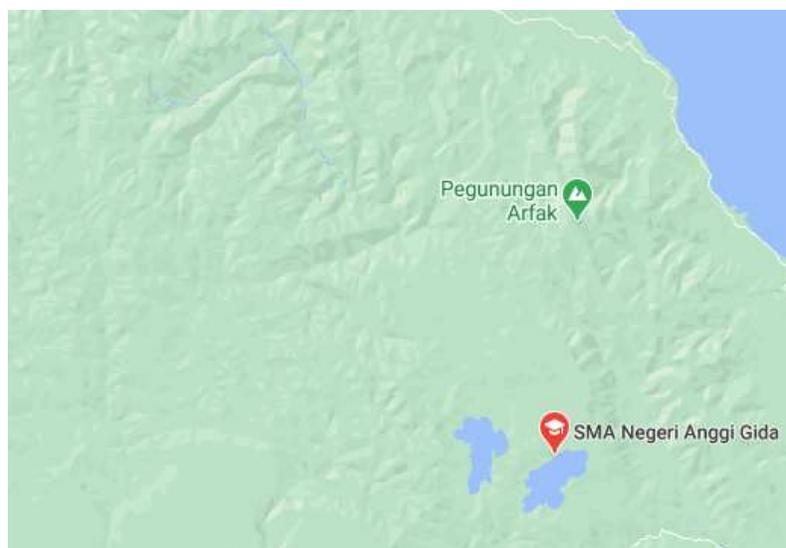
Kabupaten Pegunungan Arfak terletak di Provinsi Papua Barat. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pegunungan Arfak sangat rendah (18,35%). Jumlah SMK di Pegunungan Arfak sebanyak 2 SMK yang terdiri dari 2 SMK Negeri dan tidak ada SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Pegunungan Arfak termasuk baik (1:6). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (6) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (tidak ada). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Pegunungan Arfak juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 92 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Pegunungan Arfak

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	13813
2	Jumlah Penduduk 2019	15397
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	317
4	Pertumbuhan ekonomi	0,24

Tabel 4. 93 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Pegunungan Arfak

1	Jumlah SMK	2
2	Jumlah guru	18
3	Jumlah siswa	105
4	Rasio guru dan siswa	1:6
5	Jumlah kelas baik	0
6	Jumlah kelas rusak	6
7	APM	18,35
8	APK	46,04



Gambar 4. 78. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Pegunungan Arfak

Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk daerah pedalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura sebanyak 26 siswa, Teknik Komputer dan Informatika sebanyak 18 siswa, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran sebanyak 9 siswa

#### q. Jayawijaya

Kabupaten Jayawijaya terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Jayawijaya sangat tinggi (77,29%). Jumlah SMK di Jayawijaya sebanyak 6 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan 5 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Jayawijaya termasuk baik (1:25). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (41) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (20).

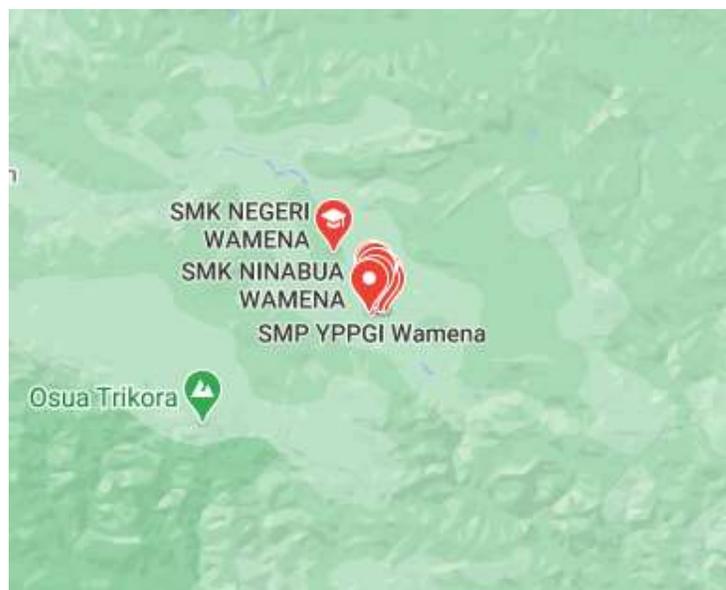
Tabel 4. 94 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Jayawijaya

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	204112
2	Jumlah Penduduk 2019	217887
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2755
4	Pertumbuhan ekonomi	3,59

Tabel 4. 95 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Jayawijaya

1	Jumlah SMK	6
2	Jumlah guru	97
3	Jumlah siswa	2434
4	Rasio guru dan siswa	1:25
5	Jumlah kelas baik	20
6	Jumlah kelas rusak	41
7	APM	42,41
8	APK	71,15

Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Jayawijaya juga sudah cukup tersebar dengan baik.



Gambar 4. 79. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Jayawijaya

Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk daerah pedalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Jayawijaya sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 346 siswa, Administrasi Perkantoran sebanyak 205 siswa, Manajemen Perkantoran sebanyak 193 siswa

#### r. Nabire

Kabupaten Nabire terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Nabire termasuk tinggi (58,49%). Jumlah SMK di Nabire sebanyak 17 SMK yang terdiri dari 5 SMK Negeri dan 12 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Nabire termasuk baik (1:12). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (56) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (64). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Nabire. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Nabire juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 96 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Nabire

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	137776
2	Jumlah Penduduk 2019	150308
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2506
4	Pertumbuhan ekonomi	4,91

Tabel 4. 97 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nabire

1	Jumlah SMK	17
2	Jumlah guru	229
3	Jumlah siswa	2806
4	Rasio guru dan siswa	1:12
5	Jumlah kelas baik	64
6	Jumlah kelas rusak	56
7	APM	58,49
8	APK	88,14

Kabupaten Nabire merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk daerah dekat pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Nabire sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 518 siswa, Teknik Komputer dan Informatika sebanyak 391 siswa, Keperawatan sebanyak 158 siswa.



Gambar 4. 80. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Nabire

#### s. Paniai

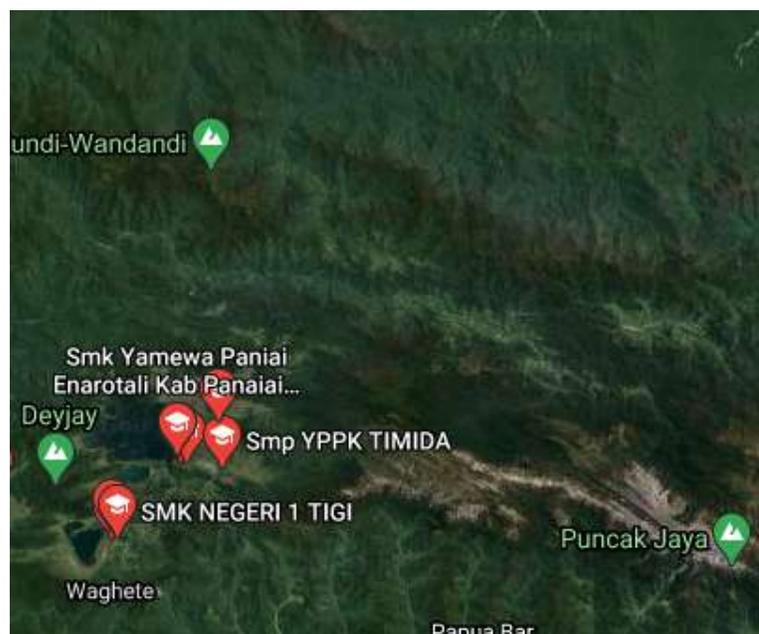
Kabupaten Paniai terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Paniai sangat rendah (19,36%). Jumlah SMK di Paniai sebanyak 3 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan 2 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Paniai termasuk baik (1:14). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (49) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (2). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Paniai. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Paniai juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 98 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Paniai

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	162489
2	Jumlah Penduduk 2019	177410
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2984
4	Pertumbuhan ekonomi	1,85

Tabel 4. 99 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Paniai

1	Jumlah SMK	3
2	Jumlah guru	81
3	Jumlah siswa	1125
4	Rasio guru dan siswa	1:14
5	Jumlah kelas baik	2
6	Jumlah kelas rusak	49
7	APM	19,36
8	APK	52,23



Gambar 4. 81. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Paniai

Kabupaten Paniai merupakan kabupaten yang letaknya termasuk dalam bentuk daerah pedalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Paniai sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura sebanyak 144 siswa, Agribisnis Ternak Unggas sebanyak 135 siswa, Keperawatan sebanyak 124 siswa

#### t. Puncak Jaya

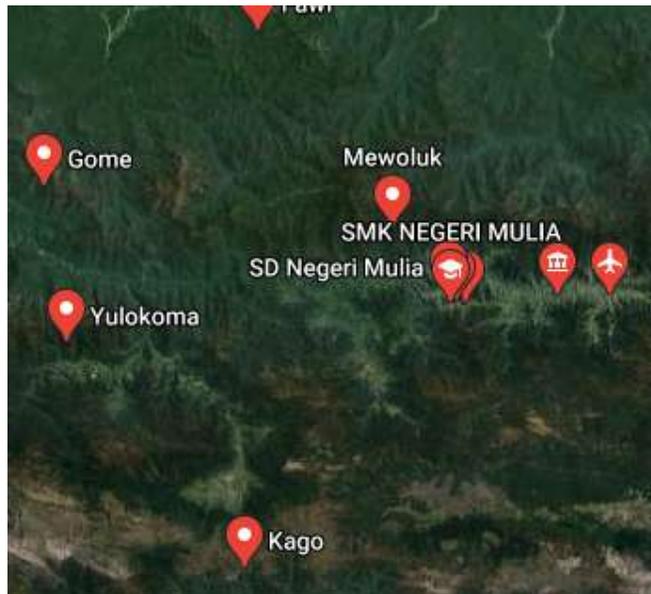
Kabupaten Puncak Jaya terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Puncak Jaya sangat rendah (25,14%). Jumlah SMK di Puncak Jaya sebanyak 2 SMK yang terdiri dari 2 SMK Negeri dan tidak ada SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Puncak Jaya termasuk baik (1:9). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (6) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (1). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Puncak Jaya juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 100 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Puncak Jaya

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	113280
2	Jumlah Penduduk 2019	129300
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	3204
4	Pertumbuhan ekonomi	0,61

Tabel 4. 101 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Puncak Jaya

1	Jumlah SMK	2
2	Jumlah guru	24
3	Jumlah siswa	224
4	Rasio guru dan siswa	1:9
5	Jumlah kelas baik	1
6	Jumlah kelas rusak	6
7	APM	25,14
8	APK	39,17



Gambar 4. 82. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Puncak Jaya

Kabupaten Puncak Jaya merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Puncak Jaya sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Administrasi Perkantoran 99 siswa, Agribisnis Tanaman 39 siswa, Administrasi 29 siswa

#### u. Boven Digul

Kabupaten Boven Digul terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Boven Digul sangat rendah (25,63%). Jumlah SMK di Boven Digul sebanyak 4 SMK yang terdiri dari 4 SMK Negeri dan tidak ada SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Boven Digul termasuk baik (1:9). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (32) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (13). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Boven Digul. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Boven Digul juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 102 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Boven Digul

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	61283
2	Jumlah Penduduk 2019	69211
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1586
4	Pertumbuhan ekonomi	2,16

Tabel 4. 103 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Boven Digul

1	Jumlah SMK	4
2	Jumlah guru	93
3	Jumlah siswa	799
4	Rasio guru dan siswa	1:9
5	Jumlah kelas baik	13
6	Jumlah kelas rusak	32
7	APM	25,63
8	APK	58,54



Gambar 4. 83. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Boven Digul

Kabupaten Boven Digul merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang

ada di kabupaten Boven Digul sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 150 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 134 siswa, Teknik Instalasi Tenaga Listrik 104 siswa

#### v. Mappi

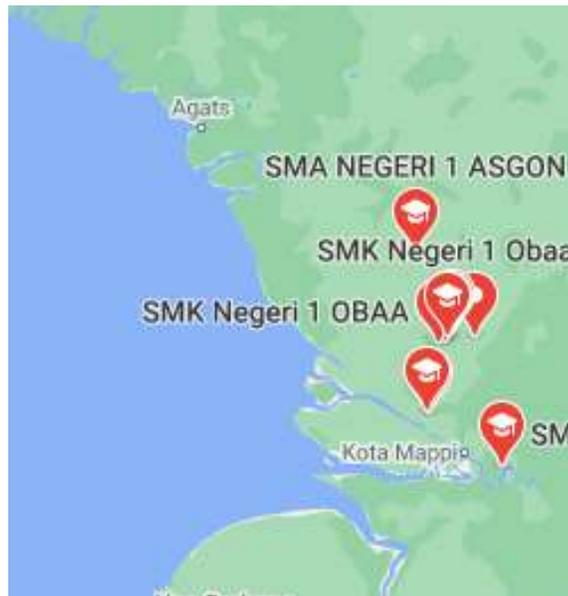
Kabupaten Mappi terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Mappi sangat rendah (15,855%). Jumlah SMK di Mappi sebanyak 5 SMK yang terdiri dari 5 SMK Negeri dan 0 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Mappi termasuk baik (1:19). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa tidak terdapat banyak ruang kelas yang rusak (0) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (32). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Mappi. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Mappi juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 104 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Mappi

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	89790
2	Jumlah Penduduk 2019	103292
3	Rata-rata penambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2700
4	Pertumbuhan ekonomi	1,26

Tabel 4. 105 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Mappi

1	Jumlah SMK	5
2	Jumlah guru	61
3	Jumlah siswa	1135
4	Rasio guru dan siswa	1:19
5	Jumlah kelas baik	32
6	Jumlah kelas rusak	0
7	APM	15,85
8	APK	49,74



Gambar 4. 84. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Mappi

Kabupaten Mappi merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalam. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Mappi sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Komputer dan Jaringan 155 siswa, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 114 siswa, Teknik Komputer dan Informatika 98 siswa

**w. Asmat**

Kabupaten Asmat terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Asmat termasuk rendah (51,71%). Jumlah SMK di Asmat sebanyak 1 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan 0 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Asmat termasuk baik (1:7). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat tidak banyak ruang kelas yang rusak (1) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (6).

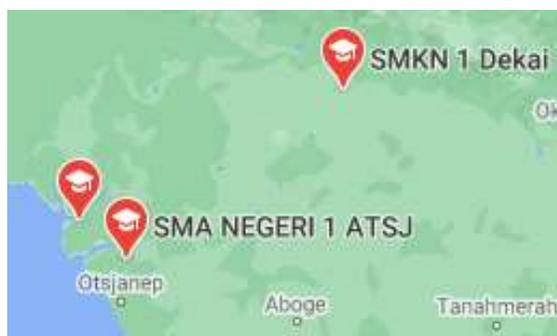
Tabel 4. 106 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Asmat

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	86614
2	Jumlah Penduduk 2019	97490
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2175
4	Pertumbuhan ekonomi	1,07

Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Asmat. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Asmat juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 107 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Asmat

1	Jumlah SMK	1
2	Jumlah guru	10
3	Jumlah siswa	71
4	Rasio guru dan siswa	1:7
5	Jumlah kelas baik	6
6	Jumlah kelas rusak	1
7	APM	15,71
8	APK	34,76



Gambar 4. 85. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Asmat

Kabupaten Asmat merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalam. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Asmat sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Desain dan Produk kreatif Kriya 27 siswa, Nautika Kapal Penangkapan Ikan 27 siswa, Pelayaran Kapal Penangkapan Ikan 17 siswa.

#### x. Yakuhiro

Kabupaten Yakuhiro terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Yakuhiro sangat rendah (14,47%). Jumlah SMK di Yakuhiro sebanyak 3 SMK yang terdiri dari 2 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Yakuhiro termasuk baik (1:21). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (12) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (8). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Yakuhiro. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Yakuhiro juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 108 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Yakuhiro

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	178193
2	Jumlah Penduduk 2019	190887
3	Rata-rata penambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2539
4	Pertumbuhan ekonomi	1,06

Tabel 4. 109 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Yakuhiro

1	Jumlah SMK	3
2	Jumlah guru	28
3	Jumlah siswa	583
4	Rasio guru dan siswa	1:21
5	Jumlah kelas baik	8
6	Jumlah kelas rusak	12
7	APM	14,47
8	APK	23,21



Gambar 4. 86. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Yakuhimo

Kabupaten Yakuhimo merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Yakuhimo sangat berpariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 284 siswa, Agribisnis Produk Tanaman 133 siswa, Administrasi Perkantoran 56 siswa.

#### y. Pegunungan Bintang

Kabupaten Pegunungan Bintang terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat rendah (15,04%). Jumlah SMK di Pegunungan Bintang sebanyak 1 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan 0 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Pegunungan Bintang termasuk baik (1:13). Sedangkan data ruang kelas menunjukkann bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (25) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (0). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Pegunungan Bintang juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 110 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Pegunungan Bintang

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	70697
2	Jumlah Penduduk 2019	75788
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1018
4	Pertumbuhan ekonomi	0,83

Tabel 4. 111 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Pegunungan Bintang

1	Jumlah SMK	1
2	Jumlah guru	24
3	Jumlah siswa	301
4	Rasio guru dan siswa	1:13
5	Jumlah kelas baik	0
6	Jumlah kelas rusak	25
7	APM	15,04
8	APK	26,67

Tidak terdeteksi di maps sebaran lokasi SMK di Kabupaten Pegunungan Bintang

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Pegunungan Bintang sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman 55 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 38 siswa, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan 38 siswa.

#### z. Tolikara

Kabupaten Tolikara terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Tolikara sangat rendah (16,38%). Jumlah SMK di Tolikara sebanyak 1 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan 0 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Tolikara termasuk baik (1:12). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa tidak terdapat ruang kelas di Kabupaten Tolikara. Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Tolikara. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Tolikara juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 112 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Tolikara

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	127526
2	Jumlah Penduduk 2019	139111
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2317
4	Pertumbuhan ekonomi	0,69

Tabel 4. 113 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Tolikara

1	Jumlah SMK	1
2	Jumlah guru	10
3	Jumlah siswa	123
4	Rasio guru dan siswa	1:12
5	Jumlah kelas baik	
6	Jumlah kelas rusak	0
7	APM	16,38
8	APK	30,04

Kabupaten Tolikara merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pedalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Tolikara sangat berpariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agrubisnis Produksi Tanaman 48 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortilkultura 34 siswa.

#### aa. Keerom

Kabupaten Keerom terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Keerom termasuk tinggi (59,21%). Jumlah SMK di Keerom sebanyak 3 SMK yang terdiri dari 2 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Keerom termasuk baik (1:15). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (12) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (19). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Keerom.

Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Keerom juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 114 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Keerom

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	53002
2	Jumlah Penduduk 2019	57100
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	820
4	Pertumbuhan ekonomi	1,28

Tabel 4. 115 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Keerom

1	Jumlah SMK	3
2	Jumlah guru	49
3	Jumlah siswa	756
4	Rasio guru dan siswa	1:15
5	Jumlah kelas baik	19
6	Jumlah kelas rusak	12
7	APM	59,21
8	APK	102,54

Kabupaten Keerom merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Keerom sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Multimedia 178 siswa, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 91 siswa Teknik Otomotif 70 siswa.



Gambar 4. 87. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Keerom

#### bb. Waropen

Kabupaten Waropen terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Waropen termasuk tinggi (56,96%). Jumlah SMK di Waropen sebanyak 3 SMK yang terdiri dari 3 SMK Negeri dan 0 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Waropen termasuk baik (1:8). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (14) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (7). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Waropen. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Waropen juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 116 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Waropen

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	27723
2	Jumlah Penduduk 2019	31514
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	758
4	Pertumbuhan ekonomi	0,91

Tabel 4. 117 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Waropen

1	Jumlah SMK	3
2	Jumlah guru	38
3	Jumlah siswa	318
4	Rasio guru dan siswa	1:8
5	Jumlah kelas baik	7
6	Jumlah kelas rusak	14
7	APM	56,96
8	APK	93,79



Gambar 4. 88. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Waropen

Kabupaten Waropen merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pantai. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Waropen sangat berpariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 81 siswa, Teknik Komputer dan Jaringan 48 siswa, Multimedia 47 siswa

#### cc. Supiori

Kabupaten Supiori terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Supiori sangat rendah (37,11%). Jumlah SMK di Supiori sebanyak 1 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan 0 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Supiori termasuk baik (1:5). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (9) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (0). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Supiori. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Supiori juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 118 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Supiori

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	17288
2	Jumlah Penduduk 2019	20710
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	684
4	Pertumbuhan ekonomi	0,45

Tabel 4. 119 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Supiori

1	Jumlah SMK	1
2	Jumlah guru	10
3	Jumlah siswa	53
4	Rasio guru dan siswa	1:5
5	Jumlah kelas baik	0
6	Jumlah kelas rusak	9
7	APM	37,11
8	APK	69,8

Kabupaten Supiori merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pedalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Supiori sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Teknik Pemesinan Kapal 19 siswa, Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut 18 siswa, Teknik Mesin 9 siswa.

#### **dd. Mamberamo Raya**

Kabupaten Mamberamo Raya terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Mamberamo Raya sangat rendah (27,59%). Jumlah SMK di Mamberamo Raya sebanyak 0 SMK atau dapat dikatakan di Kabupaten Mamberamo Raya ini tidak terdapat sekolah SMK.

Tabel 4. 120 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Mamberamo Raya

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	20514
2	Jumlah Penduduk 2019	24086
3	Rata-rata penambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	714
4	Pertumbuhan ekonomi	0,7

Tabel 4. 121 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Mamberamo Raya

1	Jumlah SMK	0
2	Jumlah guru	0
3	Jumlah siswa	0
4	Rasio guru dan siswa	0
5	Jumlah kelas baik	
6	Jumlah kelas rusak	0
7	APM	27,59
8	APK	71,81

Kabupaten Mamberamo Raya merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Tidak terdapat SMK di kabupaten Mamberamo Raya.

#### ee. Nduga

Kabupaten Nduga terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Nduga sangat rendah (37,34%). Jumlah SMK di Nduga sebanyak 1 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan tidak terdapat SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Nduga termasuk baik (1:14). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (3) dibandingkan dengan yang kondisinya tidak ada yang baik . Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Nduga. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Nduga juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 122 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Nduga

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	92530
2	Jumlah Penduduk 2019	98595
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1213
4	Pertumbuhan ekonomi	0,53

Tabel 4. 123 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Nduga

1	Jumlah SMK	1
2	Jumlah guru	5
3	Jumlah siswa	72
4	Rasio guru dan siswa	14
5	Jumlah kelas baik	0
6	Jumlah kelas rusak	3
7	APM	37,34
8	APK	57,14

Kabupaten Nduga merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Nduga sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman 40 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 32 siswa

#### ff. Lanny Jaya

Kabupaten Lanny Jaya terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Lanny Jaya sangat rendah (11,25%). Jumlah SMK di Lanny Jaya hanya terdapat sebanyak 1 SMK Negeri dan tidak terdapat SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Lanny Jaya termasuk baik (1:16). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa tidak terdapat ruang kelas yang rusak (0) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (6). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Lanny Jaya juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 124 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Lanny Jaya

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	170589
2	Jumlah Penduduk 2019	178995
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1681
4	Pertumbuhan ekonomi	0,79

Tabel 4. 125 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Lanny Jaya

1	Jumlah SMK	1
2	Jumlah guru	6
3	Jumlah siswa	95
4	Rasio guru dan siswa	1:16
5	Jumlah kelas baik	6
6	Jumlah kelas rusak	0
7	APM	11,25
8	APK	22,39

Kabupaten Lanny Jaya merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Lanny Jaya sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 60 siswa, Agribisnis Produksi Tanaman 35 siswa.

#### **gg. Mamberamo Tengah**

Kabupaten Mamberamo Tengah terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Mamberamo Tengah sangat rendah (32,76%). Tidak terdapat sekolah SMK di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Tabel 4. 126 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Mamberamo Tengah

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	45398
2	Jumlah Penduduk 2019	48201
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	561
4	Pertumbuhan ekonomi	0,51

Tabel 4. 127 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Mamberamo Tengah

1	Jumlah SMK	0
2	Jumlah guru	0
3	Jumlah siswa	0
4	Rasio guru dan siswa	0
5	Jumlah kelas baik	0
6	Jumlah kelas rusak	0
7	APM	32,76
8	APK	64,39

Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Tidak terdapat SMK di kabupaten Mamberamo Tengah.

#### hh. Yalimo

Kabupaten Yalimo terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Yalimo sangat rendah (21,55%). Jumlah SMK di Yalimo sebanyak 2 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Yalimo termasuk baik (1:10). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (3) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (0). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Yalimo. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Yalimo juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 128 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Yalimo

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	57585
2	Jumlah Penduduk 2019	62605
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1004
4	Pertumbuhan ekonomi	0,53

Tabel 4. 129 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Yalimo

1	Jumlah SMK	2
2	Jumlah guru	19
3	Jumlah siswa	184
4	Rasio guru dan siswa	10
5	Jumlah kelas baik	0
6	Jumlah kelas rusak	3
7	APM	21,55
8	APK	34,03

Kabupaten Yalimo merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah pedalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Yalimo sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 52 siswa, Administrasi Perkantoran 40 siswa, Agribisnis Tanaman Perkebunan 28 siswa

## ii. Puncak Jaya

Kabupaten Puncak Jaya terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Puncak Jaya sangat rendah (25,96%). Jumlah SMK di Puncak Jaya sebanyak 2 SMK yang terdiri dari 2 SMK Negeri dan tidak ada SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Puncak Jaya termasuk baik (1:4). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (2) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (1). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten

Puncak Jaya. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Puncak Jaya juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 130 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Puncak Jaya

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	101515
2	Jumlah Penduduk 2019	113204
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	2338
4	Pertumbuhan ekonomi	0,61

Tabel 4. 131 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Puncak Jaya

1	Jumlah SMK	2
2	Jumlah guru	18
3	Jumlah siswa	79
4	Rasio guru dan siswa	1:4
5	Jumlah kelas baik	1
6	Jumlah kelas rusak	2
7	APM	25,96
8	APK	47,93

Kabupaten Puncak Jaya merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Puncak Jaya sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 52 siswa, Agribisnis Tanaman 17 siswa

#### jj. Dogiyai

Kabupaten Dogiyai terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Dogiyai sangat rendah (10,82%). Jumlah SMK di Dogiyai sebanyak 2 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Dogiyai termasuk baik (1:31). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (13) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (1). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah

menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Dogiyai. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Dogiyai juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 132 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Dogiyai

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	90822
2	Jumlah Penduduk 2019	97902
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1416
4	Pertumbuhan ekonomi	0,57

Tabel 4. 133 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Dogiyai

1	Jumlah SMK	2
2	Jumlah guru	14
3	Jumlah siswa	440
4	Rasio guru dan siswa	1:31
5	Jumlah kelas baik	1
6	Jumlah kelas rusak	13
7	APM	10,82
8	APK	24,89



Gambar 4. 89. Sebaran lokasi SMK di Kabupaten Dogiyai

Kabupaten Dogiyai merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di kabupaten Dogiyai sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Agribisnis Ternak Unggas 153 siswa, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 135 siswa, Agribisnis Tanaman 53 siswa.

#### kk. Intan Jaya

Kabupaten Intan Jaya terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Intan Jaya sangat rendah (6,35%). Jumlah SMK di Intan Jaya sebanyak 1 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan tidak ada SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Intan Jaya tidak ada. Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa tidak ada ruang kelas Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Intan Jaya juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 134 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Intan Jaya

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	44812
2	Jumlah Penduduk 2019	49293
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	896
4	Pertumbuhan ekonomi	0,56

Tabel 4. 135 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Intan Jaya

1	Jumlah SMK	1
2	Jumlah guru	0
3	Jumlah siswa	0
4	Rasio guru dan siswa	0
5	Jumlah kelas baik	0
6	Jumlah kelas rusak	0
7	APM	6,35
8	APK	13,08

Kabupaten Intan Jaya merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Tidak terdapat SMK di kabupaten Intan Jaya.

## II. Deiyai

Kabupaten Deiyai terletak di Provinsi Papua. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Deiyai sangat rendah (32,99%). Jumlah SMK di Deiyai sebanyak 2 SMK yang terdiri dari 1 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Rasio Guru dan Siswa SMK di Deiyai termasuk baik (1:12). Sedangkan data ruang kelas menunjukkan bahwa terdapat banyak ruang kelas yang rusak (6) dibandingkan dengan yang kondisinya baik (19). Jika membandingkan rasio guru-siswa dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah masyarakat di Kabupaten Deiyai. Selain itu, sebaran lokasi SMK di kabupaten Deiyai juga sudah cukup tersebar dengan baik.

Tabel 4. 136 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kabupaten Deiyai

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk 2014	68025
2	Jumlah Penduduk 2019	73199
3	Rata-rata pertambahan jumlah penduduk (2014-2019);5	1035
4	Pertumbuhan ekonomi	0,6

Tabel 4. 137 Data pokok SMK dan Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Deiyai

1	Jumlah SMK	2
2	Jumlah guru	37
3	Jumlah siswa	440
4	Rasio guru dan siswa	12
5	Jumlah kelas baik	19
6	Jumlah kelas rusak	6
7	APM	32,99
8	APK	58,51

Kabupaten Deiyai merupakan kabupaten yang letaknya termasuk termasuk dalam bentuk daerah perdalaman. Program keahlian yang ditawarkan SMK-SMK yang ada di

kabupaten Deiyai sangat bervariasi dengan program keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak adalah Keperawatan 109 siswa, Teknik Komputer dan Jaringan 42 siswa, Agribisnis Ternak Unggas 28 siswa

## G. STRATEGI OPTIMALISASI PLK PADA SMK

### 1. Peningkatan angka partisipasi sekolah menengah kejuruan

Pendidikan Layanan Khusus ditujukan untuk siswa SMK yang belum mendapatkan akses terhadap pendidikan formal. Beberapa faktor yang menyebabkan tersebut misalkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis, faktor keberadaan SMK, dan faktor kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan jenjang menengah. Beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah yaitu dengan menawarkan program kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga memiliki tingkat keberkerjaan yang tinggi, penambahan ruang kelas baru, pengembangan SMK baru, Kerjasama dengan lembaga pondok pesantren/keagamaan untuk pengembangan SMK, beasiswa untuk siswa putus sekolah, dan mengkampanyekan SMK Bisa di daerah tertinggal. Kampanye mengenai SMK masih dibutuhkan di daerah-daerah tertinggal karena adanya anggapan bahwa lulusan SMK akan menjadi tukang atau bekerja pada sektor yang tidak memiliki kesan berharga di mata masyarakat. Misalkan saja lulusan SMK teknik sipil dipersepsikan oleh masyarakat akan bekerja layaknya tukang bangunan sehingga mereka enggan untuk mengirim anaknya sekolah di SMK. Peningkatan kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah.

## 2. Peningkatan kualitas layanan PLK pada SMK

Pendidikan Layanan Khusus memiliki sasaran yang secara umum berada di daerah atau lokasi yang menghambat mereka untuk mendapatkan akses pendidikan formal. Walaupun demikian, kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada mereka tetap harus dipertahankan. Oleh karena itu, beberapa strategi umum yang bisa dilakukan yaitu dengan 1) digitalisasi bahan dan perangkat ajar yang bisa diakses secara online ataupun offline, 2) Penyiapan perangkat pembelajaran bekerjasama dengan LPTK kejuruan, 3) Training TIK bagi guru-guru PLK pada SMK, dan khususnya guru-guru mata pelajaran produktif, 4) Kerjasama dengan LPTK untuk tutorial jarak jauh sebagai stimulus untuk memotivasi siswa dan guru PLK.

## H. PRAKTIK BAIK PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PADA SMK

### 1. SMKN 1 Gangga, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

SMKN 1 Gangga, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mendapatkan ijin operasional pada tahun 2010 berdasarkan SK Ijin Operasional No. 09/004/DIKPRA/2010. SMKN 1 Gangga mendapatkan akreditasi B pada tahun 2019.



Gambar 4. 90. SMKN 1 Gangga, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

Sumber listrik di SMKN 1 Gangga berasal PLN dengan daya sebesar 5000 W. Daerah sekolah juga sudah memiliki jaringan internet Telkomsel Flash. Walaupun termasuk dalam daerah tertinggal, akan tetapi lokasi SMKN 2 Tanjung mudah diakses serta tidak termasuk dalam kategori daerah transmigrasi dan rawan bencana alam maupun sosial.

Program kompetensi keahlian yang disediakan SMK DKV Yanuraf Khidirraja adalah 1) Otomatisasi dan tata kelola perkantoran, 2) teknik pendingin dan tata udara, 3) teknik instalasi listrik, 4) teknik computer dan jaringan, 5) sistem informatika, jaringan dan aplikasi, 6) Teknik dan bisnis sepeda motor, dan 7) Teknologi konstruksi dan property. Jumlah keseluruhan peserta didik kelas X sebanyak 175 siswa, kelas XI sebanyak 137 siswa, dan kelas XII sebanyak 164 siswa. Perkembangan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa SMK ini mampu menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SMK. SMKN 1 Gangga juga berupaya melakukan penyesuaian program keahlian yang memiliki prospek keberkerjaan lebih tinggi dengan menutup program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran dan menggantikannya dengan program keahlian teknik pendingin dan tata udara.

Berdasarkan usia peserta didik, terlihat bahwa SMKN 1 Gangga mengakomodasi peserta didik yang sudah berusia > 16 pada saat pertama kali masuk tingkat I. Terdapat peserta didik berusia > 17 tahun di tingkat I sebanyak 22 siswa, berusia >18 tahun di tingkat II sebanyak 18 siswa, dan berusia > 19 tahun di tingkat III sebanyak 29 siswa. Penurunan jumlah siswa yang masuk ke tingkat I sekolah menengah atas dengan usia lebih dari 16 tahun mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan studi ke sekolah menengah atas, khususnya SMK.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, SMKN 1 Gangga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra baik dari pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, maupun industri lokal. Berikut ini merupakan daftar mitra SMKN 1 Gangga, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4. 138 Daftar mitra SMKN 1 Gangga, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

No	Mitra	Kerjasama
1	PDAM	Prakerin
2	FAMILI MOTOR (Jasa Reparasi Mesin)	Prakerin
3	HELEK KOMPUTER (Jasa Reparasi Komputer)	Prakerin
4	MITRA COMPUTER CENTER (Jasa Reparasi Komputer)	Prakerin
5	CV. ULUNG konsultan (Konstruksi Bangunan Sipil)	Prakerin
6	PT. ASTRA MOTOR DAN PT ASTRA INTERNATIONAL tbk.-HONDA (Ind. Kendaraan Bermotor)	Prakerin
7	DIZKY MOTOR (Jasa Reparasi Mesin)	Prakerin

8	DWI MOTOR (Jasa Reparasi Mesin)	Prakerin
9	PT. Euro Building Bali (Konstruksi Gedung)	Prakerin
10	MATARAM COMPUTER CENTER (Jasa Reparasi Komputer)	Prakerin
11	ADI MOTOR (Jasa Reparasi Mesin)	Prakerin
12	DELTA JAYA (Jasa Reparasi Komputer)	Prakerin
13	12 PAS COMPUTER (Jasa Reparasi Komputer)	Prakerin
14	Kantor Camat Gangga (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan)	Prakerin
15	OZY MOTOR (Jasa Reparasi Mesin)	Prakerin
16	RINJANI COMPUTER (Jasa Reparasi Komputer)	Prakerin
17	kantor perizinan (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan)	Prakerin
18	CV. ULUNG konsultan (Konstruksi Bangunan Sipil)	Prakerin
19	CV. Rumpun BAmBU Nusantara (Konstruksi Bangunan Sipil)	Prakerin
20	GIE COMPUTER CENTER (Jasa Reparasi Komputer)	Prakerin
21	PJP MOTOR (Jasa Reparasi Mesin)	Prakerin
22	PEJAJARAN MOTOR (Jasa Reparasi Mesin)	Prakerin
23	CV. LiniFad Konsultan (Konstruksi Bangunan Sipil)	Prakerin
24	Dinas Pertanian (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan)	Prakerin
25	UPTD Gangga (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan)	Prakerin
26	DINAS PU dan Penataan Ruang KLU (Konstruksi Bangunan Sipil)	Prakerin

Jumlah mitra SMKN 1 Gangga sudah banyak dan bervariasi. Implementasi kerjasama yang dilakukan adalah praktek kerja industri. SMKN 1 Gangga dapat melibatkan mitra untuk jenis kerjasama lainnya misalkan untuk pengembangan kurikulum dan penyaluran tenaga kerja.

## 2. SMK DKV Yanuraf Khidirraja, Raja Ampat

SMK DKV Yanuraf Khidirraja, Raja Ampat mendapatkan ijin operasional pada tahun 2016 berdasarkan SK Ijin Operasional No 410/463/2016 dan mendapatkan akreditasi C pada tahun 2018. SMK ini didirikan oleh Yayasan Nuril Assyraf dengan status tanah kepemilikan sendiri yang berlokasi di Waisai Kota, Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (Kode pos: 98482).

Sumber listrik di SMK DKV Yanuraf Khidirraja berasal PLN dan Diesel dengan daya 1300 W. Daerah sekolah juga sudah memiliki jaringan internet Telkomsel Flash. DU/DI yang telah menjalin kerjasama dengan SMK Yanuraf Khidirraja ada 4, yaitu ART SHOP OEGARI YAYASAN AL KHIDR AL ISLAMI NARAJAVA (Produksi Video dan Musik), CV ZONA GRAFIKA MULTIKARYA (Ind. Pencetakan dan Repr. Media Rekaman), CV ZONA GRAFIKA MULTIKARYA (Ind. Pencetakan dan Repr. Media Rekaman), dan CV ZONA GRAFIKA MULTIKARYA (Ind. Pencetakan dan Repr. Media Rekaman). Kerjasama yang dilakukan dengan industri meliputi praktik kerja industri, pengembangan kurikulum, dan penyelenggaraan *teaching factory*.



Gambar 4. 91. SMK DKV Yanuraf Khidirraja, Raja Ampat, Papua Barat

Program kompetensi keahlian yang disediakan SMK DKV Yanuraf Khidirraja adalah Seni Rupa-Desain Komunikasi Visual. Jumlah peserta didik sebanyak 69 siswa yang terdiri dari kelas X (25), XI (18), dan XII (16). Terdapat beberapa peserta didik yang berusia lebih dari 19 tahun baik ditingkat I (3), tingkat II (2), dan tingkat III (5). Perkembangan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa SMK ini mampu menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SMK.

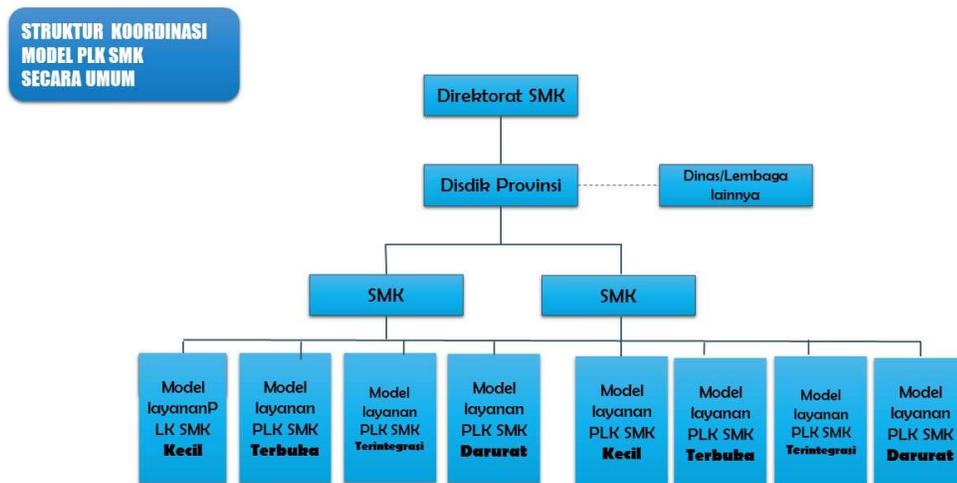
### I. MODEL PELAKSANAAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PLK) PADA SMK

Berdasarkan gambaran umum dan potensi daerah tertinggal, potensi bahan ajar digital, kajian untuk melakukan modifikasi, afirmasi, proyeksi, dan strategi (MAPS) PLK, observasi lapangan, serta berbagai masukan dari stake holder yang terlibat, maka dikembangkan model Pendidikan Layanan Khusus (PLK) pada SMK. Model yang dikembangkan terdiri dari PLK pada SMK Kecil, PLK pada SMK Terbuka, PLK pada SMK Darurat, dan PLK pada SMK Terintegrasi.

Berikuti ini akan dijelaskan mengenai struktur koordinasi PLK secara umum serta model PLK yang dikembangkan.

### 1. Struktur Koordinasi Model PLK secara umum

Model Layanan PLK pada SMK adalah program yang dilaksanakan oleh SMK yang mendapatkan izin untuk menawarkan layanan PLK kepada masyarakat. Direktorat PSMK selaku pembuat kebijakan membuat standar, pedoman, dan kriteria untuk pelaksanaan PLK pada SMK. Pedoman tersebut disosialisasikan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas pendidikan provinsi untuk disampaikan kepada SMK-SMK yang berlokasi di daerah tertinggal. Selanjutnya, SMK-SMK yang berlokasi di daerah tertinggal dan memenuhi kriteria dapat mengajukan proposal untuk pelaksanaan program PLK sesuai dengan pedoman yang ada. Model layanan PLK yang diajukan SMK dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan animo calon siswa, ketersediaan mitra di lokasi calon siswa, serta potensi di daerah calon siswa PLK.



Gambar 4. 92 Struktur Organisasi Model PLK pada SMK

## **2. Model-model program layanan PLK pada SMK**

Model program layanan PLK yang dikembangkan meliputi PLK pada SMK Kecil, PLK pada SMK Terbuka, PLK pada SMK Darurat, dan PLK pada SMK Terintegrasi. Pemilihan model PLK yang akan dilaksanakan tergantung pada situasi, kondisi, potensi daerah, serta kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan.

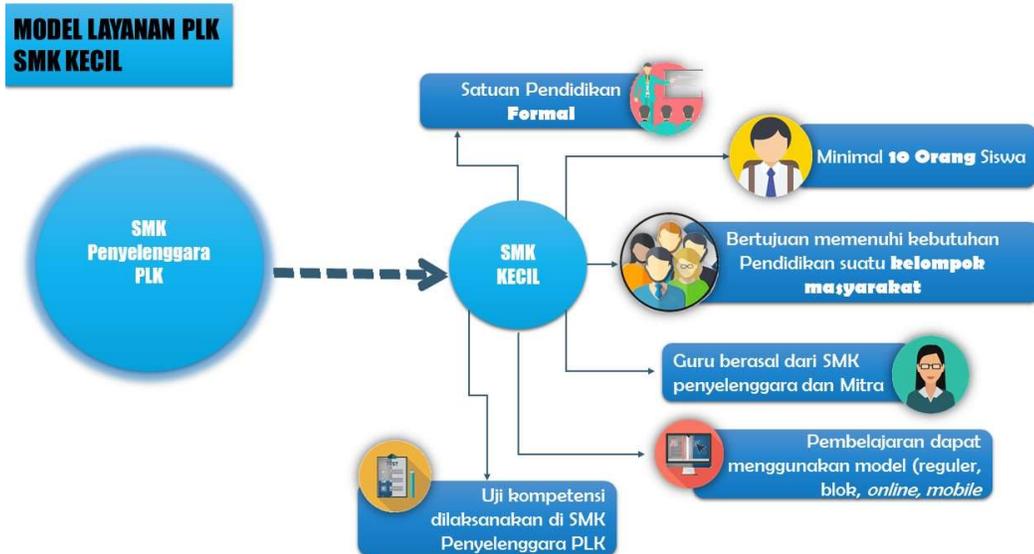
### **a. Model layanan PLK SMK Kecil**

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, Sekolah kecil dimaknai sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah peserta didik minimal 3(tiga) orang. Pada Model layanan PLK SMK Kecil ini didasari oleh peraturan tersebut dengan melakukan beberapa penyesuaian.

Model layanan PLK SMK Kecil pada konteks ini diawali dari rekomendasi SMK penyelenggara bahwa secara kebutuhan dan kelayakan masyarakat di daerahnya memang memerlukan layanan PLK SMK. Secara regulasi pendirian PLK dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah dan/atau masyarakat, sehingga dari level manapun apabila memang membutuhkan layanan PLK SMK Kecil ini dapat mengajukan usulan. Dalam kajian ini pengusul merupakan SMK penyelenggara yang tentu telah paham mengenai situasi masyarakat 3T di daerahnya. Usulan tersebut tentu harus disertai dengan beberapa persyaratan untuk menjadi bahan pertimbangan apakah layak suatu daerah tersebut didirikan layanan PLK SMK Kecil.

Pada model layanan PLK SMK Kecil ini akan diselenggarakan oleh SMK penyelenggara. SMK penyelenggara ini nantinya yang akan menyediakan beberapa kebutuhan SMK Kecil seperti guru dan beberapa fasilitas. Selain itu, kegiatan uji kompetensi bagi siswa SMK kecil juga diselenggarakan di SMK penyelenggara.

Kriteria SMK penyelenggara adalah SMK yang sudah terakreditasi dan pernah memperoleh program revitalisasi. Pemilihan SMK terakreditasi sebagai penyelenggara program PLK dengan mempertimbangkan faktor kecukupan sarana dan prasarana, kecukupan guru, serta kemampuan sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada siswa PLK.



Gambar 4. 93 Model Layanan PLK SMK Kecil

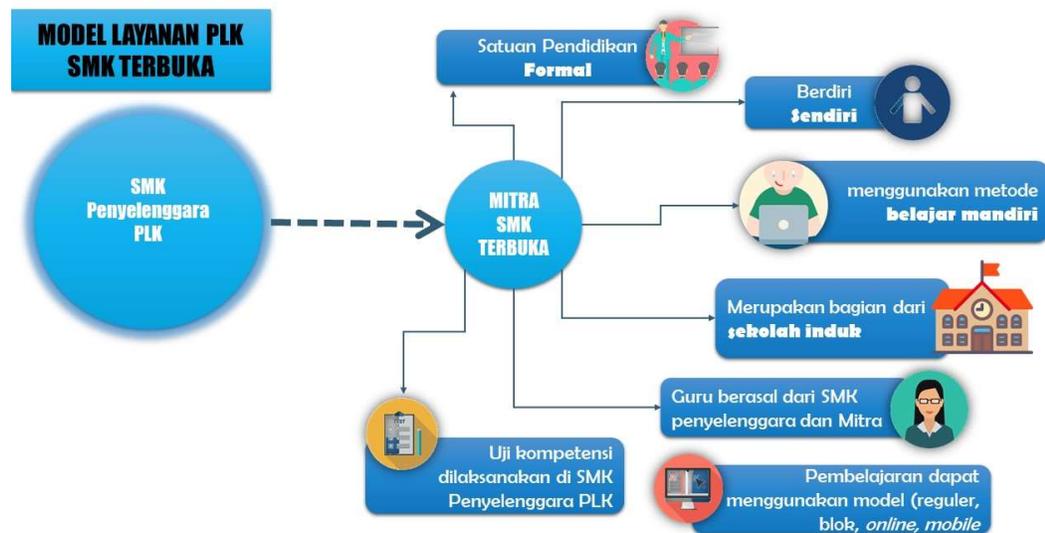
Berdasarkan gambar, maka model layanan SMK Kecil ini merupakan jenis Pendidikan formal. Jumlah minimal siswa 10 orang agar proses penyelenggaraannya dapat berjalan efisien. Layanan PLK SMK ini bertujuan memenuhi kebutuhan Pendidikan SMK pada suatu kelompok masyarakat di daerah 3T. Guru yang mengajar di SMK kecil ini berasal dari SMK penyelenggara yang sebelumnya telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran di SMK Kecil dapat menggunakan model klasikal reguler seperti sekolah pada umumnya, sistem blok, *online*, dan *mobile*. Uji kompetensi bagi siswa SMK Kecil dilakukan di SMK Penyelenggara.

Proses pembelajaran pada SMK kecil dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama mengenai penyediaan tempat pembelajaran SMK Kecil yang disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan agar para siswa tetap merasa nyaman dan aman dalam proses pembelajarannya. Kedua mengenai waktu pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, siswa dan guru. Ketiga mengenai sistem pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk klasikal, blok, tatap muka, jarak jauh, *online* dan/atau mandiri, hal tersebut dikarenakan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah 3T yang sangat beragam. Terakhir mengenai jumlah jam mengajar pendidik untuk berkunjung yang juga harus disesuaikan dengan kondisi PLK. Penyesuaian tersebut harus dipastikan tanpa mengurangi capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar (dari Badan Standar Pendidikan Nasional) demi menjaga kualitas lulusan SMK Kecil.

## b. Model layanan PLK SMK Terbuka

Pengertian yang terdapat dalam peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus menyatakan bahwa sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri (Permen 72 tahun 2013). Pada model ini, selain dibutuhkan SMK penyelenggara juga diperlukan mitra SMK untuk menyelenggarakan SMK terbuka.

Kriteria SMK penyelenggara adalah SMK yang sudah terakreditasi dan pernah memperoleh program revitalisasi. Pemilihan SMK terakreditasi sebagai penyelenggara program PLK dengan mempertimbangkan faktor kecukupan sarana dan prasarana, kecukupan guru, serta kemampuan sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada siswa PLK. Model PLK SMK terbuka dilatarbelakangi oleh regulasi tersebut dengan melakukan beberapa penyesuaian.



Gambar 4. 94 Model Layanan PLK SMK Terbuka

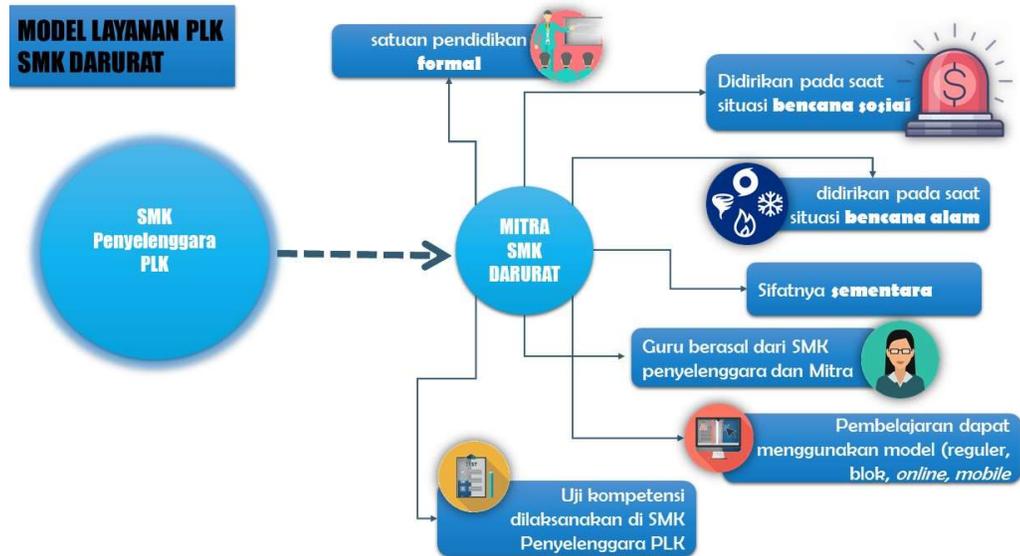
Berdasarkan gambar, model layanan PLK SMK Terbuka diselenggarakan oleh mitra penyelenggara PLK (sebagai contoh: pemerintah desa, SMP, SMA, dan mitra lainnya) dengan tetap melakukan koordinasi dengan SMK penyelenggara. Antara SMK penyelenggara dan Mitra SMK Terbuka melakukan perjanjian kerjasama mengenai penyelenggaraan SMK Terbuka. Dalam penyelenggaraannya model SMK Terbuka ini berjenis satuan pendidikan formal dan berdiri sendiri. SMK Terbuka ini menggunakan metode belajar mandiri yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan peserta didik pada daerah tersebut. Penyediaan guru pada SMK Terbuka berasal dari SMK penyelenggara dan mitra. Pembelajaran pada SMK Terbuka dapat menggunakan model regular, blok, *online*, dan *mobile* dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik di daerah tersebut. Uji kompetensi untuk siswa SMK Terbuka juga dilakukan di SMK Penyelenggara agar kualitas lulusan tetap terstandar.

Proses pembelajaran pada SMK Terbuka dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, walaupun penyelenggaraan pada SMK terbuka ini berada di (pemerintah desa, SMP, SMA, dan mitra lainnya), namun tetap harus diperhatikan keamanan dan kenyamanan agar para siswa dapat belajar dengan kondusif. Kedua mengenai waktu pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara yaitu mitra SMK, peserta didik dan guru. Ketiga mengenai sistem pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk klasikal, blok, tatap muka, jarak jauh, *online* dan/atau mandiri, hal tersebut dikarenakan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah 3T yang sangat beragam. Terakhir mengenai jumlah jam mengajar pendidik untuk berkunjung yang juga harus disesuaikan dengan kondisi SMK Terbuka. Penyesuaian tersebut harus dipastikan tanpa mengurangi capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar demi menjaga kualitas lulusan SMK Terbuka.

**c. Model layanan PLK SMK Darurat**

Pendidikan merupakan salah satu layanan dasar bagi masyarakat. Dalam situasi normal pemerintah dapat memberikan layanan secara optimal bagi warganya. Pada suatu kondisi tertentu, adanya situasi kedaruratan merupakan sesuatu yang tidak bisa diperkirakan. Kedaruratan karena bencana alam maupun sosial seringkali menjadi hambatan untuk memperoleh pendidikan yang memadai bagi warga terdampak. Guna mengantisipasi hal tersebut perlu direncanakan PLK-SMK Darurat sebagai bentuk formal layanan khusus dalam bidang pendidikan. Gambar model layanan PLK-SMK Darurat sebagai berikut:

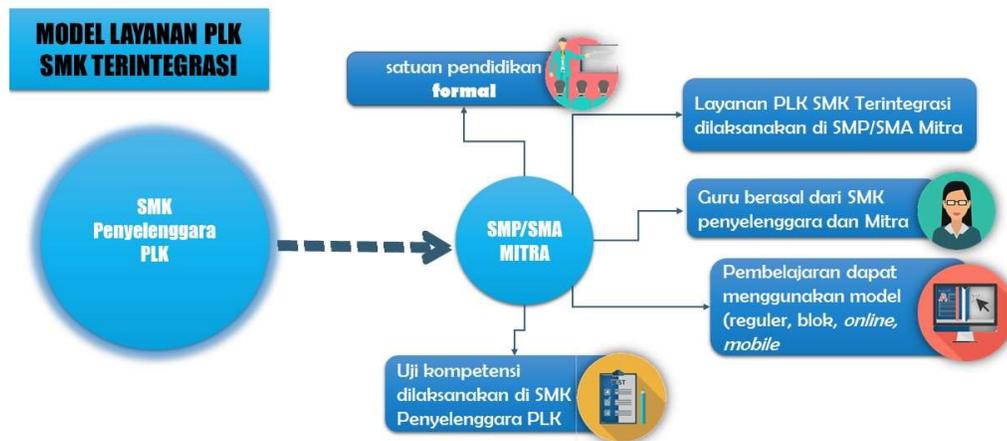


Gambar 4. 95 Model layanan PLK-SMK Darurat

Penyelenggaraan PLK-SMK Darurat dapat dilaksanakan dengan sinergi antara SMK penyelenggara PLK dengan Mitra SMK Darurat dengan mengedepankan pada kebutuhan di lapangan. Analisis pendirian memperhatikan antara lain lamanya bencana, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur penunjang, dan kesiapan manajemen. Model pembelajaran dapat mengacu pada pola di SMK penyelenggara PLK sehingga dimungkinkan terjadinya efektifitas dan efisiensi di lapangan.

#### d. Model layanan PLK SMK Terintegrasi

Keterbatasan sumber daya seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan PLK-SMK. Keterbatasan tersebut antara lain menyangkut masalah sumber daya manusia, fasilitas, dana, dan manajemen. Guna memfasilitasi terselenggaranya PLK-SMK perlu dilakukan integrasi SMK penyelenggara PLK dengan sekolah mitra. Integrasi ini dapat dilakukan melalui koordinasi untuk pelaksanaan SMK-PLK dengan konsep *sharing* untuk memastikan terselenggaranya pendidikan. Model layanan PLK-SMK disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 4. 96 Model layanan PLK-SMK Terintegrasi

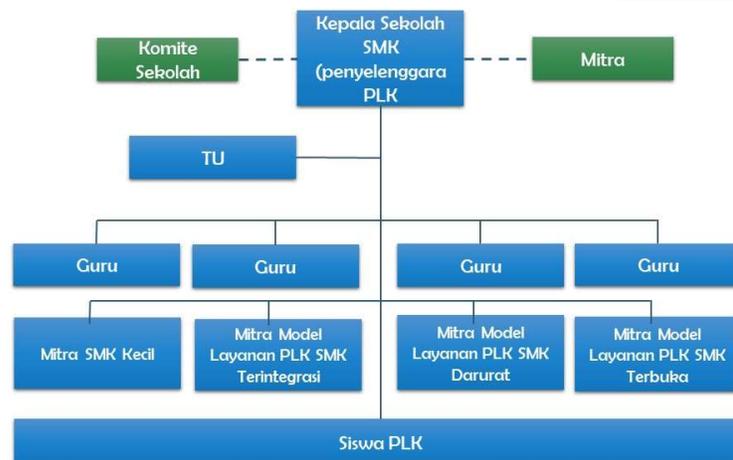
Konsep model layanan PLK-SMK Terintegrasi sebenarnya akan meminimalisir jumlah anggaran yang besar terutama untuk fasilitas. Pola koordinasi yang sehat akan berdampak pada terselenggaranya PLK-SMK yang baik.

### 3. SMK penyelenggara program PLK

Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus pada SMK adalah SMK di daerah tertinggal yang sudah terakreditasi dan pernah memperoleh program revitalisasi. Pemilihan SMK terakreditasi sebagai penyelenggara program PLK dengan mempertimbangkan faktor kecukupan sarana dan prasarana, kecukupan guru, serta kemampuan sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada siswa PLK.

SMK penyelenggara mengajukan permohonan penyelenggaraan layanan PLK kepada Direktorat PSMK dengan persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi. Proposal tersebut akan direview dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan persetujuan dari direktorat PSMK.

## STRUKTUR SATUAN PENDIDIKAN PLK SMK



Gambar 4. 97. Struktur Satuan Pendidikan PLK SMK

#### 4. Kriteria peserta didik yang masuk sasaran PLK

Pendidikan Layanan Khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada masyarakat yang belum terlayani sebelumnya. Oleh karena itu, calon peserta didik PLK harus memenuhi kriteria dengan mempertimbangkan usia, lokasi geografis, kondisi ekonomi, dan bencana alam.

##### Usia

Usia calon peserta didik program PLK pada SMK tidak dibatasi secara khusus. Bagi warga masyarakat yang sudah berusia lebih dari 18 tahun masih diperbolehkan untuk menjadi peserta didik program PLK pada SMK.

##### Lokasi geografis

Peserta didik PLK pada SMK tidak dapat mengikuti layanan program kelas reguler karena faktor lokasi yang jauh. Lokasi geografis yang jauh menyebabkan calon siswa SMK tidak dapat berangkat ke sekolah dan kembali ke rumah sesuai jadwal pembelajaran di kelas reguler. Standar jarak tempat tinggal calon siswa PLK dengan sekolah penyelenggara program layanan PLK minimal 50 KM. Standar jarak tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan transportasi, jalan penghubung menuju SMK penyelenggara, dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke SMK penyelenggara PLK.

Kondisi sosial dan ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan calon peserta layanan PLK pada SMK. Kondisi sosial dan ekonomi misalkan calon peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu sehingga harus membantu bekerja di ladang, perkebunan, atau penangkapan ikan pada waktu-waktu tertentu yang menghalanginya untuk mengikuti program kelas reguler.

Bencana alam

Situasi darurat dengan adanya bencana alam menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk menentukan penyelenggaraan layanan PLK. Calon peserta didik yang berasal dari lokasi terdampak bencana alam dapat menjadi peserta layanan program PLK pada SMK sesuai dengan lama waktu penanganan bencana yang terjadi.

## 5. Pendaftaran

Prosedur pendaftaran untuk calon peserta didik layanan PLK pada SMK dimulai dari pendaftaran, seleksi, dan penempatan. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun secara langsung di SMK penyelenggara atau mitra program layanan PLK pada SMK. Misalkan untuk model Layanan PLK SMK Kecil, pendaftaran dilakukan di SMK kecil yang berada dekat dengan tempat tinggal calon siswa. Sedangkan untuk model layanan PLK SMK Terbuka atau PLK SMK Terintegrasi dilakukan pada mitra penyelenggara PLK (sebagai contoh: pemerintah desa, SMP, SMA, dan mitra lainnya). Proses pendaftaran dilakukan bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru sebagaimana kelas reguler.



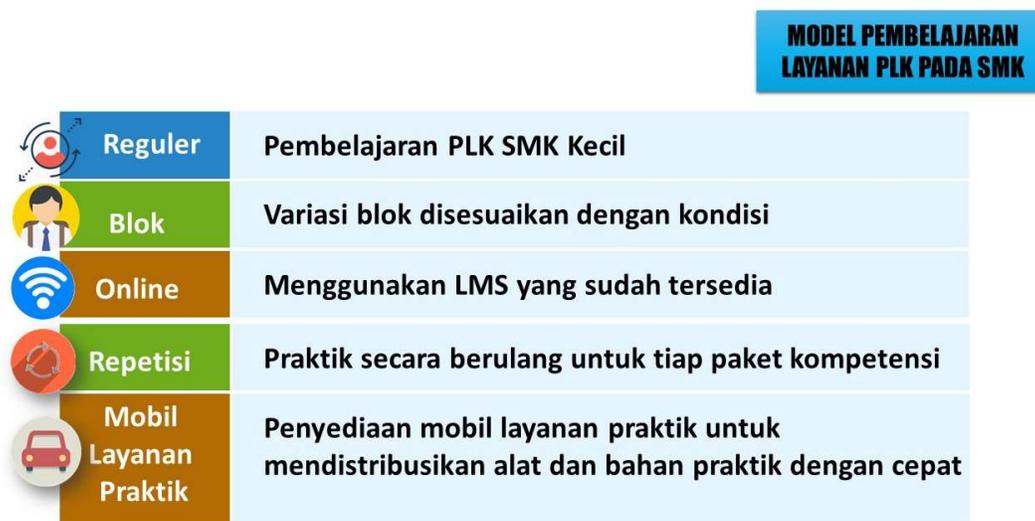
Gambar 4. 98. Proses Penerimaan Siswa Baru Layanan PLK SMK

Seleksi yang dilakukan sesuai dengan kriteria calon peserta didik layanan PLK pada SMK yang sudah dijelaskan pada bagian kriteria calon siswa PLK. Selain itu,

calon siswa juga harus memiliki kemampuan dan potensi akademik yang dirasa mencukupi untuk mengikuti layanan program PLK pada SMK. Berdasarkan seleksi tersebut, calon peserta didik layanan program PLK akan ditempatkan pada satuan belajar PLK yang diselenggarakan oleh SMK penyelenggara PLK.

## 6. Proses Pembelajaran

Model pembelajaran yang dilakukan untuk layanan program PLK terdiri dari model pembelajaran kelas reguler, model blok, model online, dan model pembelajaran dengan bantuan mobil layanan pembelajaran PLK pada SMK.



Gambar 4. 99. Model Pembelajaran Layanan PLK Pada SMK

### a. Kelas Reguler

Model pembelajaran sebagaimana kelas reguler dilakukan pada Layanan PLK SMK Kecil. Kelas reguler berarti SMK penyelenggara program PLK bekerjasama dengan SMK Kecil yang berada di satu daerah yang sama. SMK Kecil adalah sekolah yang memiliki siswa minimal 3. Akan tetapi, untuk program PLK pada SMK ini, SMK Kecil diharapkan memiliki minimal 10 siswa supaya dapat menjadi mitra untuk penyelenggaraan program PLK. Jika jumlah siswa kurang dari 10, sebaiknya SMK Kecil tersebut ditutup dan diganti menjadi program layanan PLK SMK Terbuka.

## b. Blok

Model pembelajaran blok dapat dilakukan untuk Layanan PLK pada SMK Kecil, Terbuka, Terintegrasi, maupun Darurat. Model pembelajaran blok dapat dibuat bervariasi dari sisi jangka waktu pelaksanaan maupun lokasi kegiatan sesuai dengan kondisi peserta layanan PLK dan kesiapan sumber daya di SMK penyelenggara PLK. Misalkan peserta didik PLK bertempat tinggal yang jauh dari SMK penyelenggara dan membutuhkan waktu perjalanan lebih dari 24 jam, maka model pembelajaran yang dilakukan berupa 1 bulan pembelajaran mandiri di tempat asal, 1 bulan dengan pendampingan tutor, dan 1 bulan di SMK penyelenggara PLK.



Gambar 4. 100 Variasi Pembelajaran Model Blok

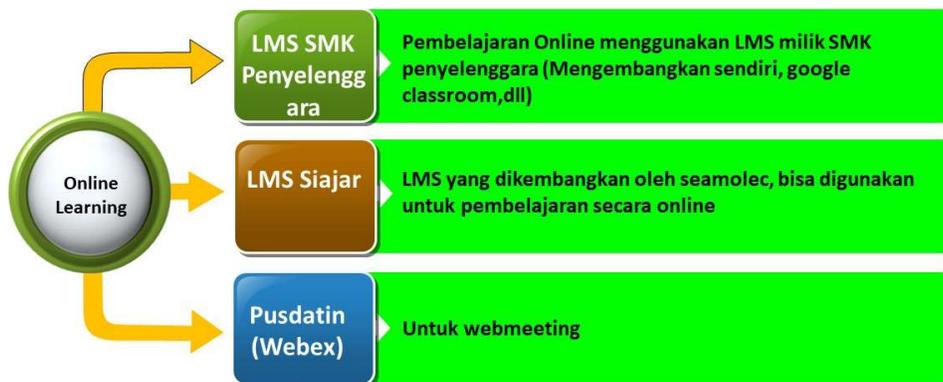
Majid, Mukhadis, dan Poerwanto (2011) menjelaskan kelebihan penerapan pembelajaran dengan model blok yaitu: (1) Pendidik dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi dan metode yang inovatif karena waktu tatap muka yang lebih lama; (2) Waktu untuk sebuah pembelajaran yang efektif dapat lebih lama hal ini dikarenakan terbuangnya waktu untuk pembukaan kelas, penjelasan tujuan atau aturan-aturan lain dalam pembelajaran serta rutinitas lain seperti absensi dan lain sebagainya dapat dikurangi karena jumlah tatap muka menjadi lebih sedikit; (3) Tatap muka antara peserta didik dan pendidik akan berlangsung lebih lama sehingga akan menjadikan pengembangan materi yang lebih dalam dan pengembangan yang lebih kritis. Serta memungkinkan pendidik untuk berinteraksi

dengan seluruh peserta didik di dalam kelas; (4) Adanya pertemuan yang berlangsung sehari atau 8 jam pelajaran, maka peserta didik akan terdorong untuk selalu menghadiri pembelajaran (tatap muka), dengan demikian kehadiran peserta didik akan lebih meningkat; dan (5) Peserta didik tidak dibebani dengan mata pelajaran yang banyak sehingga dapat mengurangi tekanan akibat beban belajar yang ditimbulkan oleh mata pelajaran yang bervariasi.

**c. Online**

Model pembelajaran online dapat menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang diimplementasikan untuk layanan PLK pada SMK. Pada saat ini tersedia beberapa LMS yang memungkinkan guru dan siswa melakukan pembelajaran secara online seperti google classroom, siajar (LMS Seamolec), dll. Model pembelajaran online dapat dilakukan untuk layanan PLK SMK Darurat, maupun untuk layanan PLK model lain selama guru dan siswa PLK memiliki peralatan (Komputer/Handphone) dan jaringan komunikasi yang dapat digunakan untuk mengakses LMS yang digunakan.

**Pembelajaran Online**



Gambar 4. 101 Sarana pembelajaran online untuk layanan PLK pada SMK

**d. Mobile Workshsop**

Salah satu perbedaan antara SMK dengan SMA adalah adanya keharusan untuk melakukan kegiatan praktik. Salah satu faktor penghambat pelaksanaan kegiatan praktik adalah tidak tersedianya peralatan praktik yang memadai. Pengembangan mobil layanan praktik dapat digunakan untuk mengatasi hambatan

tersebut. Mobil di desain supaya dapat membawa peralatan praktik yang dapat dipergunakan untuk kegiatan praktik 1 rombongan belajar siswa PLK. Desain kendaraan yang direkomendasikan juga memungkinkan cukup dibutuhkan 1 orang saja untuk menaikkan dan menurunkan peralatan praktik yang dibawa sehingga lebih mudah untuk bergerak dari SMK penyelenggara ke lokasi kegiatan layanan PLK.



Gambar 4. 102 Mobil layanan praktik PLK pada SMK

**e. Pembelajaran praktik model repetisi berbasis paket kompetensi**

Proses pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dengan metode repetisi sudah banyak dilakukan dalam bidang bahasa (Wirawan, 2019), olah raga (Zemam, 2019), sains (Hartati, Gufron, & Melinda, 2020), dan keterampilan motorik lainnya (Vleugels, Swinnen, & Hardwick, 2020). Selain itu, tim kajian juga mencoba melaksanakan peningkatan kemampuan mahasiswa untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi otomotif bidang tune up kendaraan EFI. Mahasiswa yang belum pernah melakukan praktik ternyata membutuhkan latihan berulang (repetisi) sebanyak 8-10 kali supaya dapat menguasai dan lolos mengikuti uji kompetensi tune up EFI. Oleh karena itu, model pembelajaran praktik untuk peserta PLK direkomendasikan menggunakan model repetisi.

Pelaksanaan praktik model repetisi juga perlu disesuaikan dengan paket-paket kompetensi yang ada pada setiap kompetensi keahlian sehingga perlu dilakukan modifikasi dari tahapan pembelajaran pada model praktik reguler. Misalkan untuk program kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor, jadwal praktik dapat disesuaikan dengan paket uji kompetensi sepeda motor.

Setiap kali praktik, siswa program PLK melakukan 8-10 kali pengulangan sesuai dengan prosedur uji kompetensi. Pada pertemuan pertama, guru

memberikan contoh (demonstrasi) melakukan servis berkala sepeda motor. Setelah itu, guru memberikan penjelasan tentang komponen, peralatan, dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan servis berkala sepeda motor disertai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu diperhatikan. Setelah itu, setiap siswa diberi kesempatan untuk melakukan praktik servis berkala sepeda motor secara berulang antara 8-10 kali. Diakhir praktik, siswa dapat diminta untuk melakukan uji kompetensi.

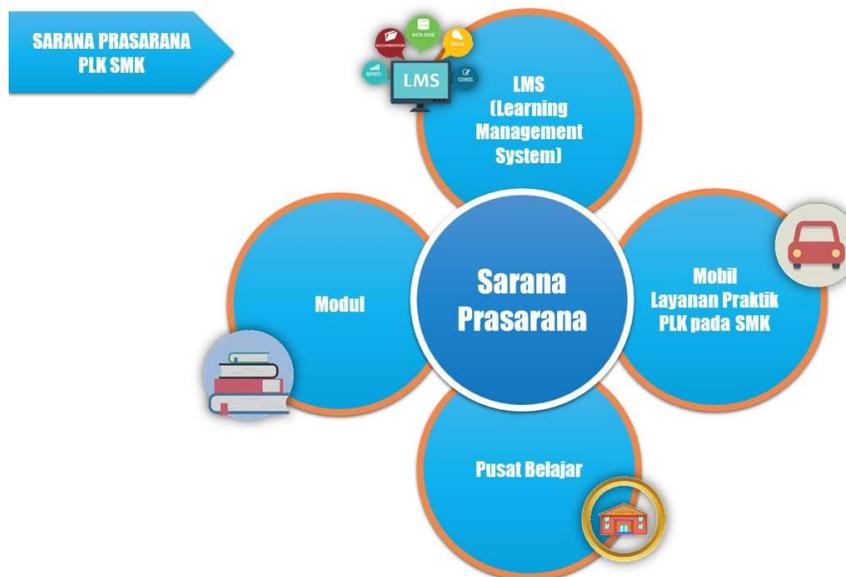
Tabel 4. Paket Uji Kompetensi Teknik Sepeda Motor

<b>1. Servis Berkala Sepeda Motor</b>
Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin
Memelihara Sistem Rem
Memperbaiki Instrumen dan Sistem Peringatan
<b>2. Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Mesin Sepeda Motor</b>
Memelihara Engine Berikut Komponen-komponennya
Memelihara Sistem Pendingin Berikut Komponen-komponennya
Memelihara Unit Kopling Manual dan Otomatis
Memelihara Sistem Transmisi Manual
Memelihara dan Memperbaiki Sistem Kontrol Emisi
Memperbaiki dan Melakukan Overhaul Komponen Sistem Bahan Bakar Bensin
Memperbaiki Engine berikut Komponen-komponennya
<b>3. Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Chassis dan Suspensi Sepeda Motor</b>
Memeriksa Sistem Kemudi
Memeriksa Sistem Suspensi
Memelihara Sistem Suspensi
Memelihara Rantai/Chain
Merakit dan Memasang Sistem Rem berikut Komponen-komponennya
Memperbaiki Sistem Rem
Memperbaiki Sistem Kemudi
Mengganti Rantai/chain
<b>4. Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Kelistrikan Sepeda Motor</b>
Menguji, Memelihara, dan Mengganti Baterai
Melakukan Perbaikan Ringan pada Rangkaian Sistem Kelistrikan
Memperbaiki Sistem Kelistrikan
Memasang, Menguji, dan Memperbaiki Sistem Penerangan dan Wiring
Memperbaiki Sistem Pengapian

Memasang, Menguji, dan Memperbaiki Sistem Pengaman
<b>5. Overhaul Sistem Mesin Sepeda Motor</b>
Memperbaiki dan Melakukan Overhaul Sistem Pendingin berikut Komponen-komponennya
Melakukan Overhaul Engine dan Menilai Komponen-komponennya, Memeriksa, Melakukan Prosedur Pengujian yang Sesuai
Melakukan Overhaul Sistem Transmisi Manual
Melakukan Overhaul Kopling Manual dan Otomatis
<b>6. Overhaul Sistem Chasis dan Suspensi Sepeda Motor</b>
Melepas, Memasang, dan Menyetel Roda
Membongkar, Memperbaiki, dan Memasang Ban Dalam dan Ban Luar
<b>7. Overhaul Sistem Kelistrikan Sepeda Motor</b>
Memperbaiki Sistem Starter
Memperbaiki Sistem Pengisian

## 7. Sarana dan prasarana pembelajaran

Sarana dan prasarana pembelajaran yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan program layanan PLK pada SMK terdiri dari modul, Learning Management System (LMS), Mobil Layanan Praktik PLK pada SMK, dan pusat belajar.



Gambar 4. 103 Sarana dan prasarana pembelajaran Layanan PLK pada SMK

### a. Modul

Modul merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam menguasai suatu materi spesifik dalam pembelajaran serta dapat digunakan secara mandiri guna membantu tercapainya tujuan pembelajaran (Abdulatip, Suratsih, Henuhili, & Rahayu, 2015; Daryanto, 2013). Modul memiliki fungsi sebagai bahan ajar mandiri, pengganti fungsi pendidik, alat evaluasi, dan sebagai bahan rujukan. Pada penyelenggaraan proses pendidikan di Universitas Terbuka, modul memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan.

Penyelenggaraan PLK pada SMK juga membutuhkan tersedianya modul-modul pembelajaran untuk mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Modul dapat dicetak oleh SMK penyelenggara dengan *mendownload* dari beberapa sumber bahan ajar digital yang sudah ada. Modul yang sudah dicetak selanjutnya didistribusikan kepada siswa kelas PLK sebagai sumber bahan ajar yang dapat dipergunakan secara mandiri. Keberadaan modul akan sangat penting khususnya untuk penyelenggaraan PLK pada SMK Kecil, Terbuka, dan Terintegrasi yang memiliki lokasi jauh dan kemungkinan gangguan komunikasi yang besar.

### b. *Learning Management System*

Walaupun penyelenggaraan PLK pada SMK memiliki sasaran utama yaitu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki dukungan jaringan komunikasi dan internet yang terbatas, akan tetapi penggunaan LMS masih berpeluang untuk diterapkan. Berdasarkan analisis tentang ketersediaan sumber bahan ajar digital, LMS tidak berbayar, dan aplikasi pembelajaran *open source*, proses pembelajaran dapat dilakukan menggunakan LMS yang sudah tersedia dan bisa diakses secara langsung oleh guru dan siswa SMK. LMS yang direkomendasikan yaitu LMS Sijar SEAMOLEC, Google Classroom, Schoology, dan Edmodo.

### c. Kendaraan layanan praktik

Pendidikan Layanan Khusus di daerah tertinggal memiliki hambatan salah satunya jarak tempuh yang jauh antara siswa dengan sekolah. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat memilih tidak mengirimkan anaknya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu, salah satu alternative solusi untuk memberikan kesempatan kepada siswa PLK untuk melaksanakan pembelajaran praktik yaitu dengan menyediakan kendaraan layanan praktik.



Gambar 4. 104 Kendaraan layanan praktik PLK pada SMK

Kendaraan layanan praktik tersebut dirancang supaya dapat membawa perlengkapan praktik yang dibutuhkan dan berpindah dari lokasi SMK penyelenggara ke daerah siswa peserta program PLK. Mobil layanan praktik dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran praktik. Penggunaan kendaraan layanan praktik dapat lebih efisien jika jumlah siswa peserta PLK dari suatu lokasi yang jauh dari SMK penyelenggara cukup banyak.

#### d. Pusat belajar

Pusat belajar merupakan salah satu sarana yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Pusat belajar dipergunakan untuk proses pembelajaran siswa PLK. Untuk program PLK pada SMK Kecil, pusat belajar dilaksanakan di lokasi SMK kecil yang menjadi mitra penyelenggara layanan PLK. Untuk PLK SMK Terbuka, pusat belajar dapat dilaksanakan di lokasi mitra, misalkan balai desa atau sanggar yang memungkinkan untuk proses pembelajaran baik teori ataupun praktik sesuai dengan jumlah siswa peserta PLK. Pada PLK SMK terintegrasi, pusat belajar dilaksanakan di sekolah mitra (SMP/SMA) yang bekerjasama dalam penyelenggaraan PLK bersama dengan SMK penyelenggara. Sedangkan PLK SMK Darurat, maka pusat belajar dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang aman dan memungkinkan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran pada situasi darurat.

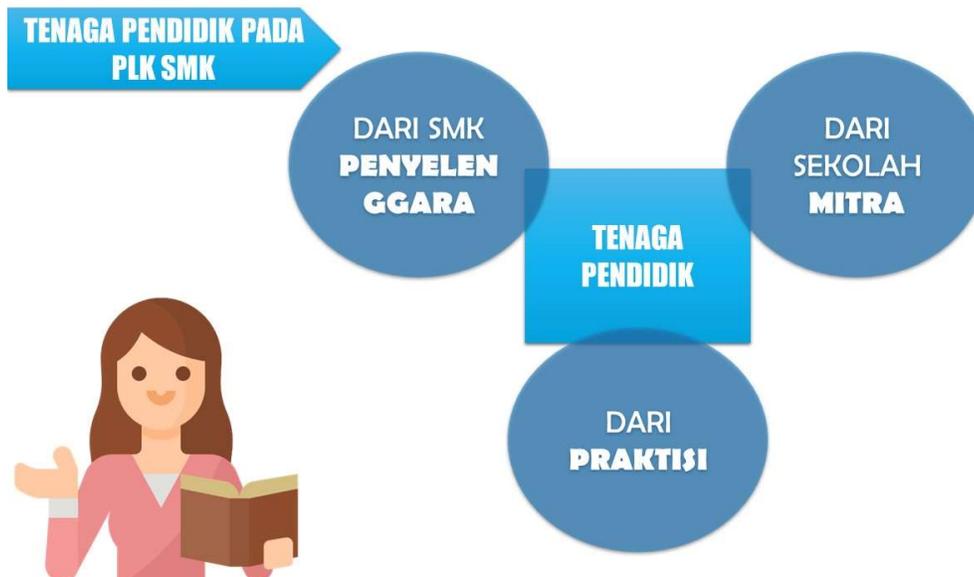
#### e. Asrama pembelajaran

Jarak geografis yang tidak memungkinkan siswa untuk berangkat dan pulang dari sekolah ke rumah setiap hari menuntut adanya asrama pembelajaran yang dapat menampung siswa PLK. Asrama pembelajaran dapat dipergunakan secara penuh menampung siswa PLK selama 1 semester, ataupun dipergunakan hanya pada saat siswa belajar praktik di SMK penyelenggara. Adanya asrama akan membantu terselenggaranya proses pembelajaran model Blok, dimana siswa PLK mengikuti pembelajaran teori di rumah berbasis modul/online dan mengikuti pembelajaran praktik di SMK penyelenggara. Asrama yang dipergunakan dapat berupa bangunan khusus asrama siswa ataupun bekerjasama dengan masyarakat setempat yang memiliki kos-kosan yang letaknya di dekat dengan lingkungan sekolah.

### 8. Pendidik

Pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Salah satu permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program PLK pada SMK yaitu kurangnya ketersediaan pendidik yang mau dan mampu untuk terlibat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam kajian ini direkomendasikan untuk membuka kesempatan yang lebih luas untuk calon-calon pendidik selain guru dari SMK penyelenggara PLK.

Guru untuk program PLK pada SMK dapat diambilkan dari SMK penyelenggara, Sekolah mitra, ataupun praktisi. Guru yang berasal dari SMK penyelenggara artinya guru-guru yang memang mengajar di SMK penyelenggara. Guru dari sekolah mitra artinya guru-guru yang tidak mengajar di SMK penyelenggara akan tetapi mengajar di Sekolah yang menjadi mitra penyelenggaraan program PLK pada SMK. Guru tersebut dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran selain produktif. Misalkan untuk guru matematika dapat diambilkan dari guru matematika di SMA yang menjadi sekolah mitra.



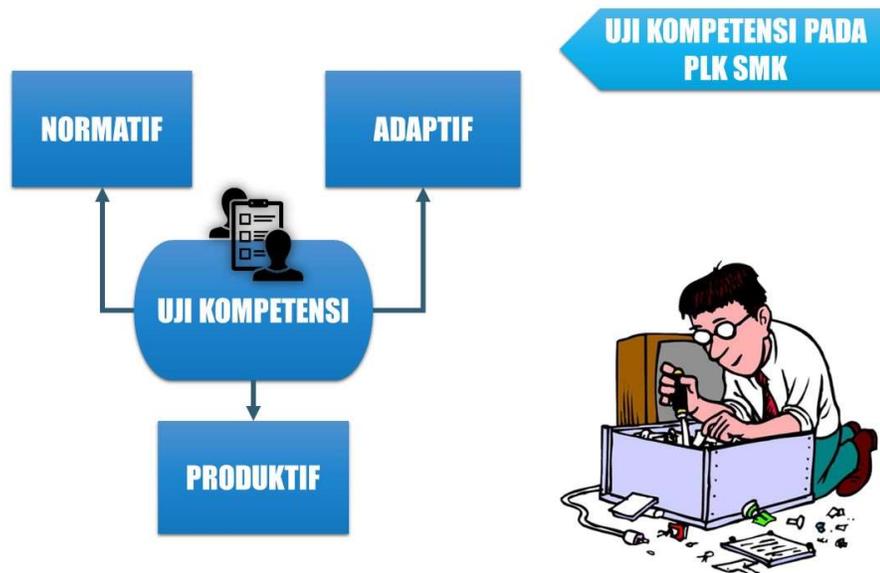
Gambar 4. 105 Pendidik program layanan PLK pada SMK

Guru untuk program PLK pada SMK juga dapat mengoptimalkan praktisi sebagai tenaga pendidik. Berdasarkan salah satu temuan di SMKN 1 Gangga, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, terdapat 5 orang praktisi yang bersedia mengajar di SMK. Praktisi-praktisi tersebut bersedia meluangkan waktu 1-2 hari dalam seminggu untuk mengajar siswa di sekolah. Walaupun bersedia mengajar di sekolah, para praktisi tersebut tidak bersedia menjadi guru tetap karena lebih memilih untuk berkarir di bidang keahliannya saat ini. Peluang ini dapat dicoba direplikasi untuk memenuhi kebutuhan guru untuk mengajar praktik bagi siswa peserta PLK.

Guru yang mengajar siswa peserta program PLK harus mendapatkan tambahan honor selain gaji tetap yang sudah diterima. Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk penghargaan bagi guru-guru yang sudah bersedia untuk mengajar siswa peserta PLK.

## 9. Uji Kompetensi

Uji kompetensi peserta didik layanan LPK pada SMK terdiri dari mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk layanan PLK pada SMK dapat dilakukan sama dengan Uji Kompetensi untuk kelas reguler ataupun dengan modifikasi.



Gambar 4. 106 Ragam Uji Kompetensi program layanan PLK pada SMK

**a. Mata pelajaran normatif dan adaptif**

Proses pembelajaran layanan PLK pada SMK berbeda dengan kelas reguler, khususnya untuk model layanan PLK SMK terbuka, terintegrasi, dan darurat. Oleh karena itu, uji kompetensi yang harus ditempuh oleh siswa PLK pada SMK dapat dimodifikasi sesuai dengan situasi yang melingkupinya. Pelaksanaan uji kompetensi pelajaran normative dan adaptif untuk layanan PLK SMK direkomendasikan menggunakan *multiple choice* dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 70 dengan mempertimbangkan partisipasi kehadiran peserta didik dalam proses pembelajaran.

**b. Mata pelajaran produktif**

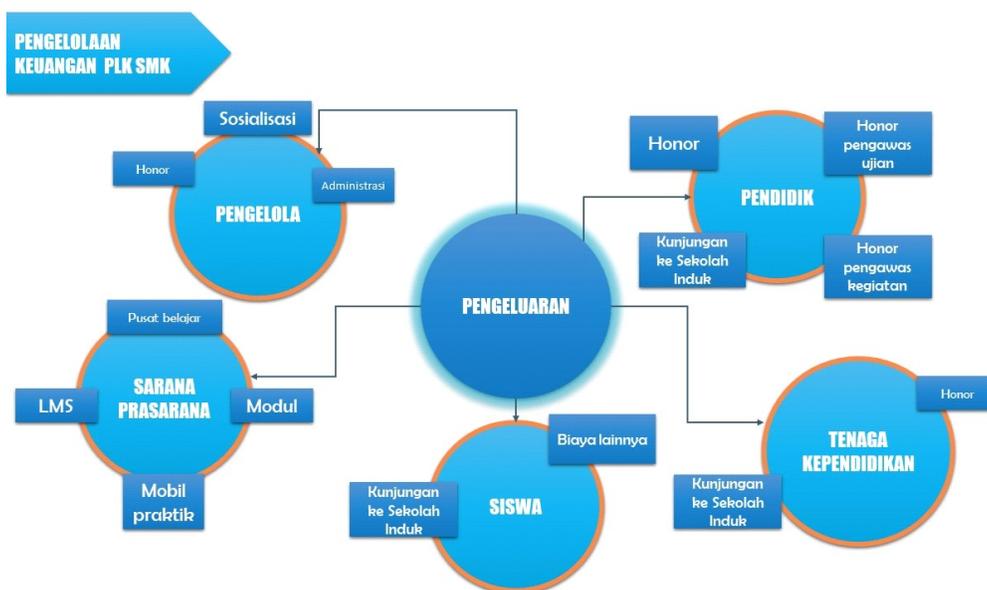
Proses pembelajaran praktik siswa program layanan PLK berbeda dengan kelas reguler. Proses pembelajaran yang dilakukan untuk siswa program layanan PLK diprioritaskan untuk penguasaan aspek keterampilan. Oleh karena itu, uji kompetensi produktif siswa layanan program PLK perlu memberikan porsi keberhasilan dalam uji kompetensi praktik lebih besar daripada uji kompetensi teorinya.

Proses uji kompetensi mata pelajaran produktif dilakukan disetiap akhir proses pembelajaran praktik yang berbasis paket-paket uji kompetensi produktif. Sebagai contoh, peserta didik layanan program PLK yang mempelajari kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor, ditahun pertama belajar tentang servis berkala sepeda motor dengan model blok metode repetisi. Diakhir proses pembelajaran, peserta didik akan mengikuti uji kompetensi produktif tentang

servis berkala sepeda motor. Jika peserta didik dapat menyelesaikan uji kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan akan diberi sertifikat kompetensi.

## 10. Pembiayaan

Pembiayaan dalam kegiatan pendidikan merupakan salah satu elemen dasar terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber-sumber pendanaan namun juga pemanfaatan secara efektif dan efisien. Dana yang diperlukan dalam pelaksanaan PLK di SMK dapat bersumber pada beberapa pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan sumber lainnya. Prinsip utama yang menjadi prioritas dalam PLK di SMK adalah memastikan keterlaksanaan dan keberlanjutannya. Pembiayaan dalam PLK di SMK pada tahap awal menekankan pada standar minimal untuk terselenggaranya pendidikan. Kebutuhan biaya dalam PLK di SMK dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4. 107 Identifikasi kebutuhan pembiayaan layanan PLK pada SMK

### a. Kebutuhan pembiayaan PLK pada SMK

Pembiayaan layanan PLK pada SMK secara umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan, pengelola, dan sarana prasarana. Secara rinci kebutuhan biaya tersebut sebagai berikut:

- 1) Siswa, pada komponen ini kebutuhan pembiayaan antara lain digunakan untuk kebutuhan operasional pelaksanaan pembelajaran dan kunjungan ke sekolah induk yang dijadwalkan secara periodik pada suatu waktu.
- 2) Pendidik, pada komponen ini kebutuhan pembiayaan memiliki aspek yang didanai pada honor, honor pengawas kegiatan, honor pengawas ujian, dan kunjungan ke sekolah induk terjadwal.
- 3) Tenaga kependidikan, pada komponen ini pembiayaan difokuskan pada honor dan biaya untuk kunjungan ke sekolah induk.
- 4) Pengelola, kebutuhan utama adalah untuk memenuhi biaya administrasi, honor, dan sosialisasi.
- 5) Sarana prasarana, kebutuhan pada komponen ini paling banyak karena digunakan untuk mendukung keterlaksanaan PLK di SMK berupa pembuatan dan pengorganisasian LMS, pembuatan dan pengembangan modul, pengembangan pusat belajar, dan pengadaan mobil praktik.

#### b. Sumber Dana

Dana merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Pada tahap awal pendirian Pendidikan Layanan Khusus di Sekolah Menengah Kejuruan (PLK-SMK) diperlukan dukungan pemerintah dan berbagai pihak terkait. Sumber dana PLK-SMK dapat berasal dari beberapa sumber:

1. Pusat (APBN)
2. Daerah (APBD)
3. Masyarakat
4. Sumber lainnya, misal hibah, CSR, dll

#### c. Perkiraan Anggaran

No	Deskripsi	Komponen Biaya	Satuan	Harga	
				Satuan	Jumlah
1.	Pengelola	sosialisasi	1 pkt	800.000	800.000
		Honor	1 pkt	8.000.000	8.000.000
		Administrasi (koordinasi)	1 pkt	500.000	500.000
2.	Sarana dan Prasarana	Pusat belajar	1 pkt	5.000.000	5.000.000
		LMS	1 pkt	5.000.000	5.000.000
		Modul	1 pkt	5.000.000	5.000.000
		Mobil Praktik	1 pkt	350.000.000	350.000.000
3.	Pendidik	Honor Pendidik	1 pkt	20.000.000	20.000.000
		Honor pengawas	1 pkt	5.000.000	5.000.000

		Honor	1 pkt	2.500.000	2.500.000
		Honor Pengawas Kegiatan	1 pkt	5.000.000	5.000.000
4.	Siswa	Kunjungan ke	1 pkt	2.000.000	2.000.000
		Biaya lainnya	1 pkt	15.000.000	15.000.000
5.	Tenaga Kependidikan	Honor	1 pkt	6.000.000	6.000.000
		Kunjungan ke sekolah inti	1 pkt	4.000.000	4.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>533.800.000</b>

## J. PROSEDUR PENYELENGGARAAN PLK PADA SMK

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus yang sifatnya masih umum untuk semua jenjang pendidikan formal. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Permendikbud NO. 72 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, Permendikbud No. 67 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PLK, dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham No. PAS-43.PR.01.02 Tahun 2016 tentang standar penyelenggaraan pendidikan layanan khusus.

### 1. Prosedur penyelenggaraan PLK berdasarkan Permendikbud No. 72 Tahun 2013

Secara khusus, peraturan yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penyelenggaraan PLK yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, pendirian PLK dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Persyaratan yang harus disiapkan meliputi studi kelayakan, rencana induk pengembangan, sumber peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sumber pembiayaan, sarana dan prasarana, serta penyelenggara PLK. Persyaratan tersebut selanjutnya diajukan melalui pertimbangan Kepada Dinas Pendidikan dan ditujukan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan izin.



Gambar 4. 108 Prosedur penyelenggaraan PLK berdasarkan Permendikbud No. 72 Tahun 2013

## 2. Prosedur penyelenggaraan PLK pada SMK

Permendikbud No. 72 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus perlu direvisi dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah (SMA/SMK) berada di tingkat provinsi. Selain itu, dalam model penyelenggaraan PLK pada SMK ini, inisiatif hendaknya dilakukan oleh SMK untuk berkontribusi dalam peningkatan angka partisipasi sekolah serta memberikan akses pendidikan formal bagi masyarakat di daerah tertinggal.

Oleh karena itu, prosedur penyelenggaraan PLK pada SMK hasil dari kajian ini direkomendasikan dengan menjadikan SMK sebagai pelaku utama dan inisiator layanan program. Implementasi model layanan PLK dimulai dengan adanya kebijakan dari Direktorat SMK untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi SMK yang menyelenggarakan PLK. SMK pengusul kegiatan layanan PLK adalah SMK yang memiliki kualitas bagus ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat akreditasi dan pernah mendapatkan dana revitalisasi. SMK pengusul mengajukan permohonan penyelenggaraan PLK dilengkapi dengan adanya MoU kerjasama dengan mitra PLK, Studi kelayakan, dan Rencana Induk Pengembangan PLK.



Gambar 4. 109. Prosedur penyelenggaraan PLK pada SMK yang direkomendasikan

Berkas-berkas pengajuan diserahkan ke dinas pendidikan provinsi untuk mendapatkan persetujuan dan perizinan. Selain itu, koordinasi juga perlu dilakukan oleh SMK pengusul ke Kabupaten/Kota lokasi penyelenggaraan untuk menjamin keterlaksanaan program layanan PLK.

## BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. SIMPULAN

1. Program Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di SMK dapat dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah sasaran untuk mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Daerah sasaran program PLK pada SMK secara umum memiliki potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Jumlah SMK di daerah tertinggal secara umum masih bisa dioptimalkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Jumlah SMK yang ada juga diikuti dengan rasio Guru dan Siswa SMK yang rata-rata 1: 14 untuk 62 Daerah tertinggal. Walaupun secara rasio jumlah guru terlihat masih sangat mencukupi, akan tetapi jumlah guru produktif masih sangat kurang. Terdapat beberapa daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk dalam 5 tahun terakhir (2014-2019) lebih dari 5000 orang. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk penambahan ruang kelas baru atau pengembangan SMK baru di daerah tertinggal.
2. Potensi sumber bahan ajar digital untuk membantu efektifitas program pembelajaran di SMK sudah mulai dirintis dan dikembangkan oleh beberapa pihak seperti Direktorat SMK, Seamolec, LPTK Kejuruan, dan Guru-Guru SMK. Sumber-sumber bahan ajar digital sudah tersedia dengan jumlah yang cukup banyak. Akan tetapi, sumber-sumber bahan ajar digital untuk SMK masih terbatas pada mata pelajaran normative dan adaptif. Oleh karena itu, pengembangan sumber bahan ajar digital untuk setiap kompetensi-kompetensi keahlian yang ada di SMK perlu dilakukan khususnya untuk mata pelajaran produktif. Program pengembangan sumber bahan ajar digital dapat melibatkan stakeholder SMK seperti Direktorat SMK, Seamolec, LPTK, Guru-Guru SMK, dan pihak-pihak lain yang dapat berkontribusi.
3. Pelaksanaan PLK pada SMK memiliki beberapa hambatan seperti motivasi peserta didik, jarak geografis, kondisi sosial-ekonomi, dan keterbatasan jumlah pendidik. Oleh karena itu diperlukan Modifikasi (M), Afirmasi (A), Proyeksi (P), dan Strategi (S) untuk menyesuaikan Standar Nasional Pendidikan supaya dapat mengakomodasi masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan formal Menengah Kejuruan sebelumnya. Bentuk modifikasi yang dilakukan misalnya proses pembelajaran, standar guru, dan standar penilaian. Bentuk afirmasi yang dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berusia lebih dari 21 tahun untuk mengikuti program layanan PLK. Sedangkan proyeksi dan strategi dilakukan untuk mengembangkan program layanan PLK sehingga Direktorat SMK dapat berkontribusi dalam peningkatan angka partisipasi sekolah, khususnya untuk jenjang menengah.

4. Model pelaksanaan PLK pada SMK dapat berupa model PLK SMK Kecil, PLK SMK Terbuka, PLK SMK Darurat, dan PLK SMK Terintegrasi. PLK SMK kecil dilaksanakan oleh SMK penyelenggara layanan program dengan SMK yang memiliki jumlah siswa kurang dari 10 orang. PLK SMK Terbuka dilaksanakan oleh SMK penyelenggara bekerjasama dengan unsur masyarakat lokasi siswa PLK tinggal. PLK SMK darurat dilaksanakan pada kondisi khusus terjadi bencana alam atau situasi darurat lainnya yang membuat kegiatan pendidikan tidak bisa berjalan dengan normal. PLK SMK darurat dapat dilakukan oleh SMK penyelenggara melalui kerjasama SMK penyelenggara dengan pihak-pihak yang memungkinkan. Sedangkan PLK SMK Terintegrasi dilaksanakan oleh SMK penyelenggara bekerjasama dengan sekolah mitra baik SMP atau SMA.
5. Sistem pengelolaan program PLK pada SMK melibatkan berbagai pihak mulai dari Direktorat SMK, Dinas Pendidikan Provinsi, SMK penyelenggara, Mitra program PLK, dan pemerintah daerah. Setiap pihak memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing supaya program PLK dapat berjalan dengan efektif.
6. Prosedur penyelenggaraan PLK pada SMK diawali dengan adanya skema bantuan pembiayaan untuk program PLK. Selanjutnya SMK yang memenuhi syarat (terakreditasi dan pernah mendapatkan dana revitalisasi) dapat mengusulkan untuk menyelenggarakan program PLK dengan mengajukan dokumen yang disertai dengan MoU ketersediaan mitra, studi kelayakan, dan rencana induk pengembangan PLK. Dokumen diajukan dengan persetujuan dinas pendidikan provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

## B. REKOMENDASI

---

1. Peningkatan kompetensi guru produktif di SMK daerah tertinggal,
2. Kerjasama pelaksanaan Praktik Kependidikan dengan LPTK untuk SMK di daerah tertinggal sebagai bagian kegiatan Merdeka Belajar
3. Kerjasama dengan praktisi sebagai pengajar mata pelajaran produktif
4. Data pokok SMK perlu mengakomodasi kebutuhan data jumlah guru produktif di SMK sehingga bisa menunjukkan kebutuhan riil di lapangan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran praktik di SMK daerah tertinggal,
6. Pembukaan kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta mempertimbangkan faktor kejenuhan jumlah lulusan,
7. Menjalin perjanjian kerjasama dengan SMP sebagai sumber siswa,
8. SMK di daerah tertinggal berusaha secara langsung berkontribusi dalam aktifitas yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.
9. Membuka kesempatan kepada pihak luar daerah untuk bekerjasama/berinvestasi dengan SMK dalam mengembangkan potensi daerah

- 
10. Adanya grant untuk penyelenggaraan Layanan PLK pada SMK penyelenggara oleh direktorat SMK
  11. Penambahan jumlah buku digital untuk kompetensi keahlian yang dibutuhkan khususnya untuk layanan PLK
  12. Kerjasama pelaksanaan Praktik Kependidikan dengan LPTK untuk SMK di daerah tertinggal sebagai bagian kegiatan Merdeka Belajar
  13. Kerjasama dengan praktisi sebagai pengajar mata pelajaran produktif



## DAFTAR PUSTAKA

- Abramovici, M., Göbel, J. C., & Neges, M. (2015). Smart engineering as enabler for the 4th industrial revolution. In *Integrated systems: Innovations and applications* (pp. 163-170). Springer, Cham.
- Darmawan, B. (2014). Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pelopor Pendidikan*.
- GTK Kemendikbud. (2020). Merdeka Belajar. Diambil pada 5 Juni 2020 dari <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>
- Hartati, S., Gufron, D., & Melinda, R. (2020). Mathematical Problem Solving Ability: The Impact of Auditory, Intellectually and Repetition Learning Models and Based Learning Problems on Trigonometry Materials. *Desimal: Jurnal Matematika*, 3(2), 183-190.
- Huda, N. (2017). MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM. *AL-TANZIM : JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM*. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i2.113>
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Share : Social Work Journal*. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>
- Jahari, J., Khoiruddin, H., & Nurjanah, H. (2019). MANAJEMEN PESERTA DIDIK. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*. <https://doi.org/10.15575/isema.v3i2.5009>
- Kustawan, D., & Meimulyani, Y. (2013). *Mengenal Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan Khusus & Serta Implementasinya*.
- Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Governance (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*.
- Mahdia, Faya, and Fiftin Noviyanto. "Pemanfaatan Google Maps Api untuk Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik Pasca Bencana Alam Berbasis Mobile Web ( Studi Kasus : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota YOGYAKARTA )." *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, vol. 1, no. 1, 1 Jun. 2013, pp. 162-171.
- Petersen, A. C. (2011). *Educational partnerships. Connecting school, families, and the community*. California: SAGE Publications, Inc.
- Prabawa, M. S., Indriani, W., & Dewiyanti, H. (2019). Mitigasi Spasial terhadap Bencana Sosial di Permukiman Johar Baru, Jakarta Pusat. *Jurnal Arsitektur ZONASI*. <https://doi.org/10.17509/jaz.v2i1.15062>
- Raharjo, S. B. (2013). EVALUASI TREND KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*. <https://doi.org/10.21831/pep.v16i2.1129>

- Ramdhani, M. A. (2017). Lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan UNIGA*.
- Schröder, T. (2019). A regional approach for the development of TVET systems in the light of the 4th industrial revolution: the regional association of vocational and technical education in Asia. *International Journal of Training Research*, 17, 83–95
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution* (Geneva: World Economic Forum).
- Semaun, F. (2019). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.  
<https://doi.org/10.31932/jpk.v4i1.373>
- Sudarsana, I. K. (2016). PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM UPAYAPEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA. *Jurnal Penjaminan Mutu*. <https://doi.org/10.25078/jpm.v1i1.34>
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*.
- UNESCO. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. In *The Salamanca statement and framework for action on special needs education*.
- Usman, H., Darmono, Putra, G. H. N. (2019). *Manajemen kemitraan SMK dengan dunia usaha/industry menyongsong era Revolusi Industri 5.0*. Yogyakarta: UNY press.
- Vleugels, L. W., Swinnen, S. P., & Hardwick, R. M. (2020). Skill acquisition is enhanced by reducing trial-to-trial repetition. *Journal of Neurophysiology*, 123(4), 1460-1471.
- Widarto. (2019). *Penguatan employability skills dan budaya kerja industry lulusan pendidikan vokasional*. Yogyakarta: UNY Press.
- Wirawan, I. G. N. (2019). Effect of repetition method on teaching English process in classroom. *International journal of social sciences and humanities*, 3(3), 143-146.
- Zemam, A. (2019). Effects Of Plyometric Exercises With Repetition Training Method On Vertical Jump Performance And Soccer-heading Skills.

## LAMPIRAN

1. Contoh studi kelayakan pengembangan SMK baru
2. Usul rencana pendirian PLK oleh pemrakarsa
3. Pemberian pertimbangan oleh Kepala Dinas Pendidikan
4. Desain kendaraan layanan praktik PLK pada SMK

**YAYASAN INDONESIA CERDAS**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MERDEKA**  
Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara  
Alamat : Jl. Raya Perjuangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

Nomor : ..... /SMK-M/MOU/IV/2016  
Lampiran : 3 lembar  
Hal : Kerjasama MOU (Momerendum Of Understanding)  
Dengan Pasangan Mitra Penyelenggara PLK

Kepada Yth.  
Kepala / Pimpinan / Ketua

.....  
Di tempat

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka Penyediaan Layanan Pendidikan Kejuruan yang berkualitas sebagai upaya perbaikan dan peningkatan terhadap sumber daya manusia yang beriman, berilmu, cerdas, terampil dan mampu menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup di masa sekarang dan pada masa-masa yang akan datang, maka perlu dibuat surat perjanjian kerjasama (MOU) dengan institusi pasangan mitra penyelenggara PLK. Berikut kami sertakan surat (blanko) MOU dimaksud, seperti tertuang pada lampiran.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Lombok Utara,

.....

KEPALA SEKOLAH  
SMK MERDEKA

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK MERDEKA LOMBOK UTARA  
DENGAN  
SMK KECIL SEBAGAI MITRA PENYELENGGARA PLK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala sekolah SMK MERDEKA Lombok Utara  
Alamat Sekolah : Jalan Raya Perjuangan Kec. Gangga Kab. Lombok Utara  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (I)  
Dalam hal ini atas nama SMK Merdeka Lombok Utara
2. Kepala/ Pimpinan/ Ketua

Nama : [REDACTED]  
Unit Kerja : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Nomor Telp. : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (II)

Dalam hal ini atas nama Lembaga / Instansi sebagai Institusi Pasangan (IP) SMK Merdeka Lombok Utara

Bahwa pada hari ini ..... Tanggal ... bulan ..... Tahun ..... PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan Program Layanan PLK SMK Kecil SMK Merdeka dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut.

**Pasal I**

**TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan kejuruan yang berkualitas kepada masyarakat daerah tertinggal.

**Pasal II**

**PRINSIP KERJASAMA**

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling menguntungkan bagi kedua pihak.

**Pasal III**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pelaksanaan Program Layanan PLK antara lain:

1. Sebagai tempat Pelaksanaan Program Layanan PLK SMK Kecil  
PIHAK PERTAMA : SMK PENYELENGGARA  
PIHAK KEDUA : SMK KECIL SEBAGAI MITRA PENYELENGGARA
2. Penyusunan bersama Program Layanan PLK SMK Kecil

3. Bersama dengan pihak sekolah melaksanakan proses pendidikan, pembimbing dan transfer ilmu selama pelaksanaan Program Layanan PLK berlangsung

**Pasal IV**

**MASA KERJASAMA**

Kerjasama ini berlaku sejak Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai dengan Naskah perjanjian Kerjasama yang baru disepakati kedua belah pihak

**Pasal V**

**LAIN-LAIN**

Naskah Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah mufakat bersama

Lombok Utara, .....

PIHAK KEDUA (II)  
Kepala/Pimpinan/Ketua  
Mitra SMK Penyelenggara

PIHAK PERTAMA (I)  
Kepala Sekolah  
SMK Merdeka

.....

.....

**STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN  
SMK Layanan Khusus  
TAHUN AJARAN 2020 / 2021**

Jl. Raya Perjuangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

**USULAN IZIN OPERASIONAL**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Pengertian dan Latar Belakang**

Pemberian hak otonomi dalam berbagai hal di Era Reformasi ini memberikan harapan baru khususnya bagi dunia pendidikan, untuk lebih berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berhati nurani dan bermartabat, yang mampu menguasai dan memberdayakan berbagai teknologi untuk kemakmuran bangsa dan negara, walaupun hal itu perlu ditempuh dengan berbagai upaya oleh semua pihak demi terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas.

Proses pendidikan yang berkualitas dan kesempatan untuk dapat menikmati pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dapat memberikan harapan baru pada masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menikmati pendidikan yang layak dan bermartabat, yang akan membawa harapan baru yang lebih baik dimasa mendatang. Hal ini dikarenakan pendidikan sementara ini masih menjadi dominasi masyarakat ekonomi kelas menengah dan kelas atas.

Pendidikan merupakan satu komoditi yang selalu laris menjadi bahan perbincangan dan dibutuhkan setiap lapisan masyarakat. yang menjadi permasalahan adalah berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk hal ini, karena keterbatasan ekonomi masyarakat dan daya beli masyarakat yang rendah sebagai akibat langsung dari kondisi ekonomi Indonesia yang berdampak bagi kehidupan makro masyarakat Indonesia. Terlihat jelas bahwa pendidikan merupakan saham yang besar dalam rangka perbaikan kualitas manusia Indonesia di masa mendatang. Ukuran kualitas mengarah pada upaya perbaikan dan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, cerdas, terampil dan mampu menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup di masa sekarang dan yang akan datang.

Sebagai Masyarakat Lombok Utara kita ketahui, Bupati Lombok Utara telah mencanangkan program percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 12 tahun, dengan harapan taraf pendidikan minimal di Kab. Lombok Utara berada pada level SMA/SMK sederajat. Namun pada kenyataannya, di Kab. Lombok Utara, khususnya di Kec. Gangga pada tahun pelajaran 2019/2020 masih banyak siswa

yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat atas (SMA/SMK/MA) dengan alasan ekonomi yang tidak mampu. Dengan alasan tersebut, YAYASAN INDONESIA CERDAS bermaksud mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MERDEKA. Dengan demikian, SMK MERDEKA mencoba ambil bagian dalam mensukseskan pencanangan bupati Lombok Utara tersebut sekaligus dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan beberapa alasan berikut:

1. Masih banyak anak usia Wajib Belajar 12 tahun yang ditemui belum menikmati pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas secara keseluruhan di Kec. Gangga Kab. Lombok Utara dengan alasan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan mereka,
2. Terlalu tingginya biaya pendidikan untuk kalangan ekonomi lemah, sehingga anak dijadikan “korban” dan kebijakan orang tua akibat rendahnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan.
3. Tuntutan ekonomi keluarga, sehingga anak dipekerjakan untuk membantu nafkah orang tua mereka karena tuntutan ekonomi keluarga agar tetap hidup dan bertahan ditengah tantangan hidup dan persaingan hidup yang serba materialistis di tengah kehidupan yang semakin sulit dan arus deras gobalisasi.
4. Dipilihnya SMK (bukan SMA) dengan alasan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kreatif dan terampil tanpa mengurangi kualitas pendidikan di tingkat menengah atas dengan harapan mempersiapkan tenaga profesional dibidangnya yang mampu membuka lapangan pekerjaan baru yang lebih layak dalam rangka peningkatan tarat hidup mereka.

Kiranya empat alasan di atas yang menjadi pertimbangan bagi SMK MERDEKA untuk menawarkan diri dan berperan serta dalam bidang pendidikan dengan biaya semurah-murahnya dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat namun dengan kualitas pendidikan yang Insya Allah dapat diharapkan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku pengelola pendidikan di SMK MERDEKA memandang perlu untuk mengajukan Izin Operasional bagi sekolah yang baru berdiri dengan dukungan berbagai pihak untuk menentukan strategi pengajaran sekolah di masa sekarang dan yang akan datang.

Adapun yang menjadi dasar pengajuan Izin Operasional bagi SMK MERDEKA ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Otonomi Daerah,
4. SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 017/U/2003. tanggal 7 Februari 2003 tentang Pelaksanaan Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Menengah.
5. Dukungan guru dan tokoh pendidikan di Kec. Gangga tanggal 2 Juni 2014
6. Rapat Dewan Guru dan civitas akademika SMK MERDEKA tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pengajuan Izin Operasional.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dalam Pengajuan Izin Operasional ini adalah

- a. Mendapatkan pengakuan secara legal bagi berdirinya SMK MERDEKA dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Utara demi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dimasa sekarang dan yang akan datang bagi SMK MERDEKA.
- b. Mendapatkan pengayoman dan payung hukum secara langsung bagi kelangsungan dan keberadaan SMK MERDEKA ditengah-tengah masyarakat.
- c. Berperan aktif dalam program pemerintah dalam rangka suksesnya Program wajib belajar 12 tahun di Kab. Lombok Utara dengan menjaring siswa yang tidak tersentuh oleh SMA/SMK manapun.
- d. Mendapatkan kemudahan dan fasilitas secara Administratif dari peminintah dalam rangka pengentasan angka partisipasi Wajar Dikdas 12 tahun di Kab. Lombok Utara
- e. Ikut andil memberikan pelayanan bidang pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menikmati pendidikan yang layak bagi siswa yang tidak terjangkau oleh SMA/SMK manapun.

## **C. Nama Sekolah/Program Jurusan yang di Kembangkan**

Untuk menyikapi kondisi tersebut, perlu segera dibangun suatu lembaga pendidikan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat guna membekali mereka dengan keahlian tertentu untuk masa depannya. Oleh karena itu YAYASAN INDONESIA CERDAS mengusulkan pendirian SMK dengan nama SMK MERDEKA dengan Program keahlian : **Teknik Komputer dan Jaringan, Administrasi Perkantoran.**

## **D. Lokasi Sekolah**

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MERDEKA berlokasi di Komplek Pendidikan YAYASAN INDONESIA CERDAS Jl. Raya Perjuangan, Lombok Utara.

## **E. Rencana Penerimaan Siswa Baru**

Pada awal tahun pelajaran 2014/2015 direncanakan menerima siswa dengan jumlah rombel jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan Administrasi Perkantoran. Rencana ini berawal dari niat yang tulus dari YAYASAN INDONESIA CERDAS untuk ikut berperan serta dalam rangka mencerdaskan anak bangsa khususnya di wilayah Kab. Lombok Utara.

## **F. Susunan Pengurus**

1. Susunan Pengurus YAYASAN INDONESIA CERDAS Lombok Utara (tertampir dalam akta Yayasan)
2. Susunan pengurus/organisasi Sekolah
3. Susunan tenaga pengajar terlampir pada proposal ini.

**G. Aset Pendidikan YAYASAN INDONESIA CERDAS**

1. Tanah Seluas 7.500 M<sup>2</sup>
2. Luas Bangunan 672 m<sup>2</sup>
3. Lembaga yang sudah ada didalam Komplek YAYASAN INDONESIA CERDAS.
  - a. MI MERDEKA
  - b. SMP MERDEKA

**H. Keadaan Sarana dan Prasarana**

**a. Keadaan Sarana dan Prasarana SMK MERDEKA**

No	Nama	Jumlah	Keadaan	Ket.
1	Ruang Belajar	3	Baik	
2	Ruang Kepala Sekolah	1	Baik	Menyatu dalam satu ruangan
3	Ruang Tata Usaha	1	Baik	
4	Ruang Guru	1	Baik	
5	Ruang Perpustakaan	-	-	
6	Ruang Lab. Komputer	1	Baik	
7	WC Guru	1	Baik	
8	WC Siswa	2	Baik	
9	Musholla	1	Baik	
10	Lemari Tata Usaha	1	Baik	
11	Halaman Sekolah/Lap. Upacara	1	Baik	
12	Lemari Guru	-	-	
13	Lemari Kepala Sekolah	-	-	
14	Meja/Kursi Guru	6	Baik	
15	Meja/Kursi Tata Usaha	2	Baik	
16	Meja/Kursi Siswa	150	Baik	
17	Papan Data	-	-	
18	Papan Tulis	2	Baik	
19	Sarana Olahraga	1	Baik	
20	Sarana Perpustakaan	-	-	
21	Sarana Laboratorium	-	-	
22	Sarana Perbengkelan	-	-	

**b. Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Insya Allah dengan berserah diri kepada Allah SWT dan terus berusaha pihak Yayasan dan masyarakat akan terus mengembangkan sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran proses belajar mengajar.

**I. Anggaran Dana Pengelolaan Sekolah**

a. Dana Rutin.

Dana rutin di dapat dari siswa sebesar Rp 90.000,- perbulan x 110 siswa = Rp 9.900.000,- dan untuk pembayaran guru tidak tetap diambil dari dana cadangan dan sumbangan lainnya.

1. Gaji Kepala Sekolah	Rp 3.500.000,-
2. gaji wakil kepala sekolah	Rp 2.500.000,-
3. Gaji Guru	Rp 8.500.000,-
4. Gaji Kepala TU	Rp 500.000,-
5. Gaji Karyawan	Rp 500.000,-
6. Gaji Penjaga Sekolah	Rp 500.000,-

Jumlah Rp 16.000.000,-

b. Dana Cadangan Rp 100.000.000,-

1. Dana Keperluan Sarana Belajar	Rp 20.000.000,-
2. Dana Sumbangan	Rp 35.000.000,-
3. Dana Lainnya	Rp 7.000.000,-

Jumlah Rp 62.000.000,-

**J. Status Bangunan**

Terlampir dalam akta tanah

**K. Wilayah Kerja**

Wilayah Kerja/Wilayah pemberi input bakal calon siswa/siswi SMK MERDEKA Lombok Utara adalah SMP dan MTs (Negeri dan Swasta) sewilayah Kec. Gangga dan sekitarnya.

**L. Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM)**

Kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan pada Pagi hari dan kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan pada Sore hari.

**M. Kurikulum yang digunakan**

SMK MERDEKA menggunakan kurikulum 2013 pada pelajaran normatif, adaptif dan produktif untuk program keahlian: *Teknik Komputer dan Jaringan, Administrasi perkantoran.*

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Visi**

" TERWUJUDNYA SMK MERDEKA YANG UNGGUL DALAM IMTAQ DAN IPTEK, TRAMPIL DALAM BERKARYA DAN MAMPU BERSAING DIPASAR KERJA GLOBAL "

#### **B. MISI**

- a. Mengembangkan kepribadian akhlak mulia dengan melatih, membimbing, dan mendidik siswa dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Membina dan mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mampu menggali keunggulan lokal peserta didik ( Local Value )
- c. Membina dan meningkatkan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- d. Menjadikan sarana belajar yang memadai untuk mencapai pembelajaran yang maksimal.
- e. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif nyaman dan menyenangkan bagi warga sekolah dalam mendukung proses pembelajaran.
- f. Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas peran sekolah di masyarakat.

#### **C. Langkah-Langkah Strategis**

Untuk mewujudkan Visi Misi di atas perlu diupayakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membangun gedung berikut infrastukturanya, menyediakan sarana yang memungkinkan terpenuhinya syarat minimal' bagi Kegiatan Belajar Mengajar.
2. Melibatkan kemampuan warga sekolah sebagai tenaga guru dan tenaga non guru sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Mengupayakan tenaga guru yang layak sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga guru dan tenaga non guru yang ada.
4. Interaktif dan komunikatif dengan masyarakat agar mendapat dukungan baik moril maupun meteril sehingga mereka mempunyai rasa memiliki.
5. Berusaha menjalin kerjasama dengan dunia usaha/industri sesuai dengan program keahlian yang dikembangkan.
6. Penggunaan alokasi dana yang terhimpun dari pemerintah dan masyarakat. secara efektif, efisien, transparan dan rasional.

#### **D. Maksud, Tujuan Dan Sasaran**

##### **Maksud dan Tujuan :**

1. Membantu masyarakat maupun pemerintah dalam mengatasi lulusan SMP/MTs yang tidak tertampung di sekolah yang lain
2. Menolong masyarakat agar dapat menyekolahkan putra/putrinya dengan biaya terjangkau.

3. Membantu siswa agar mampu memilih karier, mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan potensi diri.
4. Menciptakan lulusan yang handal dan trampil.
5. Dapat menghasilkan lulusan yang bisa menampilkan diri sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kepekaan terhadap IPTEK DAN IMTAQ

**Sasaran :**

Sedangkan sasaran yang menjadi harapan SMK MERDEKA ialah siswa lulusan SMP/MTS di wilayah Kecamatan Gangga dan sekitarnya, yang berkeinginan untuk memperoleh pengetahuan setingkat lebih tinggi dan skill tertentu sebagai bekal menciptakan lapangan kerja bagi dirinya.

**E. Dukungan Pernerintah dan Masyarakat**

1. Dukungan Pemerintah

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dibuktikan dengan program pengembangan SMK yang akan dibangun secara swadaya untuk menumbuhkan kepedulian semua pihak terhadap bidang pendidikan. Oleh karena itu, agar program ini cepat terealisasi perlu dukungan moril maupun materil dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dibuktikan dengan rmemberikan dana pendamping sebesar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, ada kesanggupan untuk memberikan dana tambahan untuk tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat Kecamatan Gangga dan sekitarnya terhadap rencana pembangunan SMK MERDEKA secara moril sangat besar. Pernyataan dukungan kami peroleh dari Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pemerintahan Pedesaan, Pondok Pesantren, serta Instansi pemerintah.

### BAB III

## LINGKUNGAN STRATEGIS

#### A. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

##### 1. Kekuatan (*Strength*)

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MERDEKA memiliki beberapa kekuatan, Antara lain :

- a. Tenaga Kependidikan (TKp) jumlahnya memadai.
- b. Sebagian besar Tenaga Kependidikan (TKp) telah mengikuti diklat sesuai dengan bidangnya.
- c. Sebagian besar Tenaga Kependidikan (TKp) Sarjana (S1)
- d. Memiliki organisasi dan manajemen yang dinamis, terbuka dan partisipatif.
- e. Kerjasama antar personil cukup baik.
- f. Fasilitas fisik gedung megah. dengan lokasi yang strategis.
- g. Jumlah SDM yang memenuhi kebutuhan.
- h. Sekitar sekolah terdapat (dua) Negeri, 5 (lima) SMP Swasta, dan 1 MTs N.
- i. Kerjasama dengan Komite Sekolah sangat baik.

##### 2. Kelemahan (*Weakness*)

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MERDEKA masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu untuk diperbaiki. Kelemahan tersebut antara lain :

- a. Sebagian besar Tenaga Kependidikan (TKp) masih berstatus GTT.
- b. Kesejahteraan Tenaga Kependidikan (TKp) belum memadai.
- c. Sebagian Tenaga Kependidikan (TKp) belum dapat berkomunikasi dalam bahasa asing khususnya bahasa Inggris.
- d. Pengembangan diri belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Alokasi dan operasional pendidikan terbatas.
- f. Jumlah alat dan ruang praktek belum sesuai dengan yang dibutuhkan.

#### B. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

##### 1. Peluang (*Opportunity*)

Peluang yang dapat diraih oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MERDEKA yang berasal dan lingkungan luar, antara lain adalah :

- a. Tersedianya beasiswa untuk peningkatan pendidikan dari Pemerintah.
- b. Terbukanya kesempatan diklat bagi Tenaga Kependidikan (TKp).
- c. Terbukanya kesempatan magang bagi Tenaga Kependidikan (TKp)
- d. Adanya pembinaan dari lembaga Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG) dalam pengembangan sekolah.
- e. Pemerintah mengangkat tenaga guru dan TU, baik PNS maupun guru
- f. Pemerintah menjanjikan peningkatan alokasi dana sektor pendidikan yang lebih memadai dengan melalui block grant.
- g. Hubungan dengan Pemda Kabupaten khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten yang cukup baik

- h. Kondisi sosial, politik dan keamanan relatif stabil.
  - i. Adanya perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah dan murah.
2. Tantangan (*Threats*)
- Tantangan dari luar yang harus dihadapi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MERDEKA antara lain adalah :
- 1. Perubahan kurikulum khususnya di lingkungan pendidikan SMK yang relatif cepat.
  - 2. Banyak lembaga lain yang menawarkan penghasilan yang lebih menarik.
  - 3. Belum tersedianya asosiasi profesi di tingkat Kabupaten.
  - 4. Tuntutan IPTEK yang berpengaruh terhadap tuntutan kemampuan dan keterampilan (tenaga yang profesional).

## **BAB IV**

### **PERSIAPAN PENGEMBANGAN PROGRAM LAYANAN PLK SMK KECIL**

#### **A. Lokasi**

SMK MERDEKA akan ditempatkan dilingkungan Komplek Pendidikan Yayasan Indonesia Cerdas yang berlokasi di :

Jalan : Jl. Perjuangan  
Desa : Dalam  
Kecamatan : Gangga  
Kabupaten : Lombok Utara  
Propinsi : Nusa Tenggara Barat

Lokasi ini cukup strategis dan kondusif untuk Kegiatan Belajar Mengajar, karena dekat dengan pusat kecamatan dan lokasinya cukup sejuk dan bebas gangguan bencana alam. Dilokasi ini pun sudah tersedia berbagai fasilitas pendukung kegiatan Belajar Mengajar yang cukup memadai.

#### **B. Kesiapan Infrastruktur**

Infrastruktur sebagai sarana penunjang Kegiatan Belajar Siswa yang bersifat Umum seperti jalan, tempat parkir, lapangan upacara dan WC sudah tersedia meskipun masih memerlukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana lainnya.

Sedangkan kesiapan infrastruktur yang relevan dengan program SMK MERDEKA juga sudah memenuhi standar minimal meskipun masih memerlukan penambahan dan perbaikan infrastruktur lainnya untuk mensukseskan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran SMK MERDEKA.

#### **C. Program Keahlian yang akan dikembangkan**

Berdasarkan studi kelayakan yang telah dilaksanakan sekolah terhadap potensi wilayah dan masyarakat serta kemampuan yayasan, dapat diambil kesimpulan bahwa, program keahlian yang tepat untuk dibuka di SMK MERDEKA Lombok Utara adalah bidang Teknik Komputer dan Jaringan dan Administrasi Perkantoran.

#### **D. Kegiatan Belajar Mengajar**

Sumber peserta didik yang menjadi garapan adalah lulusan SMP/MTS (Negeri dan Swasta) di wilayah Kecamatan Gangga dan sekitarnya, yang rata-rata setiap tahunnya meluluskan siswa kurang lebih 1100 siswa, itupun belum menghitung lulusan SMP/MTS (Negeri dan Swasta) di wilayah Kecamatan Gangga dan sekitarnya.

#### **E. Dukungan Pernerintah dan Masyarakat**

##### **1. Dukungan Pemerintah**

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan program pengembangan SMK Kecil yang akan dibangun secara swadaya untuk menumbuhkan kepedulian semua pihak terhadap bidang pendidikan.



Oleh karena itu, agar program ini cepat terealisasi perlu dukungan moril maupun materil dan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Lombok Utara dibuktikan dengan memberikan dana pendamping sebesar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, selain itu ada kesanggupan untuk memberikan dana tambahan untuk tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat Kecamatan Gangga sekitarnya terhadap rencana pembangunan SMK MERDEKA Lombok Utara secara moril sangat besar. Pernyataan dukungan kami peroleh dari Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pemerintah Desa, Kepala SMP/MTs dan SMA/SMK/MA (Negeri dan Swasta) serta instansi pemerintah

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Memerhatikan uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pendirian SMK MERDEKA Jl. Raya Gangga-Ps. Desa Dalam Kecamatan Gangga-Lombok Utara sangat prospektif perkembangannya dimasa yang akan datang. Semoga Proposal Permohonan Izin Oprasional ini menjadi bahan renungan dan kajian Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Utara untuk selanjutnya mengabulkan permohonan ini.

Hanya kepada Allah SWT lah kami memohon, semoga kita semua digolongkan kepada sebahagian manusia yang peduli akan pendidikan dan masa depan umat.

Mengetahui,  
Ketua Yayasan indonesia cerdas

**Ibnu Siswanto**

## Rencana Induk Pengembangan Sekolah

### A. Dasar Pemikiran

Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Road Map Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 2006-2010 ditetapkan program-program pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan prioritas pembinaan dan pengembangan diarahkan pada :

1. *Perluasan dan Pemerataan Akses SMK* dengan membangun sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, rehab bangunan, dan meningkatkan daya tampung yang sudah ada melalui pendekatan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien;
2. *Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan daya saing SMK* dengan mengembangkan sejumlah SMK SBI, SMK SSN, revitalisasi peralatan, dan pengadaan sarana prasarana pembelajaran lainnya;
3. Meningkatkan Manajemen SMK dengan menerapkan Prinsip *Good Governance* yang mengacu ISO 9001:2000.

SMK Merdeka merupakan sekolah baru yang didirikan tahun 2016 dengan membuka tiga Program Keahlian yaitu Program Keahlian Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan Teknik Komputer Jaringan. Pendirian sekolah ini dimaksudkan untuk menyambut program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang perluasan dan pemerataan akses SMK. Perjalanan SMK Merdeka dari tahun ke tahun semakin berkembang dan banyak memperoleh apresiasi positif dari masyarakat Kab. Lombok Utara yang sangat mendambakan kehadiran sekolah kejuruan.

Arah pengembangan kebijakan SMK MERDEKA tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang tertuang dalam program-program Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan. Disamping itu dengan adanya Undang-Undang No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengembangan SMK Merdeka juga bertumpu pada program pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Skala prioritas dalam pengembangan SMK Merdeka Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Peningkatan jumlah dan mutu guru

3. Peningkatan kualitas lingkungan sekolah
4. Peningkatan jumlah dan mutu siswa
5. Pemasaran lulusan

Kelima program yang masuk skala prioritas akan dituangkan ke dalam Program Kerja Sekolah (PKS) dan akan dilaksanakan dan direalisasikan secara bertahap setiap tahun.

Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) SMK Merdeka digali dan dikembangkan dari semua unsur yang ada di sekolah, sehingga perencanaan ini merupakan pencerminan kemauan dan kebutuhan dari semua warga sekolah.

## **B. Misi dan Tujuan SMK**

Sebagai sub sistem Pendidikan Nasional, Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai misi menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang trampil, produktif dan mandiri, mengisi lapangan kerja dalam upaya mempercepat dan memperkokoh pertumbuhan ekonomi dalam kerangka pembangunan nasional.

Tujuan SMK menurut pasal 3 ayat 2 PP No. 29/1990 dan KepMendikbud No. 080/U/1993 yaitu :

1. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta pengembangan sikap profesionalisme.
2. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkomunikasi dan mampu mengembangkan diri.
3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia kerja/industri pada saat ini maupun masa datang.
4. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif.

## **C. Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Tujuan SMK Merdeka**

### **VISI**

" TERWUJUDNYA SMK MERDEKA YANG UNGGUL DALAM IMTAQ DAN IPTEK, TRAMPIL DALAM BERKARYA DAN MAMPU BERSAING DIPASAR KERJA GLOBAL "

### **MISI**

- g. Mengembangkan kepribadian akhlak mulia dengan melatih, membimbing, dan mendidik siswa dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Membina dan mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mampu menggali keunggulan lokal peserta didik ( Local Value )
- i. Membina dan meningkatkan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

- j. Menjadikan sarana belajar yang memadai untuk mencapai pembelajaran yang maksimal.
- k. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif nyaman dan menyenangkan bagi warga sekolah dalam mendukung proses pembelajaran.
- l. Menjalinkan kerjasama untuk meningkatkan kualitas peran sekolah di masyarakat.

### **NILAI-NILAI (CORE VALUE)**

Nilai-nilai yang harus dipedomani dan dijadikan acuan dalam bertindak :

- a. **Etika Moral**, Seluruh warga sekolah dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku, mengindahkan 5 (lima) S . Yakni : Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun.
- b. **Exelence**, Setiap warga sekolah menghendaki menjadi yang terbaik.
- c. **Kejujuran**, Setiap warga sekolah berupaya untuk jujur pada diri sendiri, dan atau pada orang lain.
- d. **Bersama**, Seluruh warga sekolah bersama-sama untuk meraih hasil yang diharapkan bersama
- e. **Kebersamaan**, Menentukan tujuan bersama, memecahkan masalah bersama, membagi dan menyelesaikan tugas bersama, mencapai hasil dan menikmatinya bersama.
- f. **Tanggung Jawab**, Semua warga sekolah harus melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- g. **Transparansi**, yakni adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan (kebijakan) dan hubungan antar sesama warga sekolah.
- h. **Winning Spirit**, yakni adanya dorongan kemauan untuk menjadi pemenang dalam persaingan.
- i. **Winning for Job**, yaitu menjadi pemenang dalam persaingan memperebutkan pekerjaan.
- j. **Kerja Keras**, yakni setiap proses meraih tujuan dijiwahi dengan usaha maksimal, dan persoalan hasil tidaknya diserahkan pada Yang Maha Kuasa.

### **TUJUAN SMK MERDEKA**

- a. Meningkatkan Organisasi dan Manajemen Sekolah Yang Baik
- b. Meningkatkan Sumber Daya Sekolah
- c. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekolah
- d. Meningkatkan Iklim Kerja Sekolah
- e. Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dengan Biaya Yang Wajar
- f. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Sekolah
- g. Meningkatkan Kewirausahaan Sekolah Melalui Unit Produksi Sekolah
- h. Meningkatkan Daya Serap Tamatan Ke Du/Di Melalui Jaringan Kerja Sama Dan Bursa Kerja Sekolah

- 
- i. Meningkatkan Penguasaan Berkomunikasi Dengan Menggunakan Bahasa Asing (Inggris)
  - j. Meningkatkan Prestasi Ujian Nasional
  - k. Meningkatkan Prestasi Lomba Promosi Kompetensi Siswa
  - l. Meningkatkan Pembinaan Bakat Siswa Lewat Ekstra Kurikuler
  - m. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekolah.

Contoh Sertifikat SMK yang telah terakreditasi

No. 33.18.00018

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
SEKOLAH/MADRASAH**

**SERTIFIKAT AKREDITASI**  
Berdasarkan Keputusan  
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Nomor: 032/BAN-SM/SK/2019, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : [REDACTED]  
NPSN : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]

**Terakreditasi A (UNGGUL) dengan Nilai 93**

Sertifikat ini berlaku 4 (empat) tahun

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Januari 2019

Dibandingkan secara elektronik oleh:  
Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Dr. Tom Taharudin, M.Pd.

Dokumen ini dibundling dengan elektronik dengan  
penggunaan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.  
Berdasarkan Pasal 11 UU/19 Tahun 2016, untuk keberlakuan  
sertifikat elektronik harus disertai dengan tanda elektronik yang sah.

**NILAI AKREDITASI**  
SMKN 1 PURWODADI

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	97
2	Standar Proses	93
3	Standar Kompetensi Lulusan	92
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	91
5	Standar Sarana dan Prasarana	95
6	Standar Pengelolaan	83
7	Standar Pembinaan	97
8	Standar Penelitian Pendidikan	94
Nilai Akhir		93

**KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:**

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
91 ≤ Nilai Akhir ≤ 100	A	Unggul
81 ≤ Nilai Akhir ≤ 90	B	Baik
71 ≤ Nilai Akhir ≤ 80	C	Cukup Baik
0 ≤ Nilai Akhir ≤ 70	TT	Tidak Terakreditasi

## Desain kendaraan layanan praktik PLK pada SMK



Gambar 1. Kendaraan layanan praktik tampak samping



Gambar 2. Kendaraan layanan praktik tampak belakang



Gambar 3. Kendaraan layanan praktik tampak terbuka



Gambar 4. Kendaraan layanan praktik tampak terbuka



Gambar 5. Kendaraan layanan praktik tampak terbuka



Gambar 6. Kendaraan layanan praktik tampak terbuka